



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan dalam satu tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Simalungun, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan melihat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Sebagai perwujudan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta bermanfaat dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dan penyusunan laporan keuangan ini telah mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pada lampiran Bab VII menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut;
2. Cara memperoleh sumber daya ekonomi dana lokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025*

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun TA 2025 sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

- i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 seri D Nomor 6);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 Nomor 5);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- x. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 681); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 Nomor 698).
- y. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 Nomor 714);
- z. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 Nomor 709);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan laporan keuangan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan beberapa modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan kelengkapan dalam pelaporan keuangan, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1. Pengelolaan Pendapatan daerah;
 - 2.2.2. Pengelolaan Belanja daerah;
 - 2.2.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah.
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.3.1. Pendapatan.
 - 2.3.2. Belanja.

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.1.1. Realisasi Pendapatan-LRA;
 - 3.1.2. Realisasi Belanja dan transfer Bantuan Keuangan.
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Bab V. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

- 5.1.1. Pendapatan-LRA
- 5.1.2. Belanja-LRA
- 5.1.3. Transfer-LRA
- 5.1.4. Surplus / Defisit-LRA
- 5.1.5. Pembiayaan
- 5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
- 5.2.3. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
- 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
- 5.2.5. Lain-lain
- 5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

- 5.3.1. Aset
- 5.3.2. Kewajiban
- 5.3.3. Ekuitas

5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

- 5.4.1. Pendapatan-LO
- 5.4.2. Beban
- 5.4.3. Surplus / Defisit-LO
- 5.4.4. Kegiatan Non Operasional
- 5.4.5. Surplus/Defisit dari kegiatan non Operasional
- 5.4.6. Surplus/defisit sebelum pos luar Biasa
- 5.4.7. Pos Luar Biasa
- 5.4.8. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa
- 5.4.9. Surplus/Defisit LO

5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

- 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
- 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
- 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.5.5. Saldo Akhir Kas

5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

- 5.6.1. Ekuitas Awal
- 5.6.2. Surplus / Defisit-LO tahun berjalan
- 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar
- 5.6.4. Ekuitas Akhir

Bab VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 6.1. Gambaran Umum Wilayah
- 6.2. Kependudukan dan tenaga Kerja



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

6.3. Administrasi Pemerintah

6.4. Pendidikan

6.5. Potensi Ekonomi Daerah

6.6. Visi dan Misi Organisasi

6.7. Organisasi Kelembagaan

Bab VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah yang mempengaruhi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Simalungun. Setiap negara atau daerah akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Selain itu, pencapaian kinerja makro juga dapat dilihat dampak pembangunan pada pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ringkasan Indikator Ekonomi Makro dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Ringkasan Indikator Ekonomi Makro

No	Indikator	Satuan	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,88	76,48
	Komponen IPM			
	a. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,3	74,59
	b. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,09	13,16
	c. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,73	9,74
	d. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu	12.119,00	12.585,00
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.051.845,00	1.067.499,00
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,62	
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)			
	- Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Triliun	58.906,11	64.810,17
	- Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Triliun	33.052,35	34.616,99
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	4,73
6	Inflasi	%		
7	Indeks Gini	Poin	0,379	
8	Ketenagakerjaan:			
	a. Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)	Jiwa		
	b. Penduduk Angkatan Kerja	Jiwa	569.405,00	604.582,00
	c. Penduduk Bekerja (15 tahun ke atas)	Jiwa	539.969,00	577.502,00
	d. Pengangguran Terbuka	Jiwa	29.436,00	27.080,00
	e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,31	74,52
	f. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,17	4,48
9	Kemiskinan			



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Indikator	Satuan	2024	2025
a.	Penduduk Miskin	Ribu orang	68,05	61,12
b.	Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk	%	7,72	6,91

(Sumber: BPS/Kabupaten Simalungun dalam Angka 2026)

Dari data BPS diatas Tahun 2026, jumlah penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2025 adalah sebanyak 1.067.499.

Dilihat dari indikator ketenagakerjaan penduduk wilayah Kabupaten Simalungun terdiri atas: a) Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), b). Penduduk Angkatan Kerja c) Penduduk bekerja (15 tahun ke atas, d) Pengangguran (mencari Kerja). Jumlah angkatan kerja mencapai 604.582 jiwa tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 74,52 persen. Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perhitungan BPS seluruh komponen indikator IPM Kabupaten Simalungun pada Tahun 2025 sebesar 76,48 poin dicapai dari angka harapan hidup sebesar 74,59 Tahun, harapan lama sekolah 13,16 Tahun dan pengeluaran perkapita 12.585 ribu per tahun.

Indikator kesejahteraan masyarakat lainnya adalah tingkat kemiskinan. Untuk mengukur keadaan kemiskinan, Badan pusat statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar pemerintah kabupaten Simalungun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 mencapai 61,12 ribu menurun dari tahun 2024 sebesar 68,05 ribu. Berdasarkan produk Capaian PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Simalungun tahun 2025 sebesar Rp34.616,99 Triliun.

Struktur ekonomi suatu daerah ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor akan menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari masing-masing sektor tersebut. Distribusi masing-masing sektor dalam struktur ekonomi Kabupaten Simalungun pada tahun 2025 atas dasar harga berlaku dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Perekonomian Kabupaten Simalungun pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun Tahun 2025 sebesar 4,73%, sedangkan tahun 2024 sebesar 4,89%. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan tertinggi terdapat di lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,37%, disusul katagori Real Estat dengan pertumbuhan sebesar 8,04%, Industri Pengolahan sebesar 8,03%, dan Pedagang Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,11%. Sedangkan 3 (tiga) lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,27%, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,31% dan Jasa Lainnya sebesar 1,53%.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Simalungun Tahun 2021 s.d. 2025

Lapangan Usaha	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,10	5,74	5,05	5,22	4,09



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Lapangan Usaha	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Pertambangan dan Penggalian	2,71	3,14	4,78	4,46	3,31
Industri Pengolahan	2,00	2,01	3,07	1,82	8,03
Pengadaan Listrik dan Gas	2,07	4,14	2,15	3,28	2,78
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,53	3,32	2,92	2,28	3,46
Konstruksi	2,37	1,74	5,24	0,24	4,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,44	5,20	6,68	6,30	6,11
Transportasi dan Pergudangan	1,42	7,30	10,35	10,90	8,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,14	5,70	10,12	12,19	3,97
Informasi dan Komunikasi	5,22	5,74	7,73	8,57	5,84
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,98	3,87	5,12	4,14	1,31
<i>Real Estate</i>	0,40	3,09	2,24	5,68	8,04
Jasa Perusahaan	-0,10	6,53	4,87	5,24	4,41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,40	-0,76	0,08	5,51	-0,27
Jasa Pendidikan	3,05	4,59	4,78	6,02	5,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,87	3,54	7,64	8,16	5,97
Jasa lainnya	1,43	6,03	7,28	7,88	1,53
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3,70	4,68	5,07	4,89	4,73

(Sumber: BPS/Kabupaten Simalungun dalam angka 2026)

1. PDRB Perkapita/Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Data perkembangan PDRB perkapita untuk tahun 2021-2025, seperti terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 3. PDRB Simalungun Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2021 – 2025**

Lapangan Usaha	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.859	24.915	28.406	33.328	37.298
Pertambangan dan Penggalian	94	99	107	112	118
Industri Pengolahan	4.932	5.294	5.480	5.873	6.514
Pengadaan Listrik dan Gas	28	30	31	31	31
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35	37	38	41	43
Konstruksi	4.253	4.602	4.776	4.824	5.114
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.747	7.456	8.226	8.976	9.679
Transportasi dan Pergudangan	693	772	900	1.032	1.134
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	335	359	403	462	494



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Lapangan Usaha	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Informasi dan Komunikasi	237	256	278	299	318
Jasa Keuangan dan Asuransi	471	513	533	564	583
<i>Real Estate</i>	381	398	409	437	460
Jasa Perusahaan	38	42	46	49	53
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.824	1.830	1.883	2.085	2.099
Jasa Pendidikan	436	457	480	517	570
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166	173	192	214	237
Jasa lainnya	47	52	56	61	63
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	42.557	47.286	52.239	58.906	64.810

(Sumber: BPS/Kabupaten Simalungun dalam angka 2026)

Tabel 4. PDRB Simalungun Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021 – 2025

Lapangan Usaha	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.663	17.619	18.510	19.477	20.274
Pertambangan dan Penggalian	64	67	70	73	75
Industri Pengolahan	2.791	2.847	2.935	3.005	3.346
Pengadaan Listrik dan Gas	24	25	26	27	28
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23	24	24	25	26
Konstruksi	2.409	2.450	2.579	2.585	2.706
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.798	3.996	4.270	4.539	4.816
Transportasi dan Pergudangan	436	468	516	573	620
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	225	238	262	294	306
Informasi dan Komunikasi	207	219	236	256	271
Jasa Keuangan dan Asuransi	262	272	286	298	302
<i>Real Estate</i>	243	251	257	271	293
Jasa Perusahaan	22	24	25	26	27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.064	1.056	1.057	1.115	1.112
Jasa Pendidikan	287	300	314	333	350
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102	105	113	123	130
Jasa lainnya	28	30	32	35	35
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	28.649	29.990	31.511	33.052	34.617

(Sumber: BPS/Kabupaten Simalungun dalam angka 2026)

Tabel 5. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga Berlaku Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021 – 2025

Lapangan Usaha	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51,34	52,69	54,38	56,58	57,55
Pertambangan dan Penggalian	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Lapangan Usaha	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Industri Pengolahan	11,58	11,20	10,49	9,95	10,05
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
Konstruksi	9,99	9,73	9,14	8,19	7,89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,85	15,77	15,74	15,24	14,93
Transportasi dan Pergudangan	1,63	1,63	1,72	1,75	1,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,79	0,76	0,77	0,78	0,76
Informasi dan Komunikasi	0,56	0,54	0,53	0,51	0,49
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,11	1,09	1,02	1,96	0,90
Real Estate	0,89	0,84	0,78	0,74	0,71
Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,28	3,87	3,60	3,54	3,24
Jasa Pendidikan	1,02	0,97	0,92	0,88	0,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39	0,37	0,37	0,36	0,37
Jasa lainnya	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100	100	100	100	100

(Sumber: BPS/Kabupaten Simalungun dalam angka 2026)

2. Kondisi Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Simalungun mulai meningkat setelah dilakukannya kebijakan normalisasi aktivitas masyarakat dalam pemulihan perekonomian setelah penurunan *COVID-19* dampak normalisasi ini sangat berpengaruh terutama pada bidang transportasi, perindustrian, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan dan asuransi perusahaan, pertanian, perdagangan, real estate, penyediaan akomodasi dan makan minum, bidang usaha pariwisata dan bidang kegiatan lainnya sebagainya.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan menjadi primadona bagi pendapatan daerah, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat baik yang berupa Dana Perimbangan maupun dari Lain-Lain Pendapatan yang sah merupakan faktor penunjang.
2. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja.
3. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

4. Seluruh Pendapatan harus disetor ke kas daerah secara bruto dan tidak diperkenankan secara neto, dimana biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan daerah tidak dapat dipotong secara langsung dari pendapatan daerah dimaksud.
5. Seluruh pendapatan daerah wajib disetor ke kas daerah paling lambat satu hari setelah penerimaannya.
6. Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan demikian pagu anggaran yang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja tidak boleh dilampaui.
7. Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain bahwa:
 - a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
 - b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi pagu anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan dan diselenggarakan secara bruto dalam APBD. Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, dan setiap jenis pendapatan di rinci menurut obyek pendapatan, serta setiap obyek pendapatan di rinci menurut rincian obyek pendapatan. Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada APBD Tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD. Semua penerimaan daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut, sebaliknya dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD, dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan seperti melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal/pembelian saham dan/atau bentuk investasi lainnya serta mendepositokan dana yang belum terpakai sepanjang hal tersebut memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.

2.2.1. Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah menyangkut hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dimulai dari penyusunan kebijakan umum anggaran APBD yang dilanjutkan dengan penyusunan prioritas plafon anggaran sementara sebagai pedoman untuk menerapkan program dan kegiatan serta anggaran yang dituangkan pada



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

rancangan APBD selanjutnya dibahas bersama dengan legislatif untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD.

Disamping pendapatan daerah dan pembiayaan, belanja daerah yang dialokasikan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat direalisasikan dengan memperhatikan azas umum pengelolaan keuangan daerah, dimana keuangan daerah harus dikelola secara tertib taat pada peraturan, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab serta azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.

Pedoman tentang pengelolaan belanja daerah pada tahun 2025 didasarkan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- e. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.

2.2.2. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Penerimaan daerah meliputi sisa penghitungan anggaran tahun lalu, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan sumber pengeluaran daerah meliputi pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program kebijaksanaan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impact*).



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Selanjutnya diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan urusan pemerintahan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana masing-masing memerlukan anggaran belanja untuk membiayai program kegiatan tersebut dan ditetapkan dalam APBD.

Penetapan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dilaksanakan melalui penetapan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025. Kinerja APBD dapat diuraikan menurut bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Pendidikan sebesar Rp1.003.048.951.502,00 dan terealisasi sebesar Rp749.384.938.193,00 atau 74,71%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Anggaran Bidang Pendidikan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	769.746.240.484,00	527.671.943.436,00	68,55	242.074.297.048,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	233.195.711.018,00	221.712.994.757,00	95,08	11.482.716.261,00
3	Program Pengembangan Kurikulum	107.000.000,00	0,00	0,00	107.000.000,00
	Jumlah	1.003.048.951.502,00	749.384.938.193,00	74,71	253.664.013.309,00

2. Bidang Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Kesehatan sebesar Rp465.475.088.695,00 dan terealisasi sebesar Rp438.093.521.256,00 atau 94,12%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Anggaran Bidang Kesehatan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	230.467.229.105,32	230.522.899.721,00	100,02	(55.670.615,68)
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	231.907.301.326,68	205.358.925.677,00	88,55	26.548.375.649,68
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.525.245.763,00	889.052.684,00	58,29	636.193.079,00
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	580.000.000,00	486.013.484,00	83,80	93.986.516,00
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	995.312.500,00	836.629.690,00	84,06	158.682.810,00
	Jumlah	465.475.088.695,00	438.093.521.256,00	94,12	27.381.567.439,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp248.456.392.128,39 dan terealisasi sebesar Rp224.552.573.556,00 atau 90,38%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Anggaran Bidang Pekerjaan Umum

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.977.754.193,00	25.981.478.800,00	86,67	3.996.275.393,00
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.269.505.065,00	9.539.373.775,00	92,89	730.131.290,00
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.899.927.197,00	12.705.735.000,00	98,49	194.192.197,00
4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	578.293.500,00	0,00	0,00	578.293.500,00
5	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2.757.500.000,00	2.621.859.189,00	95,08	135.640.811,00
6	Program Penyelenggaraan Jalan	151.275.042.253,40	141.203.243.406,00	93,34	10.071.798.847,40
7	Program Penataan Bangunan Gedung	12.596.649.799,99	9.767.695.423,00	77,54	2.828.954.376,99
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	26.941.911.920,00	21.995.043.200,00	81,64	4.946.868.720,00
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.159.808.200,00	738.144.763,00	63,64	421.663.437,00
	Jumlah	248.456.392.128,39	224.552.573.556,00	90,38	23.903.818.572,39

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp4.182.883.217,00 dan terealisasi sebesar Rp3.830.971.258,00 atau 91,59%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Anggaran Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.649.187.717,00	2.331.907.450,00	88,02	317.280.267,00
2	Program Pengembangan Perumahan	175.645.500,00	167.404.540,00	95,31	8.240.960,00
3	Program Kawasan Permukiman	1.358.050.000,00	1.331.659.268,00	98,06	26.390.732,00
	Jumlah	4.182.883.217,00	3.830.971.258,00	91,59	351.911.959,00

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp38.394.457.474,00 dan terealisasi sebesar Rp32.637.652.380,00 atau 85,01%, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 10. Rincian Anggaran Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.141.852.906,00	11.034.745.380,00	78,03	3.107.107.526,00
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	546.283.400,00	264.765.000,00	48,47	281.518.400,00
3	Program Penanggulangan Bencana	23.706.321.168,00	21.338.142.000,00	90,01	2.368.179.168,00
	Jumlah	38.394.457.474,00	32.637.652.380,00	85,01	5.756.805.094,00

6. Bidang Sosial

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Sosial sebesar Rp6.437.725.198,00 dan terealisasi sebesar Rp5.994.033.396,00 atau 93,11%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Anggaran Bidang Sosial

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.947.202.998,00	3.615.296.616,00	91,59	331.906.382,00
2	Program Pemberdayaan Sosial	70.192.600,00	64.742.500,00	92,24	5.450.100,00
3	Program Rehabilitasi Sosial	965.877.300,00	886.428.080,00	91,77	79.449.220,00
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	992.042.300,00	971.311.000,00	97,91	20.731.300,00
5	Program Penanganan Bencana	462.410.000,00	456.255.200,00	98,67	6.154.800,00
	Jumlah	6.437.725.198,00	5.994.033.396,00	93,11	443.691.802,00

7. Bidang Tenaga Kerja

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Tenaga Kerja sebesar Rp3.559.006.436,00 dan terealisasi sebesar Rp3.256.261.799,00 atau 91,49%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Anggaran Bidang Tenaga Kerja

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.268.125.036,00	2.970.040.099,00	90,88	298.084.937,00
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	153.855.200,00	153.855.200,00	100,00	0,00
3	Program Hubungan Industrial	137.026.200,00	132.366.500,00	96,60	4.659.700,00
	Jumlah	3.559.006.436,00	3.256.261.799,00	91,49	302.744.637,00

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp2.690.566.788,00 dan terealisasi sebesar Rp2.449.763.876,00 atau 91,05%, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 13. Rincian Anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.217.892.888,00	2.087.370.376,00	94,12	130.522.512,00
2	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	92.600.500,00	47.272.000,00	51,05	45.328.500,00
3	Program Perlindungan Perempuan	27.028.000,00	10.035.000,00	37,13	16.993.000,00
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	54.246.000,00	50.343.500,00	92,81	3.902.500,00
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	222.744.400,00	221.351.000,00	99,37	1.393.400,00
6	Program Perlindungan Khusus Anak	76.055.000,00	33.392.000,00	43,91	42.663.000,00
	Jumlah	2.690.566.788,00	2.449.763.876,00	91,05	240.802.912,00

9. Bidang Pangan

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Pangan sebesar Rp8.341.643.659,00 dan terealisasi sebesar Rp7.658.245.809,00 atau 91,81%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Anggaran Bidang Pangan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.627.324.228,00	5.100.351.838,00	90,64	526.972.390,00
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.714.319.431,00	2.557.893.971,00	94,24	156.425.460,00
	Jumlah	8.341.643.659,00	7.658.245.809,00	91,81	683.397.850,00

10. Bidang Pertanahan

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Pertanahan sebesar Rp64.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp63.267.855,00 atau 97,64%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Anggaran Bidang Pertanahan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	64.800.000,00	63.267.855,00	97,64	1.532.145,00
	Jumlah	64.800.000,00	63.267.855,00	97,64	1.532.145,00

11. Bidang Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp12.517.577.366,00 dan terealisasi sebesar Rp11.923.004.862,00 atau 95,25%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Anggaran Bidang Lingkungan Hidup

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4.716.519.484,50	4.389.179.761,00	93,06	327.339.723,50



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
	Daerah Kabupaten/Kota				
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.635.401.238,50	1.515.100.895,00	92,64	120.300.343,50
3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	399.883.300,00	372.864.805,00	93,24	27.018.495,00
4	Program Pengelolaan Persampahan	5.765.773.343,00	5.645.859.401,00	97,92	119.913.942,00
	Jumlah	12.517.577.366,00	11.923.004.862,00	95,25	594.572.504,00

12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil)

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil sebesar Rp6.363.558.477,00 dan terealisasi sebesar Rp5.046.089.657,00 atau 79,30%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Anggaran Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.488.944.377,00	4.448.475.557,00	81,04	1.040.468.820,00
2	Program Pendaftaran Penduduk	637.540.100,00	475.945.100,00	74,65	161.595.000,00
3	Program Pencatatan Sipil	114.195.500,00	53.969.000,00	47,26	60.226.500,00
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	72.984.500,00	31.900.000,00	43,71	41.084.500,00
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	49.894.000,00	35.800.000,00	71,75	14.094.000,00
	Jumlah	6.363.558.477,00	5.046.089.657,00	79,30	1.317.468.820,00

13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp6.270.746.545,00 dan terealisasi sebesar Rp5.812.381.137,00 atau 92,69%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.262.419.333,00	4.037.669.905,00	94,73	224.749.428,00
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	91.370.400,00	90.003.000,00	98,50	1.367.400,00
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	655.343.212,00	604.586.777,00	92,25	50.756.435,00
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.261.613.600,00	1.080.121.455,00	85,61	181.492.145,00
	Jumlah	6.270.746.545,00	5.812.381.137,00	92,69	458.365.408,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp23.109.745.139,00 dan terealisasi sebesar Rp19.065.376.436,00 atau 82,50%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Anggaran Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.679.421.039,00	8.472.941.631,00	87,54	1.206.479.408,00
2	Program Pengendalian Penduduk	973.277.390,00	771.426.034,00	79,26	201.851.356,00
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.396.093.310,00	5.490.568.780,00	85,84	905.524.530,00
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.060.953.400,00	4.330.439.991,00	71,45	1.730.513.409,00
	Jumlah	23.109.745.139,00	19.065.376.436,00	82,50	4.044.368.703,00

15. Bidang Perhubungan

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Perhubungan sebesar Rp52.220.524.442,00 dan terealisasi sebesar Rp49.002.016.909,00 atau 93,84%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Anggaran Bidang Perhubungan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.660.992.710,00	7.519.600.920,00	86,82	1.141.391.790,00
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	43.459.571.972,00	41.382.679.989,00	95,22	2.076.891.983,00
3	Program Pengelolaan Pelayaran	99.959.760,00	99.736.000,00	99,78	223.760,00
	Jumlah	52.220.524.442,00	49.002.016.909,00	93,84	3.218.507.533,00

16. Bidang Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Komunikasi dan Informatika sebesar Rp9.203.013.896,00 dan terealisasi sebesar Rp8.688.103.404,00 atau 94,40%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Anggaran Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.039.420.399,00	3.690.399.993,00	91,36	349.020.406,00
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.105.807.417,00	3.945.008.930,00	96,08	160.798.487,00
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.057.786.080,00	1.052.694.481,00	99,52	5.091.599,00
	Jumlah	9.203.013.896,00	8.688.103.404,00	94,40	514.910.492,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

17. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp9.054.619.172,00 dan terealisasi sebesar Rp5.314.568.958,00 atau 58,69%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Anggaran Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.551.643.472,00	2.955.657.406,00	83,22	595.986.066,00
2	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	40.000.000,00	39.100.000,00	97,75	900.000,00
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
4	Program Pengembangan UMKM	5.422.975.700,00	2.279.811.552,00	42,04	3.143.164.148,00
	Jumlah	9.054.619.172,00	5.314.568.958,00	58,69	3.740.050.214,00

18. Bidang Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Penanaman Modal sebesar Rp4.873.760.755,00 dan terealisasi sebesar Rp4.364.312.278,00 atau 89,55%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Anggaran Bidang Penanaman Modal

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.087.428.955,00	3.684.281.844,00	90,14	403.147.111,00
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	208.391.000,00	198.673.869,00	95,34	9.717.131,00
3	Program Promosi Penanaman Modal	141.667.700,00	102.771.027,00	72,54	38.896.673,00
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	308.624.800,00	263.915.265,00	85,51	44.709.535,00
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	125.956.500,00	113.116.478,00	89,81	12.840.022,00
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1.691.800,00	1.553.795,00	91,84	138.005,00
	Jumlah	4.873.760.755,00	4.364.312.278,00	89,55	509.448.477,00

19. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp5.671.967.568,00 dan terealisasi sebesar Rp4.772.269.664,00 atau 84,14%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Anggaran Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.432.198.252,00	2.876.629.648,00	83,81	555.568.604,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	401.462.700,00	61.685.400,00	15,37	339.777.300,00
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.338.306.616,00	1.333.954.616,00	99,67	4.352.000,00
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	5.671.967.568,00	4.772.269.664,00	84,14	899.697.904,00

20. Bidang Statistik

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Statistik sebesar Rp17.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.663.000,00 atau 55,22%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Anggaran Bidang Statistik

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penyelenggara Statistik Sektor	17.500.000,00	9.663.000,00	55,22	7.837.000,00
	Jumlah	17.500.000,00	9.663.000,00	55,22	7.837.000,00

21. Bidang Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Kebudayaan sebesar Rp2.051.836.400,00 dan terealisasi sebesar Rp388.080.774,00 atau 18,91%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Anggaran Bidang Kebudayaan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Pengembangan Kebudayaan	1.508.479.400,00	0,00	0,00	1.508.479.400,00
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	365.154.800,00	235.221.404,00	64,42	129.933.396,00
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	178.202.200,00	152.859.370,00	85,78	25.342.830,00
	Jumlah	2.051.836.400,00	388.080.774,00	18,91	1.663.755.626,00

22. Bidang Perpustakaan

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Perpustakaan sebesar Rp4.242.898.123,00 dan terealisasi sebesar Rp3.822.992.581,00 atau 90,10%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Anggaran Bidang Perpustakaan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.009.982.779,00	3.623.343.798,00	90,36	386.638.981,00
2	Program Pembinaan Perpustakaan	232.915.344,00	199.648.783,00	85,72	33.266.561,00
	Jumlah	4.242.898.123,00	3.822.992.581,00	90,10	419.905.542,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

23. Bidang Kearsipan

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Kearsipan sebesar Rp135.997.000,00 dan terealisasi sebesar Rp131.286.650,00 atau 96,54%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Anggaran Bidang Kearsipan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Pengelolaan Arsip	135.997.000,00	131.286.650,00	96,54	4.710.350,00
	Jumlah	135.997.000,00	131.286.650,00	96,54	4.710.350,00

24. Bidang Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Pariwisata sebesar Rp2.582.915.369,00 dan terealisasi sebesar Rp2.532.032.794,00 atau 98,03%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29. Rincian Anggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	893.250.000,00	881.233.200,00	98,65	12.016.800,00
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.687.415.369,00	1.648.549.594,00	97,70	38.865.775,00
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	2.582.915.369,00	2.532.032.794,00	98,03	50.882.575,00

25. Bidang Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Pariwisata sebesar Rp6.952.689.269,00 dan terealisasi sebesar Rp5.921.391.265,00 atau 85,17%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Anggaran Bidang Pariwisata

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.963.804.319,00	4.991.079.526,00	83,69	972.724.793,00
2	Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata	290.410.950,00	267.352.076,00	92,06	23.058.874,00
3	Program Pemasaran Pariwisata	533.474.000,00	513.302.311,00	96,22	20.171.689,00
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	165.000.000,00	149.657.352,00	90,70	15.342.648,00
	Jumlah	6.952.689.269,00	5.921.391.265,00	85,17	1.031.298.004,00

26. Bidang Pertanian

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Pertanian sebesar Rp66.316.305.797,80 dan terealisasi sebesar Rp59.625.629.474,00 atau 89,91%, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 31. Rincian Anggaran Bidang Pertanian

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.713.115.759,60	22.204.473.646,00	86,35	3.508.642.113,60
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.102.575.462,20	6.834.834.593,00	75,09	2.267.740.869,20
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	29.945.920.616,00	29.223.426.805,00	97,59	722.493.811,00
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	232.108.000,00	218.597.510,00	94,18	13.510.490,00
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	161.840.000,00	76.640.000,00	47,36	85.200.000,00
6	Program Penyuluhan Pertanian	1.160.745.960,00	1.067.656.920,00	91,98	93.089.040,00
	Jumlah	66.316.305.797,80	59.625.629.474,00	89,91	6.690.676.323,80

27. Bidang Perdagangan

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Perindustrian sebesar Rp16.452.812.900,00 dan terealisasi sebesar Rp15.961.759.706,00 atau 97,02%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Anggaran Bidang Perdagangan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	15.817.234.000,00	15.455.891.742,00	97,72	361.342.258,00
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	366.701.800,00	287.776.000,00	78,48	78.925.800,00
3	Program Pengembangan Ekspor	250.090.000,00	199.369.964,00	79,72	50.720.036,00
4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	18.787.100,00	18.722.000,00	99,65	65.100,00
	Jumlah	16.452.812.900,00	15.961.759.706,00	97,02	491.053.194,00

28. Bidang Perindustrian

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Perindustrian sebesar Rp7.304.196.280,00 dan terealisasi sebesar Rp6.532.195.535,00 atau 89,43%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian Anggaran Bidang Perindustrian

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.782.646.280,00	3.187.368.193,00	84,26	595.278.087,00
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.521.550.000,00	3.344.827.342,00	94,98	176.722.658,00
	Jumlah	7.304.196.280,00	6.532.195.535,00	89,43	772.000.745,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

29. Bidang Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Administrasi Pemerintahan sebesar Rp122.164.106.525,00 dan terealisasi sebesar Rp108.071.521.633,00 atau 88,46%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Anggaran Bidang Administrasi Pemerintahan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	88.177.239.639,00	76.935.974.138,00	87,25	11.241.265.501,00
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	13.932.104.386,00	12.688.399.510,00	91,07	1.243.704.876,00
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.079.329.100,00	1.635.333.971,00	78,65	443.995.129,00
4	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	17.975.433.400,00	16.811.814.014,00	93,53	1.163.619.386,00
	Jumlah	122.164.106.525,00	108.071.521.633,00	88,46	14.092.584.892,00

30. Bidang Pengawasan

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Pengawasan sebesar Rp17.550.215.104,00 dan terealisasi sebesar Rp14.111.267.584,00 atau 80,41%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Anggaran Bidang Pengawasan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.759.581.604,00	12.138.524.641,00	88,22	1.621.056.963,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.317.189.400,00	1.847.892.443,00	55,71	1.469.296.957,00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	473.444.100,00	124.850.500,00	26,37	348.593.600,00
	Jumlah	17.550.215.104,00	14.111.267.584,00	80,41	3.438.947.520,00

31. Bidang Perencanaan

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Perencanaan sebesar Rp6.687.073.728,00 dan terealisasi sebesar Rp5.770.343.281,00 atau 86,29%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Rincian Anggaran Bidang Perencanaan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.002.482.428,00	4.440.542.317,00	88,77	561.940.111,00
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	857.307.300,00	797.129.622,00	92,98	60.177.678,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	518.214.900,00	435.901.354,00	84,12	82.313.546,00
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	159.069.100,00	96.769.988,00	60,84	62.299.112,00
5	Program Riset dan Inovasi Daerah	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
	Jumlah	6.687.073.728,00	5.770.343.281,00	86,29	916.730.447,00

32. Bidang Keuangan

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Keuangan sebesar Rp626.809.309.641,87 dan terealisasi sebesar Rp514.520.706.146,00 atau 82,09%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Anggaran Bidang Keuangan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	83.011.396.161,87	56.013.334.318,00	67,48	26.998.061.843,87
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	536.955.990.160,00	453.119.048.680,00	84,39	83.836.941.480,00
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.981.300.000,00	1.376.000.248,00	69,45	605.299.752,00
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.860.623.320,00	4.012.322.900,00	82,55	848.300.420,00
	Jumlah	626.809.309.641,87	514.520.706.146,00	82,09	112.288.603.495,87

33. Bidang Kepegawaian

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Kepegawaian sebesar Rp114.655.789.543,00 dan terealisasi sebesar Rp48.110.891.213,00 atau 41,96%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38. Rincian Anggaran Bidang Kepegawaian

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	109.145.370.499,00	44.211.758.173,00	40,51	64.933.612.326,00
2	Program Kepegawaian Daerah	2.129.274.716,00	1.594.721.002,00	74,90	534.553.714,00
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.381.144.328,00	2.304.412.038,00	68,15	1.076.732.290,00
	Jumlah	114.655.789.543,00	48.110.891.213,00	41,96	66.544.898.330,00

34. Bidang Kewilayahan- Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan sebesar Rp98.555.530.294,00 dan terealisasi sebesar Rp87.001.836.001,00 atau 88,28%, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 39. Rincian Anggaran Bidang kewilayahan-Administrasi Pemerintahan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92.116.444.634,00	81.128.904.501,00	88,07	10.987.540.133,00
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.039.085.660,00	693.234.500,00	66,72	345.851.160,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.400.000.000,00	5.179.697.000,00	95,92	220.303.000,00
	Jumlah	98.555.530.294,00	87.001.836.001,00	88,28	11.553.694.293,00

35. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp8.922.627.345,00 dan terealisasi sebesar Rp7.890.498.010,00 atau 88,43%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40. Rincian Anggaran Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.321.387.345,00	4.415.973.031,00	82,99	905.414.314,00
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.500.000.000,00	1.382.417.479,00	92,16	117.582.521,00
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.966.380.500,00	1.957.248.000,00	99,54	9.132.500,00
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	134.859.500,00	134.859.500,00	100,00	0,00
	Jumlah	8.922.627.345,00	7.890.498.010,00	88,43	1.032.129.335,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun berupa realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

3.1.1. Realisasi Pendapatan-LRA

1. Realisasi Pendapatan-LRA pada TA 2025 adalah sebesar Rp2.802.579.318.946,24 atau mencapai 96,45% dari anggaran sebesar Rp2.905.652.117.725,32;
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah PAD - LRA pada TA 2025 adalah sebesar Rp287.515.330.890,24 atau 102,32% dari anggaran sebesar Rp280.971.278.663,93;
3. Realisasi Pendapatan Transfer - LRA TA 2025 adalah sebesar Rp2.481.041.824.180,00 atau 95,93% dari anggaran sebesar Rp2.586.092.530.162,71; dan
4. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - LRA TA 2025 adalah sebesar Rp34.022.163.876,00 atau 88,16% dari anggaran sebesar Rp38.588.308.898,68.

3.1.2. Realisasi Belanja-LRA

1. Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp2.643.511.032.939,00 atau mencapai 87,78% dari anggaran sebesar Rp3.011.338.831.777,06;
2. Realisasi Belanja Operasi pada TA 2025 adalah sebesar Rp1.903.191.395.823,00 atau mencapai 87,88% dari anggaran sebesar Rp2.165.536.480.916,86;
3. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 adalah sebesar Rp291.290.325.913,00 atau mencapai 92,75% dari anggaran sebesar Rp314.047.380.220,20;
4. Realisasi Belanja Tak Terduga pada TA 2025 adalah sebesar Rp17.802.727.800,00 atau 55,58% dari anggaran sebesar Rp32.027.096.574,00; dan
5. Realisasi Belanja Transfer pada TA 2025 adalah sebesar Rp431.226.583.403,00 atau mencapai 86,29% dari anggaran sebesar Rp499.727.874.066,00.

Rincian perbandingan anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan transfer TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 41. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer
TA 2025 dan TA 2024**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.905.652.117.725,32	2.802.579.318.946,24	96,45	2.646.959.901.844,96
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.971.278.663,93	287.515.330.890,24	102,33	219.944.520.964,96



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
4.1.01	Pajak Daerah	205.495.195.692,00	205.995.136.182,00	100,24	151.774.759.464,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.038.440.966,00	4.343.283.279,00	71,93	3.151.160.835,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.984.918.125,00	22.984.918.125,00	100,00	20.272.583.191,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	46.452.723.880,93	54.191.993.304,24	116,66	44.746.017.474,96
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.586.092.530.162,71	2.481.041.824.180,00	95,94	2.394.298.529.632,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.333.952.128.418,71	2.242.060.730.140,00	96,06	2.295.761.234.987,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	252.140.401.744,00	238.981.094.040,00	94,78	98.537.294.645,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	38.588.308.898,68	34.022.163.876,00	88,17	32.716.851.248,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.588.308.898,68	34.022.163.876,00	88,17	32.716.851.248,00
5	BELANJA DAERAH	3.011.338.831.777,06	2.643.511.032.939,00	87,79	2.657.709.012.035,83
5.1	BELANJA OPERASI	2.165.536.480.916,86	1.903.191.395.823,00	87,89	1.792.094.066.702,63
5.1.01	Belanja Pegawai	1.356.639.921.836,17	1.176.138.593.451,00	86,69	964.985.141.154,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	768.534.251.580,69	688.336.827.754,00	89,56	725.004.496.544,63
5.1.05	Belanja Hibah	39.733.357.500,00	38.157.474.618,00	96,03	101.603.079.004,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	628.950.000,00	558.500.000,00	88,80	501.350.000,00
5.2	BELANJA MODAL	314.047.380.220,20	291.290.325.913,00	92,75	342.561.963.087,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.986.181.550,00	58.911.262.046,00	95,04	107.661.000.057,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.202.143.081,00	68.257.309.278,00	93,24	76.995.108.180,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.572.222.566,20	135.455.575.766,00	89,96	134.990.437.486,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.848.333.023,00	28.424.703.823,00	102,07	22.915.417.364,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	438.500.000,00	241.475.000,00	55,07	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	32.027.096.574,00	17.802.727.800,00	55,59	20.843.392.248,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	32.027.096.574,00	17.802.727.800,00	55,59	20.843.392.248,00
5.4	BELANJA TRANSFER	499.727.874.066,00	431.226.583.403,00	86,29	502.209.589.998,20
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.971.574.266,00	10.659.992.569,00	97,16	158.540.735.998,20
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	488.756.299.800,00	420.566.590.834,00	86,05	343.668.854.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(105.686.714.051,74)	159.068.286.007,24	(150,51)	(10.749.110.190,87)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	113.186.714.051,74	113.186.714.051,45	100,00	130.935.824.242,61
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	113.186.714.051,74	113.186.714.051,45	100,00	130.935.824.242,61
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	105.686.714.051,74	105.686.714.051,45	100,00	123.935.824.242,61



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	264.755.000.058,69	0,00	113.186.714.051,74

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam TA 2025 secara umum antara lain:

1. Masih terbatasnya sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah (PAD);
2. Belum memadainya kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada dalam meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
4. Banyaknya piutang pajak, retribusi dan pajak bumi dan bangunan yang belum tertagih dari para wajib pajak;
5. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi tentang kewajiban untuk membayar pajak/retribusi; dan
6. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset.

3.3 Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun meliputi hal-hal sebagai berikut:

3.3.1 Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) serta PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah minimal 20% dari total belanja daerah. Tujuan dari *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun. Adapun capaian dari *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan di wilayah Kabupaten Simalungun adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 42. Mandatory Spending Fungsi Pendidikan TA 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
ALOKASI MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN			
1	DINAS PENDIDIKAN	996.801.537.266,00	745.325.063.546,00
2	DINAS KESEHATAN	1.372.746.900,00	1.150.929.690,00
3	DINAS KETENAGAKERJAAN	153.855.200,00	153.855.200,00
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	85.956.500,00	80.713.500,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	399.883.300,00	372.864.805,00
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18.615.000,00	18.250.000,00
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI	489.781.900,00	373.048.857,00
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	1.476.614.590,00	748.976.722,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
	BERENCANA		
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	72.825.000,00	65.475.478,00
10	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.239.769.316,00	1.895.640.016,00
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	232.915.344,00	199.648.783,00
12	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.276.753.700,00	585.965.202,00
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.500.000.000,00	1.382.417.479,00
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	848.195.000,00	786.431.847,00
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	300.000.000,00	299.920.000,00
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN		1.008.269.449.016,00	753.439.201.125,00
TOTAL BELANJA DAERAH		3.011.338.831.777,06	2.643.511.032.939,00
PERSENTASE (MIN. 20%)		33,48	28,50

Alokasi *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan Kabupaten Simalungun TA 2025 telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu sebesar 33,48%.

3.3.2 *Mandatory Spending* Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBN TA 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, batasan besaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik minimal 40% dari APBD diluar transfer ke daerah bawahan dan desa.

Tujuan dari *Mandatory Spending* Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun.

Adapun capaian dari *Mandatory Spending* Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik di wilayah Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 43. *Mandatory Spending* Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK			
1	Total Belanja Daerah	3.011.338.831.777,06	2.643.511.032.939,00
2	Belanja Bagi Hasil		
	a. Belanja bagi hasil	10.971.574.266,00	10.659.992.569,00
	b. Bantuan Keuangan	488.756.299.800,00	420.566.590.834,00
	Jumlah (a + b)	499.727.874.066,00	431.226.583.403,00
3	Selisih (1 - 2)	2.511.610.957.711,06	2.212.284.449.536,00
4	Minimal belanja infrastruktur pelayanan publik (40% x selisih)	1.004.644.383.084,42	1.057.404.413.175,60
5	Alokasi yang dianggarkan dalam Anggaran APBD Kabupaten dan realisasi	684.692.516.100,64	624.643.311.119,00
1	DINAS PENDIDIKAN	100.256.746.616,00	94.010.532.494,00
2	DINAS KESEHATAN	73.409.494.205,75	60.866.798.862,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	223.236.784.605,39	201.819.893.207,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	949.448.946,00	838.671.014,00
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	2.191.345.300,00	1.858.043.778,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.654.270.900,00	2.736.907.281,00
7	DINAS PERTANIAN	35.288.845.939,00	32.705.163.223,00
8	DINAS SOSIAL	428.571.100,00	339.524.359,00
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	387.516.860,00	345.473.820,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	592.733.900,00	513.919.206,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	3.240.889.395,00	3.012.347.083,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.903.234.434,50	7.582.655.081,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.584.040.063,00	845.137.132,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI	695.315.420,00	594.812.574,00
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.101.225.600,00	6.017.965.638,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	45.373.582.572,00	42.820.774.655,00
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.814.782.108,00	1.714.972.016,00
18	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.897.210.847,00	2.656.089.573,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	756.274.419,00	592.515.942,00
20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	563.946.416,00	536.657.416,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	700.062.860,00	605.862.562,00
22	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.248.824.513,00	2.028.965.684,00
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16.588.668.900,00	16.089.294.456,00
24	INSPEKTORAT	3.271.615.864,00	2.969.737.828,00
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.095.903.450,00	1.048.406.174,00
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	7.836.808.500,00	5.491.047.547,00
27	SEKRETARIAT DPRD	4.983.531.100,00	3.918.829.636,00
28	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	2.013.542.000,00	1.854.522.813,00
29	SEKRETARIAT DAERAH	25.006.797.060,00	19.290.256.978,00
30	KECAMATAN SIANTAR	467.216.064,00	373.503.500,00
31	KECAMATAN GUNUNG MALELA	142.076.700,00	134.485.498,00
32	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS	232.921.172,00	211.147.900,00
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25.706.753.768,00	22.789.440.147,00
34	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI	543.799.600,00	484.506.344,00
35	KECAMATAN JORLANG HATARAN	768.331.330,00	658.041.822,00
36	KECAMATAN BANDAR MASILAM	279.038.400,00	258.554.426,00
37	KECAMATAN RAYA KAHEAN	505.418.500,00	494.057.700,00
38	KECAMATAN BOSAR MALIGAS	585.290.800,00	568.079.441,00
39	KECAMATAN SIDAMANIK	859.479.552,00	786.369.395,00
40	KECAMATAN TANAH JAWA	741.923.872,00	643.593.280,00
41	KECAMATAN PURBA	875.684.000,00	818.872.700,00
42	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON	658.639.880,00	635.115.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
43	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON	1.653.346.556,00	1.435.190.814,00
44	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR	1.138.560.080,00	1.076.604.500,00
45	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA	540.092.300,00	514.990.140,00
46	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI	206.810.128,00	188.385.640,00
47	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN	322.636.900,00	224.888.373,00
48	KECAMATAN PEMATANG BANDAR	1.137.866.810,00	1.079.764.913,00
49	KECAMATAN BANDAR HULUAN	315.905.854,00	284.394.000,00
50	KECAMATAN BANDAR	1.816.979.849,00	1.750.489.567,00
51	KECAMATAN SILIMAKUTA	1.084.218.416,00	983.899.330,00
52	KECAMATAN SILOU KAHEAN	270.476.055,00	231.841.600,00
53	KECAMATAN RAYA	2.585.054.904,00	2.359.594.800,00
54	KECAMATAN UJUNG PADANG	623.456.700,00	549.028.383,00
55	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA	221.760.830,00	164.149.730,00
56	KECAMATAN DOLOG MASAGAL	174.128.044,00	161.199.462,00
57	KECAMATAN PANEI	724.671.860,00	448.654.800,00
58	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK	671.893.545,00	605.968.700,00
59	KECAMATAN HATONDUHAN	232.016.400,00	207.516.327,00
60	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN	296.221.000,00	233.356.869,00
61	KECAMATAN TAPIAN DOLOK	847.069.000,00	807.758.514,00
62	KECAMATAN DOLOK SILOU	221.214.000,00	148.157.622,00
63	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN	15.624.133.589,00	22.474.694.961,00
64	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM	15.377.803.085,00	21.180.901.158,00
65	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT	24.167.612.664,00	22.970.335.331,00
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK		684.692.516.100,64	624.643.311.119,00
TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR BELANJA TRANSFER		2.697.291.451.556,86	2.697.291.451.557,86
PERSENTASE ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (MIN. 40%)		27,26	28,24
Kekurangan alokasi anggaran (4-5)		319.951.866.983,78	432.761.102.056,60

Alokasi *Mandatory Spending* Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten Simalungun TA 2025 tidak memenuhi standar yang ditetapkan yaitu sebesar 27,26%. Hal ini dikarenakan kemampuan keuangan daerah yang rendah, sehingga kapasitas fiskal untuk belanja infrastruktur tidak tersedia.

3.3.3 *Mandatory Spending* Belanja Pegawai

Dalam konteks belanja pegawai, Pemerintah Daerah (pemda) diharuskan untuk memenuhi batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD. Hal ini diatur dalam UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Batasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa belanja pegawai tidak mendominasi anggaran, sehingga ada cukup dana untuk belanja infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

Adapun capaian dari *Mandatory Spending* Belanja Pegawai di wilayah Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 44. Mandatory Spending Belanja Pegawai TA 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja Pegawai	1.356.639.921.836,17	1.176.138.593.451,00
2	Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (Faktor Pengurang):		
	a. Pendapatan DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	229.867.382.200,00	206.957.690.909,00
	b. Pendapatan DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	11.659.751.000,00	6.721.270.000,00
	c. Pendapatan DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	1.784.769.400,00	16.018.000,00
	Jumlah Pengurang (a+b+c)	243.311.902.600,00	213.694.978.909,00
3	Total Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (1-2)	1.113.328.019.236,17	962.443.614.542,00
4	Total Belanja Daerah	3.011.338.831.777,06	2.643.511.032.939,00
5	Persentase (3:4) MAX. 30%	36,97	36,41

Alokasi *Mandatory Spending* Belanja Pegawai Kabupaten Simalungun TA 2025 tidak memenuhi standar yang ditetapkan yaitu sebesar 36,97%. Hal ini dikarenakan jumlah penerimaan PPPK tahun 2023-2025 sebanyak 6.680 orang, sehingga terdapat penambahan alokasi anggaran untuk belanja pegawai.

3.3.4 Mandatory Spending Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Permendagri No 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD diatas Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,50% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas. Adapun capaian dari *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan di wilayah Kabupaten Simalungun adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 45. Mandatory Spending Belanja Pengawasan TA 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
ALOKASI MANDATORY SPENDING UNSUR PENGAWASAN			
1	TOTAL BELANJA DAERAH	3.011.338.831.777,06	2.643.511.032.939,00
2	Minimal Alokasi (Belanja Daerah x 0,5%)	15.056.694.158,89	13.217.555.164,70
3	INSPEKTORAT	11.834.987.152,00	8.636.918.424,00
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING UNSUR PENGAWASAN		11.834.987.152,00	8.636.918.424,00
4	Kekurangan Alokasi anggaran/realisasi Pengawasan (2-3)	3.221.707.006,89	4.580.636.740,70
	MINIMAL PERSENTASE DAN BESARAN ALOKASI MANDATORY SPENDING UNSUR PENGAWASAN (0,50% DAN Rp.15.000.000.000,00) Persentase anggaran/realisasi (3/1 x 100%)	0,39	0,33

Alokasi *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan Kabupaten Simalungun TA 2025 tidak memenuhi standar yang ditetapkan yaitu sebesar 0,39%. Hal ini dikarenakan realisasi belanja tahun sebelumnya yang rendah dan faktor efisiensi belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

BpAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas LK Daerah

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diamanatkan untuk membuat LK yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK. Kewajiban SKPD membuat laporan atas penggunaan anggaran/penggunaan barang yang dimaksud kemudian disebut entitas akuntansi. Setiap LK entitas akuntansi kemudian akan digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK. LKPD tersebut selanjutnya dikonsolidasikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Entitas akuntansi yang ada di Kabupaten Simalungun adalah SKPD yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Simalungun berjumlah 65 SKPD yang terdiri dari 21 Dinas, 5 Badan, 2 Sekretariat, 3 Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, dan 32 Kecamatan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 46. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) TA 2025

NO	NAMA SKPD	SINGKATAN NAMA SKPD
1	Dinas Pendidikan	Disdik
2	Dinas Kesehatan	Dinkes
3	Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan	RSUD Perdagangan
4	Rumah Sakit Daerah Tn. Rondahaim Pamatang Raya	RSUD Tn. Rondahaim Pamatang Raya
5	Rumah Sakit Umum Daerah Parapat	RSUD Parapat
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas PUTR
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	Dinas PKPP
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesbangpol
9	Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
11	Dinas Sosial	Dinsos
12	Dinas Tenaga Kerja	Disnaker
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPPA
14	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	Hanpang
15	Dinas Lingkungan Hidup	DLH
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	CAPIL
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori	DPMPN
18	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DPPKB
19	Dinas Perhubungan	Dishub
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kominfo
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA SKPD	SINGKATAN NAMA SKPD
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	DPMPPTSP
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Dispora
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan
25	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disbudparekraf
26	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Disperindag
28	Sekretariat Daerah Kabupaten	Setda
29	Sekretariat DPRD Kabupaten	Setwan
30	Kecamatan Siantar	Kecamatan Siantar
31	Kecamatan Gunung Malela	Kecamatan Gunung Malela
32	Kecamatan Gunung Maligas	Kecamatan Gunung Maligas
33	Kecamatan Panei	Kecamatan Panei
34	Kecamatan Panombeian Panei	Kecamatan Panombeian Panei
35	Kecamatan Jorlang Hataran	Kecamatan Jorlang Hataran
36	Kecamatan Raya Kahean	Kecamatan Raya Kahean
37	Kecamatan Bosar Maligas	Kecamatan Bosar Maligas
38	Kecamatan Sidamanik	Kecamatan Sidamanik
39	Kecamatan Pematang Sidamanik	Kecamatan Pematang Sidamanik
40	Kecamatan Tanah Jawa	Kecamatan Tanah Jawa
41	Kecamatan Hatonduhan	Kecamatan Hatonduhan
42	Kecamatan Dolok Panribuan	Kecamatan Dolok Panribuan
43	Kecamatan Purba	Kecamatan Purba
44	Kecamatan Haranggaol Horisan	Kecamatan Haranggaol Horisan
45	Kecamatan Girsang Sipangan Bolon	Kecamatan Girsip
46	Kecamatan Dolok Batu Nanggar	Kecamatan Dobana
47	Kecamatan Huta Bayu Raja	Kecamatan Huta Bayu Raja
48	Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi	Kecamatan J.M Bahjambi
49	Kecamatan Dolok Pardamean	Kecamatan Dolpar
50	Kecamatan Pematang Bandar	Kecamatan Pematang Bandar
51	Kecamatan Bandar Hulan	Kecamatan Bandar Hulan
52	Kecamatan Bandar	Kecamatan Bandar
53	Kecamatan Bandar Masilam	Kecamatan Bandar Masilam
54	Kecamatan Silimakuta	Kecamatan Silimakuta
55	Kecamatan Silau Kahean	Kecamatan Silau Kahean
56	Kecamatan Tapian Dolok	Kecamatan Tapian Dolok
57	Kecamatan Raya	Kecamatan Raya
58	Kecamatan Ujung Padang	Kecamatan Ujung Padang



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA SKPD	SINGKATAN NAMA SKPD
59	Kecamatan Pamatang Silimahuta	Kecamatan Pamatang Silimahuta
60	Kecamatan Dolok Masagal	Kecamatan Dolok Masagal
61	Kecamatan Dolok Silau	Kecamatan Dolok Silau
62	Inspektorat Daerah Kabupaten	Inspektorat Daerah Kabupaten
63	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Bapperida
64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	BPKPD
65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan LK

Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Simalungun, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK adalah basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Unsur-unsur laporan keuangan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari pos-pos yang membentuk laporan keuangan, bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu:

- Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
- Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal; dan
- Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

1. Kebijakan Akuntansi Aset

- Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Aset lancar** adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- Aset non lancar** adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

A. Aset Lancar

1. Kas dan setara kas

Definisi Kas dan Setara Kas

- a) **Kas dan setara kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Kas terdiri dari:
 - 1) Kas di Kas Daerah;
 - 2) Kas di Bendahara Penerimaan;
 - 3) Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
 - 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- d) **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- e) Setara kas terdiri dari:
 - 1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - 2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
- f) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2. Investasi Jangka Pendek

Definisi Investasi Jangka Pendek

- a. **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. **Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

3. Piutang

Definisi Piutang

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya
- d. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Piutang

- a. Piutang Pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
 - 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- b. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - 2) jumlah piutang dapat diukur.
- c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- d. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- e. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- f. Piutang Transfer Lainnya diakui apabila:
 - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- g. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- h. Piutang Transfer Antar Daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- i. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- j. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

- a. Pengukuran Piutang Pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- 2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- 3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- 4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan
 - 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- e. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- f. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- g. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- h. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - 1) Kualitas Piutang Lancar;
 - 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - 3) Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - 4) Kualitas Piutang Macet.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- i. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - 1) Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*); dan
 - 2) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- j. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1(satu) tahun; dan/atau
 - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - e) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - 2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1(satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;
 - e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - 3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - 4) Kualitas macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang lebih 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya/tidak ditemukan; dan/atau
 - d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
 - 5) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1(satu) tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib pajak likuid; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- (5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lebih dari 1(satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya/tidak ditemukan; dan/atau
 - (4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)
- 6) Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a) Kualitas lancar
 - (1) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1(satu) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) Kualitas kurang lancar
 - (1) Umur piutang 1(satu) bulan sampai dengan 3 (dua) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas diragukan.
 - (1) Umur piutang lebih dari 3 (dua) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d) Kualitas macet,
 - (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan atau



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 7) Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar,
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas kurang lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas macet
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 8) Penggolongan kualitas piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, apabila mempunyai umur piutang pajak sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b) Kualitas kurang lancar, apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan
 - c) Kualitas diragukan, mempunyai umur piutang pajak lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - d) Kualitas macet, apabila:
 - (1) Apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - (2) Memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat hasil laporan penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang tersebut memenuhi syarat untuk dihapuskan; atau
 - (3) Ketetapan PBB-P2 yang meliputi SPPT,SKP,STP, berdasarkan hasil pemuktahiran data objek dan/atau subjek pajak, memenuhi syarat untuk dibatalkan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang pada tanggal laporan keuangan surat keputusan pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar belum diterbitkan.
- 9) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
 - a) 0,5% (setengah perseratus) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- b) 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 10) Pencatatan transaksi Penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- 11) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal.

4. Beban Dibayar Dimuka

Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

5. Persediaan

Definisi Persediaan

- 1) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 3) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 47. Klasifikasi Persediaan Dalam Bagan Akun Standar (BAS)

Objek	Rincian Objek
Barang Pakai Habis	1. Bahan 2. Suku Cadang 3. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 4. Obat-obatan 5. Persediaan untuk dijual/diserahkan 6. Persediaan untuk tujuan strategi/berjaga-jaga 7. Natura dan Pakan 8. Persediaan Penelitian 9. Persediaan Dalam Proses
Barang Tak Habis Pakai	1. Komponen 2. Pipa
Barang Bekas Dipakai	1. Komponen Bekas dan Pipa Bekas

Pengakuan Persediaan

- 1) Persediaan diakui:
 - a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan/atau
 - b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran Persediaan

- 1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
- 2) Persediaan disajikan sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

6. Aset untuk Dikonsolidasikan

Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah (R/K-SKPD). Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

B. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar terdiri dari Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

1. Investasi Jangka Panjang

Definisi Investasi Jangka Panjang

- 1) **Investasi Jangka Panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) **Investasi Permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- 3) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- 4) **Investasi Non Permanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- 5) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- 6) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

- 1) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih beredar (*outstanding*).
- 2) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya Investasi Non Permanen Dana Bergulir.
- 3) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur Investasi Non Permanen Dana Bergulir dengan persentase penyisihan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 48. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang Tidak Tertagih

Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur			
	1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	>3 s.d 4 Tahun	Lebih dari 4 Tahun
Investasi Non Permanen Dana Bergulir	25%	50%	75%	100%

2. Aset Tetap

Definisi Aset Tetap

- 1) **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 3) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 4) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 5) Masa manfaat adalah:
 - a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- 6) Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi sebagai berikut:
 - a) Tanah;
 - b) Peralatan dan Mesin;
 - c) Gedung dan Bangunan;
 - d) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e) Aset Tetap Lainnya; dan
 - f) Kontruksi Dalam Pengerjaan.
- 7) **Tanah** adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 8) **Peralatan dan Mesin** adalah mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dengan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.
- 9) **Gedung dan Bangunan** adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dalam kondisi siap dipakai.
- 10) **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- 11) **Aset Tetap Lainnya** adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dalam kondisi siap dipakai.
 - 12) Aset Tetap Lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
 - 13) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap, harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - 14) **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
 - 15) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 49. Batasan Biaya Kapitalisasi Perolehan Awal Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan/KM (Rp)
1	Tanah	Tidak dibatasi
2	Peralatan dan Mesin, yang terdiri atas:	
2.1	Alat Besar	1.000.000,00
2.2	Alat Angkutan	1.000.000,00
2.3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.000.000,00
2.4	Alat Pertanian	1.000.000,00
2.5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.000.000,00
2.6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.000.000,00
2.7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.000.000,00
2.8	Alat Laboratorium	1.000.000,00
2.9	Alat Persenjataan	1.000.000,00
2.10	Komputer	1.000.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	1.000.000,00
2.12	Alat Pengeboran	1.000.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	1.000.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1.000.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	1.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan/KM (Rp)
2.16	Alat Peraga	1.000.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000,00
2.18	Rambu – Rambu	1.000.000,00
2.19	Peralatan Olah Raga	1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000,00
3.2	Monumen	10.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	10.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan Dan Jembatan	10.000.000,00
4.2	Bangunan Air	10.000.000,00
4.3	Instalasi	5.000.000,00
4.4	Jaringan	5.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	100.000,00
5.3	Hewan	1.000.000,00
5.4	Biota Perairan	1.000.000,00
5.5	Tanaman	1.000.000,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	1.000.000,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	1.000.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak dibatasi

Penyusutan

Metode penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Simalungun adalah metode garis lurus dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai perolehan (penilaian)}}{\text{Masa manfaat}}$$

Masa manfaat

- a) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap;
- b) Penetapan perhitungan umur penyusutan aset tetap dengan pendekatan tahunan yaitu penyusutan yang dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari;
- c) Kapitalisasi yang tidak menambah masa manfaat asetnya, tetapi menambah efisiensi dan kapasitasnya, maka untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun menggunakan nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- sisa umur;
- d) Kapitalisasi yang menambah masa manfaat asetnya, maka untuk menghitung besarnya penyusutannya pertahun adalah menggunakan nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur ditambah penambahan masa manfaatnya;
 - e) Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi;
 - f) Masa manfaat Aset Tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 50. Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1	Alat Besar	10
1	3	2	2	Alat Angkutan	7
1	3	2	3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	10
1	3	2	4	Alat Pertanian	4
1	3	2	5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5
1	3	2	6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5
1	3	2	7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	5
1	3	2	8	Alat Laboratorium	8
1	3	2	9	Alat Persenjataan	10
1	3	2	10	Komputer	4
1	3	2	11	Alat Eksplorasi	5
1	3	2	12	Alat Pengeboran	5
1	3	2	13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	5
1	3	2	14	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	15	Alat Keselamatan Kerja	5
1	3	2	16	Alat Peraga	5
1	3	2	17	Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	2	18	Rambu-Rambu	2
1	3	2	19	Peralatan Olah Raga	2
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung	50
1	3	3	2	Monumen	50
1	3	3	3	Bangunan Menara	50
1	3	3	4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan dan Jembatan	10
1	3	4	2	Bangunan Air	50
1	3	4	3	Instalasi	30
1	3	4	4	Jaringan	30

- g) Penambahan masa manfaat Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap Aset Tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 51. Penambahan masa manfaat Aset Tetap

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Pertanian	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Alat Persenjataan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pengeboran	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Peraga	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Monumen	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Pasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan Bangunan dalam renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

- h) Untuk masa manfaat ketika terjadi *overhaul* masa manfaat, maka masa manfaat dihitung dengan menambahkan sisa manfaat pada saat *overhaul* dengan penambahan masa manfaat dari *overhaul*.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- i) Batas maksimum masa manfaat setelah terjadi kapitalisasi adalah masa manfaat awal barang terkait.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu Aset Tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap dilakukan setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah untuk nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00. Tanah dan/atau bangunan dan Aset Tetap dengan nilai diatas Rp5.000.000.000,00 harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/bangunan sebagaimana dimaksud yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

- a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

3. Dana Cadangan

Definisi Dana Cadangan

- a. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

anggaran.

- b. Pembentukan maupun peruntukan Dana Cadangan akan diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan Dana Cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
- c. Dana Cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

4. Aset Lainnya

Definisi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Jenis Aset Lainnya

- 1) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
 - a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d) Aset Tidak Berwujud;
 - e) Aset Lain-lain.
- 2) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh Tagihan Piutang Penjualan Angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 3) Jenis Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah:
 - a) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - b) Bangun, Guna, Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya. Kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
 - c) Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* - BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang. Kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
 - e) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 4) **Aset tidak berwujud** adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

hak atas kekayaan intelektual.

5) Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

- a. **Goodwill** adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham diatas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- b. **Hak Paten, Hak Cipta** adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Disamping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
- c. **Royalti** adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- d. **Software**. *Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah *Software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *Software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
- e. **Lisensi** adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- f. **Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang** adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang dan dapat diidentifikasi sebagai aset.
- g. **Aset Tidak Berwujud Lainnya** merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
- h. **Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan**. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan (*Intangible Asset – Work In Progress*). Setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
- i. Masa manfaat Aset Tidak Berwujud ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 52. Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TIDAK BERWUJUD	
<i>Goodwill</i>	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	Tidak Terbatas
<i>Royalti</i>	20
<i>Software</i>	5



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Lisensi	10
Hasil Kajian	5
Aset Tak Berwujud Lainnya	5
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	5

- 6) **Aset Lain-lain** adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, dan penyertaan modal)
- 7) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Definisi Kewajiban

- 1) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 2) **Kewajiban Jangka Pendek** adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan.
- 3) **Kewajiban jangka panjang** adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

A. Kewajiban Jangka Pendek

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- a. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK** merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
- b. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

2. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

- a. **Utang Bunga** adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
- b. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur, tetapi belum ditarik oleh debitur.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya pendapatan yang ditangguhkan.

4. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- 1) **Kewajiban untuk Dikonsolidasikan** adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- 2) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (R/K PPKD). Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
- 3) Akun ini menurut Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan.
- 4) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik, maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

6. Utang Beban

Definisi Utang Beban

- 1) **Utang Beban** adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk didalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).
- 2) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
 - a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran;
 - b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

perusahaan untuk suatu bulan. Baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

- c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan. Sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

B. Kewajiban Jangka Panjang

1. Utang Dalam Negeri

Definisi Utang Dalam Negeri

- 1) **Utang Dalam Negeri** adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
- 2) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
 - a) Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan;
 - b) Utang Dalam Negeri – Sektor Lembaga Keuangan Non Bank;
 - c) Utang Dalam Negeri – Obligasi;
 - d) Utang Pemerintah Pusat;
 - e) Utang Pemerintah Provinsi; dan
 - f) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Utang Luar Negeri

Definisi Utang Luar Negeri

- a. **Utang Luar Negeri** atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
- b. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
- c. **Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban** adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- d. **Premium** adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
- e. **Diskonto** adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

3. Utang Jangka Panjang Lainnya

Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

- a. **Utang jangka panjang lainnya** adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Utang Kemitraan

- b. **Utang Kemitraan** merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
- c. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
- d. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
- e. Utang Kemitraan disajikan pada Neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil. Utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Definisi Ekuitas

1. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
2. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
3. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas Awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
4. Akun Ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013.
5. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun Aset adalah akun Kewajiban.
6. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai Ekuitas yang sebenarnya.

4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Definisi Pendapatan LRA

- a. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- c. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

- d. **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran** (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- e. **Surplus/Defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- f. Pendapatan-LRA terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah - LRA
 - 2) Pendapatan Transfer – LRA
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA

- a. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
- b. Pendapatan-LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

1. Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang Rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

A. Pendapatan Asli Daerah -LRA

Definisi Pendapatan Asli Daerah –LRA

- a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA** adalah pendapatan yang diperoleh daerah



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025*

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Pengakuan Pendapatan Asli Daerah –LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah –LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam bukti penerimaan atau Surat Tanda Setoran (STS).

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang Rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

B. Pendapatan Transfer -LRA

Definisi Pendapatan Transfer –LRA

Pendapatan Transfer – LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

- a. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen nota kredit dari bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
- b. Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh PPKD.

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA

Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang Rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah– LRA

Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah– LRA

- a. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA (Dana Perimbangan).



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah – LRA,
- 2) Dana Darurat – LRA,
- 3) Pendapatan Lainnya – LRA.

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.
- b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang Rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

5. Kebijakan Akuntansi Belanja

Definisi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.
3. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer.
4. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
5. Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
7. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

10. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan, serta Aset Tak Berwujud.
Nilai yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
12. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
13. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
 - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
15. Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D GU) atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal Badan Layanan Umum (BLU), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.

Pengukuran

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a) Belanja Operasi
 - b) Belanja Modal
 - c) Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam CaLK.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

2. Belanja disajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun Belanja Modal dengan penambahan Aset Tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Kebijakan Akuntansi Transfer

Definisi

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil
2. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi
3. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah
4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
7. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025*

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

Pengukuran

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Definisi

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Penerimaan pembiayaan, dan
 - 2) Pengeluaran pembiayaan.

A. Penerimaan Pembiayaan

Definisi Penerimaan Pembiayaan

- a. **Penerimaan pembiayaan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- b. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

B. Pengeluaran pembiayaan

Definisi Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- b. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- b. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
- c. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- d. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
 - 1) Surplus/Defisit - LRA
 - 2) Pembiayaan Neto
 - 3) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
 - 4) Perubahan SAL
- e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- f. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- g. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
- h. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.
- i. Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- a. Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
- b. Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Defenisi

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
2. Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
 - a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
 - b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
 - c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- pendapatan atas jasa giro.
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assesment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
 - e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
3. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
 4. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
 - b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - c. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - d. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

9. Kebijakan Akuntansi Beban

Defenisi

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
 7. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
 8. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 9. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 10. Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 11. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
 12. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
 13. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diatas.
 14. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 15. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
 16. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Beban atas kegiatan penanganan pandemi *COVID-19* tidak disajikan dalam pos luar biasa tapi menyebar di seluruh pos laporan keuangan karena pengaruh pandemi *COVID-19* hampir menyebar di seluruh pos laporan keuangan.
 17. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

Pengakuan

1. Beban diakui pada:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

- a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
 3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
 4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
 6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
 7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
 8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun Neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
 9. Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
 10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban Beban Pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang Rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-Lain;
 - b. Beban Transfer;
 - c. Beban Non Operasional; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- d. Beban Luar Biasa
2. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

10. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini meliputi:

- 1) Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 3) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- 4) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- 5) Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk:
 - a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah. Dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam produksi atau penyediaan barang/jasa untuk tujuan administratif.

Pengakuan

- 1) Properti Investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerja sama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Surat Ketetapan Bupati. Untuk dapat diakui sebagai Properti Investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang dari aset Properti Investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.
- 2) Dalam menentukan suatu Properti Investasi, memenuhi kriteria pertama pengakuan. Pemerintah Daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- 3) Kriteria kedua pengakuan Properti Investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset Properti Investasi tersebut. Apabila suatu Properti Investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 4) Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya Properti Investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan Properti Investasi dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan Properti Investasi.
- 5) Berdasarkan prinsip pengakuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat Properti Investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
- 6) Bagian dari Properti Investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat Properti Investasi atas biaya penggantian bagian Properti Investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- 1) Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- 2) Apabila Properti Investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, Properti Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 3) Biaya perolehan dari Properti Investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- 4) Biaya perolehan Properti Investasi tidak bertambah atas biaya- biaya dibawah ini:
 - a) Biaya perintisan (kecuali biaya- biaya yang diperlukan untuk membawa Properti Investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum Properti Investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan Properti Investasi.
- 5) Jika pembayaran atas Properti Investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- 6) Properti Investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Simalungun menggunakan kewenangannya untuk



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai Properti Investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

- 7) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai Properti Investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan. Dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.
 - 8) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari kewajiban. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai Properti Investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
 - 9) Properti Investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan Properti Investasi tersebut dihitung dari nilai wajar, kecuali:
 - a) Transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial;
 - b) Nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.
- Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- 10) Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa dimasa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - a) Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan;
 - b) Nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - c) Selisih antara huruf a atau huruf b adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

- 11) Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci. Nilai wajar suatu aset dimana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - a) Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - b) Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- 12) Properti Investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan Properti Investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya diluar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- 13) Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 14) Properti Investasi disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan metode penyusutan yang diadopsi Pemerintah Daerah.

Penyajian Properti Investasi

- 1) Properti Investasi disajikan sebagai aset non lancar pada Neraca dalam mata uang Rupiah.
- 2) Properti Investasi disajikan pada Neraca terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- 3) Karena sifat dari pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah Daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas Properti Investasi menguntungkan dan Pemerintah Daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut dimasa mendatang. Pengklasifikasian Properti Investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan Aset Properti Investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Properti Investasi dalam CaLK antara lain:

- 1) Properti Investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan Properti Investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai Aset;
 - b) Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c) Pelepasan;
 - d) Penyusutan;
 - e) Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- f) Perubahan lain.
- 6) Apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi atas Properti Investasi, nilai wajar dari Properti Investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Uraian Properti Investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b) Dasar peraturan untuk menilai kembali Properti Investasi;
 - c) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - d) Nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - e) Jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 - f) Nilai tercatat Properti Investasi setelah revaluasi.
- 7) Apabila penilaian dilakukan secara bertahap agar mengungkapkan hasil revaluasi Properti Investasi;
- 8) Apabila pengklasifikasian atas untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- 9) Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dari Properti Investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- 10) Apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- 11) Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
 - a) Penghasilan sewa menyewa biasa dari Properti Investasi;
 - b) Beban Operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari Properti Investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; dan
 - c) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari Properti Investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- 12) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan Properti Investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan:
 - a) Properti Investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
 - b) Informasi lain terkait dengan Properti Investasi.

11. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Layanan Umum Badan Keuangan Daerah

Definisi



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

- 1) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah Pemerintah Daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 2) Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD dan menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

Komponen Laporan Layanan Umum Badan Layanan Umum Daerah

Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya dimasa mendatang.

12. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud

Definisi

Berikut ini adalah pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi Aset Tak Berwujud :

- 1) Aset Tak berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 2) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham diatas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/ penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan;
- 3) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu;
- 4) *Franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa;
- 5) Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan;
- 6) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya;
- 7) Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada antara lain meliputi *Software*, DED dan kajian yang memiliki manfaat ekonomis dalam jangka panjang;



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- 8) Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan terhadap ATB dengan umur manfaat terbatas yang dibatasi berdasarkan umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pengakuan

Pengakuan terhadap Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

- 1) Secara umum sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas;
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan aset tak berwujud, maka seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset;
- 3) Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang dapat dibedakan menjadi tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan aset tak berwujud, maka pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset tidak dapat diakui sebagai aset tak berwujud. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi;
- 4) Pengeluaran-pengeluaran dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan aset tak berwujud diakui apabila memenuhi kriteria:
 - a) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tak Berwujud, sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan aset tak berwujud tersebut;
 - c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tak berwujud tersebut;
 - d) Manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang;
 - e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tak Berwujud tersebut;
 - f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke Aset Tak Berwujud selama masa pengembangan.
- 5) Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
 - a) Apa manfaat ekonomi dan/atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
 - b) Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
 - c) Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- d) Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
- 6) Aset Tak Berwujud yang dibiayai oleh instansi lain diluar Pemerintah Daerah, maka Aset Tak Berwujud diakui sebagai aset pihak yang memberikan dana penelitian dan pengembangan.
- 7) *Software* diakui sebagai aset tak berwujud adalah *software* yang dibangun sendiri dengan cara dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- 8) *Software* program yang dibeli tersendiri dan penggunaannya tidak terkait dengan *hardware* tertentu harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud, namun apabila *software* yang dibeli tersebut merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
- 9) Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya dan ditambah nilai hasil kajian/pengembangan yang telah dikapitalisasi, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

Pengukuran

Pengukuran terhadap Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- 1) Aset Tak Berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan;
- 2) Apabila aset tak berwujud diperoleh secara gabungan, maka harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, termasuk biaya *import* dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- 3) Aset Tak Berwujud yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- 4) Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima aset tak berwujud tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.
- 5) Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan aset tak berwujud tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian hibah.
- 6) Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan. Nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkan aset tak berwujud tersebut. Aset tak berwujud memiliki masa manfaat dimasa yang akan datang sampai dengan aset tak berwujud tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud periode berikutnya.
- 7) Aset Tak Berwujud (ATB) yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di Neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Penyajian

Aset Tak Berwujud disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya;

1) Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Aset Tak Berwujud pada akhir periode akuntansi:

- a) Masa manfaat sehingga diketahui adanya ATB dengan masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;
- b) Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
- c) Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
- d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
- e) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*);
- f) Penghentian dan penghapusan ATB; dan
- g) Informasi penting lainnya terkait ATB.

13. Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Definisi

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- 1) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
- 2) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).

Pengakuan dan Pengukuran

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan Pemerintah Daerah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:

- 1) Apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
- 2) Apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

Pengungkapan

Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

14. Kebijakan Akuntansi Aset Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi

Definisi

Istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Konsesi Jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
 - a) Mitra menggunakan Aset Konsesi Jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - b) Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
- 2) Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya;
- 3) Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang memberikan hak penggunaan Aset Konsesi Jasa kepada mitra;
- 4) Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan Aset Konsesi Jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi;



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- 5) Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - a) Disediakan oleh mitra, yang:
 - (1) Dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - (2) Merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - b) Disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - (1) Merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - (2) Merupakan peningkatan aset pemberi konsesi

Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

- 1) Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai Aset Konsesi Jasa apabila:
 - a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - b) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- 2) Kebijakan Akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset), jika persyaratan dalam poin d.1).a) terpenuhi;
- 3) Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas Aset Konsesi Jasa yang diakui berdasarkan poin d.1).a) (atau poin d.2) - untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam poin d.4);
- 4) Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud poin d.1) huruf a) dan poin d.1) huruf (b) (atau poin d.2) untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai Aset Konsesi Jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset;
- 5) Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas Aset Konsesi Jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud;
- 6) Perolehan awal komponen Aset Konsesi Jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset, sebagaimana dinyatakan dalam PSAP yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen Aset Konsesi Jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

konsesi jasanya. Komponen Aset Konsesi Jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa; dan

- 7) Pada akhir masa konsesi jasa, Aset Konsesi Jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

15. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Definisi

- a. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- c. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- d. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- e. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi atau perkembangan lain.
- f. Penyajian kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
- g. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

A. Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya, sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
6. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
10. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

- a. Yang menambah saldo Kas dan yang mengurangi saldo Kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo Kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo Kas dan Pendapatan Lain-Lain.
- b. Yang menambah saldo Kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset,



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo Kas dan menambah akun Pendapatan Lain-Lain-LRA.
- c. Yang mengurangi saldo Kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo Kas.
 - d. Yang mengurangi saldo Kas terkait belanja modal yang menghasilkan Aset, yaitu Belanja Modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo Kas.
11. Koreksi kesalahan atas perolehan Aset selain Kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi Kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan Aset selain Kas:

- a. Yang menambah saldo Kas terkait perolehan aset selain Kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo Kas dan mengurangi akun terkait dalam pos Aset Tetap.
 - b. Yang mengurangi saldo Kas terkait perolehan aset selain Kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos Aset Tetap dan mengurangi saldo Kas.
12. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi Kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain Kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-Lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo Kas dan menambah Pendapatan Lain-Lain-LO.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Beban Lain-Lain-LO dan mengurangi saldo Kas.
13. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi Kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

- a. Yang menambah saldo Kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

belum masuk ke Kas Daerah dikoreksi dengan menambah akun Kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

- b. yang mengurangi saldo Kas yaitu pengembalian pendapatan Dana Alokasi Umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo Kas.
 - 2) Pemerintah Pusat dengan menambah akun saldo Kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LO:

- a. Yang menambah saldo Kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke Kas Daerah dikoreksi dengan menambah akun Kas dan menambah akun Ekuitas.
- b. yang mengurangi saldo Kas yaitu pengembalian pendapatan Dana Alokasi Umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas;
 - 2) Pemerintah Pusat dengan menambah akun saldo Kas dan menambah Ekuitas.

15. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi Kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a. Yang menambah saldo Kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo Kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. Yang mengurangi saldo Kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu Pemerintah Pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo Kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. Yang menambah saldo Kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo Kas dan menambah akun Saldo Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Lebih.

- b. Yang mengurangi saldo Kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo Kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
16. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi Kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. yang menambah saldo Kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo Kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - b. yang mengurangi saldo Kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo Kas.
17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos Neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian Peralatan dan Mesin (kelompok Aset Tetap) dilaporkan sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan menambah akun Peralatan dan Mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

18. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
19. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

B. Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan didalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

laporan keuangan entitas.

4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK;
7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan:
 - a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

C. Perubahan Estimasi Akuntansi

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

D. Peristiwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada diluar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan didalam anggaran. Suatu



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

kejadian atau transaksi yang berada diluar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran Belanja Tak Terduga atau dana darurat, sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran Belanja Tak Terduga atau anggaran Belanja Lain-Lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada diluar kendali atau pengaruh entitas; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

BAB V

PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan TA 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap Laporan Keuangan dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud diatas agar penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan TA 2025 merupakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025.

Laporan Keuangan Kabupaten Simalungun TA 2025 terdiri dari:

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 5.3. Neraca;
- 5.4. Laporan Operasional (LO);
- 5.5. Laporan Arus Kas (LAK);
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 5.7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam TA 2025.

Tabel 53. Ikhtisar LRA TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Persentase	Realisasi TA 2024
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5=4:3	6
1	Pendapatan	2.905.652.117.725,32	2.802.579.318.946,24	96,45	2.646.959.901.844,96
2	Belanja	3.011.338.831.777,06	2.643.511.032.939,00	87,79	2.657.709.012.035,83
3	Surplus/Defisit (1-2)	(105.686.714.051,74)	159.068.286.007,24	(150,51)	(10.749.110.190,87)
4	Penerimaan Pembiayaan	113.186.714.051,74	113.186.714.051,45	100,00	130.935.824.242,61
5	Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00
6	Pembiayaan Neto (4-5)	105.686.714.051,74	105.686.714.051,45	100,00	123.935.824.242,61
7	Koreksi SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SILPA	0,00	264.755.000.058,69	0,00	113.186.714.051,74

Laporan realisasi anggaran Kabupaten Simalungun merupakan gabungan dari laporan realisasi anggaran SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) SKPD. Laporan realisasi anggaran Kabupaten Simalungun disajikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 44



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tahun 2024 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025. Saldo Awal atau LRA Tahun 2025 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun yang disajikan sebagai berikut:

LRA menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam TA 2025.

5.1.1 Pendapatan-LRA

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp2.905.652.117.725,32	Rp2.802.579.318.946,24	Rp2.646.959.901.844,96

Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Lampiran E.XXIII Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dinyatakan bahwa pendapatan daerah dikelompokkan menjadi: (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan telah dikonversi berdasarkan SAP, yaitu semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima BUD Kabupaten Simalungun telah disetorkan ke rekening kas daerah selama TA 2025. Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Simalungun TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp2.802.579.318.946,24 dan Rp2.646.959.901.844,96. Realisasi pendapatan tersebut termasuk penerimaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) yang diterima di rekening puskesmas dan digunakan langsung, penerimaan BLUD dari 3 (tiga) rumah sakit yang diterima di rekening rumah sakit dan dapat digunakan langsung, penerimaan dana desa dan digunakan langsung dan penerimaan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima di rekening sekolah dan langsung digunakan, dimana secara pencatatan harus dicatatkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan-LRA TA 2025 dan TA 2024, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 54. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA TA 2025 dan TA 2024

Uraian	AnggaranTA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	280.971.278.663,93	287.515.330.890,24	6.544.052.226,31	102,33	219.944.520.964,96
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	2.586.092.530.162,71	2.481.041.824.180,00	(105.050.705.982,71)	95,94	2.394.298.529.632,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	38.588.308.898,68	34.022.163.876,00	(4.566.145.022,68)	88,17	32.716.851.248,00
Jumlah	2.905.652.117.725,32	2.802.579.318.946,24	(103.072.798.779,08)	96,45	2.646.959.901.844,96

Realisasi Pendapatan tidak melampaui target anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebesar Rp2.802.579.318.946,24 atau 96,45% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.905.652.117.725,32. Apabila dibandingkan realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp2.802.579.318.946,24 dengan realisasi Pendapatan TA 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

sebesar Rp2.646.959.901.844,96 maka realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp155.619.417.101,28 atau 5,88%. Kontribusi PAD terhadap jumlah Pendapatan adalah sebesar 10,26%, kontribusi Pendapatan Transfer sebesar 88,53%, dan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap jumlah pendapatan adalah sebesar 1,21%. Hal itu memperlihatkan masih adanya ketergantungan terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Simalungun yaitu sebesar 88,53% dari keseluruhan pendapatan. Rincian pendapatan Per-SKPD TA 2025 disajikan pada **Lampiran I**.

Pendapatan Kabupaten Simalungun menurut kelompoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp280.971.278.663,93	Rp287.515.330.890,24	Rp219.944.520.964,96

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Simalungun Nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Pada TA 2025 secara umum realisasi pendapatan asli daerah tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA 2025 dan TA 2024, disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 55. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA
TA 2025 dan TA 2024**

Uraian	AnggaranTA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	205.495.195.692,00	205.995.136.182,00	499.940.490,00	100,24	151.774.759.464,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	6.038.440.966,00	4.343.283.279,00	(1.695.157.687,00)	71,93	3.151.160.835,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	22.984.918.125,00	22.984.918.125,00	0,00	100,00	20.272.583.191,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	46.452.723.880,93	54.191.993.304,24	7.739.269.423,31	116,66	44.746.017.474,96
Jumlah	280.971.278.663,93	287.515.330.890,24	6.544.052.226,31	102,33	219.944.520.964,96

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 adalah sebesar Rp287.515.330.890,24 atau 102,33% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp280.971.278.663,93. Apabila dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 sebesar Rp287.514.555.890,24 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 sebesar Rp219.944.520.964,96 maka realisasi pendapatan asli daerah pada TA 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp67.570.809.925,28 atau 30,72%.

Berdasarkan tabel diatas, Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap jumlah PAD adalah sebesar 71,65%, Pendapatan Retribusi Daerah terhadap jumlah PAD sebesar 1,51%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap jumlah PAD



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

sebesar 7,99%, dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap jumlah PAD sebesar 18,85%. Hal itu memperlihatkan Pendapatan Pajak Daerah paling berkontribusi atas keseluruhan PAD.

Rincian Pendapatan Asli Daerah Per- SKPD TA 2025, disajikan pada **Lampiran II**.

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Kabupaten Simalungun pada TA 2025 terdiri dari:

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp205.495.195.692,00	Rp205.995.136.182,00	Rp151.774.759.464,00

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 sebesar Rp205.995.136.182,00 atau 100,24% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp205.495.195.692,00. sehingga realisasi melebihi anggaran sebesar Rp499.940.490,00. Apabila dibandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 sebesar Rp205.995.136.182,00 dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp151.774.759.464,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp54.220.376.718,00 atau sebesar 35,72%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2025 dan TA 2024 terdiri dari:

Tabel 56. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pajak Reklame – LRA	1.800.000.000,00	2.114.938.877,00	314.938.877,00	117,50	1.851.823.322,00
Pajak Air Tanah – LRA	9.500.000.000,00	10.959.921.475,00	1.459.921.475,00	115,37	3.310.847.112,00
Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	3.000.000.000,00	3.323.234.634,00	323.234.634,00	110,77	8.188.242.531,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LRA	54.883.860.872,00	63.617.366.435,00	8.733.505.563,00	115,91	57.084.069.643,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	21.000.000.000,00	18.544.828.334,00	(2.455.171.666,00)	88,31	20.584.956.625,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - LRA	55.571.061.059,00	60.689.482.374,00	5.118.421.315,00	109,21	60.754.820.231,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	39.889.461.084,00	29.271.226.428,00	(10.618.234.656,00)	73,38	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) -LRA	19.849.812.677,00	17.473.137.625,00	(2.376.675.052,00)	88,03	0,00
Jumlah	205.495.195.692,00	205.995.136.182,00	499.940.490,00	100,24	151.774.759.464,00

Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2025 terdiri dari:

a. Pajak Reklame

Pajak Reklame dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yakni megatron, *billboard*, videotron, bando,



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

*neon box, neon sign, baliho, large electric display, sign board, papan/plat, video wall, dinamic wall, reklame berjalan pada kendaraan, spanduk, umbul umbul, vertikal banner, poster, brosur, plag chain, stiker, reklame udara/balon, reklame suara, reklame film/slide, peragam dalam ruangan dan luar ruangan. Realisasi Pajak Reklame TA 2025 sebesar Rp2.114.938.877,00 atau 117,50% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.800.000.000,00, sehingga realisasi melampaui anggaran sebesar Rp314.938.877,00. Apabila dibandingkan realisasi Pajak Reklame TA 2025 sebesar Rp2.114.938.877,00 dengan realisasi Pajak Reklame TA 2024 sebesar Rp1.851.823.322,00 maka realisasi Pajak Reklame pada TA 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp263.115.555,00 atau 14,21%.*

b. Pajak Air Tanah-LRA

Pajak Air Tanah dipungut atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, instansi pemerintah serta peribadatan. Realisasi Pajak Air Tanah TA 2025 sebesar Rp10.959.921.475,00 atau 115,37% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp9.500.000.000,00, sehingga realisasi melampaui anggaran sebesar Rp1.459.921.475,00. Apabila dibandingkan realisasi Pajak Air Tanah TA 2025 sebesar Rp10.959.921.475,00 dengan realisasi Pajak Air Tanah TA 2024 sebesar Rp3.310.847.112,00, maka Realisasi Pajak Air Tanah pada TA 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp7.649.074.363,00 atau 231,03%.

c. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengoperasian, pengolahan dan pengambilan sarang burung walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet TA 2025 sebesar Rp1.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00.

d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes, batu kerikil, kerikil pecah bangunan, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit (batu gunung), feldspar, garam batu, grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, maramer, nitrat, opsidien/obsidian, oker, pasir kuarsa, pasir, perlit, fosfat, tanah serap, tanah diatome, sirtu, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2025 sebesar Rp3.323.234.634,00 atau 110,77% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00, sehingga realisasi melampaui anggaran sebesar Rp323.234.634,00. Apabila dibandingkan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2025 sebesar Rp3.323.234.634,00 dengan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 sebesar Rp8.188.242.531,00, maka realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp4.865.007.897,00 atau 59,41%.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LRA

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2025 adalah sebesar Rp63.617.366.435,00 atau 115,91% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp54.883.860.872,00, sehingga realisasi melebihi anggaran sebesar Rp8.733.505.563,00. Apabila dibandingkan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2025 sebesar Rp63.617.366.435,00 dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2024 sebesar Rp57.084.069.643,00, maka realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp6.533.296.792,00 atau 11,45%. Peningkatan ini disebabkan oleh kesadaran WP semakin meningkat untuk membayar PBB karena sosialisasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan kepada wajib pajak. Intensifikasi pemungutan di lapangan oleh petugas dari kabupaten dan UPTD kecamatan.

f. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LRA

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp18.544.828.334,00 atau 88,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21.000.000.000,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp2.455.171.666,00. Apabila dibandingkan, realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp18.544.828.334,00 dengan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp20.584.956.625,00, maka realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.040.128.291,00 atau 9,91%.

g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2025 Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT, adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- 1) Makanan dan/atau Minuman;
- 2) Tenaga Listrik;
- 3) Jasa Perhotelan;
- 4) Jasa Parkir; dan
- 5) Jasa Kesenian dan Hiburan

Rincian anggaran dan realisasi PBJT TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 57. Rincian Anggaran dan Realisasi PBJT TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.500.000.000,00	6.166.752.253,00	1.666.752.253,00	137,04	4.501.716.436,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PBJT-Tenaga Listrik	39.000.000.000,00	40.850.173.559,00	1.850.173.559,00	104,74	43.016.543.679,00
PBJT-Jasa Perhotelan	11.500.000.000,00	13.063.490.426,00	1.563.490.426,00	113,60	12.630.620.069,00
PBJT-Jasa Parkir	271.061.059,00	344.655.137,00	73.594.078,00	127,15	287.247.638,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	300.000.000,00	264.410.999,00	(35.589.001,00)	88,14	318.692.409,00
Jumlah	55.571.061.059,00	60.689.482.374,00	5.118.421.315,00	109,21	60.754.820.231,00

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terdiri dari :

1. PBJT-Makanan dan/atau Minuman

PBJT-Makanan dan/atau Minuman yang merupakan perubahan dari nomenklatur Pajak Restoran sesuai dengan Undang-Undang HKPD merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah pajak atas fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, kedai kopi dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman TA 2025 adalah sebesar Rp6.166.752.253,00 atau 137,04% dari anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00 sehingga realisasi melebihi anggaran sebesar Rp1.666.752.253,00. Apabila dibandingkan realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman TA 2025 sebesar Rp6.166.752.253,00 dengan realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman TA 2024 sebesar Rp4.501.716.436,00, maka realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman mengalami *peningkatan* sebesar Rp1.665.035.817,00 atau 36,99%.

2. PBJT-Tenaga Listrik

PBJT-Tenaga Listrik adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir. Sebelumnya PBJT atas tenaga listrik disebut sebagai pajak penerangan jalan dalam Undang-Undang 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Realisasi PBJT-Tenaga Listrik TA 2025 adalah sebesar Rp40.850.173.559,00 atau 104,74% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp39.000.000.000,00. Apabila dibandingkan realisasi PBJT-Tenaga Listrik TA 2025 sebesar Rp40.850.173.559,00 dengan realisasi realisasi PBJT-Tenaga Listrik TA 2024 sebesar Rp43.016.543.679,00, maka realisasi PBJT-Tenaga Listrik mengalami *penurunan* sebesar Rp2.166.370.120,00 atau sebesar 5,04%.

3. PBJT- Jasa Perhotelan

PBJT- Jasa Perhotelan adalah pajak yang dikenakan atas jasa penyediaan akomodasi dengan beragam fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. Subjek PBJT- Jasa Perhotelan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Realisasi Pajak Hotel TA 2025 adalah sebesar Rp13.063.490.426,00 atau sebesar 113,60% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.500.000.000,00. Apabila dibandingkan realisasi PBJT- Jasa Perhotelan TA 2025 sebesar Rp13.063.490.426,00 dengan realisasi realisasi PBJT- Jasa Perhotelan TA



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

2024 sebesar Rp12.630.620.069,00, maka realisasi PBJT-Jasa Perhotelan mengalami **peningkatan** sebesar Rp432.870.357,00 atau sebesar 3,43%.

4. PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah pajak yang dibebankan kepada konsumen akhir yang menikmati layanan hiburan tertentu. Hal ini mencakup berbagai jenis hiburan, seperti pertunjukan seni, pameran, permainan ketangkasan, hingga rekreasi di lokasi tertentu. Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Subjek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sesuai undang-undang HKPD, telah terjadi pergantian nomenklatur pajak hiburan menjadi Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) – Jasa Kesenian dan Hiburan. Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan TA 2025 adalah sebesar Rp264.410.999,00 atau 88,14% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00, sehingga realisasi dibawah anggaran sebesar Rp35.589.001,00. Apabila dibandingkan realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan TA 2025 sebesar Rp264.410.999,00 dengan realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan TA 2024 sebesar Rp318.692.409,00, maka realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan mengalami **penurunan** sebesar Rp54.281.410,00 atau 17,03%.

5. PBJT- Jasa Parkir

PBJT Jasa Parkir adalah pajak yang dibayar oleh konsumen akhir untuk penggunaan layanan parkir, baik itu tempat parkir diluar badan jalan, valet, atau penitipan kendaraan. Subjek pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir atau konsumen. Sesuai undang-undang HKPD, telah terjadi pergantian nomenklatur Pajak Parkir menjadi Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) – Jasa Parkir. Realisasi PBJT Jasa Parkir TA 2025 adalah sebesar Rp344.655.137,00 atau 127,15% dari anggaran sebesar Rp271.061.059,00, sehingga realisasi melebihi anggaran sebesar Rp73.594.078,00. Apabila dibandingkan realisasi PBJT Jasa Parkir TA 2025 sebesar Rp344.655.137,00 dengan realisasi PBJT Jasa Parkir TA 2024 sebesar Rp287.247.638,00, maka realisasi PBJT Jasa Parkir mengalami **peningkatan** sebesar Rp57.407.499,00 atau 19,99%.

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Opsen PKB TA 2025 adalah sebesar Rp29.271.226.428,00 atau 73,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp39.889.461.084,00, sehingga realisasi dibawah anggaran sebesar Rp10.618.234.656,00.

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Opsen BBNKB TA 2025 adalah sebesar Rp17.473.137.625,00 atau 88,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.849.812.677,00, sehingga realisasi dibawah anggaran sebesar Rp2.376.675.052,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp6.038.440.966,00	Rp4.343.283.279,00	Rp3.151.160.835,00

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan realisasi TA 2024, disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 58. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
TA 2025 dan TA 2024**

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1. Retribusi Jasa umum	1.776.213.728,00	1.471.006.447,00	(305.207.281,00)	82,82	1.576.207.216,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	68.630.205,00	23.580.000,00	(45.050.205,00)	34,36	24.653.500,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	113.557.500,00	551.229.334,00	437.671.834,00	485,42	996.951.029,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	648.900.000,00	243.015.000,00	(405.885.000,00)	37,45	196.000.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	459.993.613,00	361.673.012,00	(98.320.601,00)	78,63	358.232.687,00
Retribusi Pelayanan Kebersihan	485.132.410,00	291.509.101,00	(193.623.309,00)	60,09	370.000,00
2. Retribusi Jasa Usaha	2.662.227.238,00	404.963.000,00	(2.257.264.238,00)	15,21	422.370.100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	386.125.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	242.351.333,00	0	(242.351.333,00)	0,00	31.097.100,00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	23.163.913,00	3.600.000,00	(19.563.913,00)	15,54	5.148.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2.000.000.000,00	8.918.000,00	(1.991.082.000,00)	0,45	0
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	396.711.992,00	389.025.000,00	(7.686.992,00)	98,06	0
3. Retribusi Perizinan Tertentu	1.600.000.000,00	2.467.313.832,00	867.313.832,00	154,21	1.152.583.519,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	1.194.942.840,00	194.942.840,00	119,49	1.152.583.519,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	600.000.000,00	1.272.370.992,00	672.370.992,00	212,06	0
Jumlah	6.038.440.966,00	4.343.283.279,00	(1.695.157.687,00)	71,93	3.151.160.835,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 adalah sebesar Rp4.343.283.279,00 atau 71,93% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp6.038.440.966,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp1.695.157.687,00. Apabila dibandingkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp4.343.283.279,00 dengan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp3.151.160.835,00, maka realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.192.122.444,00 atau sebesar 37,83%.

Kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap jumlah Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar 33,87%, Retribusi Jasa Usaha sebesar 9,32%, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 56,81%. Hal itu memperlihatkan Retribusi Jasa Umum paling berkontribusi atas keseluruhan Pendapatan Retribusi Daerah.

Uraian pendapatan retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum - LRA

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 sebesar Rp1.471.006.447,00 atau 82,82% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.776.213.728,00 sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp305.207.281,00. Apabila dibandingkan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 sebesar Rp1.471.006.447,00 dengan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 sebesar Rp1.576.207.216,00, maka realisasi Retribusi Jasa Umum pada TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp105.200.769,00 atau 6,67%. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 sebesar Rp23.580.000,00 atau 34,36% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp68.630.205,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp45.050.205,00. Apabila dibandingkan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 sebesar Rp23.580.000,00 dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 sebesar Rp24.653.500,00, maka realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.073.500,00 atau 4,35%. Retribusi Pelayanan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan.

1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelola oleh 22 kecamatan. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2025 sebesar Rp551.229.334,00 atau 485,42% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp113.557.500,00, sehingga realisasi berada diatas anggaran sebesar Rp437.671.834,00. Apabila dibandingkan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan TA 2025 sebesar Rp551.229.334,00 dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan TA 2024 sebesar Rp996.951.029,00, maka realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp445.721.695,00 atau 44,71%.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

1.3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2025 sebesar Rp243.015.000,00 atau 37,45% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp648.900.000,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp405.885.000,00. Apabila dibandingkan realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2025 sebesar Rp243.015.000,00 dengan realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada TA 2024 sebesar Rp Rp196.000.000,00, maka realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada TA 2025 mengalami **kenaikan** sebesar Rp47.015.000,00 atau 23,99%. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dikelola oleh Dinas Perhubungan.

1.4 Retribusi Pelayanan Pasar-LRA

Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan daerah atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional (pelataran, los, kios) yang dikelola oleh Pemerintah untuk pedagang. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 sebesar Rp361.673.012,00 atau 78,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp459.993.613,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp98.320.601,00. Apabila dibandingkan realisasi Retribusi Pasar TA 2025 sebesar Rp361.673.012,00 dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024 sebesar Rp358.232.687,00, maka realisasi 1.4 Retribusi Pelayanan Pasar mengalami **peningkatan** sebesar Rp3.440.325,00 atau 0,96%.

1.5 Retribusi Pelayanan Kebersihan-LRA

Retribusi Pelayanan Kebersihan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Pada TA 2025 terdapat realisasi retribusi pelayanan sampah sebesar Rp291.509.101,00 atau 60,09% dari anggaran sebesar Rp485.132.410,00. Apabila dibandingkan realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan Tahun 2025 sebesar Rp291.509.101,00 dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan Tahun 2024 sebesar Rp370.000,00, maka realisasi mengalami **peningkatan** sebesar Rp291.139.101,00 atau 78.686%. Terdapat perubahan kode rekening untuk Retribusi Pelayanan Persampahan TA 2025 yang pada TA 2024 berada pada kode rekening Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 sebesar Rp404.963.000,00 atau 15,21% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.662.227.238,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp2.257.264.238,00. Apabila dibandingkan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 sebesar Rp404.963.000,00 dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 sebesar Rp422.370.100,00, maka realisasi Retribusi Jasa Usaha pada TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp17.407.100,00 atau 4,12%. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri atas Retribusi Pemakaian Laboratorium dan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum. Pada TA 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi untuk



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Retribusi Pemakaian Laboratorium dan Retrubusi Pemakaian Kendaraan Bermotor. Sementara realisasi TA 2025 untuk Retribusi Pemakaian Laboratorium adalah sebesar Rp3.420.000,00. Apabila dibandingkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2025 sebesar Rp3.420.000,00 dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 sebesar Rp386.125.000,00, maka realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp382.705.000,00 atau 99,11%.

2.2 Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan dikelola oleh Dinas Pertanian. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp242.351.333,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp242.351.333,00.

2.3 Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pungutan daerah atas penggunaan fasilitas dan jasa di pelabuhan yang dikelola Pemerintah Daerah, termasuk jasa labuh, tambat, dermaga, serta naik turun penumpang/kendaraan. Realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan TA 2025 adalah sebesar Rp3.600.000,00 atau 15,54% dari anggaran sebesar Rp23.163.913,00. Apabila dibandingkan realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan TA 2025 sebesar Rp3.600.000,00 dengan realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan TA 2024 sebesar Rp5.148.000,00, maka realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.548.000,00 atau 30,07%.

2.4 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan sarana dan prasarana rekreasi, wisata, serta fasilitas olahraga oleh Pemerintah Daerah. Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga TA 2025 sebesar Rp8.918.000,00 atau 0,45% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00.

2.5 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pungutan atas jasa penggunaan, pemakaian atau sewa Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak mengganggu fungsi pelayanan, bertujuan untuk peningkatan PAD dan optimalisasi aset tanpa mengubah kepemilikan. Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025 sebesar Rp389.025.000,00 atau 98,06% dari anggaran sebesar Rp396.711.992,00.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 sebesar Rp2.467.313.832,00 atau 154,20% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.600.000.000,00, sehingga realisasi melebihi anggaran sebesar Rp867.313.832,00. Apabila dibandingkan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 sebesar Rp2.467.313.832,00 dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 sebesar Rp1.152.583.519,00, maka realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada TA 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp1.314.730.313,00 atau 114,07%. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

3.1 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2025 sebesar Rp1.194.942.840,00 atau 119,49% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00, Apabila dibandingkan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2025 sebesar Rp1.194.942.840,00 dengan realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2024 sebesar Rp1.152.583.519,00 maka Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp 42.359.321,00 atau 3,68%.

3.2 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah dana kompensasi atas perpanjangan pengesahan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) yang dibayarkan pemberi kerja ke Pemerintah Daerah. Berdasarkan PP No. 34 Tahun 2021, pungutan ini bertujuan meningkatkan pendapatandaerah dan mendanai pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal. Realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) TA 2025 adalah sebesar Rp1.272.370.992,00 atau 212,06% dari anggaran sebesar Rp600.000.000,00.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp22.984.918.125,00	Rp22.984.918.125,00	Rp20.272.583.191,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada PT Bank Sumut. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2025 sebesar Rp22.984.918.125,00 atau sebesar 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp22.984.918.125,00. Apabila dibandingkan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2025 sebesar Rp22.984.918.125,00 dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp20.272.583.191,00, maka Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp2.712.334.934,00 atau 13,38%.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp46.452.723.880,93	Rp54.191.993.304,24	Rp44.746.017.474,96



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025*

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Rincian anggaran dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan realisasi TA 2024, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 59. Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LRA TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	113.868.314,00	34.413.000,00	(79.455.314,00)	30,22	90.836.500,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.033.208.750,00	0,00	(1.033.208.750,00)	0,00	563.437.500,00
Jasa Giro	11.417.521.764,00	5.536.494.081,00	(5.881.027.683,00)	48,49	2.370.830.122,88
Pendapatan Bunga	9.367.100.283,00	31.309.004,00	(9.335.791.279,00)	0,33	5.954.473.570,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	94.265.940,00	5.406.142.493,05	5.311.876.553,05	5.734,99	8.609.763.633,08
Pendapatan Denda Pajak Daerah	8.000.000,00	582.732.799,00	574.732.799,00	7.284,16	160.577.290,00
Pendapatan dari Pengembalian	11.678.081.397,73	13.289.331.506,19	1.611.250.108,46	113,80	0,00
Pendapatan BLUD	12.740.677.432,20	29.311.570.421,00	16.570.892.988,80	230,06	26.996.098.859,00
Jumlah	46.452.723.880,93	54.191.993.304,24	7.739.269.423,31	116,66	44.746.017.474,96

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2025 adalah sebesar Rp54.191.993.304,24 atau 116,66% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp46.452.723.880,93, sehingga realisasi melebihi anggaran sebesar Rp7.739.269.423,31. Apabila dibandingkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2025 sebesar Rp54.191.993.304,24 dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2024 sebesar Rp44.746.017.474,96 maka realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2025 mengalami *peningkatan* sebesar Rp9.445.975.829,28 atau 21,11%. Rincian Lain-lain PAD yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan

Realisasi hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan merupakan hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya dan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain. Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2025 adalah sebesar Rp34.413.000,00 atau 30,22% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp113.868.314,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp79.455.314,00. Apabila dibandingkan realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2025 sebesar Rp34.413.000,00 dengan realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp90.836.500,00 maka realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp56.423.500,00 atau 62,12%.

Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya merupakan pendapatan dari hasil penjualan buah kelapa sawit pada Dinas Pertanian sebesar Rp34.413.000,00 atau 84,35% dari anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

yang telah ditetapkan sebesar Rp40.797.065,00 dan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain tidak memiliki realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp73.071.249,00.

b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2025 tidak memiliki realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.033.208.750,00.

c. Penerimaan Jasa Giro

Realisasi Pendapatan Jasa Giro TA 2025 sebesar Rp5.536.494.081,00 atau 48,49% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp11.417.521.764,00, sehingga realisasi dibawah anggaran sebesar Rp5.881.027.683,00. Apabila dibandingkan realisasi Pendapatan Jasa Giro TA 2025 sebesar Rp5.536.494.081,00 dengan realisasi Pendapatan Jasa Giro TA 2024 sebesar Rp2.370.830.122,88 maka realisasi Pendapatan Jasa Giro TA 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp3.165.663.958,12 atau 133,53%. Pendapatan Jasa Giro TA 2025 terdiri dari Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp5.341.114.158,00, Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp25.179.111,00, Jasa Giro Puskesmas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp142.676.894,00, dan Jasa Giro pada Rekening Dana BOS P sebesar Rp27.523.918,00. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS masih berada pada rekening sekolah.

d. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga merupakan bunga deposito tahun 2025. Realisasi Pendapatan Bunga TA 2025 sebesar Rp31.309.004,00 atau 0,33% dari anggaran sebesar Rp9.367.100.283,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp9.335.791.279,00. Apabila dibandingkan antara realisasi Pendapatan Bunga TA 2025 sebesar Rp31.309.004,00 dengan TA 2024 sebesar Rp5.954.473.570,00 maka realisasi Pendapatan Bunga TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp5.923.164.566,00 atau 99,47%. Pendapatan Bunga termasuk Remunerasi yang merupakan imbalan bunga atas penyimpanan dana milik pemerintah Kabupaten Simalungun pada fasilitas TDF (*Treasury Deposit Facility*) sebesar Rp12.307.516,00.

e. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain

Realisasi Komisi, Potongan atau Bentuk Lain TA 2025 sebesar Rp5.406.142.493,05 atau 5.734,99% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp94.265.940,00. Sedangkan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain TA 2024 adalah sebesar Rp8.609.763.633,08. Apabila dibandingkan antara realisasi Komisi, Potongan atau Bentuk Lain TA 2025 sebesar Rp5.406.142.493,05 dan realisasi Komisi, Potongan atau Bentuk Lain TA 2024 sebesar Rp8.609.763.633,08, maka realisasi Komisi, Potongan atau Bentuk Lain TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp3.203.621.140,03 atau 37,21%. Untuk rincian Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran III** dan pada tabel berikut:

Tabel 60. Rincian Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain TA 2025

No.	Uraian	Realisasi 2025
1	Lain-lain PAD yang sah lainnya	5.390.663.218,43
2	Dua Kali Setor	5.185.072,00
3	Lebih bayar	2.464.375,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Realisasi 2025
4	Sanksi	3.696.795,00
5	Pendapatan Pengembalian Lain-Lain di Rekening BOSP SD Tahun 2025	3.740.586,21
6	Pendapatan Pengembalian Lain-Lain di Rekening BOSP SMP Tahun 2025	392.446,41
Total		5.406.142.493,05

f. Pendapatan Denda Pajak

Realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2025 sebesar Rp582.732.800,00 atau sebesar 7.284,16% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp8.000.000,00, sehingga realisasi melebihi anggaran sebesar Rp574.732.800,00. Apabila dibandingkan antara realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2025 sebesar Rp582.732.800,00,00 dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2024 sebesar Rp160.577.290,00, maka realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2025 mengalami *kenaikan* sebesar Rp422.155.510,00 atau 262,90% terdiri dari:

Tabel 61. Rincian Realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Bertambah/ Berkurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan denda pajak hotel	1.000.000,00	4.345.273,00	3.345.273,00	434,53	116.664,00
Pendapatan denda pajak restoran	1.000.000,00	22.226.170,00	21.226.170,00	2.222,62	2.600.396,00
Pendapatan denda pajak hiburan	1.000.000,00	242.015,00	(757.985,00)	24,20	64.620,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.000.000,00	27.500,00	(972.500,00)	2,75	5.220,00
Pendapatan denda pajak Reklame	1.000.000,00	7.307.783,00	6.307.783,00	730,78	105.690,00
Pendapatan denda pajak air tanah	1.000.000,00	1.252.747,00	252.747,00	125,27	246.286,00
Pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan	1.000.000,00	4.180.912,00	3.180.912,00	418,09	1.514.657,00
Pendapatan denda pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.000.000,00	122.597.741,00	121.597.741,00	12.259,77	155.923.757,00
Pendapatan Denda Opsen PKB	0,00	420.481.846,00	420.481.846,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen BBNKB	0,00	70.812,00	70.812,00	0,00	0,00
Jumlah	8.000.000,00	582.732.799,00	574.732.799,00	7.284,16	160.577.290,00

g. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp13.289.331.506,19 atau 113,80% dari anggaran sebesar Rp11.678.081.397,73 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62. Rincian Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2025

Uraian	Realisasi TA 2025
	(Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	61.595.090,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	243.964.763,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Realisasi TA 2025
	(Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.898.565,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	624.979.612,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	12.128.817.217,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	227.076.259,19
Jumlah	13.289.331.506,19

h. Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2025 adalah sebesar Rp29.311.570.421,00 atau 230,06% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp12.740.677.432,20, sehingga realisasi melebihi anggaran sebesar Rp16.570.892.988,80. Apabila dibandingkan antara realisasi pendapatan BLUD TA 2025 sebesar Rp29.311.570.421,00 dengan realisasi pendapatan BLUD TA 2024 sebesar Rp26.996.098.859,00, maka realisasi pendapatan BLUD TA 2025 mengalami *peningkatan* sebesar Rp2.315.471.562,00 atau 8,58% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63. Rincian Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah TA 2025

URAIAN	RUMAH SAKIT UMUM PARAPAT	RUMAH SAKIT UMUM PERDAGANGAN	RUMAH SAKIT UMUM TN. RONDAHAIM	JUMLAH
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Pendapatan BLUD Periode Januari 2025	225.956.855,00	1.213.808.757,00	561.818.465,00	2.001.584.077,00
Pendapatan BLUD Periode Februari 2025	418.828.782,00	829.317.883,00	978.687.943,00	2.226.834.608,00
Pendapatan BLUD Periode Maret 2025	570.242.394,00	998.078.541,00	996.542.810,00	2.564.863.745,00
Pendapatan BLUD Periode April 2025	386.868.024,00	160.147.286,00	793.046.799,00	1.340.062.109,00
Pendapatan BLUD Periode Mei 2025	521.978.454,00	1.572.845.414,00	1.322.288.399,00	3.417.112.267,00
Pendapatan BLUD Periode Juni 2025	422.069.660,00	875.013.997,00	819.461.973,00	2.116.545.630,00
Pendapatan BLUD Periode Juli 2025	743.184.960,00	942.179.105,00	1.035.269.969,00	2.720.634.034,00
Pendapatan BLUD Periode Agustus 2025	97.436.755,00	967.247.720,00	203.901.179,00	1.268.585.654,00
Pendapatan BLUD Periode September 2025	495.519.682,00	2.428.224.477,00	772.576.426,00	3.696.320.585,00
Pendapatan BLUD Periode Oktober 2025	535.640.354,00	881.838.267,00	789.598.946,00	2.207.077.567,00
Pendapatan BLUD Periode November 2025	512.818.781,00	215.433.022,00	724.287.993,00	1.452.539.796,00
Pendapatan BLUD Periode Desember 2025	686.469.098,00	1.655.432.219,00	1.957.509.032,00	4.299.410.349,00
JUMLAH	5.617.013.799,00	12.739.566.688,00	10.954.989.934,00	29.311.570.421,00

Data pendapatan BLUD ini disajikan sesuai dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap 3 (Tiga) Rumah Sakit Umum Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LRA

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2025
Rp2.586.092.530.162,71	Rp2.481.041.824.180,00	Rp2.394.298.529.632,00

Pendapatan Transfer merupakan perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah, yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang bersumber dari pendapatan APBN dan APBD Provinsi. Pendapatan Transfer dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Transfer –LRA TA 2025 terdiri dari:(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA; (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan realisasi TA 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 64. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer-LRA TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	2.333.952.128.418,71	2.242.060.730.140,00	(91.891.398.278,71)	96,06	2.295.761.234.987,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	252.140.401.744,00	238.981.094.040,00	(13.159.307.704,00)	94,78	98.537.294.645,00
Jumlah	2.586.092.530.162,71	2.481.041.824.180,00	(105.050.705.982,71)	95,94	2.394.298.529.632,00

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Pendapatan Transfer secara keseluruhan belum mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi Transfer Pemerintah Pusat terhadap jumlah Pendapatan Transfer adalah sebesar 90,37%, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebesar 9,63%.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 adalah sebesar Rp2.481.041.824.180,00 atau 95,94% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.586.092.530.162,71, sehingga realisasi dibawah anggaran sebesar Rp105.050.705.982,71. Apabila dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 sebesar Rp2.481.041.824.180,00 dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp2.394.298.529.632,00, maka realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2025 mengalami **kenaikan** sebesar Rp86.743.294.548,00 atau 3,62%. Adapun rincian Pendapatan Transfer diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp2.333.952.128.418,71	Rp2.242.060.730.140,00	Rp2.295.761.234.987,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

pelaksanaan desentralisasi. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari (1) Dana Perimbangan dan (2) Dana Desa.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 adalah sebesar Rp2.242.060.730.140,00 atau 96,06% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.333.952.128.418,71, sehingga realisasi dibawah anggaran sebesar Rp91.891.398.278,71. Apabila dibandingkan realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp2.242.060.730.140,00 dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp2.295.761.234.987,00, maka realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp53.700.504.847,00 atau 2,34%. Rincian Laporan realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan TA 2025 disajikan pada **Lampiran IV**.

5.1.1.2.1.7 Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp80.142.451.000,00	Rp74.753.539.800,00	Rp77.997.860.510,00

Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 merupakan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang dialokasikan sesuai dengan alokasi tahun berjalan dan kurang bayar tahun sebelumnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 65. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	50.345.190.000,00	46.470.508.900,00	(3.874.681.100,00)	92,30	53.037.663.000,00
DBH PPh Pasal 21	18.115.864.000,00	15.657.621.800,00	(2.458.242.200,00)	86,43	19.300.136.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	163.086.000,00	911.327.100,00	748.241.100,00	558,80	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.118.180.000,00	1.118.188.000,00	8.000,00	100,00	949.149.510,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	12.184.000,00	11.156.000,00	(1.028.000,00)	91,56	1.090.308.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	125.626.000,00	131.760.000,00	6.134.000,00	104,88	112.583.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.938.460.000,00	4.127.156.000,00	188.696.000,00	104,79	2.058.816.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	168.370.000,00	169.302.000,00	932.000,00	100,55	375.394.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	0,00	100,00	1.073.811.000,00
DBH Sawit	5.321.686.000,00	5.321.686.000,00	0,00	100,00	0,00
Jumlah	80.142.451.000,00	74.753.539.800,00	(5.388.911.200,00)	93,28	77.997.860.510,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 sebesar Rp74.753.539.800,00 atau 93,28% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp80.142.451.000,00, sehingga realisasi berada dibawah pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.388.911.200,00. Apabila dibandingkan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 sebesar Rp74.753.539.800,00 dengan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 sebesar Rp77.997.860.510,00, maka Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp3.244.320.710,00 atau 4,16%.

Dari total realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 sebesar Rp74.753.539.800,00, terdapat penarikan Dana TDF oleh daerah sebesar Rp955.020.000,00 yang terdiri dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp759.257.000,00; DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp1.000,00; DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp6.134.000,00; Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum sebesar Rp 188.696.000,00; dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) kehutanan PSDH sebesar Rp932.000,00.

5.1.1.2.1.8 Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp1.491.714.477.000,00	Rp1.505.898.079.984,00	Rp1.334.875.047.531,00

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi pendapatan DAU TA 2025 adalah sebesar Rp1.505.898.079.984,00 atau 100,95 % dari anggaran sebesar Rp1.491.714.477.000,00. Realisasi DAU melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp14.183.602.984,00. Apabila dibandingkan realisasi Pendapatan DAU TA 2025 sebesar Rp1.505.898.079.984,00 dengan realisasi Pendapatan DAU TA 2024 sebesar Rp 1.334.875.047.531,00. maka pendapatan Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 mengalami **kenaikan** sebesar Rp171.023.032.453,00 atau 12,81%.

Tabel 66. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.229.679.273.000,00	1.266.590.396.800,00	36.911.123.800,00	103,00	1.025.442.924.000,00
DAU	1.229.679.273.000,00	1.266.590.396.800,00	36.911.123.800,00	103,00	1.025.442.924.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	262.035.204.000,00	239.307.683.184,00	(22.727.520.816,00)	91,33	309.432.123.531,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	0,00	100,00	5.400.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai	62.260.088.000,00	39.532.567.184,00	(22.727.520.816,00)	63,50	89.493.287.531,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	133.730.639.000,00	133.730.639.000,00	0,00	100,00	145.505.301.000,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	60.644.477.000,00	60.644.477.000,00	0,00	100,00	48.383.062.000,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650.473.000,00
Jumlah	1.491.714.477.000,00	1.505.898.079.984,00	14.183.602.984,00	100,95	1.334.875.047.531,00

5.1.1.2.1.9 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp429.334.682.418,71	Rp397.208.623.208,00	Rp539.219.472.946,00

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi Dana Alokasi Khusus-LRA TA 2025 sebesar Rp397.208.623.208,00 atau 92,52% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp429.334.682.418,71, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp32.126.059.210,71. Apabila dibandingkan realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2025 sebesar Rp397.208.623.208,00 dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp539.219.472.946,00, maka realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp142.010.849.738,00 atau 26,34%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 67. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAK FISIK	56.157.160.000,00	52.783.147.720,00	(3.374.012.280,00)	93,99	204.755.773.878,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	260.045.000,00	248.268.150,00	(11.776.850,00)	95,47	792.046.963,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	0,00	28.892.833.217,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	226.120.000,00	225.383.160,00	(736.840,00)	99,67	17.819.931.927,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	19.244.258.000,00	16.408.542.149,00	(2.835.715.851,00)	85,26	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.140.000.000,00	1.117.152.246,00	(22.847.754,00)	98,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	0,00	42.789.657.736,00
DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan	15.000.000.000,00	14.777.161.315,00	(222.838.685,00)	98,51	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	18.580.912.712,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275.806.983,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	61.114.188.791,00
DAK Reguler Bidang Air Minum	8.110.000.000,00	7.829.909.200,00	(280.090.800,00)	96,55	10.337.882.199,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	12.176.737.000,00	12.176.731.500,00	(5.500,00)	100,00	4.498.349.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan			0,00	0,00	10.410.306.000,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup			0,00	0,00	3.243.858.350,00
DAK NON FISIK	373.177.522.418,71	344.425.475.488,00	(28.752.046.930,71)	92,30	334.463.699.068,00
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.015.713.374,00	3.015.713.374,00	0,00	100,00	2.065.934.839,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	4.724.032.800,00	2.328.783.300,00	(2.395.249.500,00)	49,30	253.930.150,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	112.592.898.186,00	112.637.576.949,00	44.678.763,00	100,04	121.729.583.247,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.733.750.000,00	3.733.750.000,00	0,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	7.104.600.000,00	6.916.622.300,00	(187.977.700,00)	97,35	7.118.466.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	347.700.000,00	336.600.000,00	(11.100.000,00)	96,81	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	444.900.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.498.678.532,00	5.497.011.732,00	(1.666.800,00)	99,97	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	21.430.589.281,71	21.410.989.279,00	(19.600.002,71)	99,91	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	197.801.894.000,00	174.892.342.309,00	(22.909.551.691,00)	88,42	140.295.524.300,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	6.269.000.000,00	2.955.520.000,00	(3.313.480.000,00)	47,14	7.052.876.000,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	9.636.872.245,00	9.678.772.245,00	41.900.000,00	100,43	52.503.947.902,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.534.700,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	543.003.480,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	633.998.450,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	961.794.000,00	961.794.000,00	0,00	100,00	0,00
Jumlah	429.334.682.418,71	397.208.623.208,00	(32.126.059.210,71)	92,52	539.219.472.946,00

Rincian Pendapatan Dana BOS SD Negeri dan SMP Negeri Tahun 2025 disajikan pada Lampiran V dan Lampiran VI.

5.1.1.2.1.5 Dana Desa

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp332.760.518.000,00	Rp264.200.487.148,00	Rp343.668.854.000,00

Realisasi Pendapatan Dana Desa TA 2025 adalah sebesar Rp264.200.487.148,00 atau 79,39% dari anggaran sebesar Rp332.760.518.000,00. Apabila dibandingkan Realisasi Pendapatan Dana Desa TA 2025 sebesar Rp264.200.487.148,00 dan TA 2024 sebesar Rp343.668.854.000,00 maka terdapat **penurunan** sebesar Rp79.468.366.852,00 atau sebesar 23,12%. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 386 desa yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp252.140.401.744,00	Rp238.981.094.040,00	Rp98.537.294.645,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari bagi hasil pajak provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi yang objek pajaknya berada di kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang dialokasikan kepada kabupaten/kota serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 sebesar Rp238.981.094.040,00 atau 94,78% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp252.140.401.744,00. Apabila



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 sebesar Rp238.981.094.040,00 dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp98.537.294.645,00, maka realisasi TA 2025 mengalami **kenaikan** sebesar Rp140.443.799.395,00 atau 142,53%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 68. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah
TA 2025 dan TA 2024**

URAIAN	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	203.068.295.370,00	189.908.987.666,00	(13.159.307.704,00)	93,52	98.537.294.645,00
Bantuan Keuangan	49.072.106.374,00	49.072.106.374,00	0,00	100,00	0,00
Jumlah	252.140.401.744,00	238.981.094.040,00	(13.159.307.704,00)	94,78	98.537.294.645,00

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp203.068.295.370,00	Rp189.908.987.666,00	Rp98.537.294.645,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dibagi hasil kepada setiap pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan angka persentase tertentu.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2025 sebesar Rp189.908.987.666,00 atau 93,52% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp203.068.295.370,00. Apabila dibandingkan realisasi Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2025 sebesar Rp189.908.987.666,00 dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp98.537.294.645,00, maka realisasi TA 2025 mengalami **kenaikan** sebesar Rp91.371.693.021,00 atau 92,73%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 69. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak
TA 2025 dan TA 2024**

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	45.312.780.380,00	45.312.780.380,00	0,00	100,00	13.916.956.165,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.482.279.446,00	26.482.279.446,00	0,00	100,00	10.397.860.956,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	77.173.930.138,00	60.024.029.789,00	(17.149.900.349,00)	77,78	22.372.021.161,00
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	5.275.084.366,00	2.894.385.194,00	(2.380.699.172,00)	54,87	2.038.829.725,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	48.824.221.040,00	55.195.512.857,00	6.371.291.817,00	113,05	49.811.626.638,00
Jumlah	203.068.295.370,00	189.908.987.666,00	(13.159.307.704,00)	93,52	98.537.294.645,00

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp49.072.106.374,00	Rp49.072.106.374,00	Rp0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025*

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2025 sebesar Rp49.072.106.374,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp49.072.106.374,00. Apabila dibandingkan realisasi Bantuan Keuangan TA 2025 sebesar Rp49.072.106.374,00 dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00, maka realisasi TA 2025 mengalami **kenaikan** sebesar Rp49.072.106.374,00 atau 100%.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp38.588.308.898,68	Rp34.022.163.876,00	Rp32.716.851.248,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan lain-lain yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 sebesar Rp34.022.163.876,00 atau 88,17% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp38.588.308.898,68 sehingga berada dibawah anggaran sebesar Rp4.566.145.022,68. Apabila dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 sebesar Rp34.022.163.876,00 dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp32.716.851.248,00, maka realisasi TA 2025 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.305.312.628,00 atau 3,99%.

Tabel 70. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.588.308.898,68	34.022.163.876,00	(4.566.145.022,68)	88,17	32.716.851.248,00
Jumlah	38.588.308.898,68	34.022.163.876,00	(4.566.145.022,68)	88,17	32.716.851.248,00

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp38.588.308.898,68	Rp34.022.163.876,00	Rp32.716.851.248,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2025 adalah sebesar Rp34.022.163.876,00 atau 88,16% dari anggaran sebesar Rp38.588.308.898,68, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp4.566.145.022,68. Realisasi Pendapatan dana Kapitasi JKN TA 2025 berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP di 46 (empat puluh enam) Puskesmas dengan rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 71. Rincian Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA TA 2025

NO	Puskesmas	Pendapatan Dana Kapitasi Tahun 2025
1	Saribu Dolok	458.549.612,00
2	Pamatang Silimahuta	64.868.221,00
3	Tiga Runggu	744.525.425,00
4	Haranggaol	655.687.318,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	Puskesmas	Pendapatan Dana Kapitasi Tahun 2025
5	Sipintuagin	435.722.660,00
6	Sarimatondang	439.584.311,00
7	Pamatang Sidamanik	1.023.799.939,00
8	Parapat	785.138.752,00
9	Tanah Jawa	257.837.694,00
10	Marubun Jaya	142.096.957,00
11	Hatonduhan	1.082.648.981,00
12	Buntu Turunan	319.288.878,00
13	Tiga Dolok	805.423.170,00
14	Tiga Balata	702.510.972,00
15	Panei Tengah	649.467.943,00
16	Panombean Pane	901.637.359,00
17	Pamatang Raya	698.728.764,00
18	Bah Bolon	653.004.990,00
19	Saran Padang	534.079.802,00
20	Cingkes	665.476.335,00
21	Negeri Dolok	513.185.570,00
22	Sindar Raya	1.027.127.893,00
23	Tapian Dolok	783.781.068,00
24	Serbelawan	444.381.514,00
25	Batu Anam	317.773.668,00
26	Rambung Merah	609.850.331,00
27	Silau Malaha	1.507.770.168,00
28	Simpang Bah Jambi	1.905.986.460,00
29	Bandar Siantar	313.130.379,00
30	Gunung Maligas	712.553.681,00
31	Huta Bayu	515.890.749,00
32	Raja Maligas	650.200.192,00
33	Jawa Maraja	787.900.949,00
34	Pematang Bandar	197.693.940,00
35	Kerasaan	1.317.175.782,00
36	Bandar Huluan	512.476.129,00
37	Perdagangan	1.235.751.040,00
38	Marihat Bandar	49.844.448,00
39	Bandar Masilam	747.986.984,00
40	Bandar Tinggi	572.505.948,00
41	Bosar Maligas	1.834.800.274,00
42	Parbutaran	1.373.795.449,00
43	Ujung Padang	661.241.650,00
44	Sayur Matinggi	1.103.611.861,00
45	Bah Tonang	1.200.811.682,00
46	Sinasih	1.104.857.984,00
Jumlah		34.022.163.876,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.1.2 Belanja-LRA

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp3.011.338.831.777,06	Rp2.643.511.032.939,00	Rp2.657.709.012.035,83

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Pada laporan realisasi belanja tahun 2025 telah menggunakan kode rekening Permendagri 90 Tahun 2019 baik pada pencatatan saldo awal, sehingga terdapat perbedaan kategori untuk mencatat saldo awal. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 72. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja - LRA TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
BELANJA OPERASI	2.165.536.480.916,86	1.903.191.395.823,00	(262.345.085.093,86)	87,89	1.792.094.066.702,63
BELANJA MODAL	314.047.380.220,20	291.290.325.913,00	(22.757.054.307,20)	92,75	342.561.963.087,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	32.027.096.574,00	17.802.727.800,00	(14.224.368.774,00)	55,59	20.843.392.248,00
BELANJA TRANSFER	499.727.874.066,00	431.226.583.403,00	(68.501.290.663,00)	86,29	502.209.589.998,20
JUMLAH	3.011.338.831.777,06	2.643.511.032.939,00	(367.827.798.838,06)	87,79	2.657.709.012.035,83

Berdasarkan Belanja TA 2025 diatas diketahui bahwa persentase Belanja Operasi terhadap jumlah belanja adalah 71,99%, Belanja Modal sebesar 11,02 %, Belanja Tidak Terduga sebesar 0,67% dan Belanja Transfer 16,31%. Hal itu memperlihatkan belanja operasional Pemerintah Kabupaten Simalungun cukup tinggi yaitu sebesar 71,99% dari keseluruhan belanja.

Pada TA 2025 realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana realisasi belanja TA 2025 sebesar Rp2.643.511.032.939,00 atau 87,79% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.011.338.831.777,06, sehingga realisasi belanja berada dibawah anggaran sebesar Rp367.827.798.838,06. Apabila dibandingkan realisasi belanja TA 2025 sebesar Rp2.643.511.032.939,00 dengan realisasi belanja TA 2024 sebesar Rp2.657.709.012.035,83, maka realisasi belanja TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp14.197.979.096,83 atau 0,53%.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada **Lampiran VII**.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp2.165.536.480.916,86	Rp1.903.191.395.823,00	Rp1.792.094.066.702,63



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Belanja Operasi TA 2025 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Berdasarkan Belanja Operasi TA 2025 diatas diketahui bahwa persentase Belanja Pegawai atas Belanja Operasi sebesar 61,80%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 36,17%, Hibah sebesar 2,00%, dan Bantuan Sosial sebesar 0,03%. Hal itu memperlihatkan Belanja Pegawai paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Operasi. Rincian Belanja Operasi dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 73. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pegawai	1.356.639.921.836,17	1.176.138.593.451,00	(180.501.328.385,17)	86,69	964.985.141.154,00
Belanja Barang dan Jasa	768.534.251.580,69	688.336.827.754,00	(80.197.423.826,69)	89,56	725.004.496.544,63
Belanja Hibah	39.733.357.500,00	38.157.474.618,00	(1.575.882.882,00)	96,03	101.603.079.004,00
Belanja Bantuan Sosial	628.950.000,00	558.500.000,00	(70.450.000,00)	88,80	501.350.000,00
Jumlah	2.165.536.480.916,86	1.903.191.395.823,00	(262.345.085.093,86)	87,89	1.792.094.066.702,63

Pada TA 2025 realisasi Belanja Operasi tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp1.903.191.395.823,00 atau 87,89% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.165.536.480.916,86, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp262.345.085.093,86. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp1.903.191.395.823,00 dengan realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar Rp1.792.094.066.702,63, maka realisasi Belanja Operasi pada TA 2025 mengalami *peningkatan* sebesar Rp111.097.329.120,37 atau 6,20%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Per SKPD TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada **Lampiran VIII**.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp1.356.639.921.836,17	Rp1.176.138.593.451,00	Rp964.985.141.154,00

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Belanja Pegawai TA 2025 diketahui bahwa Belanja Gaji dan Tunjangan atas Belanja Pegawai adalah 71,02%, Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar 26,52%, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar 2,37%, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar 0,02%, Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH sebesar 0,08%. Hal itu memperlihatkan Gaji dan Tunjangan ASN paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Pegawai. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 74. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	959.595.604.250,83	835.311.714.113,00	(124.283.890.137,83)	87,05	683.626.023.589,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	366.917.062.167,34	311.872.898.517,00	(55.044.163.650,34)	85,00	255.849.166.017,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.885.321.181,00	27.835.141.057,00	(1.050.180.124,00)	96,36	24.616.543.606,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	248.814.237,00	217.783.764,00	(31.030.473,00)	87,53	172.127.942,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	901.056.000,00	(92.064.000,00)	90,73	721.280.000,00
Jumlah	1.356.639.921.836,17	1.176.138.593.451,00	(180.501.328.385,17)	86,69	964.985.141.154,00

Pada TA 2025 realisasi Belanja Pegawai tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp1.176.138.593.451,00 atau 86,69% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.356.639.921.836,17, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp180.501.328.385,17. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp1.176.138.593.451,00 dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp964.985.141.154,00, maka realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami *peningkatan* sebesar Rp211.153.452.297,00 atau sebesar 21,88%.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per SKPD TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada **Lampiran IX**.

Belanja Pegawai TA 2025 terdiri dari:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan adalah belanja untuk pengeluaran atas pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, serta Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian ASN. Rincian anggaran dan realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 75. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
TA 2025 dan TA 2024**

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Gaji Pokok ASN	715.175.995.965,00	642.631.674.136,00	(72.544.321.829,00)	89,86	521.112.995.546,00
Belanja Gaji Pokok PNS	397.505.636.062,00	372.286.807.880,00	(25.218.828.182,00)	93,66	395.418.456.608,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	317.670.359.903,00	270.344.866.256,00	(47.325.493.647,00)	85,10	125.694.538.938,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	66.413.484.616,00	51.056.772.762,00	(15.356.711.854,00)	76,88	47.128.438.746,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	36.802.098.247,00	34.729.193.216,00	(2.072.905.031,00)	94,37	36.317.497.406,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	29.611.386.369,00	16.327.579.546,00	(13.283.806.823,00)	55,14	10.810.941.340,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.457.709.574,00	8.724.349.430,00	(733.360.144,00)	92,25	9.138.302.978,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.457.709.574,00	8.724.349.430,00	(733.360.144,00)	92,25	9.138.302.978,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	56.238.307.886,00	49.080.963.626,00	(7.157.344.260,00)	87,27	38.953.835.200,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	27.985.004.733,00	24.781.363.033,00	(3.203.641.700,00)	88,55	26.448.580.200,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	28.253.303.153,00	24.299.600.593,00	(3.953.702.560,00)	86,01	12.505.255.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.022.649.274,00	5.175.132.054,00	(1.847.517.220,00)	73,69	3.377.347.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.634.779.609,00	3.790.288.850,00	(844.490.759,00)	81,78	3.304.922.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.387.869.665,00	1.384.843.204,00	(1.003.026.461,00)	57,99	72.425.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	40.323.272.521,00	33.822.407.480,00	(6.500.865.041,00)	83,88	26.689.944.257,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	19.809.295.245,00	18.024.834.432,00	(1.784.460.813,00)	90,99	19.132.774.540,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	20.513.977.276,00	15.797.573.048,00	(4.716.404.228,00)	77,01	7.557.169.717,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.631.201.185,00	1.444.306.160,00	(186.895.025,00)	88,54	1.266.688.951,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.631.201.185,00	1.444.306.160,00	(186.895.025,00)	88,54	1.266.688.951,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	38.512.239,50	7.797.757,00	(30.714.482,50)	20,25	6.556.069,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.622.720,50	4.675.157,00	(28.947.563,50)	13,90	5.029.907,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.889.519,00	3.122.600,00	(1.766.919,00)	63,86	1.526.162,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	50.181.162.715,00	38.038.062.337,00	(12.143.100.378,00)	75,80	31.582.291.094,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	31.806.972.239,00	23.661.818.356,00	(8.145.153.883,00)	74,39	26.009.256.772,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	18.374.190.476,00	14.376.243.981,00	(3.997.946.495,00)	78,24	5.573.034.322,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.762.581.512,00	1.334.709.591,00	(427.871.921,00)	75,72	1.115.261.446,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	999.605.050,00	766.491.666,00	(233.113.384,00)	76,68	833.109.561,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	762.976.462,00	568.217.925,00	(194.758.537,00)	74,47	282.151.885,00
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	5.223.864.654,00	3.995.538.780,00	(1.228.325.874,00)	76,49	3.254.362.302,00
Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.936.321.210,00	2.291.042.229,00	(645.278.981,00)	78,02	2.410.362.922,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	2.287.543.444,00	1.704.496.551,00	(583.046.893,00)	74,51	843.999.380,00
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6.126.862.109,33	0,00	(6.126.862.109,33)	0,00	0,00
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6.126.862.109,33	0,00	(6.126.862.109,33)	0,00	0,00
Jumlah	959.595.604.250,83	835.311.714.113,00	(124.283.890.137,83)	87,05	683.626.023.589,00

Pada TA 2025 realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2025 sebesar Rp835.311.714.113,00 atau 87,05% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp959.595.604.250,83, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp124.283.890.137,83. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2025 sebesar Rp835.311.714.113,00 dengan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2024 sebesar Rp683.626.023.589,00, maka realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan pada TA 2025 mengalami *peningkatan* sebesar Rp151.685.690.524,00 atau sebesar 22,19%.

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran tambahan penghasilan kerja berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja serta kelangkaan profesi ASN. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 76. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN
TA 2025 dan TA 2024**

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	114.578.666.191,34	91.127.025.763,00	(23.451.640.428,34)	79,53	94.994.114.536,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	252.338.395.976,00	220.745.872.754,00	(31.592.523.222,00)	87,48	160.855.051.481,00
Jumlah	366.917.062.167,34	311.872.898.517,00	(55.044.163.650,34)	85,00	255.849.166.017,00

Pada TA 2025 realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 sebesar Rp311.872.898.517,00 atau 85,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp366.917.062.167,34, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp55.044.163.650,34. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 sebesar Rp311.872.898.517,00 dengan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 sebesar Rp255.849.166.017,00, maka realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 mengalami *peningkatan* sebesar Rp56.023.732.500,00 atau sebesar 21,90%.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN adalah komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan kepada ASN (PNS/PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penghargaan atas beban tugas yang melampaui batas normal, diukur berdasarkan kelas jabatan dan kehadiran, guna meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pegawai.

Pada TA 2025 realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana realisasi TA 2025 sebesar Rp91.127.025.763,00 atau 79,53% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp114.578.666.191,34, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp23.451.640.428,34. Apabila dibandingkan realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS TA 2025 sebesar Rp91.127.025.763,00 dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp94.994.114.536,00, maka realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp3.867.088.773,00 atau sebesar 4,07%.

b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk Pembayaran Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru PNSD, Belanja Pelayanan Kesehatan bagi ASN dan Belanja Honorarium. Rincian anggaran dan realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 77. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	90.000.000,00	86.849.200,00	(3.150.800,00)	96,50	79.999.999,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	475.363.098,00	460.418.431,00	(14.944.667,00)	96,86	156.966.447,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00	144.173.175,00	(5.826.825,00)	96,12	204.999.958,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.745.144.783,00	2.661.036.489,00	(84.108.294,00)	96,94	2.178.828.198,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.075.038.136,00	762.141.843,00	(312.896.293,00)	70,89	835.210.740,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.401.930.426,00	2.399.801.327,00	(2.129.099,00)	99,91	2.558.254.039,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsean Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.265.236.527,00	0,00	(1.265.236.527,00)	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsean Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	823.780.406,00	536.473.380,00	(287.307.026,00)	65,12	0,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	229.867.382.200,00	206.957.690.909,00	(22.909.691.291,00)	90,03	151.388.765.500,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.784.769.400,00	16.018.000,00	(1.768.751.400,00)	0,90	168.609.600,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	11.659.751.000,00	6.721.270.000,00	(4.938.481.000,00)	57,65	2.398.750.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	55.277.000,00
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	829.390.000,00
Jumlah	252.338.395.976,00	220.745.872.754,00	(31.592.523.222,00)	87,48	160.855.051.481,00

Pada TA 2025 realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana realisasi TA 2025 sebesar Rp220.745.872.754,00 atau 87,48% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp252.338.395.976,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp31.592.523.222,00. Apabila dibandingkan realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 sebesar Rp220.745.872.754,00 dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp160.855.051.481,00, maka realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 mengalami *peningkatan* sebesar Rp59.890.821.273,00 atau sebesar 37,23%.

3. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran Belanja Uang Representasi dan Tunjangan DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 78. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
TA 2025 dan TA 2024**

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.112.685.000,00	(1.575.000,00)	99,86	1.102.605.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.408.400,00	95.432.400,00	(59.976.000,00)	61,41	91.654.500,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	202.776.000,00	115.582.320,00	(87.193.680,00)	57,00	114.568.440,00
Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.403.000,00	(105.000,00)	99,89	94.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.613.393.250,00	(2.283.750,00)	99,86	1.598.777.250,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	157.670.100,00	133.919.100,00	(23.751.000,00)	84,94	108.950.100,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD	66.868.200,00	25.715.025,00	(41.153.175,00)	38,46	14.768.250,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00	100,00	6.247.500.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.470.000.000,00	1.425.900.000,00	(44.100.000,00)	97,00	525.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	536.961.528,00	524.522,00	(536.437.006,00)	0,10	141.318,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.235.151.953,00	5.008.130.440,00	(227.021.513,00)	95,66	5.033.925.748,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.395.040.000,00	9.388.456.000,00	(6.584.000,00)	99,93	9.295.653.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	388.500.000,00
Jumlah	28.885.321.181,00	27.835.141.057,00	(1.050.180.124,00)	96,36	24.616.543.606,00

Pada TA 2025 realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana realisasi TA 2025 sebesar Rp27.835.141.057,00 atau 96,36% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp28.885.321.181,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp1.050.180.124,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 sebesar Rp27.835.141.057,00 dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp24.616.543.606,00, maka realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 mengalami *peningkatan* sebesar Rp3.218.597.451,00 atau sebesar 13,07%.

4. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Rincian Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 79. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
TA 2024 dan TA 2023**

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	126.165.000,00	101.400.000,00	(24.765.000,00)	80,37	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.801.900,00	6.108.000,00	(693.900,00)	89,80	6.636.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	(2.457.000,00)	97,56	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.235.362,00	5.286.660,00	(948.702,00)	84,79	6.083.280,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.695.546,00	808.044,00	(887.502,00)	47,66	608.422,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	102.009,00	1.860,00	(100.149,00)	1,82	1.840,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.540.156,00	5.449.920,00	(1.090.236,00)	83,33	5.469.120,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00	112.320,00	(21.996,00)	83,62	112.320,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00	336.960,00	(65.988,00)	83,62	336.960,00
Jumlah	248.814.237,00	217.783.764,00	(31.030.473,00)	87,53	172.127.942,00

Pada TA 2025 realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana realisasi TA 2025 sebesar Rp217.783.764,00 atau 87,53% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp248.814.237,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp31.030.473,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2025 sebesar Rp217.783.764,00 dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp172.127.942,00, maka realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2025 mengalami *peningkatan* sebesar Rp45.655.822,00 atau sebesar 26,52%.

5. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH adalah pengeluaran untuk Dana Operasional Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH untuk TA 2025 dan TA 2024, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 80. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	301.056.000,00	(92.064.000,00)	76,58	161.280.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	560.000.000,00
Jumlah	993.120.000,00	901.056.000,00	(92.064.000,00)	90,73	721.280.000,00

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2025 sebesar Rp901.056.000,00 atau 90,73% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp993.120.000,00, sehingga realisasi dibawah anggaran sebesar Rp92.064.000,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2025 sebesar Rp901.056.000,00 dengan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2024 sebesar Rp721.280.000,00, maka realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH pada TA 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp179.776.000,00 atau sebesar 24,92%.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp768.534.251.580,69	Rp688.336.827.754,00	Rp725.004.496.544,63

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Belanja Barang dan Jasa TA 2025, empat kegiatan yang paling besar pengaruhnya atas Belanja Barang dan Jasa adalah Belanja Barang sebesar 26,46%, Belanja Jasa sebesar 41,16%, Belanja Pemeliharaan sebesar 8,92%, Belanja Perjalanan Dinas sebesar 9,93%, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar 0,79%, Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar 8,42% dan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar 4,32%. Persentase yang ada memperlihatkan Belanja Barang merupakan belanja yang paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Barang dan Jasa.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 81. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Barang	206.653.985.936,57	182.108.045.819,00	(24.545.940.117,57)	88,12	200.996.920.762,00
Belanja Jasa	335.273.318.332,00	283.332.131.522,00	(51.941.186.810,00)	84,51	266.667.871.533,63
Belanja Pemeliharaan	67.479.520.639,20	61.392.751.261,00	(6.086.769.378,20)	90,98	73.809.472.587,00
Belanja Perjalanan Dinas	78.670.781.008,92	68.381.644.525,00	(10.289.136.483,92)	86,92	77.883.878.489,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.314.777.380,00	5.422.401.073,00	(892.376.307,00)	85,87	8.251.756.623,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	59.641.868.284,00	57.943.017.320,00	(1.698.850.964,00)	97,15	69.981.035.601,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.500.000.000,00	29.756.836.234,00	15.256.836.234,00	205,22	27.413.560.949,00
Jumlah	768.534.251.580,69	688.336.827.754,00	(80.197.423.826,69)	89,56	725.004.496.544,63

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp688.336.827.754,00 atau 89,56% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp768.534.251.580,69, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp80.197.423.826,69. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp688.336.827.754,00 dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp725.004.496.544,63, maka realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp36.667.668.790,63 atau sebesar 5,06%.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Adapun Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan Persediaan adalah sebesar Rp269.807.899.373,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 82. Rincian Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan Persediaan TA 2025

No.	Nama Rekening	Realisasi TA 2025 (Rp)
1	Belanja Barang	182.108.045.819,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOS	57.943.017.320,00
3	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.756.836.234,00
	Jumlah	269.807.899.373,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada **Lampiran X**.

Belanja Barang dan Jasa TA 2025 terdiri dari:

a. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 sebesar Rp182.108.045.819,00 atau 88,12% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp206.653.985.936,57, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp24.545.940.117,57. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 83. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	206.646.818.436,57	182.101.179.617,00	(24.545.638.819,57)	88,12	200.974.191.662,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	999.000,00	999.000,00	0,00	100,00	0,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.168.500,00	5.867.202,00	(301.298,00)	95,12	22.729.100,00
Jumlah	206.653.985.936,57	182.108.045.819,00	(24.545.940.117,57)	88,12	200.996.920.762,00

Apabila dibandingkan realisasi Belanja Barang TA 2025 sebesar Rp182.108.045.819,00 dengan realisasi Belanja Barang TA 2024 sebesar Rp200.996.920.762,00, maka realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp18.888.874.943,00 atau 9,40%.

Belanja Barang TA 2025 terdiri dari:

a. Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Barang Pakai Habis adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 84. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	821.819.700,00	754.355.640,00	(67.464.060,00)	91,79	1.293.863.057,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.033.210.942,20	1.777.122.159,00	(256.088.783,20)	87,40	1.011.841.420,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.590.159.400,00	949.038.694,00	(641.120.706,00)	59,68	933.118.815,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.985.537.400,00	1.749.551.200,00	(235.986.200,00)	88,11	2.376.983.500,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	550.800,00	550.000,00	(800,00)	99,85	2.203.200,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	163.930.000,00	148.172.640,00	(15.757.360,00)	90,39	121.585.810,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	469.713.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	310.121.700,00	140.362.000,00	(169.759.700,00)	45,26	193.039.400,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	889.346.701,00	763.287.104,00	(126.059.597,00)	85,83	1.177.107.981,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	274.350.265,00	265.286.850,00	(9.063.415,00)	96,70	1.549.919.841,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999.911,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	25.741.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.127.997.768,00	2.735.847.618,00	(392.150.150,00)	87,46	3.188.826.368,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.900.350.650,00	2.551.215.589,00	(349.135.061,00)	87,96	2.371.059.531,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.555.193.464,43	8.672.883.269,00	(1.882.310.195,43)	82,17	10.052.434.859,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	97.361.200,00	72.814.460,00	(24.546.740,00)	74,79	126.019.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.495.161.814,00	2.050.432.411,00	(444.729.403,00)	82,18	2.763.762.650,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.934.169.429,00	1.696.107.576,00	(238.061.853,00)	87,69	1.654.794.709,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.091.075.318,00	957.246.572,00	(133.828.746,00)	87,73	762.999.656,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	326.733.500,00	258.399.958,00	(68.333.542,00)	79,09	606.899.323,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.957.619.800,00	1.753.108.800,00	(204.511.000,00)	89,55	1.740.427.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.186.654.545,80	1.565.697.306,00	(620.957.239,80)	71,60	2.710.545.519,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	15.615.376.325,00	11.581.835.788,00	(4.033.540.537,00)	74,17	6.561.021.949,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.830.764.825,00	7.637.627.724,00	(2.193.137.101,00)	77,69	3.784.434.603,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	52.730.762.560,00	50.336.924.640,00	(2.393.837.920,00)	95,46	49.243.882.501,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	54.656.228.728,99	52.578.021.375,00	(2.078.207.353,99)	96,20	69.700.154.048,00
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	498.823.600,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.381.811.385,00	3.872.424.544,00	(509.386.841,00)	88,37	4.037.933.681,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	167.622.000,00	167.622.000,00	0,00	100,00	131.370.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.216.670.859,15	15.745.217.782,00	(3.471.453.077,15)	81,94	17.090.669.664,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.420.624.100,00	2.162.867.800,00	(1.257.756.300,00)	63,23	4.731.541.400,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.724.624.956,00	4.023.186.675,00	(1.701.438.281,00)	70,28	2.065.631.875,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.062.084.300,00	3.399.670.309,00	(662.413.991,00)	83,69	5.034.706.691,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	172.588.100,00	167.965.000,00	(4.623.100,00)	97,32	174.992.100,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	700.000.000,00	496.725.000,00	(203.275.000,00)	70,96	572.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	166.412.500,00	131.234.748,00	(35.177.752,00)	78,86	423.772.400,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	434.319.000,00	328.213.059,00	(106.105.941,00)	75,57	894.973.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	213.500.000,00	212.902.991,00	(597.009,00)	99,72	203.550.000,00
Belanja Pakaian Teknik	3.892.000,00	0,00	(3.892.000,00)	0,00	0,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pakaian Adat Daerah	377.732.400,00	366.833.340,00	(10.899.060,00)	97,11	245.977.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.100.000,00	12.066.996,00	(33.004,00)	99,73	17.120.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	18.360.000,00	18.360.000,00	0,00	100,00	94.554.000,00
Jumlah	206.646.818.436,57	182.101.179.617,00	(24.545.638.819,57)	88,12	200.974.191.662,00

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2025 tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2025 sebesar Rp182.101.179.617,00 atau 88,12% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp206.646.818.436,57, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp24.545.638.819,57. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2025 sebesar Rp182.101.179.617,00 dengan realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2024 sebesar Rp200.974.191.662,00, maka realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp18.873.012.045,00 atau 9,39%.

b. Belanja Barang Tak Habis Pakai

Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2025 terealisasi sebesar Rp999.000,00 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja Barang Tak Habis Pakai ini merupakan Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2025 sebesar Rp5.867.202,00 atau 95,12% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp6.168.500,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp301.298,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2025 dan realisasi TA 2024, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 85. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.168.500,00	5.867.202,00	(301.298,00)	95,12	1.140.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	21.589.100,00
Jumlah	6.168.500,00	5.867.202,00	(301.298,00)	95,12	22.729.100,00

b. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa TA 2025 sebesar Rp283.332.131.522,00 atau 84,51% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp335.273.318.332,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp51.941.186.810,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa TA 2025 dan realisasi TA 2024, disajikan pada tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 86. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Jasa Kantor	175.059.611.375,00	144.056.398.745,00	(31.003.212.630,00)	82,29	149.137.823.481,63
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	111.367.101.199,00	101.538.821.761,00	(9.828.279.438,00)	91,17	61.393.583.237,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.804.562.710,00	7.163.410.450,00	(2.641.152.260,00)	73,06	13.820.405.917,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	941.700.000,00	651.900.000,00	(289.800.000,00)	69,23	843.391.500,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	16.620.888.048,00	14.766.223.081,00	(1.854.664.967,00)	88,84	17.410.685.332,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	566.430.000,00	468.958.000,00	(97.472.000,00)	82,79	2.408.735.653,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	284.944.000,00	274.725.000,00	(10.219.000,00)	96,41	192.204.300,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	217.000.000,00	149.960.000,00	(67.040.000,00)	69,11	218.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.396.081.000,00	14.246.734.485,00	(6.149.346.515,00)	69,85	21.243.042.113,00
Jumlah	335.273.318.332,00	283.332.131.522,00	(51.941.186.810,00)	84,51	266.667.871.533,63

Apabila dibandingkan realisasi Belanja Jasa TA 2025 sebesar Rp283.332.131.522,00 dengan realisasi Belanja Jasa TA 2024 sebesar Rp266.667.871.533,63 maka realisasi Belanja Jasa TA 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp16.664.259.988,37 atau 6,25%.

Belanja Jasa terdiri dari:

a. Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2025 sebesar Rp144.056.398.745,00 atau 82,29% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp175.059.611.375,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp31.003.212.630,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2025 sebesar Rp144.056.398.745,00 dengan realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2024 sebesar Rp149.137.823.481,63 maka realisasi Belanja Jasa Kantor pada TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp5.081.424.736,63 atau 3,41%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2025 dan realisasi TA 2024, disajikan pada tabel dibawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 87 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.469.850.000,00	2.191.622.500,00	(2.278.227.500,00)	49,03	3.330.655.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	836.450.000,00	612.100.000,00	(224.350.000,00)	73,18	3.110.170.000,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	266.200.000,00	183.800.000,00	(82.400.000,00)	69,05	997.600.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.808.160.000,00	3.887.970.000,00	(920.190.000,00)	80,86	4.900.370.000,00
Honorarium Rohaniwan	7.600.000,00	4.800.000,00	(2.800.000,00)	63,16	2.000.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	150.000.000,00	147.500.000,00	(2.500.000,00)	98,33	180.000.000,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	120.800.000,00	108.000.000,00	(12.800.000,00)	89,40	76.800.000,00
Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	404.000.000,00	354.000.000,00	(50.000.000,00)	87,62	0,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	541.200.000,00	498.900.000,00	(42.300.000,00)	92,18	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.080.000.000,00	874.800.000,00	(205.200.000,00)	81,00	581.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	45.706.988.000,00	39.184.842.517,00	(6.522.145.483,00)	85,73	35.881.353.293,63
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	416.210.000,00	324.533.084,00	(91.676.916,00)	77,97	238.010.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	115.531.020,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	75.000.000,00	900.000,00	(74.100.000,00)	1,20	110.188.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	845.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	966.358.000,00	871.380.000,00	(94.978.000,00)	90,17	8.320.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	77.028.840,00	46.217.304,00	(30.811.536,00)	60,00	31.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	34.338.717.424,00	24.985.780.400,00	(9.352.937.024,00)	72,76	41.729.338.306,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.949.624.000,00	1.703.348.000,00	(246.276.000,00)	87,37	1.324.150.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.129.308.420,00	7.041.718.574,00	(87.589.846,00)	98,77	3.260.883.700,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	102.500.000,00	61.850.000,00	(40.650.000,00)	60,34	106.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	606.432.870,00	429.662.054,00	(176.770.816,00)	70,85	158.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	289.908.792,00	212.000.000,00	(77.908.792,00)	73,13	360.000.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.206.903.384,00	1.542.952.324,00	(663.951.060,00)	69,91	2.240.114.290,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	334.151.970,00	315.235.970,00	(18.916.000,00)	94,34	122.941.050,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	46.992.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	943.820.000,00	779.130.000,00	(164.690.000,00)	82,55	418.511.100,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	788.250.000,00	518.850.000,00	(269.400.000,00)	65,82	1.707.092.800,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	320.000.000,00	297.650.000,00	(22.350.000,00)	93,02	660.455.000,00
Belanja Jasa Kalibrasi	181.826.000,00	159.897.267,00	(21.928.733,00)	87,94	454.996.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366.550,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.592.426.200,00	3.420.587.009,00	(171.839.191,00)	95,22	4.045.314.808,00
Belanja Tagihan Telepon	88.007.147,00	0,00	(88.007.147,00)	0,00	129.701.057,00
Belanja Tagihan Air	1.041.191.664,00	354.293.194,00	(686.898.470,00)	34,03	442.103.755,00
Belanja Tagihan Listrik	42.643.570.732,00	39.251.703.779,00	(3.391.866.953,00)	92,05	29.517.446.689,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	630.093.900,00	558.809.500,00	(71.284.400,00)	88,69	596.520.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.289.083.128,00	6.177.212.163,00	(2.111.870.965,00)	74,52	5.629.724.299,00
Belanja Paket/Pengiriman	23.670.000,00	5.567.500,00	(18.102.500,00)	23,52	648.000,00
Belanja Penambahan Daya	93.564.000,00	63.104.375,00	(30.459.625,00)	67,45	15.594.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	898.870.000,00	255.610.212,00	(643.259.788,00)	28,44	261.174.467,00
Belanja Lembur	7.553.846.904,00	6.164.813.017,00	(1.389.033.887,00)	81,61	5.283.097.200,00
Belanja Medical Check Up	330.000.000,00	147.628.002,00	(182.371.998,00)	44,74	153.510.597,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	229.280.000,00	147.780.000,00	(81.500.000,00)	64,45	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	418.160.000,00	159.290.000,00	(258.870.000,00)	38,09	0,00
Jumlah	175.059.611.375,00	144.056.398.745,00	(31.003.212.630,00)	82,29	149.137.823.481,63



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, belanja iuran Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN.

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2025 sebesar Rp101.538.821.761,00 atau 91,17% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp111.367.101.199,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp9.828.279.438,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2025 sebesar Rp101.538.821.761,00 dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp61.393.583.237,00 maka realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi pada TA 2025 mengalami *peningkatan* sebesar Rp40.145.238.524,00 atau 65,39%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2025 dan realisasi TA 2024, disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 88. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
TA 2025 dan TA 2024**

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.471.790.432,00	4.529.711.180,00	(942.079.252,00)	82,78	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	81.489.207.313,00	78.778.095.000,00	(2.711.112.313,00)	96,67	37.413.065.966,00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	8.375.109.037,00	6.707.484.000,00	(1.667.625.037,00)	80,09	3.388.848.400,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.865.543.280,00	2.540.097.572,00	(2.325.445.708,00)	52,21	11.102.325.081,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.399.732.588,00	5.229.717.142,00	(1.170.015.446,00)	81,72	5.409.166.116,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.765.718.549,00	3.753.716.867,00	(1.012.001.682,00)	78,76	4.080.177.674,00
Jumlah	111.367.101.199,00	101.538.821.761,00	(9.828.279.438,00)	91,17	61.393.583.237,00

c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp7.163.410.450,00 atau 73,06% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp9.804.562.710,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp2.641.152.260,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp7.163.410.450,00 dengan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp13.820.405.917,00 maka Belanja Sewa Peralatan dan Mesin pada TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp6.656.995.467,00 atau 48,17%. Rincian anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

dan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 89. Rincian Anggaran dan Realisasi Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	323.261.450,00	297.798.850,00	(25.462.600,00)	92,12	9.615.900,00
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	1.989.872.000,00	1.504.618.000,00	(485.254.000,00)	75,61	1.667.718.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	697.370.000,00	368.300.000,00	(329.070.000,00)	52,81	738.965.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	193.200.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.770.710.000,00	3.557.410.000,00	(1.213.300.000,00)	74,57	5.952.148.500,00
Belanja Sewa Mebel	706.657.020,00	441.203.600,00	(265.453.420,00)	62,44	464.742.500,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	973.092.240,00	805.280.000,00	(167.812.240,00)	82,75	2.182.896.017,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	60.000.000,00	20.000.000,00	(40.000.000,00)	33,33	234.500.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	84.000.000,00	61.000.000,00	(23.000.000,00)	72,62	14.000.000,00
Belanja Sewa Komputer Jaringan	183.600.000,00	91.800.000,00	(91.800.000,00)	50,00	148.164.000,00
Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.056.000,00
Jumlah	9.804.562.710,00	7.163.410.450,00	(2.641.152.260,00)	73,06	13.820.405.917,00

d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp651.900.000,00 atau 69,23% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp941.700.000,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp289.800.000,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp651.900.000,00 dengan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp843.391.500,00, maka Belanja Sewa Gedung dan Bangunan pada TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp191.491.500,00 atau 22,70%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 90. Rincian Anggaran dan Realisasi Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	469.600.000,00	411.600.000,00	(58.000.000,00)	87,65	581.387.500,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	362.100.000,00	200.800.000,00	(161.300.000,00)	55,45	231.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00
Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	60.000.000,00	39.500.000,00	(20.500.000,00)	65,83	19.000.000,00
Jumlah	941.700.000,00	651.900.000,00	(289.800.000,00)	69,23	843.391.500,00

e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2025 merupakan belanja sewa alat musik yang terealisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan.

f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2025 sebesar Rp14.766.223.081,00 atau 88,84% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp16.620.888.048,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp1.854.664.967,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2025 sebesar Rp14.766.223.081,00 dengan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2024 sebesar Rp17.410.685.332,00 maka Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.644.462.251,00 atau 15,19%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 91. Rincian Anggaran dan Realisasi Jasa Konsultansi Kontruksi TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	100,00	9.546.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.266.348.619,00	1.497.687.476,00	(768.661.143,00)	66,08	2.087.344.009,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	344.697.000,00	339.099.450,00	(5.597.550,00)	98,38	150.709.433,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	300.000.000,00	199.533.800,00	(100.466.200,00)	66,51	299.883.705,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.200.000.000,00	997.520.625,00	(202.479.375,00)	83,13	1.391.136.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	4.208.800.000,00	4.194.997.025,00	(13.802.975,00)	99,67	2.301.420.720,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	855.000.000,00	849.532.950,00	(5.467.050,00)	99,36	1.211.096.550,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.160.150,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	440.021.000,00	419.050.530,00	(20.970.470,00)	95,23	233.114.600,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.951.571.429,00	2.383.510.800,00	(568.060.629,00)	80,75	3.724.667.465,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.553.200.000,00	1.517.444.925,00	(35.755.075,00)	97,70	1.964.594.550,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.116.300.000,00	1.109.573.150,00	(6.726.850,00)	99,40	1.095.294.700,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	508.158.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.375.000.000,00	1.248.322.350,00	(126.677.650,00)	90,79	190.559.250,00
Jumlah	16.620.888.048,00	14.766.223.081,00	(1.854.664.967,00)	88,84	17.410.685.332,00

g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2025 sebesar Rp468.958.000,00 atau 82,79% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp566.430.000,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp97.472.000,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Konstruksi TA 2025 sebesar Rp468.958.000,00 dengan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2024 sebesar Rp2.408.735.653,00, maka Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi pada TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.939.777.653,00 atau 80,53%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 92. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
TA 2025 dan TA 2024**

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	646.602.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	166.430.000,00	122.030.000,00	(44.400.000,00)	73,32	3.180.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	0,00	101.986.653,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200.000.000,00	146.928.000,00	(53.072.000,00)	73,46	887.967.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	769.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Jumlah	566.430.000,00	468.958.000,00	(97.472.000,00)	82,79	2.408.735.653,00

i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) TA 2025 sebesar Rp274.725.000,00 atau 96,41% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp284.944.000,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp10.219.000,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) TA 2025 sebesar Rp274.725.000,00 dengan realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) TA 2024 sebesar Rp192.204.300,00, maka Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) TA 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp82.520.700,00 atau 42,93%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 93. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Ketenagalistrikan	284.944.000,00	274.725.000,00	(10.219.000,00)	96,41	192.204.300,00
Jumlah	284.944.000,00	274.725.000,00	(10.219.000,00)	96,41	192.204.300,00

j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2025 sebesar Rp149.960.000,00 atau 69,11% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp217.000.000,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp67.040.000,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2025 sebesar Rp149.960.000,00 dengan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2024 sebesar Rp218.000.000,00, maka Belanja Beasiswa Pendidikan PNS pada TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp68.040.000,00 atau 31,21%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2025 dan TA 2024, disajikan pada table berikut ini:

Tabel 94. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	144.000.000,00	76.960.000,00	(67.040.000,00)	53,44	72.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	100,00	146.000.000,00
Jumlah	217.000.000,00	149.960.000,00	(67.040.000,00)	69,11	218.000.000,00

k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2025 sebesar Rp14.246.734.485,00 atau 69,85% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20.396.081.000,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp6.149.346.515,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2025 sebesar Rp14.246.734.485,00 dengan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2024 sebesar Rp21.243.042.113,00, maka Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp6.996.307.628,00 atau 32,93%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 95. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20.396.081.000,00	14.246.734.485,00	(6.149.346.515,00)	69,85	19.316.042.113,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.000.000,00
Jumlah	20.396.081.000,00	14.246.734.485,00	(6.149.346.515,00)	69,85	21.243.042.113,00

c. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 sebesar Rp61.392.751.261,00 atau 90,98% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp67.479.520.639,20, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp6.086.769.378,20. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dan realisasi TA 2024, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 96. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.850.225.000,00	11.638.299.275,00	(2.211.925.725,00)	84,03	11.686.179.709,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.112.449.690,00	29.880.733.538,00	(3.231.716.152,00)	90,24	53.124.956.978,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.516.845.949,20	19.873.718.448,00	(643.127.501,20)	96,87	8.998.335.900,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	67.479.520.639,20	61.392.751.261,00	(6.086.769.378,20)	90,98	73.809.472.587,00

Belanja Pemeliharaan terdiri dari:

a. Belanja Pemeliharaan Tanah

Belanja Pemeliharaan Tanah tidak dianggarkan pada TA 2025.

b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp11.638.299.275,00 atau 84,03% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp13.850.225.000,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp2.211.925.725,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp11.638.299.275,00 dengan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp11.686.179.709,00, maka Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp-47.880.434,00 atau 0,41%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024, disajikan pada tabel dibawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

**Tabel 97. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 TA 2025 dan TA 2024**

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	88.126.000,00	14.490.000,00	(73.636.000,00)	16,44	40.990.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	97.931.000,00	81.675.000,00	(16.256.000,00)	83,40	93.359.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	92.319.000,00	34.250.000,00	(58.069.000,00)	37,10	56.220.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	56.540.000,00	42.310.050,00	(14.229.950,00)	74,83	134.151.120,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	15.000.000,00	14.970.000,00	(30.000,00)	99,80	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.056.410.000,00	8.014.548.727,00	(1.041.861.273,00)	88,50	9.592.817.427,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	742.200.000,00	694.324.700,00	(47.875.300,00)	93,55	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	959.500.000,00	709.118.341,00	(250.381.659,00)	73,90	78.725.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	753.799.000,00	372.090.102,00	(381.708.898,00)	49,36	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00	10.198.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	144.350.000,00	135.405.000,00	(8.945.000,00)	93,80	275.665.222,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	216.990.000,00	215.605.845,00	(1.384.155,00)	99,36	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	544.940.000,00	327.552.550,00	(217.387.450,00)	60,11	241.774.035,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00	35.108.700,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	600.000.000,00	587.162.250,00	(12.837.750,00)	97,86	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	290.775.600,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	509.233.459,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	256.000.000,00	244.437.960,00	(11.562.040,00)	95,48	80.061.646,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	136.120.000,00	70.756.250,00	(65.363.750,00)	51,98	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	90.000.000,00	79.602.500,00	(10.397.500,00)	88,45	147.000.000,00
Jumlah	13.850.225.000,00	11.638.299.275,00	(2.211.925.725,00)	84,03	11.686.179.709,00

c. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp29.880.733.538,00 atau 90,24% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp33.112.449.690,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp3.231.716.152,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp29.880.733.538,00 dengan Belanja Pemeliharaan



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp53.124.956.978,00, maka Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp23.244.223.440,00 atau 43,75%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 98. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan TA 2024**

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	((Rp)		(Rp)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	9.551.837.690,00	6.998.337.513,00	(2.553.500.177,00)	73,27	51.719.638.654,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi	120.000.000,00	100.566.000,00	(19.434.000,00)	83,81	59.496.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	42.667.569,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	23.179.612.000,00	22.522.352.825,00	(657.259.175,00)	97,16	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan	198.800.000,00	197.727.200,00	(1.072.800,00)	99,46	1.303.154.755,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	62.200.000,00	61.750.000,00	(450.000,00)	99,28	0,00
Jumlah	33.112.449.690,00	29.880.733.538,00	(3.231.716.152,00)	90,24	53.124.956.978,00

d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 sebesar Rp19.873.718.448,00 atau 96,87% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20.516.845.949,20, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp643.127.501,20. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 sebesar Rp19.873.718.448,00 dengan Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp8.998.335.900,00, maka Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada TA 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp10.875.382.548,00 atau



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

120,86%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 99. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	12.319.466.469,20	12.187.016.267,00	(132.450.202,20)	98,92	6.136.234.900,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa	4.850.000.000,00	4.709.114.710,00	(140.885.290,00)	97,10	398.216.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	2.997.379.480,00	2.628.340.000,00	(369.039.480,00)	87,69	2.193.390.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	200.000.000,00	199.657.820,00	(342.180,00)	99,83	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	150.000.000,00	149.589.651,00	(410.349,00)	99,73	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	194.480.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	76.015.000,00
Jumlah	20.516.845.949,20	19.873.718.448,00	(643.127.501,20)	96,87	8.998.335.900,00

d. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 sebesar Rp68.381.644.525,00 atau 86,92% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp78.670.781.008,92, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp10.289.136.483,92. Apabila dibandingkan realisasi Perjalanan Dinas TA 2025 sebesar Rp68.381.644.525,00 dengan realisasi belanja Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp77.883.878.489,00 maka realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp9.502.233.964,00 atau 12,20%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 100. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri:					
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.415.224.093,34	31.736.098.125,00	(3.679.125.968,34)	89,61	33.283.132.309,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.515.968.652,58	34.251.267.500,00	(5.264.701.152,58)	86,68	41.121.990.976,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.876.222.263,00	1.729.812.500,00	(1.146.409.763,00)	60,14	1.708.473.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	863.366.000,00	664.466.400,00	(198.899.600,00)	76,96	1.770.282.204,00
Jumlah	78.670.781.008,92	68.381.644.525,00	(10.289.136.483,92)	86,92	77.883.878.489,00

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 sebesar Rp5.422.401.073,00 atau 85,87% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp6.314.777.380,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp892.376.307,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 sebesar Rp5.422.401.073,00 dengan realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 sebesar Rp8.251.756.623,00, maka realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.829.355.550,00 atau 34,29%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 101. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.758.530.000,00	2.032.003.693,00	(726.526.307,00)	73,66	5.046.156.623,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	653.730.000,00	652.003.693,00	(1.726.307,00)	99,74	1.155.856.623,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	130.500.000,00
Belanja Beasiswa	1.924.800.000,00	1.225.500.000,00	(699.300.000,00)	63,67	1.024.800.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	150.000.000,00	124.500.000,00	(25.500.000,00)	83,00	2.260.000.000,00
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.556.247.380,00	3.390.397.380,00	(165.850.000,00)	95,34	3.205.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.556.247.380,00	3.390.397.380,00	(165.850.000,00)	95,34	3.205.600.000,00
Jumlah	6.314.777.380,00	5.422.401.073,00	(892.376.307,00)	85,87	8.251.756.623,00

f. Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2025 sebesar Rp57.943.017.320,00 atau 97,15% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp59.641.868.284,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp1.698.850.964,00. Dari total realisasi Barang dan Jasa BOS sebesar Rp57.943.017.320,00 terdapat terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler sebesar Rp56.343.295.604,00, Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp1.599.721.716,00. Dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler di dalamnya terdapat Belanja Barang dan Jasa PAUD sebesar Rp32.100.000,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD dan Kesetaraan, BOS SD dan SMP TA 2025 disajikan pada **Lampiran XI, XII, XIII**

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2025 sebesar Rp29.756.836.234,00 atau 205,22% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp14.500.000.000,00, sehingga realisasi berada diatas anggaran sebesar Rp15.256.836.234,00. Sesuai dengan Pasal 74 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah “Dalam hal terjadi kekurangan Anggaran Belanja BLUD, maka BLUD dapat mempergunakan ambang batas belanja dengan memperhitungkan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA”.

Apabila dibandingkan realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2025 sebesar Rp29.756.836.234,00 dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024 sebesar Rp27.413.560.949,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada TA 2025 mengalami *peningkatan* sebesar Rp2.343.275.285,00 atau 8,55%.

Data belanja BLUD ini disajikan setelah keluar hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap 3 (Tiga) Rumah Sakit Umum Daerah. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 102. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD
TA 2025 dan TA 2024**

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Rumah Sakit Umum Perdagangan	6.000.000.000,00	13.366.551.225,00	7.366.551.225,00	222,78	11.326.573.818,00
Rumah Sakit Umum Tuan Rondahaim	4.500.000.000,00	10.865.410.657,00	6.365.410.657,00	241,45	10.103.156.986,00
Rumah Sakit Umum Parapat	4.000.000.000,00	5.524.874.352,00	1.524.874.352,00	138,12	5.983.830.145,00
Jumlah	14.500.000.000,00	29.756.836.234,00	15.256.836.234,00	205,22	27.413.560.949,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Anggaran TA 2025
Rp0,00

Realisasi TA 2025
Rp0,00

Realisasi TA 2024
Rp0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Bunga Tahun 2025.

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Anggaran TA 2025
Rp0,00

Realisasi TA 2025
Rp0,00

Realisasi TA 2024
Rp0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2025.

5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Anggaran TA 2025
Rp39.733.357.500,00

Realisasi TA 2025
Rp38.157.474.618,00

Realisasi TA 2024
Rp101.603.079.004,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp38.157.474.618,00 atau 96,03% anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp39.733.357.500,00, sehingga realisasi berada dibawah pagu anggaran sebesar Rp1.575.882.882,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp38.157.474.618,00 dengan realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp101.603.079.004,00, maka realisasi Belanja Hibah TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp63.445.604.386,00 atau 62,44%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan TA 2024, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 103. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	59.507.220.000,00
Belanja Hibah kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.000.000,00
Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.714.309.500,00	15.292.163.965,00	(1.422.145.535,00)	91,49	12.336.672.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	21.112.100.000,00	20.958.362.653,00	(153.737.347,00)	99,27	21.928.704.004,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.906.948.000,00	1.906.948.000,00	0,00	100,00	1.834.483.000,00
Jumlah	39.733.357.500,00	38.157.474.618,00	(1.575.882.882,00)	96,03	101.603.079.004,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Belanja Hibah TA 2025 terdiri dari:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tidak dianggarkan pada Tahun 2025, namun di Tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp59.507.220.000,00 yang merupakan belanja hibah kepada KPU dan BAWASLU kabupaten Simalungun.

2. Belanja Hibah kepada BUMN

Belanja Hibah kepada BUMN tidak dianggarkan pada Tahun 2025, namun di Tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp3.996.000.000,00.

3. Belanja Hibah kepada BUMD

Belanja Hibah kepada BUMD tidak dianggarkan pada Tahun 2025, namun di Tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 yang merupakan Belanja Hibah kepada BUMD PERUMDA AGROMADEAR Kabupaten Simalungun.

4. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 sebesar Rp15.292.163.965,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp16.714.309.500,00, sehingga realisasi berada dibawah pagu anggaran sebesar Rp1.422.145.535,00 atau 91,49%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 104. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.279.450.000,00	8.877.304.465,00	(402.145.535,00)	95,67	9.641.672.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.662.300.000,00	7.276.022.300,00	(386.277.700,00)	94,96	9.524.366.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.617.150.000,00	1.601.282.165,00	(15.867.835,00)	99,02	117.306.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.300.000.000,00	4.730.000.000,00	(570.000.000,00)	89,25	800.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.300.000.000,00	4.730.000.000,00	(570.000.000,00)	89,25	800.000.000,00
Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.134.859.500,00	1.684.859.500,00	(450.000.000,00)	78,92	1.695.000.000,00
Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.134.859.500,00	1.684.859.500,00	(450.000.000,00)	78,92	1.695.000.000,00
Jumlah	16.714.309.500,00	15.292.163.965,00	(1.422.145.535,00)	91,49	12.336.672.000,00

Apabila dibandingkan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 sebesar Rp15.292.163.965,00 dengan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 sebesar Rp12.336.672.000,00, maka realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada TA 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp2.955.491.965,00 atau 23,96%. Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 105. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia berdasarkan SKPD TA 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.279.450.000,00	8.877.304.465,00	(402.145.535,00)	95,67	9.641.672.000,00
Dinas Pendidikan	7.512.300.000,00	7.276.022.300,00	(236.277.700,00)	96,85	7.524.366.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan & Peternakan	1.617.150.000,00	1.601.282.165,00	(15.867.835,00)	99,02	117.306.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	0,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.300.000.000,00	4.730.000.000,00	(570.000.000,00)	89,25	800.000.000,00
Sekretariat Daerah	5.300.000.000,00	4.730.000.000,00	(570.000.000,00)	89,25	800.000.000,00
Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.134.859.500,00	1.684.859.500,00	(450.000.000,00)	78,92	1.695.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	1.500.000.000,00	1.300.000.000,00	(200.000.000,00)	86,67	0,00
Dinas Kesehatan	500.000.000,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	50,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	134.859.500,00	134.859.500,00	0,00	100,00	1.695.000.000,00
Jumlah	16.714.309.500,00	15.292.163.965,00	(1.422.145.535,00)	91,49	12.336.672.000,00

5. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja Hibah Dana BOS merupakan belanja dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS untuk satuan pendidikan dasar swasta TA 2025 sebesar Rp20.958.362.653,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp21.112.100.000,00, sehingga realisasi berada dibawah pagu anggaran sebesar Rp153.737.347,00 atau 99,27%. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2025 terdapat pada 67 SD Swasta sebesar Rp10.037.910.889,00 dan SMP Swasta sebanyak 90 sekolah sebesar Rp10.920.451.764,00. Jika dibandingkan realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2025 sebesar Rp20.958.362.653,00 dan realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2024 sebesar Rp21.928.704.004,00 mengalami *penurunan* sebesar Rp970.341.351,00 atau 4,42%.

**Tabel 106. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOS
TA 2025 dan TA 2024**

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	21.112.100.000,00	20.958.362.653,00	(153.737.347,00)	99,27	21.928.704.004,00
Jumlah	21.112.100.000,00	20.958.362.653,00	(153.737.347,00)	99,27	21.928.704.004,00

6. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2025 sebesar Rp1.906.948.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.906.948.000,00 atau 100%. Rincian Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 107. Realisasi Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
TA 2025**

No	Nama Partai Politik	Realisasi TA 2025
1	Partai Golkar	569.932.000,00
2	Partai Gerindra	241.608.000,00
3	Partai Demokrat	146.800.000,00
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	85.664.000,00
5	Partai Nasional Demokrat	230.772.000,00
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	314.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Nama Partai Politik	Realisasi TA 2025
7	Partai Perindo	148.060.000,00
8	Partai Hati Nurani Rakyat	85.496.000,00
9	Partai Gelora	31.236.000,00
10	Partai Persatuan Pembangunan	52.680.000,00
	Jumlah	1.906.948.000,00

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp628.950.000,00	Rp558.500.000,00	Rp501.350.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 sebesar Rp558.500.000,00 atau 88,80% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp628.950.000,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 sebesar Rp558.500.000,00 dengan realisasi bantuan sosial TA 2024 sebesar Rp501.350.000,00, maka realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 mengalami *peningkatan* sebesar Rp57.150.000,00 atau 11,40%. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 108. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2025 dan TA 2024**

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	502.950.000,00	432.500.000,00	(70.450.000,00)	85,99	491.350.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	10.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Jumlah	628.950.000,00	558.500.000,00	(70.450.000,00)	88,80	501.350.000,00

Rincian Belanja Bantuan Sosial per SKPD TA 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 109. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan Sosial per SKPD TA 2025

NO	SKPD	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	90.450.000,00	90.000.000,00	Bantuan Sosial Kegiatan MOW
2	DINAS SOSIAL	392.500.000,00	322.500.000,00	Layanan Kedaruratan pemakaman ODGJ sebesar Rp3.000.000,00; Bantuan sosial uang sebesar Rp27.000.000,00 dan BLT Pada masyarakat Pentani Tembakau sebesar Rp292.500.000,00
3	SEKRETARIAT DAERAH	146.000.000,00	146.000.000,00	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu, keluarga dan kelompok Masyarakat
	JUMLAH	628.950.000,00	558.500.000,00	

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp314.047.380.220,20	Rp291.290.325.913,00	Rp342.561.963.087,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan Aset Tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025. Persentase Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari keseluruhan Belanja Modal adalah sebesar 20,22%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 23,43%, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 46,50%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 9,76% dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 0,08%. Hal itu memperlihatkan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan paling berpengaruh atas keseluruhan Belanja Modal.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 110. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	(Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	((Rp)		(Rp)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.986.181.550,00	58.911.262.046,00	(3.074.919.504,00)	95,04	107.661.000.057,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.202.143.081,00	68.257.309.278,00	(4.944.833.803,00)	93,24	76.995.108.180,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.572.222.566,20	135.455.575.766,00	(15.116.646.800,20)	89,96	134.990.437.486,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.848.333.023,00	28.424.703.823,00	576.370.800,00	102,07	22.915.417.364,00
Belanja Modal Aset Lainnya	438.500.000,00	241.475.000,00	(197.025.000,00)	55,07	0,00
Jumlah	314.047.380.220,20	291.290.325.913,00	(22.757.054.307,20)	92,75	342.561.963.087,00

Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp291.290.325.913,00 atau 92,75% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp314.047.380.220,20, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp22.757.054.307,20. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp291.290.325.913,00 dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp342.561.963.087,00, maka realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp51.271.637.174,00 atau sebesar 14,97%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Per SKPD TA 2025 disajikan pada **Lampiran XIV**.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Anggaran TA 2025
Rp0,00

Realisasi TA 2025
Rp0,00

Realisasi TA 2024
Rp0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah pada Tahun 2025.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran TA 2025
Rp61.986.181.550,00

Realisasi TA 2025
Rp58.911.262.046,00

Realisasi TA 2024
Rp107.661.000.057,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp58.911.262.046,00 atau 95,04% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp61.986.181.550,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp3.074.919.504,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp58.911.262.046,00 dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp107.661.000.057,00, maka realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp48.749.738.011,00 atau 45,28%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 111. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Alat Besar	1.683.990.996,00	1.370.307.929,00	(313.683.067,00)	81,37	2.268.913.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	2.961.702.000,00	2.934.409.998,00	(27.292.002,00)	99,08	17.604.586.480,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.536.600,00	10.516.800,00	(19.800,00)	99,81	41.000.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	1.407.600,00	1.407.600,00	0,00	100,00	3.500.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	28.391.507.585,00	27.207.450.216,00	(1.184.057.369,00)	95,83	37.185.362.370,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	236.064.000,00	232.538.600,00	(3.525.400,00)	98,51	428.881.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.211.235.897,00	7.650.123.158,00	(561.112.739,00)	93,17	26.361.540.670,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	694.461.600,00	193.812.800,00	(500.648.800,00)	27,91	2.340.897.500,00
Belanja Modal Komputer	6.987.639.055,00	6.461.277.482,00	(526.361.573,00)	92,47	8.938.804.834,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	1.086.606.000,00	1.032.441.000,00	(54.165.000,00)	95,02	491.957.200,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	180.000.000,00	162.066.000,00	(17.934.000,00)	90,04	2.182.203.489,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.570.000,00	0,00	(3.570.000,00)	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	1.772.060.000,00	1.768.361.276,00	(3.698.724,00)	99,79	2.818.116.250,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	752.457.500,00	750.410.000,00	(2.047.500,00)	99,73	13.799.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.012.942.717,00	9.136.139.187,00	123.196.470,00	101,37	6.981.438.264,00
Jumlah	61.986.181.550,00	58.911.262.046,00	(3.074.919.504,00)	95,04	107.661.000.057,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp58.911.262.046,00 disajikan pada **Lampiran XIV**.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp73.202.143.081,00	Rp68.257.309.278,00	Rp76.995.108.180,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp68.257.309.278,00 atau 93,24% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp73.202.143.081,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp4.944.833.803,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp68.257.309.278,00 dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp76.995.108.180,00, maka realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp8.737.798.902,00 atau sebesar 11,35%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan realisasi TA 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 112. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan TA 2024**

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung	69.361.143.081,00	66.117.233.278,00	(3.243.909.803,00)	95,32	64.357.774.850,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	69.361.143.081,00	66.117.233.278,00	(3.243.909.803,00)	95,32	64.357.774.850,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	212.511.480,00	209.418.100,00	(3.093.380,00)	98,54	864.068.923,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	14.278.771.052,00	12.486.110.508,00	(1.792.660.544,00)	87,45	20.203.094.672,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000,00	199.873.650,00	(126.350,00)	99,94	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	31.921.507.000,00	32.985.649.465,00	1.064.142.465,00	103,33	36.977.568.089,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	11.883.318.532,00	11.666.506.855,00	(216.811.677,00)	98,18	1.149.175.906,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	0,00	199.298.000,00
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	167.372.369,00	166.535.800,00	(836.569,00)	99,50	303.879.485,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	10.462.663.568,00	8.169.332.900,00	(2.293.330.668,00)	78,08	4.332.258.775,00
Belanja Modal Taman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	199.999.080,00	198.806.000,00	(1.193.080,00)	99,40	328.431.000,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.841.000.000,00	2.140.076.000,00	(1.700.924.000,00)	55,72	12.437.944.330,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.841.000.000,00	2.140.076.000,00	(1.700.924.000,00)	55,72	12.437.944.330,00
Belanja Modal Pagar	3.841.000.000,00	2.140.076.000,00	(1.700.924.000,00)	55,72	12.425.504.330,00
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	199.389.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	199.389.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	199.389.000,00
Jumlah	73.202.143.081,00	68.257.309.278,00	(4.944.833.803,00)	93,24	76.995.108.180,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp150.572.222.566,20	Rp135.455.575.766,00	Rp134.990.437.486,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 sebesar Rp135.455.575.766,00 atau 89,96% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp150.572.222.566,20, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp15.116.646.800,20. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 sebesar Rp135.455.575.766,00 dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp134.990.437.486,00, maka realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 mengalami *peningkatan* sebesar Rp465.138.280,00 atau 0,34%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 113. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2025 dan TA 2024**

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	119.058.016.380,20	109.194.987.459,00	(9.863.028.921,20)	91,72	119.714.973.038,00
Belanja Modal Bangunan Air	26.260.514.186,00	22.102.612.907,00	(4.157.901.279,00)	84,17	13.886.724.967,00
Belanja Modal Instalasi	5.222.012.000,00	4.126.368.400,00	(1.095.643.600,00)	79,02	1.388.739.481,00
Belanja Modal Jaringan	31.680.000,00	31.607.000,00	(73.000,00)	99,77	0,00
Jumlah	150.572.222.566,20	135.455.575.766,00	(15.116.646.800,20)	89,96	134.990.437.486,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp27.848.333.023,00	Rp28.424.703.823,00	Rp22.915.417.364,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp28.424.703.823,00 atau 102,07% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp27.848.333.023,00, sehingga realisasi melebihi anggaran sebesar Rp576.370.800,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp28.424.703.823,00 dengan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp22.915.417.364,00, maka realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 mengalami *peningkatan* sebesar Rp5.509.286.459,00 atau 24,04%.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan realisasi TA 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 114. Rincian Anggaran dan Realisasi Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	601.634.024,00	584.246.363,00	(17.387.661,00)	97,11	293.262.108,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	601.634.024,00	584.246.363,00	(17.387.661,00)	97,11	293.262.108,00
Belanja Modal Buku Umum	500.409.821,00	483.022.160,00	(17.387.661,00)	96,53	240.187.444,00
Belanja Modal Buku Agama	25.833.985,00	25.833.985,00	0,00	100,00	0,00
Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	22.685.751,00
Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	10.721.268,00	10.721.268,00	0,00	100,00	0,00
Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	30.388.914,00	30.388.914,00	0,00	100,00	30.388.913,00
Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	34.280.036,00	34.280.036,00	0,00	100,00	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	0,00	7.429.600,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429.600,00
Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429.600,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	0,00	0,00
Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	27.241.598.999,00	27.840.457.460,00	598.858.461,00	102,20	22.614.725.656,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	27.241.598.999,00	27.840.457.460,00	598.858.461,00	102,20	22.614.725.656,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	25.746.309.475,00	26.309.163.112,00	562.853.637,00	102,19	22.614.725.656,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	1.495.289.524,00	1.531.294.348,00	36.004.824,00	102,41	0,00
Jumlah	27.848.333.023,00	28.424.703.823,00	576.370.800,00	102,07	22.915.417.364,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp28.424.703.823,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS SD dan SMP TA 2025 disajikan pada **Lampiran XI, XII, XIII**.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun Anggaran 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp27.241.598.999,00 dengan realisasi sebesar Rp27.840.457.460,00 sehingga realisasi melampaui anggaran sebesar Rp598.858.46,00 atau 102,20% pada TA 2025. Hal ini sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran BOS yang dilaporkan Dinas Pendidikan yang sudah direkonsiliasi oleh Dinas Pendidikan dengan sekolah dan diakomodir didalam laporan realisasi anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sesuai dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) BOS Tahun 2025. Secara sistem di Aplikasi SIPD, Laporan Realisasi Belanja BOS di-entry dari menu penatausahaan melalui Input Transaksi Non Anggaran (ITNA). Dimana dalam pelaksanaan Input Realisasi Non Anggaran BOS tidak dibatasi nilai realisasinya.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp438.500.000,00	Rp241.475.000,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp241.475.000,00 atau sebesar 55,07% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp438.500.000,00. Realisasi belanja tersebut merupakan belanja Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software* pada Inspektorat dan Dinas Kesehatan.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp32.027.096.574,00	Rp17.802.727.800,00	Rp20.843.392.248,00

Belanja Tak Terduga merupakan dana yang dialokasikan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lain yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025 sebesar Rp17.802.727.800,00 atau 55,59% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp32.027.096.574,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp(14.224.368.774,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025 sebesar Rp17.802.727.800,00 dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp20.843.392.248,00, maka realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp3.040.664.448,00 atau sebesar 14,59%.

Belanja Tidak Terduga TA 2025 direalisasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk:

1. Penanganan banjir Parapat;
2. Penanganan dampak bencana alam banjir di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025;



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

3. Penanganan dampak bencana sosial kebakaran Pasar Inpres/Pajak Baru Lingkungan II Parluasan Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun;
4. Penanggulangan bencana alam longsor di beberapa wilayah Kabupaten Simalungun
5. Pengamanan tim terpadu untuk menjaga stabilitas wilayah PT. Toba Pulp Lestari Tbk dan masyarakat Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik Kab. Simalungun;
6. Pembuatan akte notaris untuk 27 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Simalungun; dan
7. Kegiatan siaga darurat bencana Kabupaten Simalungun tahun 2025.

Rincian realisasi Belanja Tak Terduga terdapat pada **Lampiran XV**.

5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp499.727.874.066,00	Rp431.226.583.403,00	Rp502.209.589.998,20

Belanja Transfer TA 2025 merupakan transfer bantuan keuangan yang terdiri dari Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa. Realisasi Belanja Transfer pada TA 2025 sebesar Rp431.226.583.403,00 atau 86,29% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp499.727.874.066,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp68.501.290.663,00. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Transfer TA 2025 sebesar Rp431.226.583.403,00 dengan realisasi Belanja Transfer TA 2024 sebesar Rp502.209.589.998,20 maka realisasi Belanja Transfer TA 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp70.983.006.595,20 atau 14,13%. Realisasi Belanja Transfer tahun 2025 terdiri dari Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp10.659.992.569,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp420.566.590.834,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 115. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Lebih/Kurang	%	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Bagi Hasil	10.971.574.266,00	10.659.992.569,00	(311.581.697,00)	97,16	158.540.735.998,20
Belanja Bantuan Keuangan	488.756.299.800,00	420.566.590.834,00	(68.189.708.966,00)	86,05	343.668.854.000,00
Jumlah	499.727.874.066,00	431.226.583.403,00	(68.501.290.663,00)	86,29	502.209.589.998,20

5.1.2.4.1 BELANJA BAGI HASIL

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp10.971.574.266,00	Rp10.659.992.569,00	Rp158.540.735.998,20

Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 digunakan untuk Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan Perangkat Nagori dan Tunjangan Jabatan Maujana Nagori di Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 386 Nagori serta Pembayaran Sisa Atas Pembagian ADN,



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Penyaluran DBH dan Penyaluran Sisa Atas Pembagian BHPRD Tahap II. Realisasi Belanja bagi Hasil TA 2025 adalah sebesar Rp10.659.992.569,00 atau 97,16% dari nilai anggaran sebesar Rp10.971.574.266,00, sehingga realisasi berada dibawah anggaran sebesar Rp311.581.697,00. Adapun rincian penyaluran Belanja Bagi Hasil setiap nagori dapat dilihat pada **Lampiran XVI**.

5.1.2.4.2 BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp488.756.299.800,00	Rp420.566.590.834,00	Rp343.668.854.000,00

Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 merupakan penyaluran dana dari pusat untuk desa di Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 386 nagori. Realisasi Belanja bantuan keuangan TA 2025 adalah sebesar Rp420.566.590.834,00 atau terealisasi 86,05% dari nilai anggaran.

Apabila dibandingkan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 sebesar Rp420.566.590.834,00 dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp343.668.854.000,00, maka realisasi mengalami **peningkatan** sebesar Rp76.897.736.834,00 atau 22,38%. Adapun rincian penyaluran dana desa setiap nagori dapat dilihat dalam **Lampiran XVI**.

5.1.3 SURPLUS/ (DEFISIT)

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp(105.686.714.051,74)	Rp159.068.286.007,24	Rp(10.749.110.190,87)

Surplus/Defisit merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan belanja, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja dalam tahun anggaran berkenaan. Realisasi Surplus TA 2025 sebesar Rp159.068.286.007,24 dan Defisit TA 2024 sebesar Rp10.749.110.190,87 merupakan selisih lebih/kurang antara jumlah realisasi pendapatan dikurangi dengan jumlah realisasi belanja dan transfer tahun anggaran berkenaan.

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan neto merupakan selisih lebih/kurang antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

5.1.4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp113.186.714.051,74	Rp113.186.714.051,45	Rp130.935.824.242,61

Penerimaan Pembiayaan TA 2025 sebesar Rp113.186.714.051,45 dan Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp130.935.824.242,61.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

SILPA Tahun Sebelumnya

SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp113.186.714.051,45 terdiri dari:

Tabel 116. Rincian Silpa Tahun Sebelumnya

Uraian	Silpa Tahun Sebelumnya
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	93.946.614.850,33
Sisa Belanja Lainnya:	19.240.099.201,12
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.759.322.567,80
Sisa Dana BOS	681.763.928,18
Sisa Dana Kapitasi	6.198.076.101,32
Sisa Dana BOSP	97.885,82
Sisa Dana BOK Puskesmas	10.600.838.718,00
Jumlah Silpa Audited Tahun 2024	113.186.714.051,45
Koreksi SILPA	0,00
Jumlah Silpa Tahun 2024 setelah Koreksi	113.186.714.051,45

5.1.4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp7.500.000.000,00	Rp7.500.000.000,00	Rp7.000.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 sebesar Rp7.500.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp7.500.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan Penyertaan Modal pada BUMD untuk BANK SUMUT sebesar Rp7.000.000.000,00.

5.1.4.3 PEMBIAYAAN NETO

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp105.686.714.051,74	Rp105.686.714.051,45	Rp123.935.824.242,61

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2025 sebesar Rp105.686.714.051,45 dan Tahun 2024 sebesar Rp123.935.824.242,61. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp264.755.000.058,69	Rp113.186.714.051,74

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan penjumlahan Surplus/Defisit dengan Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025. SILPA Tahun 2025 sebesar Rp264.755.000.058,69 mengalami *peningkatan* sebesar Rp151.568.286.006,95 atau 133,91%, jika dibandingkan dengan SILPA Tahun 2024 sebesar Rp113.186.714.051,74. Komposisi SiLPA Tahun 2024 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 117. Komposisi SiLPA TA 2025

URAIAN	JUMLAH
Kas di Kas Daerah	255.808.729.916,36
Kas di Bendahara Penerimaan	11.434.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	JUMLAH
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	1.314.056.754,80
Kas di Bendahara FKTP	2.254.311.295,32
Kas di Bendahara BOS	991.494.462,21
Kas Dana BOK Puskesmas	4.374.972.930,00
JUMLAH	264.755.000.058,69

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menggambarkan jumlah saldo anggaran lebih yang tersedia untuk digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan serta saldo anggaran lebih akhir yang akan menjadi penerimaan pembiayaan tahun berikutnya. Rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih TA 2025 dan TA 2024, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 118. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	113.186.714.051,74	130.995.491.106,32
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	113.186.714.051,45	130.935.824.242,61
Sub Total	0,29	59.666.863,71
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	264.755.000.058,69	113.186.714.051,74
Sub Total	264.755.000.058,98	113.246.380.915,45
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	253,12
Lain-lain	(0,29)	(59.667.116,83)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	264.755.000.058,69	113.186.714.051,74

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2025 Rp113.186.714.051,74	Tahun 2024 Rp130.995.491.106,32
--	--	--

Saldo Anggaran Lebih Awal pada Tahun 2025 sebesar Rp113.186.714.051,74 dan Saldo Anggaran Lebih Awal pada Tahun 2024 sebesar Rp130.995.491.106,32. Apabila dibandingkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dengan Saldo Anggaran Lebih Awal pada Tahun 2024, maka Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp17.808.777.054,58 atau sebesar 13,59%.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2025 Rp113.186.714.051,45	Tahun 2024 Rp130.935.824.242,61
--	--	--

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Pada Tahun 2025 Penggunaan SAL untuk Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp113.186.714.051,45.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA	Tahun 2025 Rp264.755.000.058,69	Tahun 2024 Rp113.186.714.051,74
---	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan dengan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp264.755.000.058,69.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	Rp253,12

Merupakan kesalahan pembukuan Pemerintah Kabupaten Simalungun TA 2025 yang mengurangi nilai SAL sebesar Rp0,00, sedangkan pada TA 2024 terdapat koreksi kesalahan pembukuan sebesar Rp253,12.

5.2.5 Koreksi Lain-Lain	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp(0,29)	Rp(59.667.116,83)

Terdapat Koreksi Lain-Lain pada Tahun 2025 sebesar 0,29 yang merupakan koreksi saldo awal Kas Dana BOK Puskesmas karena adanya pembulatan koma di Bank BNI pada saat peralihan ke tahun 2025, sedangkan pada Tahun 2024 terdapat Koreksi Lain-Lain yang merupakan koreksi saldo awal Dana BOS SD yang disetor ke Kas Daerah karena sekolahnya telah tutup sebesar Rp59.667.116,83.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp264.755.000.058,69	Rp113.186.714.051,74

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL Akhir pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp264.755.000.058,69.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Penjelasan akun-akun Neraca menguraikan mengenai posisi saldo-saldo akun Neraca per 31 Desember 2025 yang merupakan Neraca gabungan dari Neraca SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun terdiri dari:

5.3.1 ASET	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp3.336.099.688.366,90	Rp3.066.579.757.891,37

Aset atau disebut juga dengan aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi/sosial dimasa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lain-



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

lain. Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 sebesar Rp3.336.099.688.366,90, maka mengalami **kenaikan** sebesar Rp269.519.930.475,53 atau 8,79% dari Tahun 2024 sebesar Rp3.066.579.757.891,37. Rincian saldo Aset Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 119. Rincian Aset TA 2025 dan 2024

Aset	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)		
ASET LANCAR	372.479.311.780,54	260.680.427.737,32	111.798.884.043,22	42,89
INVESTASI JANGKA PANJANG	190.308.626.325,48	182.808.626.325,48	7.500.000.000,00	4,10
ASET TETAP	2.712.220.468.700,88	2.563.031.221.986,57	149.189.246.714,31	5,82
DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA	2.242.205.433,00	60.059.481.842,00	(57.817.276.409,00)	(96,27)
PROPERTI INVESTASI	58.849.076.127,00	0,00	58.849.076.127,00	0,00
JUMLAH	3.336.099.688.366,90	3.066.579.757.891,37	269.519.930.475,53	8,79

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.1.1 Aset Lancar	Rp372.479.311.780,54	Rp260.680.427.737,32

Aset Lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi Kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Saldo Aset Lancar Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp372.479.311.780,54 dan sebesar Rp260.680.427.737,32 maka mengalami **kenaikan** sebesar Rp111.798.884.043,22 atau 42,89% dari Tahun 2024. Rincian Aset Lancar Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 120. Rincian Saldo Aset Lancar TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Kas di Kas Daerah	255.808.729.916,36	93.925.115.350,33	161.883.614.566,03	172,35
Kas di Bendahara Penerimaan	11.434.700,00	21.499.500,00	(10.064.800,00)	(46,81)
Kas di BLUD	1.314.056.754,80	1.759.322.567,80	(445.265.813,00)	(25,31)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.254.311.295,32	6.198.076.101,32	(3.943.764.806,00)	(63,63)
Kas Lainnya	65.095.887,74	0,00	65.095.887,74	0,00
Kas Dana BOSP	991.494.462,21	681.861.814,00	309.632.648,21	45,41
Kas Dana BOK Puskesmas	4.374.972.930,00	10.600.838.718,29	(6.225.865.788,29)	(58,73)
Piutang Pajak Daerah	131.664.152.224,78	122.878.235.850,78	8.785.916.374,00	7,15
Piutang Retribusi Daerah	2.309.768.601,00	2.309.768.601,00	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.133.160.955,00	5.125.114.637,00	8.046.318,00	0,16
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	49.226.946.965,00	34.922.129.704,00	14.304.817.261,00	40,96
Piutang Bantuan Keuangan	0,00	49.072.106.374,00	(49.072.106.374,00)	(100,00)
Piutang Lainnya	0,00	88.500,00	(88.500,00)	(100,00)
Penyisihan Piutang	(102.365.813.390,77)	(94.180.760.493,38)	(8.185.052.897,39)	8,69
Persediaan	21.691.000.479,10	27.367.030.512,18	(5.676.030.033,08)	(20,74)
Jumlah	372.479.311.780,54	260.680.427.737,32	111.798.884.043,22	42,89



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Tahun 2025

Tahun 2024

Rp255.808.729.916,36

Rp93.925.115.350,33

Saldo Kas di Kas Daerah Tahun 2025 sebesar Rp255.808.729.916,36 mengalami *kenaikan* sebesar Rp161.883.614.566,03 atau 172,35% dari saldo Tahun 2024 sebesar Rp93.925.115.350,33. Kas di Kas Daerah TA 2025 merupakan Kas di BUD pada Bank SUMUT Cabang Pamatang Raya.

Adapun mutasi Kas di Kas Daerah sebagai berikut:

Saldo awal Kas Daerah 01 Januari 2025	Rp	93.925.115.350,33
Mutasi tambah - Penerimaan Kas Daerah selama Tahun 2025	Rp	2.152.332.679.145,03
Mutasi kurang - Pengeluaran Kas Daerah selama Tahun 2025	Rp	1.990.449.064.579,00
Saldo akhir Kas Daerah 31 Desember 2025	Rp	255.808.729.916,36

Rincian pembentuk Kas di Kas Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 121. Rincian Kas di Kas Daerah Tahun 2025

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Silpa THR Guru Tahun 2023	32.783.600,00
2	Silpa_DAK FISIK tahun 2023	2.407.922.371,00
3	Silpa TPG tahun 2024	8.396.200,00
4	Silpa TKG tahun 2024	1.752.733.400,00
5	Silpa Tamsil 2024	782.251.000,00
6	Silpa THR + 13 Guru Tahun 2024	2.142.709.800,00
7	SILPA_DAK FISIK_2024	2.419.639.527,00
8	SILPA_DBH SAWIT 2024	6.412.536.689,00
9	Silpa_dana kelurahan DAU_SG_2024	12.825.780,00
10	Silpa DAK FISIK (Air Minum) 2025	30.950.000,00
11	Silpa DAK FISIK (Sanitasi) 2025	12.801.500,00
12	Silpa DAK FISIK (KESEHATAN) 2025	523.193.522,00
13	Silpa DAK Fisik Perdagangan 2025	573,00
14	Silpa DAK Non Fisik (Perdagangan/PKSIKM) 2025	69.895.933,00
15	Silpa DAK Non Fisik (Pertanian) 2025	88.578.000,00
16	Silpa DAK Non Fisik (KB) 2025	4.437.083.419,00
17	Silpa DAK Non Fisik Koperasi PK2UMK 2025	593.947.299,00
18	Silpa DAK Non Fisik Kesehatan	2.408.917.438,00
19	Silpa DAU SG Bid. Pendidikan 2025	3.668.520.127,00
20	Silpa DAU SG Bid. Kesehatan 2025	2.060.827.591,00
21	Silpa DANA KELURAHAN 2025	220.303.000,00
22	Silpa DBH DR Reboisasi 2025	121.966.991,00
23	Silpa DBH SAWIT 2025	585.023.412,06
24	Silpa DBH Cukai tembakau_2025	36.430.170,00
25	Silpa DBH Provinsi	10.982.860.284,64
26	Silpa BKP 2025	3.500.143.226,00
27	Silpa DAU THR 13 GURU 2025	37.389.417.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
28	Silpa DAU/DBH Pusat 2025	133.365.960.821,92
29	PAD 2025	39.740.111.241,74
	TOTAL KAS DI RKUD	255.808.729.916,36

Saldo Rekening Kas Umum Daerah pada Bank SUMUT (RK No. 36001020686868) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp304.171.271.687,36. Terdapat *outstanding* SP2D sebesar Rp48.362.541.771,00 di 14 (empat belas) SKPD, mutasi keluar dari rekening koran tanggal 2 Januari Tahun 2026. Pada tanggal 31 Desember 2025 telah terbit SP2D atas Dinas Kesehatan Nomor: 12.08/04.0/000245/GU/1.02.0.00.0.00.19.0000/PPR1/12/2025 dengan nilai sebesar Rp853.925.101,00 dan ditransaksikan oleh bank. Namun yang ditransaksikan bank sebesar Rp853.825.101,00 sesuai dengan yang tercatat dalam rekening koran pada tanggal 31 Desember 2025, sehingga menyebabkan perbedaan dalam posisi saldo sebesar Rp100.000,00 yang ditransfer kembali oleh pihak bank pada tanggal 08 Januari 2026. Rincian *outstanding* SP2D disajikan dalam **Lampiran XVII**.

5.3.1.1.2	Kas di Bendahara	Tahun 2025	Tahun 2024
	Penerimaan	Rp11.434.700,00	Rp21.499.500,00

Terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 sebesar Rp11.434.700,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp21.499.500,00. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan retribusi kebersihan dan pasar terdapat pada lima kecamatan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 122. Rincian Kas di Bendahara Penerima Tahun 2025

NO	SKPD	KETERANGAN SETORAN	BULAN	JUMLAH (Rp)	TANGGAL SETOR	TANGGAL MASUK RKUD
1.	KEC. RAYA	RETRIBUSI PERSAMPAHAN	DESEMBER 2025	3.560.000,00	31-Des-25	02-Jan-26
		RETRIBUSI PERSAMPAHAN	DESEMBER 2025	2.310.000,00	31-Des-25	02-Jan-26
		RETRIBUSI PASAR	DESEMBER 2025	500.000,00	31-Des-25	02-Jan-26
		RETRIBUSI PASAR	DESEMBER 2025	450.000,00	31-Des-25	02-Jan-26
		RETRIBUSI PASAR	DESEMBER 2025	48.000,00	31-Des-25	02-Jan-26
2.	KEC. PAMATANG SIDAMANIK	RETRIBUSI PASAR	MARET 2025	490.000,00	11-Apr-25	04-Feb-26
3.	DINAS PERHUBUNGAN	RETRIBUSI PELABUHAN	DESEMBER 2025	1.800.000,00	31-Des-25	02-Jan-26
4.	KEC. BANDAR	KURANG SETOR RETRIBUSI PERSAMPAHAN	MEI 2024	2.000,00		
		KURANG SETOR RETRIBUSI PASAR	MEI 2024	2.500,00		
5	BPKPD	BPHTB	DESEMBER 2025	1.497.200,00		
6	DINAS KESEHATAN	Retribusi Pelayanan	DESEMBER 2025	775.000,00	02,06,07,08,13,21,22 Januari 2026	02,06,07,08,13,21,22 Januari 2026
JUMLAH				11.434.700,00		



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.3.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2025 Rp0,00	Tahun 2024 Rp0,00
-----------	---------------------------------	----------------------	----------------------

Tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 maupun Tahun 2024.

5.3.1.1.4	Kas di BLUD	Tahun 2025 Rp1.314.056.754,80	Tahun 2024 Rp1.759.322.567,80
-----------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

Saldo Kas di BLUD Tahun 2025 sebesar Rp1.314.056.754,80 mengalami *penurunan* sebesar Rp445.265.813,00 atau 25,31% dari saldo Tahun 2024 sebesar Rp1.759.322.567,80. Kas di BLUD berada di tiga rumah sakit yaitu di Rumah Sakit Parapat senilai Rp551.255.351,00, Rumah Sakit Perdagangan senilai Rp626.086.954,80, dan Rumah Sakit Tn. Rondahaim senilai Rp136.714.449,00.

5.3.1.1.5	Kas Dana BOSP	Tahun 2025 Rp991.494.462,21	Tahun 2024 Rp681.861.814,00
-----------	---------------	--------------------------------	--------------------------------

Saldo Kas Dana BOSP Tahun 2025 sebesar Rp991.494.462,21 dan Tahun 2024 sebesar Rp681.861.814,00 mengalami *kenaikan* sebesar Rp309.632.648,21 atau 45,41% dari saldo Tahun 2024. Saldo Kas Dana BOSP Tahun 2025 terdiri atas saldo kas di 761 SD Negeri sebesar Rp807.622.696,46 dan 65 SMP Negeri sebesar Rp178.660.630,93 dan saldo Kas BOP PAUD dan Kesetaraan pada 2 TK dan 1 SKB Kesetaraan sebesar Rp5.211.134,82. Dari jumlah SiLPA Kas Dana BOS tersebut terdiri dari sisa dana BOS sebesar Rp959.837.511,59 (dengan rincian sebesar Rp795.038.156 berada di rekening bank BOS dan sebesar Rp196.456.306,21 dipegang tunai di 258 SD Negeri, 37 SMP Negeri dan 1 SKB Kesetaraan), jasa giro BOS sebesar Rp27.523.918,00, Lain-Lain Pendapatan akibat salah setor ke rekening BOS sebesar Rp4.133.032,62. Rincian Kas Dana BOSP disajikan dalam **Lampiran XVIII**.

5.3.1.1.6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Tahun 2025 Rp2.254.311.295,32	Tahun 2024 Rp6.198.076.101,32
-----------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Saldo Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Tahun 2025 sebesar Rp2.254.311.295,32 mengalami *penurunan* sebesar Rp3.943.764.806,00 atau 63,63% dari saldo Tahun 2024 sebesar Rp6.198.076.101,32. Kas di Bendahara JKN merupakan SiLPA di 46 puskesmas pada Tahun 2025 di lingkungan Kabupaten Simalungun yang dikelola dan digunakan secara langsung oleh para bendahara JKN tanpa melalui Kas BUD. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi serta penetapan bendahara dan nomor rekening dana kapitasi sesuai dengan SK Bupati Nomor: 188.45/4080-DINKES Tanggal 25 Juni 2014 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Simalungun.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Rincian mutasi kas di bendahara FKTP Tahun 2025 (pendapatan/penerimaan dan belanja/pengeluaran dana kapitasi) pada seluruh puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 123. Rincian Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN Tahun 2025

NO	PUSKESMAS	SALDO AWAL (SALDO AKHIR DES 2024) (Rp)	PENDAPATAN JANUARI S/D DES 2025 (Rp)	TOTAL DANA S/D DES 2025 (Rp)	TOTAL REALISASI JAN S/D DES 2025 (Rp)	SALDO AKHIR DES 2025 (Rp)
1	Bah Bolon	43.839.284,15	458.549.612,00	502.388.896,15	497.582.730,00	4.806.166,15
2	Bah Tonang	0,00	64.868.221,00	64.868.221,00	59.506.211,00	5.362.010,00
3	Bandar Huluan	95.914.626,53	744.525.425,00	840.440.051,53	786.047.223,00	54.392.828,53
4	Bandar Masilam	74.479.150,00	655.687.318,00	730.166.468,00	696.948.320,00	33.218.148,00
5	Bandar Siantar	58.575.128,00	435.722.660,00	494.297.788,00	488.293.156,00	6.004.632,00
6	Bandar Tinggi	54.137.535,00	439.584.311,00	493.721.846,00	472.796.192,00	20.925.654,00
7	Batu Anam	603.047.371,00	1.023.799.939,00	1.626.847.310,00	1.318.045.338,00	308.801.972,00
8	Bosar Maligas	111.889.333,61	785.138.752,00	897.028.085,61	888.348.795,00	8.679.290,61
9	Buntu Turunan	120.571.196,00	257.837.694,00	378.408.890,00	352.226.212,00	26.182.678,00
10	Cingkes	19.679.532,00	142.096.957,00	161.776.489,00	158.514.893,00	3.261.596,00
11	Gunung Maligas	145.794.855,00	1.082.648.981,00	1.228.443.836,00	1.195.164.452,00	33.279.384,00
12	Haranggaol	74.357.494,59	319.288.878,00	393.646.372,59	373.669.924,00	19.976.448,59
13	Hatonduhan	90.944.190,40	805.423.170,00	896.367.360,40	865.914.835,00	30.452.525,40
14	Huta Bayu	134.474.746,15	702.510.972,00	836.985.718,15	798.226.449,00	38.759.269,15
15	Jawa Maraja	71.702.389,00	649.467.943,00	721.170.332,00	677.821.967,00	43.348.365,00
16	Kerasaan	112.107.520,98	901.637.359,00	1.013.744.879,98	950.621.722,00	63.123.157,98
17	Marihat Bandar	108.444.062,00	698.728.764,00	807.172.826,00	742.153.564,00	65.019.262,00
18	Marubun Jaya	53.998.874,00	653.004.990,00	707.003.864,00	659.106.945,00	47.896.919,00
19	Negeri Dolok	271.176.781,00	534.079.802,00	805.256.583,00	745.894.385,00	59.362.198,00
20	Pematang Sidamanik	92.583.062,00	665.476.335,00	758.059.397,00	738.026.231,00	20.033.166,00
21	Pematang Silimahuta	73.616.602,00	513.185.570,00	586.802.172,00	558.977.638,00	27.824.534,00
22	Panei Tongah	215.695.544,00	1.027.127.893,00	1.242.823.437,00	1.181.426.288,00	61.397.149,00
23	Panombeian Pane	75.328.279,00	783.781.068,00	859.109.347,00	840.329.525,00	18.779.822,00
24	Parapat	109.635.825,00	444.381.514,00	554.017.339,00	518.956.096,00	35.061.243,00
25	Parbutaran	49.625.988,00	317.773.668,00	367.399.656,00	353.050.061,00	14.349.595,00
26	Pematang Bandar	172.972.699,00	609.850.331,00	782.823.030,00	691.224.039,00	91.598.991,00
27	Pematang Raya	350.762.065,35	1.507.770.168,00	1.858.532.233,35	1.808.731.619,00	49.800.614,35
28	Perdagangan	348.420.925,00	1.905.986.460,00	2.254.407.385,00	2.074.848.311,00	179.559.074,00
29	Raja Maligas	81.543.717,00	313.130.379,00	394.674.096,00	385.690.134,00	8.983.962,00
30	Rambung Merah	153.956.022,00	712.553.681,00	866.509.703,00	843.204.360,00	23.305.343,00
31	Saran Padang	89.978.461,00	515.890.749,00	605.869.210,00	546.995.832,00	58.873.378,00
32	Saribu Dolok	41.050.901,00	650.200.192,00	691.251.093,00	666.954.148,00	24.296.945,00
33	Sarimatondang	102.546.318,35	787.900.949,00	890.447.267,35	839.428.131,00	51.019.136,35



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	PUSKESMAS	SALDO AWAL (SALDO AKHIR DES 2024) (Rp)	PENDAPATAN JANUARI S/D DES 2025 (Rp)	TOTAL DANA S/D DES 2025 (Rp)	TOTAL REALISASI JAN S/D DES 2025 (Rp)	SALDO AKHIR DES 2025 (Rp)
34	Sayur Matinggi	6.813.744,00	197.693.940,00	204.507.684,00	199.196.938,00	5.310.746,00
35	Serbelawan	205.722.126,36	1.317.175.782,00	1.522.897.908,36	1.452.363.178,00	70.534.730,36
36	Silau Malaha	136.949.517,41	512.476.129,00	649.425.646,41	607.573.511,00	41.852.135,41
37	Simpang Bah Jambi	128.982.550,20	1.235.751.040,00	1.364.733.590,20	1.356.133.451,00	8.600.139,20
38	Sinasih	0,00	49.844.448,00	49.844.448,00	28.923.256,00	20.921.192,00
39	Sindar Raya	73.727.000,00	747.986.984,00	821.713.984,00	812.210.373,00	9.503.611,00
40	Sipintuagin	71.645.012,05	572.505.948,00	644.150.960,05	576.499.000,00	67.651.960,05
41	Tanah Jawa	210.782.664,00	1.834.800.274,00	2.045.582.938,00	1.927.863.281,00	117.719.657,00
42	Tapian Dolok	426.581.206,89	1.373.795.449,00	1.800.376.655,89	1.642.788.668,00	157.587.987,89
43	Tiga Balata	45.244.086,00	661.241.650,00	706.485.736,00	695.472.935,00	11.012.801,00
44	Tiga Dolok	187.026.449,37	1.103.611.861,00	1.290.638.310,37	1.239.380.077,00	51.258.233,37
45	Tiga Runggu	154.360.894,93	1.200.811.682,00	1.355.172.576,93	1.299.618.475,00	55.554.101,93
46	Ujung Padang	347.390.372,00	1.104.857.984,00	1.452.248.356,00	1.353.179.813,00	99.068.543,00
Jumlah		6.198.076.101,32	34.022.163.876,00	40.220.239.977,32	37.965.928.682,00	2.254.311.295,32

5.3.1.1.7	Kas Dana BOK	Tahun 2025	Tahun 2024
	Puskesmas	Rp4.374.972.930,00	Rp10.600.838.718,29

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas pada Tahun 2025 sebesar Rp4.374.972.930,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp6.225.865.788,29 atau 58,73% dari saldo Tahun 2024 sebesar Rp10.600.838.718,29. Kas Dana BOK Puskesmas pada Tahun 2024 dikelola langsung oleh 46 Puskesmas tanpa melalui RKUD.

**Tabel 124. Realisasi Pemanfaatan Dana DAK Non Fisik (BOK) Puskesmas Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2025**

NO	PUSKESMAS	SALDO AWAL	PENDAPATAN TAHUN 2025	TOTAL SALDO AWAL + PENDAPATAN	TOTAL	SALDO AKHIR
1	BAH BOLON	115.629.055,00	529.458.945,00	645.088.000,00	582.907.600,00	62.180.400,00
2	BAH TONANG	112.348.841,00	153.208.159,00	265.557.000,00	190.974.600,00	74.582.400,00
3	BANDAR HULUAN	163.400.364,00	727.193.236,00	890.593.600,00	862.716.984,00	27.876.616,00
4	BANDAR MASILAM	281.524.574,00	139.047.802,00	420.572.376,00	413.888.685,00	6.683.691,00
5	BANDAR SIANTAR	38.822.537,00	480.310.463,00	519.133.000,00	516.159.304,00	2.973.696,00
6	BANDAR TINGGI	165.685.696,00	406.085.304,00	571.771.000,00	507.840.569,00	63.930.431,00
7	BATU ANAM	313.597.530,00	321.853.970,00	635.451.500,00	552.361.488,00	83.090.012,00
8	BOSAR MALIGAS	240.465.092,00	680.161.908,00	920.627.000,00	852.342.000,00	68.285.000,00
9	BUNTU TURUNAN	105.342.187,00	277.737.815,00	383.080.002,00	348.145.001,00	34.935.001,00
10	CINGKES	114.262.000,00	341.837.998,00	456.099.998,00	361.226.644,00	94.873.354,00
11	GUNUNG MALIGAS	311.199.796,00	328.893.204,00	640.093.000,00	560.640.963,00	79.452.037,00
12	HARANGGAOL	154.927.872,00	249.149.133,00	404.077.005,00	354.684.620,00	49.392.385,00
13	HATONDUHAN	461.058.646,00	337.172.354,00	798.231.000,00	637.385.500,00	160.845.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	PUSKESMAS	SALDO AWAL	PENDAPATAN TAHUN 2025	TOTAL SALDO AWAL + PENDAPATAN	TOTAL	SALDO AKHIR
14	HUTA BAYU	252.955.748,00	499.742.253,00	752.698.001,00	660.351.691,00	92.346.310,00
15	JAWA MARAJA	165.554.568,00	439.167.432,00	604.722.000,00	595.908.000,00	8.814.000,00
16	KERASAAN	247.954.200,00	469.988.800,00	717.943.000,00	652.947.351,00	64.995.649,00
17	MARIHAT BANDAR	196.503.158,00	498.107.842,00	694.611.000,00	613.325.650,00	81.285.350,00
18	MARUBUN JAYA	225.012.563,00	446.042.439,00	671.055.002,00	452.705.308,00	218.349.694,00
19	NEGERI DOLOK	334.060.103,00	507.606.897,00	841.667.000,00	561.640.142,00	280.026.858,00
20	PAMATANG SILIMAHUTA	171.068.353,00	428.393.647,00	599.462.000,00	508.058.000,00	91.404.000,00
21	PANEI TONGAH	463.892.509,00	147.214.491,00	611.107.000,00	429.240.509,00	181.866.491,00
22	PANOMBEIAN PANE	260.863.588,00	431.531.412,00	692.395.000,00	387.698.898,00	304.696.102,00
23	PARAPAT	397.933.258,00	346.245.444,00	744.178.702,00	600.176.022,00	144.002.680,00
24	PARBUTARAN	148.812.771,00	515.389.229,00	664.202.000,00	641.243.398,00	22.958.602,00
25	PEMATANG BANDAR	109.785.209,00	228.639.793,00	338.425.002,00	287.635.976,00	50.789.026,00
26	PEMATANG RAYA	529.472.149,00	422.013.851,00	951.486.000,00	831.909.200,00	119.576.800,00
27	PERDAGANGAN	373.177.700,00	673.428.700,00	1.046.606.400,00	866.981.600,00	179.624.800,00
28	RAJA MALIGAS	216.478.072,00	274.979.928,00	491.458.000,00	438.906.000,00	52.552.000,00
29	RAMBUNG MERAH	208.283.772,00	481.979.228,00	690.263.000,00	626.967.340,00	63.295.660,00
30	SARAN PADANG	314.116.860,00	531.096.140,00	845.213.000,00	741.728.000,00	103.485.000,00
31	SARIBU DOLOK	276.221.706,00	345.846.094,00	622.067.800,00	382.246.000,00	239.821.800,00
32	SARIMATONDANG	93.076.505,00	698.805.495,00	791.882.000,00	701.180.535,00	90.701.465,00
33	SAYUR MATINGGI	208.207.485,00	488.098.515,00	696.306.000,00	623.354.684,00	72.951.316,00
34	SERBALAWAN	423.817.634,00	730.738.366,00	1.154.556.000,00	976.077.660,00	178.478.340,00
35	SIDAMANIK	263.668.168,00	521.290.834,00	784.959.002,00	701.332.351,00	83.626.651,00
36	SILAU MALAHA	161.158.392,00	408.550.611,00	569.709.003,00	498.037.702,00	71.671.301,00
37	SIMPANG BAH JAMBI	156.262.450,00	650.396.550,00	806.659.000,00	800.070.375,00	6.588.625,00
38	SINASIH	107.271.362,00	192.738.638,00	300.010.000,00	257.260.000,00	42.750.000,00
39	SINDAR RAYA	26.469.696,00	567.254.304,00	593.724.000,00	579.925.910,00	13.798.090,00
40	SIPINTU ANGIN	86.414.320,00	499.019.681,00	585.434.001,00	423.939.160,00	161.494.841,00
41	TANAH JAWA	287.864.800,00	789.377.801,00	1.077.242.601,00	924.036.891,00	153.205.710,00
42	TAPIAN DOLOK	375.592.704,00	814.168.296,00	1.189.761.000,00	1.058.640.000,00	131.121.000,00
43	TIGA BALATA	238.683.229,00	438.362.771,00	677.046.000,00	628.279.758,00	48.766.242,00
44	TIGA DOLOK	138.775.653,00	691.714.348,00	830.490.001,00	725.403.500,00	105.086.501,00
45	TIGA RUNGGU	134.097.573,00	779.141.428,00	913.239.001,00	890.483.400,00	22.755.601,00
46	UJUNG PADANG	429.068.270,00	481.807.730,00	910.876.000,00	827.890.098,00	82.985.902,00
Jumlah		10.600.838.718,00	21.410.989.279,00	32.011.827.997,00	27.636.855.067,00	4.374.972.930,00

5.3.1.1.8 Kas Lainnya

Tahun 2025
Rp65.095.887,74

Tahun 2024
Rp0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025*

Kas Lainnya adalah saldo kas selain Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan, berupa pendapatan seperti Bunga, Jasa Giro, Pungutan Pajak, dan Pengembalian Belanja yang Belum Disetor ke Kas Daerah atau Kas Negara. Jumlah Kas lainnya pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp65.095.887,74 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp4.649.158,00 merupakan pajak negara yang belum disetor ke Kas Negara karena keterlambatan pihak bank dalam mendebit ke Kas Negara. Kas lainnya ini berada di Bendahara JKN Puskesmas Pamatang Raya, Puskesmas Sinasih, dan Puskesmas Saribu Dolok. Pajak ini telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 05,07 dan 15 Januari 2026;
- b. Dinas Pertanian sebesar Rp642.150,00 merupakan Utang PPh Pasal 22 yang merupakan kas tunai yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran. Pajak ini telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 13 April 2026;
- c. Dinas Pendidikan sebesar Rp59.804.579,74, merupakan kas tunai yang dipegang Bendahara, yang terdiri dari:
 - 1) Sudah dibayarkan pada Tahun 2026 senilai Rp50.305.675,82 (Utang PPN Rp19.162.331,00, Utang PPh pasal 22 Rp820.000,00 utang PPh pasal 23 Rp9.024.028,82 dan PPh pasal 21 sebesar Rp21.299.316,00);
 - 2) Belum dibayarkan sebesar Rp9.498.903,92 (Utang PPN Rp8.967.026,92, Utang PPh pasal 22 Rp186.969,00 utang PPh pasal 23 Rp344.908,00).

5.3.1.1.9	Setara Kas	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo Setara Kas pada per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3.1.1.10	Investasi Jangka Pendek	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3.1.1.11	Piutang Pajak Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp131.664.152.224,78	Rp122.878.235.850,78

Saldo Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp131.664.152.224,78 mengalami **kenaikan** sebesar Rp8.785.916.374,00 atau 7,15% jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp122.878.235.850,78. Rincian piutang pajak tahun 2025 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 125. Rincian Piutang Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
	Rp	Rp		
Piutang Pajak Daerah Lainnya	14.463.338.819,78	14.132.744.333,78	330.594.486,00	2,34
Piutang PBB-P2	117.200.813.405,00	108.745.491.517,00	8.455.321.888,00	7,78
Jumlah	131.664.152.224,78	122.878.235.850,78	8.785.916.374,00	7,15



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5. Pajak Air Tanah sebesar Rp119.433.760,00 (piutang ketetapan pajak air tanah Tahun 2023 sebesar Rp83.968.814,00, dan Tahun 2024 sebesar Rp35.464.946,00);
6. Pajak Hiburan sebesar Rp1.914.500,00 (piutang ketetapan pajak hiburan Tahun 2024); dan
7. Pajak Parkir sebesar Rp300.00,00 (piutang ketetapan pajak parkir Tahun 2024).

Ketetapan pajak yang terbit Tahun 2025 sebesar Rp124.163.535.899,00 dan tertagih sebesar Rp122.483.149.713,00, sehingga piutang atas ketetapan pajak Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.680.386.186,00. Jumlah piutang pajak dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2025 adalah sebesar Rp14.463.338.819,78 {(Rp14.132.744.333,78 - Rp1.349.791.700,00) + Rp1.680.386.186,00}. Rincian Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2008 sampai dengan 2025 disajikan dalam **Lampiran XIX**.

1. Masa Piutang Pajak Daerah

Masa piutang pajak sebesar Rp14.463.338.819,78 ditentukan berdasarkan masa wajib pajak terutang pajak dan diterbitkan surat ketetapan-pajaknya. Masa piutang pajak tersebut tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 127. Rincian Masa Piutang Pajak Tahun 2008-2025

Pajak Hotel	Hotel	Restoran	Mineral	Reklame	Air Tanah	Hiburan	Perangan Jalan	Parkir	Jumlah
2008	16.968.747,00	49.807.700,00		144.500,00			0,00		66.920.947,00
2009	16.304.792,00	58.629.990,00		75.067.463,00			0,00		150.002.245,00
2010	105.505.338,00	55.790.935,00		77.068.026,00			0,00		238.364.299,00
2011	92.434.660,00	65.892.900,00	48.224.840,00	104.911.702,00			0,00		311.464.102,00
2012	122.623.796,40	78.570.740,00	237.274.451,00	6.842.125,00	53.554.289,00	8.650.000,00	0,00		507.515.401,40
2013	90.275.019,00	12.120.860,00	43.004.160,00	23.146.125,00	10.599.453,00	135.000,00	0,00		179.280.617,00
2014	80.509.093,00	8.312.000,00	11.216.160,00	3.994.500,00	9.369.899,00	495.000,00	0,00		113.896.652,00
2015	30.871.178,00	13.670.000,00	13.903.920,00	293.750,00	21.701.463,00	1.100.000,00	0,00		81.540.311,00
2016	48.950.593,00	10.946.959,00	13.067.880,00	1.426.250,00	11.804.835,00	910.000,00	0,00		87.106.517,00
2017	29.557.835,00	11.331.510,00	16.457.156,00	20.345.702,00	9.776.945,00	1.225.000,00	0,00		88.694.148,00
2018	340.541.660,00	80.715.720,00	9.466.636,00	23.186.048,00	24.796.039,00	1.510.000,00	0,00		480.216.103,00
2019	69.340.421	148.746.551,00	16.543.589,00	54.153.030,00	1.994.376.700,00	905.000,00	0,00		2.284.065.291,00
2020	932.500,00	229.159.080,00	1.430.800,00	31.489.882,00	3.043.503.331,00	529.000,00	0,00		3.307.044.593,00
2021	966.504,00	23.996.782,00	31.864.500,00	16.375.950,00	2.699.971.936,00	732.500,00	0,00		2.773.908.172,00
2022	7.966.864,00	59.552.310,00	6.650.100,00	12.015.115,00	1.577.773.115,00	3.177.500,00	0,00	1.203.300,00	1.668.338.304,00
2023	78.243.654,00	16.812.106,00	11.557.520,00	9.808.399,00	123.676,00	480.000,00	0,00	2.028.000,00	119.053.355,00
2024	124.009.692,00	104.710.179,00	20.776.770,38	62.154.983,00	13.768.952,00	100.000,00	0,00	21.000,00	325.541.576,38
2025	857.329.921,00	167.408.384,00	341.682.237,00	84.782.541,00	226.722.103,00	2.061.000,00	0,00	400.000,00	1.680.386.186,00
Jumlah	2.113.332.267,40	1.196.174.706,00	823.120.719,38	607.206.091,00	9.697.842.736,00	22.010.000,00	0,00	3.652.300,00	14.463.338.819,78

Rincian masing-masing piutang pajak berdasarkan wajib pajak menurut tahun tersedia pada *database* pengelolaan pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

2. Pengenaan Penyisihan Piutang Pajak

Pengenaan Penyisihan Piutang Pajak disesuaikan umur masa piutang sebagaimana dijelaskan diatas. Sesuai dengan penerapan standar akuntansi berbasis akrual, kualitas piutang pajak dikategorikan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan dan macet dengan persentase dan umur sebagai berikut:

Tabel 128. Rincian Pengenaan Penyisihan Piutang Pajak

Kategori	%	Umur
Lancar	0,50%	< 1 thn
Kurang lancar	10%	dari 1 s.d. 2 thn
Diragukan	50%	dari 2 s.d. 5 thn
Macet	100%	> 5 thn

Berdasarkan kebijakan tersebut diatas, akumulasi penyisihan per jenis Piutang Pajak Lainnya sampai dengan per 31 Desember 2025 disajikan dalam **Lampiran XXV**.

Tabel 129. Rincian Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak sampai dengan per 31 Desember 2024

Tahun	Saldo Piutang	Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah				Jumlah	Nilai Buku Piutang
		Kualitas					
		Lancar < 1 thn (0,50%)	Kurang Lancar dari 1 thn s.d 2 thn (10%)	Diragukan dari 2 s.d 5 thn (50%)	Macet >5 thn (100%)		
2008	66.920.947,00				66.920.947,00	66.920.947,00	0,00
2009	150.002.245,00				150.002.245,00	150.002.245,00	0,00
2010	238.364.299,00				238.364.299,00	238.364.299,00	0,00
2011	311.464.102,00				311.464.102,00	311.464.102,00	0,00
2012	507.515.401,40				507.515.401,40	507.515.401,40	0,00
2013	179.280.617,00				179.280.617,00	179.280.617,00	0,00
2014	113.896.652,00				113.896.652,00	113.896.652,00	0,00
2015	81.540.311,00				81.540.311,00	81.540.311,00	0,00
2016	87.106.517,00				87.106.517,00	87.106.517,00	0,00
2017	88.694.148,00				88.694.148,00	88.694.148,00	0,00
2018	480.216.103,00				480.216.103,00	480.216.103,00	0,00
2019	2.400.959.509,00				2.400.959.509,00	2.400.959.509,00	0,00
2020	3.409.396.647,00			1.704.698.323,50		1.704.698.323,50	1.704.698.323,50
2021	2.823.552.588,010			1.411.776.294,00		1.411.776.294,00	1.411.776.294,00
2022	1.697.675.384,00			848.837.692,00		848.837.692,00	848.837.692,00
2023	419.204.697,00		41.920.469,70			41.920.469,70	377.284.227,30
2024	1.076.954.166,38	5.384.770,88				5.384.770,88	1.071.569.395,50
Jumlah	14.132.744.333,78	5.384.770,88	41.920.469,70	3.965.312.309,50	4.705.960.851,40	8.718.578.401,48	5.414.165.932,30

Nilai Akumulasi Penyisihan Piutang menjadi pengurang Ekuitas yang dilaporkan pada TA 2025. Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.217.717.230,52 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 130. Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak sampai dengan per 31 Desember 2025

Tahun	Saldo Piutang	Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah				Jumlah	Nilai Buku Piutang
		Kualitas					
		Lancar < 1 thn (0,50%)	Kurang Lancar dari 1 thn s.d 2 thn (10%)	Diragukan dari 2 s.d 5 thn (50%)	Macet >5 thn (100%)		
2008	66.920.947,00				66.920.947,00	66.920.947,00	0,00
2009	150.002.245,00				150.002.245,00	150.002.245,00	0,00
2010	238.364.299,00				238.364.299,00	238.364.299,00	0,00
2011	311.464.102,00				311.464.102,00	311.464.102,00	0,00
2012	507.515.401,40				507.515.401,40	507.515.401,40	0,00
2013	179.280.617,00				179.280.617,00	179.280.617,00	0,00
2014	113.896.652,00				113.896.652,00	113.896.652,00	0,00
2015	81.540.311,00				81.540.311,00	81.540.311,00	0,00
2016	87.106.517,00				87.106.517,00	87.106.517,00	0,00
2017	88.694.148,00				88.694.148,00	88.694.148,00	0,00
2018	480.216.103,00				480.216.103,00	480.216.103,00	0,00
2019	2.284.065.291,00				2.284.065.291,00	2.284.065.291,00	0,00
2020	3.307.044.593,00				3.307.044.593,00	3.307.044.593,00	0,00
2021	2.773.908.172,00			1.386.954.086,00		1.386.954.086,00	1.386.954.086,00
2022	1.668.338.304,00			834.169.152,00		834.169.152,00	834.169.152,00
2023	119.053.355,00			59.526.677,50		59.526.677,50	59.526.677,50
2024	325.541.576,38		32.554.157,69			32.554.157,69	292.987.418,69
2025	1.680.386.186,00	8.401.930,93				8.401.930,93	1.671.984.255,07
Jumlah	14.463.338.819,78	8.401.930,93	32.554.157,69	2.280.649.915,50	7.896.111.226,40	10.217.717.230,52	4.245.621.589,26

5.3.1.1.11.2. Piutang PBB-P2

Tahun 2025

Tahun 2024

Rp117.200.813.405,00

Rp108.745.491.517,00

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025 sebesar Rp117.200.813.405,00 mengalami *kenaikan* sebesar Rp8.455.321.888,00 atau 7,78%, jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp108.745.491.517,00. Saldo Piutang PBB-P2 Tahun 2025 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 131. Rincian Piutang PBB-P2 Tahun 1994 s.d. Tahun 2025

Tahun	Saldo Piutang/Ketetapan 2024		Realisasi 01 jan s/d 31 des 2025		Saldo Piutang	
	SPPT	Rupiah	SPPT	Rupiah	SPPT	Rupiah
1994	3.492	18.766.380,00	1	6.800,00	3.491	18.759.580,00
1995	70.801	543.127.911,00	93	1.976.197,00	70.708	541.151.714,00
1996	113.509	1.022.250.449,00	139	5.543.901,00	113.370	1.016.706.548,00
1997	120.386	1.023.800.257,00	154	5.843.612,00	120.232	1.017.956.645,00
1998	116.830	1.060.659.308,00	159	4.852.078,00	116.671	1.055.807.230,00
1999	107.744	911.653.376,00	139	2.588.413,00	107.605	909.064.963,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tahun	Saldo Piutang/Ketetapan 2024		Realisasi 01 jan s/d 31 des 2025		Saldo Piutang	
	SPPT	Rupiah	SPPT	Rupiah	SPPT	Rupiah
2000	136.365	1.323.172.413,00	177	4.417.535,00	136.188	1.318.754.878,00
2001	146.940	1.553.395.913,00	216	6.863.569,00	146.724	1.546.532.344,00
2002	148.310	1.809.136.901,00	266	10.066.180,00	148.044	1.799.070.721,00
2003	99.679	1.397.594.433,00	173	2.908.735,00	99.506	1.394.685.698,00
2004	104.868	1.459.397.630,00	163	4.548.855,00	104.705	1.454.848.775,00
2005	111.451	1.617.328.203,00	149	2.546.002,00	111.302	1.614.782.201,00
2006	79.382	1.324.690.414,00	104	2.711.740,00	79.278	1.321.978.674,00
2007	97.285	2.009.388.953,00	115	2.757.638,00	97.170	2.006.631.315,00
2008	135.444	3.141.854.207,00	149	4.599.735,00	135.295	3.137.254.472,00
2009	139.021	3.315.254.191,00	152	12.460.306,00	138.869	3.302.793.885,00
2010	226.016	5.141.374.872,00	324	9.756.863,00	225.692	5.131.618.009,00
2011	213.397	4.459.307.989,00	337	10.638.682,00	213.060	4.448.669.307,00
2012	276.783	7.216.892.483,00	580	22.695.665,00	276.203	7.194.196.818,00
2013	141.684	3.846.698.300,00	813	26.093.933,00	140.871	3.820.604.367,00
2014	130.083	4.499.001.041,00	772	26.403.951,00	129.311	4.472.597.090,00
2015	166.006	4.949.676.561,00	1004	30.817.434,00	165.002	4.918.859.127,00
2016	119.088	3.823.705.580,00	801	30.319.650,00	118.287	3.793.385.930,00
2017	84.942	4.156.817.718,00	561	25.363.510,00	84.381	4.131.454.208,00
2018	86.124	4.488.811.206,00	567	30.866.458,00	85.557	4.457.944.748,00
2019	111.914	5.649.530.296,00	843	50.913.723,00	111.071	5.598.616.573,00
2020	130.853	7.724.748.456,00	1.039	72.048.024,00	129.814	7.652.700.432,00
2021	128.376	7.656.967.945,00	1.185	81.283.329,00	127.191	7.575.684.616,00
2022	91.538	6.044.478.310,00	1.169	90.461.784,00	90.369	5.954.016.526,00
2023	92.216	6.297.358.961,00	1.506	137.509.235,00	90.710	6.159.849.726,00
2024	126.213	9.258.650.860,00	6.693	585.422.525,00	119.520	8.673.228.335,00
2025	384.377	72.072.688.323,00	256.992	62.312.080.373,00	127.385	9.760.607.950,00
	4.241.117,00	180.818.179.840,00	277.535,00	63.617.366.435,00	3.963.582,00	117.200.813.405,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2025 diterbitkan ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 Tahun Pajak 2025 sebanyak 384.377 SPPT senilai Rp72.072.688.323,00,00 dengan realisasi sebesar Rp62.312.080.373,00 yang belum terealisasi sebesar Rp9.760.607.950,00. Jumlah realisasi pembayaran piutang PBB-P2 merupakan pengurang nilai Piutang PBB-P2. Pada Tahun 2025, realisasi pembayaran piutang PBB-P2 adalah sebesar Rp1.305.286.062,00, terdiri atas:

- a. Realisasi pembayaran sisa piutang PBB-P2 untuk Tahun Pajak 1994 s.d. 2024 atas 20.543 SPPT senilai Rp1.305.286.062,00, sehingga sisa Piutang PBB-P2 untuk Tahun Pajak 1994 s.d. 2024 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp107.440.205.455 (Rp108.745.491.517,00 - Rp1.305.286.062,00).



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- b. Realisasi pembayaran ketetapan piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2025 atas 256.992 SPPT senilai Rp62.312.080.373,00, Sisa Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.760.607.950,00. Berdasarkan uraian diatas, saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp117.200.813.405,00 (Rp107.440.205.455 + Rp9.760.607.950,00).

Piutang PBB P2 sebesar Rp444.866.403,00 sudah dilakukan pembayaran oleh WP kepada Kepala UPTD Bosar Maligas, tetapi belum dilakukan penyetoran ke RKUD.

Pengenaan Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Pengenaan penyisihan piutang pajak disesuaikan umur masa piutang sebagaimana dijelaskan diatas. Sesuai dengan penerapan standar akuntansi berbasis akrual, kualitas piutang pajak dikategorikan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan dan macet dengan persentase dan umur sebagai berikut:

Tabel 132. Rincian Pengenaan Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Kategori	%	Umur
Lancar	0,50%	< 1 thn
Kurang lancar	10%	dari 1 s.d. 2 thn
Diragukan	50%	dari 2 s.d. 5 thn
Macet	100%	> 5 thn

Berdasarkan kebijakan pengenaan penyisihan tersebut diperoleh Akumulasi Penyisihan Piutang PBB-P2 sampai dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp83.152.413.490,90 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 133. Rincian Akumulasi Penyisihan Piutang Ragu-Ragu atas Piutang PBB-P2 Tahun 2024

Tahun	SPPT	Pokok Piutang PBB	Akumulasi Penyisihan Piutang				Jumlah	Nilai Buku Piutang
			Kualitas					
			Lancar < 1 thn (0,50%)	Kurang Lancar dari 1 thn s.d 2 thn (10%)	Diragukan dari 2 s.d 5 thn (50%)	Macet >5 thn (100%)		
1994	3.492	18.766.380,00				18.766.380,00	18.766.380,00	-
1995	70.801	543.127.911,00				543.127.911,00	543.127.911,00	-
1996	113.509	1.022.250.449,00				1.022.250.449,00	1.022.250.449,00	-
1997	120.386	1.023.800.257,00				1.023.800.257,00	1.023.800.257,00	-
1998	116.830	1.060.659.308,00				1.060.659.308,00	1.060.659.308,00	-
1999	107.744	911.653.376,00				911.653.376,00	911.653.376,00	-
2000	136.365	1.323.172.413,00				1.323.172.413,00	1.323.172.413,00	-
2001	146.940	1.553.395.913,00				1.553.395.913,00	1.553.395.913,00	-
2002	148.310	1.809.136.901,00				1.809.136.901,00	1.809.136.901,00	-
2003	99.679	1.397.594.433,00				1.397.594.433,00	1.397.594.433,00	-
2004	104.868	1.459.397.630,00				1.459.397.630,00	1.459.397.630,00	-
2005	111.451	1.617.328.203,00				1.617.328.203,00	1.617.328.203,00	-
2006	79.382	1.324.690.414,00				1.324.690.414,00	1.324.690.414,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tahun	SPPT	Pokok Piutang PBB	Akumulasi Penyisihan Piutang				Jumlah	Nilai Buku Piutang
			Kualitas					
			Lancar < 1 thn (0,50%)	Kurang Lancar dari 1 thn s.d 2 thn (10%)	Diragukan dari 2 s.d 5 thn (50%)	Macet >5 thn (100%)		
2007	97.285	2.009.388.953,00				2.009.388.953,00	2.009.388.953,00	-
2008	135.444	3.141.854.207,00				3.141.854.207,00	3.141.854.207,00	-
2009	139.021	3.315.254.191,00				3.315.254.191,00	3.315.254.191,00	-
2010	226.016	5.141.374.872,00				5.141.374.872,00	5.141.374.872,00	-
2011	213.397	4.459.307.989,00				4.459.307.989,00	4.459.307.989,00	-
2012	276.783	7.216.892.483,00				7.216.892.483,00	7.216.892.483,00	-
2013	141.684	3.846.698.300,00				3.846.698.300,00	3.846.698.300,00	-
2014	130.083	4.499.001.041,00				4.499.001.041,00	4.499.001.041,00	-
2015	166.006	4.949.676.561,00				4.949.676.561,00	4.949.676.561,00	-
2016	119.088	3.823.705.580,00				3.823.705.580,00	3.823.705.580,00	-
2017	84.942	4.156.817.718,00				4.156.817.718,00	4.156.817.718,00	-
2018	86.124	4.488.811.206,00				4.488.811.206,00	4.488.811.206,00	-
2019	111.914	5.649.530.296,00				5.649.530.296,00	5.649.530.296,00	-
2020	130.853	7.724.748.456,00			3.862.374.228,00		3.862.374.228,00	3.862.374.228,00
2021	128.376	7.656.967.945,00			3.828.483.972,50		3.828.483.972,50	3.828.483.972,50
2022	91.538	6.044.478.310,00			3.022.239.155,00		3.022.239.155,00	3.022.239.155,00
2023	92.216	6.297.358.961,00		629.735.896,10			629.735.896,10	5.667.623.064,90
2024	126.213	9.258.650.860,00	46.293.254,30				46.293.254,30	9.212.357.605,70
Jumlah	3.856.740,00	108.745.491.517,00	46.293.254,30	629.735.896,10	10.713.097.355,50	71.763.286.985,00	83.152.413.490,90	25.593.078.026,10

Sedangkan Penyisihan Piutang Ragu-Ragu atas PBB-P2 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp89.789.524.519,50 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 134. Rincian Akumulasi Penyisihan Piutang Ragu-ragu atas Piutang PBB-P2 Tahun 2025

Tahun	SPPT	Pokok Piutang PBB	Akumulasi Penyisihan Piutang				Jumlah	Nilai Buku Piutang
			Kualitas					
			Lancar < 1 thn (0,50%)	Kurang Lancar dari 1 thn s.d 2 thn (10%)	Diragukan dari 2 s.d 5 thn (50%)	Macet >5 thn (100%)		
1994	3.492	18.759.580,00				18.759.580,00	18.759.580,00	-
1995	70.801	541.151.714,00				541.151.714,00	541.151.714,00	-
1996	113.509	1.016.706.548,00				1.016.706.548,00	1.016.706.548,00	-
1997	120.386	1.017.956.645,00				1.017.956.645,00	1.017.956.645,00	-
1998	116.830	1.055.807.230,00				1.055.807.230,00	1.055.807.230,00	-
1999	107.744	909.064.963,00				909.064.963,00	909.064.963,00	-
2000	136.365	1.318.754.878,00				1.318.754.878,00	1.318.754.878,00	-
2001	146.940	1.546.532.344,00				1.546.532.344,00	1.546.532.344,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tahun	SPPT	Pokok Piutang PBB	Akumulasi Penyisihan Piutang				Jumlah	Nilai Buku Piutang
			Kualitas					
			Lancar < 1 thn (0,50%)	Kurang Lancar dari 1 thn s.d 2 thn (10%)	Diragukan dari 2 s.d 5 thn (50%)	Macet >5 thn (100%)		
2002	148.310	1.799.070.721,00				1.799.070.721,00	1.799.070.721,00	-
2003	99.679	1.394.685.698,00				1.394.685.698,00	1.394.685.698,00	-
2004	104.868	1.454.848.775,00				1.454.848.775,00	1.454.848.775,00	-
2005	111.451	1.614.782.201,00				1.614.782.201,00	1.614.782.201,00	-
2006	79.382	1.321.978.674,00				1.321.978.674,00	1.321.978.674,00	-
2007	97.285	2.006.631.315,00				2.006.631.315,00	2.006.631.315,00	-
2008	135.444	3.137.254.472,00				3.137.254.472,00	3.137.254.472,00	-
2009	139.021	3.302.793.885,00				3.302.793.885,00	3.302.793.885,00	-
2010	226.016	5.131.618.009,00				5.131.618.009,00	5.131.618.009,00	-
2011	213.397	4.448.669.307,00				4.448.669.307,00	4.448.669.307,00	-
2012	276.783	7.194.196.818,00				7.194.196.818,00	7.194.196.818,00	-
2013	141.684	3.820.604.367,00				3.820.604.367,00	3.820.604.367,00	-
2014	130.083	4.472.597.090,00				4.472.597.090,00	4.472.597.090,00	-
2015	166.006	4.918.859.127,00				4.918.859.127,00	4.918.859.127,00	-
2016	119.088	3.793.385.930,00				3.793.385.930,00	3.793.385.930,00	-
2017	84.942	4.131.454.208,00				4.131.454.208,00	4.131.454.208,00	-
2018	86.124	4.457.944.748,00				4.457.944.748,00	4.457.944.748,00	-
2019	111.914	5.598.616.573,00				5.598.616.573,00	5.598.616.573,00	-
2020	130.853	7.652.700.432,00				7.652.700.432,00	7.652.700.432,00	-
2021	128.376	7.575.684.616,00			3.787.842.308,00		3.787.842.308,00	3.787.842.308,00
2022	91.538	5.954.016.526,00			2.977.008.263,00		2.977.008.263,00	2.977.008.263,00
2023	92.216	6.159.849.726,00			3.079.924.863,00		3.079.924.863,00	3.079.924.863,00
2024	126.213	8.673.228.335,00		867.322.833,50			867.322.833,50	7.805.905.501,50
2025	384.377	9.760.607.950,00	48.803.039,75				48.803.039,75	9.711.804.910,25
Jumlah	4.241.117,00	117.200.813.405,00	0,00	867.322.833,50	9.844.775.434,00	79.077.426.252,00	89.838.327.559,25	27.362.485.845,75

5.3.1.1.12. Piutang Retribusi Daerah

Tahun 2025

Tahun 2024

Rp2.309.768.601,00

Rp2.309.768.601,00

Piutang Retribusi Tahun 2025 sebesar Rp2.309.768.601,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp2.309.768.601,00, tidak terdapat penambahan Piutang Retribusi atas ketetapan Tahun 2025 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 135. Rincian Piutang Retribusi TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Retribusi Izin Gangguan HO	2.287.948.601,00	2.287.948.601,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)		
2	Retribusi ITPM Alkohol	21.820.000,00	21.820.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.309.768.601,00	2.309.768.601,00	0,00	0,00

a. Masa Piutang Retribusi

Masa Piutang Retribusi setelah dikurangi dengan pelunasan oleh wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 136. Rincian Masa Piutang Retribusi tahun 2008 s.d. 2025

Tahun	Jenis		Jumlah
	Retribusi. Izin Gangguan HO	Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
2008	391.135.650,00	0,00	391.135.650,00
2009	168.753.914,00	4.950.000,00	173.703.914,00
2010	244.677.646,00	5.090.000,00	249.767.646,00
2011	649.347.004,00	5.090.000,00	654.437.004,00
2012	445.710.887,00	5.990.000,00	451.700.887,00
2013	16.189.600,00	350.000,00	16.539.600,00
2014	58.676.050,00	350.000,00	59.026.050,00
2015	282.027.800	0,00	282.027.800,00
2016	12.008.300,00	0,00	12.008.300,00
2017	19.421.750,00	0,00	19.421.750,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.287.948.601,00	21.820.000,00	2.309.768.601,00

b. Kualitas Piutang Retribusi

Kualitas Piutang Retribusi diatur sebagaimana ditetapkan pada Bab IV CaLK, dengan kualitas sebagai berikut:

Tabel 137. Rincian Kualitas Piutang Retribusi TA 2025

Kategori	%	Umur
Lancar	0,50%	< 1 bln
Kurang lancar	10%	Dari 1 s.d. 3 bln
Diragukan	50%	dari 3 s.d.12 bln
Macet	100%	> 12 bln

Perhitungan Akumulasi Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.309.768.601,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 138. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi TA 2024

Tahun	Jumlah	Akumulasi Penyisihan Piutang Retribusi				Jumlah	Nilai Buku Piutang
		Kualitas					
		Lancar < 1 bln (0,50%)	Kurang Lancar dari 1 s.d 3 bln (10%)	Diragukan dari 3 s.d 12 bln (50%)	Macet >12 bln (100%)		
2008	391.135.650,00	0,00	0,00	0,00	391.135.650,00	391.135.650,00	0,00
2009	173.703.914,00	0,00	0,00	0,00	173.703.914,00	173.703.914,00	0,00
2010	249.767.646,00	0,00	0,00	0,00	249.767.646,00	249.767.646,00	0,00
2011	654.437.004,00	0,00	0,00	0,00	654.437.004,00	654.437.004,00	0,00
2012	451.700.887,00	0,00	0,00	0,00	451.700.887,00	451.700.887,00	0,00
2013	16.539.600,00	0,00	0,00	0,00	16.539.600,00	16.539.600,00	0,00
2014	59.026.050,00	0,00	0,00	0,00	59.026.050,00	59.026.050,00	0,00
2015	282.027.800,00	0,00	0,00	0,00	282.027.800,00	282.027.800,00	0,00
2016	12.008.300,00	0,00	0,00	0,00	12.008.300,00	12.008.300,00	0,00
2017	19.421.750,00	0,00	0,00	0,00	19.421.750,00	19.421.750,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.309.768.601,00	0,00	0,00	0,00	2.309.768.601,00	2.309.768.601,00	0,00

Perhitungan Akumulasi Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.309.768.601,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 139. Rincian Perhitungan Akumulasi Penyisihan Piutang Retribusi TA 2025

Tahun	Jumlah	Akumulasi Penyisihan Piutang Retribusi				Jumlah	Nilai Buku Piutang
		Kualitas					
		Lancar < 1 bln (0,50%)	Kurang Lancar dari 1 s.d 3 bln (10%)	Diragukan dari 3 s.d 12 bln (50%)	Macet >12 bln (100%)		
2008	391.135.650,00	0,00	0,00	0,00	391.135.650,00	391.135.650,00	0,00
2009	173.703.914,00	0,00	0,00	0,00	173.703.914,00	173.703.914,00	0,00
2010	249.767.646,00	0,00	0,00	0,00	249.767.646,00	249.767.646,00	0,00
2011	654.437.004,00	0,00	0,00	0,00	654.437.004,00	654.437.004,00	0,00
2012	451.700.887,00	0,00	0,00	0,00	451.700.887,00	451.700.887,00	0,00
2013	16.539.600,00	0,00	0,00	0,00	16.539.600,00	16.539.600,00	0,00
2014	59.026.050,00	0,00	0,00	0,00	59.026.050,00	59.026.050,00	0,00
2015	282.027.800,00	0,00	0,00	0,00	282.027.800,00	282.027.800,00	0,00
2016	12.008.300,00	0,00	0,00	0,00	12.008.300,00	12.008.300,00	0,00
2017	19.421.750,00	0,00	0,00	0,00	19.421.750,00	19.421.750,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tahun	Jumlah	Akumulasi Penyisihan Piutang Retribusi				Jumlah	Nilai Buku Piutang
		Kualitas					
		Lancar < 1 bln (0,50%)	Kurang Lancar dari 1 s.d 3 bln (10%)	Diragukan dari 3 s.d 12 bln (50%)	Macet >12 bln (100%)		
Jumlah	2.309.768.601,00	0,00	0,00	0,00	2.309.768.601,00	2.309.768.601,00	0,00

5.3.1.1.13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3.1.1.14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp5.133.160.955,00	Rp5.125.114.637,00

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp5.133.160.955,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp8.046.318,00 atau 0,16%, jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp5.125.114.637,00. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan Piutang BLUD atas BPJS di tiga rumah sakit yaitu piutang RSUD Parapat sebesar Rp811.854.210,00, piutang RSUD Perdagangan sebesar Rp3.344.309.769, piutang RSUD Tuan Rondahaim Pematang Raya sebesar Rp786.058.533,00, piutang Pendapatan Jaminan Persalinan Puskesmas sebesar Rp64.040.000,00, piutang Pengembalian Jasa Konsultansi Dinas Pendidikan sebesar Rp36.000.000,00, piutang Pengembalian Jasa Konsultansi Pengawasan PUTR sebesar Rp24.179.643,00 dan Piutang dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Dinas Pertanian sebesar Rp66.718.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 140. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2025

No	Jenis Piutang	Saldo per 31 Desember 2024	Koreksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang (Terbayar)	Saldo per 31 Desember 2025
1	Piutang Pendapatan BLUD RSUD PARAPAT	814.494.287,00	(120.677.200,00)	811.854.210,00	693.817.087,00	811.854.210,00
2	Piutang Pendapatan BLUD RSUD Tn. Rondahaim	1.002.158.700,00	484.600,00	786.058.533,00	1.002.643.300,00	786.058.533,00
3	Piutang Pendapatan BLUD RSUD PERDAGANGAN	3.308.461.650,00	(539.282.400,00)	3.344.309.769,00	2.769.179.250,00	3.344.309.769,00
4	Piutang Penerimaan PAD Lainnya Jampersal Bulan Desember Dinas Kesehatan Puskesmas					64.040.000,00
5	Piutang dari Pengembalian kelebihan pembayaran belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Dinas Pendidikan					36.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Piutang	Saldo per 31 Desember 2024	Koreksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang (Terbayar)	Saldo per 31 Desember 2025
6	Piutang dari Pengembalian kelebihan pembayaran belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Dinas PUTR					24.179.643,00
7	Piutang dari Pengembalian kelebihan pembayaran belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Dinas Pertanian					66.718.800,00
Jumlah		5.125.114.637,00	(659.475.000,00)	4.942.222.512,00	4.465.639.637,00	5.133.160.955,00

5.3.1.1.15 Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp0,00 **Rp0,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan kurang bayar atas transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Tidak terdapat Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pada Tahun 2025.

5.3.1.1.16 Piutang Transfer antar Daerah **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp49.226.946.965,00 **Rp83.994.236.078,00**

Saldo Piutang Transfer antar Daerah Tahun 2025 sebesar Rp49.226.946.965,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp83.994.236.078,00 mengalami *penurunan* sebesar Rp34.767.289.113,00 atau 41,39%. Piutang Transfer antar Daerah terdiri dari :

5.3.1.1.16.1 Piutang Bagi Hasil **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp49.226.946.965,00 **Rp34.922.129.704,00**

Saldo Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 (per 31 Desember 2025) sebesar Rp49.226.946.965,00, sedangkan Piutang Pajak Tahun 2024 sebesar Rp34.922.129.704,00 mengalami *kenaikan* sebesar Rp14.304.817.261,00 atau 40,96% Piutang Pajak Bagi Hasil Tahun 2024 sesuai dengan SK Gubernur Nomor: 188.44/97/KPTS/2025 tanggal 22 Januari 2025. Piutang Pajak Bagi Hasil dari Pemprov atas hak Pemkab Simalungun pada TA 2025 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/231/KPTS/2026 tanggal 25 Maret 2026 sebesar Rp49.226.946.965,00. Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 pada tabel berikut:

Tabel 141. Rincian Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi TA 2025

No	Uraian	Piutang Per 31 Desember 2024	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang/Penyalaran RKUD TA 2025	Piutang Per 31 Desember 2025
			Koreksi Piutang TA 2024	Alokasi TA 2025		
1	DBH PKB	11.337.938.296,00	33.974.842.084,00	137.212.124,00	45.312.780.380,00	137.212.124,00
2	BBNKB	7.205.462.251,00	19.276.817.195,00	239.281.609,00	26.482.279.446,00	239.281.609,00
3	PBB-KB	16.378.729.157,00	43.145.300.632,00	45.461.482.646,00	60.024.029.789,00	44.961.482.646,00
4	PAP	0,00	2.894.385.194,00	3.888.970.586,00	2.894.385.194,00	3.888.970.586,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Piutang Per 31 Desember 2024	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang/Penyuluran RKUD TA 2025	Piutang Per 31 Desember 2025
			Koreksi Piutang TA 2024	Alokasi TA 2025		
5	ROKOK	0,00	0,00	55.195.512.857,00	55.195.512.857,00	0,00
	JUMLAH	34.922.129.704,00	99.291.345.105,00	104.922.459.822,00	189.908.987.666,00	49.226.946.965,00

5.3.1.1.16.2 Piutang Bantuan Keuangan Tahun 2025 Tahun 2024
Rp0,00 Rp49.072.106.374,00

Saldo Piutang Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp0,00, sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp49.072.106.374,00. Piutang Pajak tahun 2024 telah direalisasikan di Tahun 2025.

5.3.1.1.17 Piutang Lainnya Tahun 2025 Tahun 2024
Rp0,00 Rp88.500,00

Saldo Piutang Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp88.500,00.

5.3.1.1.18 Penyisihan Piutang Tahun 2025 Tahun 2024
Rp(102.365.813.390,77) Rp(94.180.760.493,38)

Saldo Penyisihan Piutang pada Tahun 2025 sebesar Rp(102.365.813.390,77) mengalami penambahan sebesar Rp(8.185.052.897,39) atau 8,69%, jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp(94.180.760.493,38) dengan uraian sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Tahun 2025 untuk Piutang Pajak Daerah sebesar Rp10.217.717.230,52, sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp8.718.578.401,48. Selisih bertambah sebesar Rp1.499.138.829,04 menjadi penambah akumulasi Penyisihan Piutang Tahun 2025. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Daerah telah dijelaskan pada catatan 5.3.1.1.10.1 atas Laporan Keuangan tentang Piutang Pajak Daerah diluar PBB-P2;
2. Penyisihan Piutang PBB-P2 Tahun 2025 sebesar Rp89.838.327.559,25, sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp83.152.413.490,90, sehingga Akumulasi Penyisihan Piutang Tahun 2025 **bertambah** sebesar Rp6.685.914.068,35. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang PBB-P2 telah dijelaskan pada catatan 5.3.1.1.10.2 atas Laporan Keuangan tentang Piutang PBB-P2;
3. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp2.309.768.601,00 tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah telah dijelaskan pada catatan 5.3.1.1.11 atas Laporan Keuangan tentang Piutang Retribusi Daerah. Penyisihan Piutang disajikan pada **Lampiran XX**. Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 142. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tahun 2025

Uraian	Akumulasi Penyisihan Sampai 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Akumulasi Penyisihan Sampai 31 Des 2025
Piutang Pajak Daerah (Non PBB)			
Pajak Hotel	1.281.305.737,44	(176.213.975,22)	1.105.091.762,22
Pajak Restoran	758.708.613,22	126.474.990,61	885.183.603,83



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Akumulasi Penyisihan Sampai 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Akumulasi Penyisihan Sampai 31 Des 2025
Pajak Mineral	433.130.801,35	6.280.938,88	439.411.740,23
Pajak Reklame	422.160.389,47	25.647.856,54	447.808.246,01
Pajak Air Tanah	5.805.259.232,50	1.515.668.590,73	7.320.927.823,23
Pajak hiburan	17.207.572,50	466.732,50	17.674.305,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
Pajak Parkir	806.055,00	813.695,00	1.619.750,00
Jumlah Akm Penyisihan Piutang Pajak	8.718.578.401,48	1.499.138.829,04	10.217.717.230,52
Piutang Pajak Daerah (PBB)			
PBB	83.152.413.490,90	6.685.914.068,35	89.838.327.559,25
Jumlah Akm Penyisihan Piutang PBB	83.152.413.490,90	6.685.914.068,35	89.838.327.559,25
Piutang Retribusi Daerah			
Retribusi Izin Gangguan	2.287.948.601,00	0,00	2.287.948.601,00
Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	21.820.000,00	0,00	21.820.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	2.309.768.601,00	0,00	2.309.768.601,00
Penyisihan Piutang Sampai 31 Desember 2025	94.180.760.493,38	8.185.052.897,39	102.365.813.390,77

5.3.1.1.19 Beban Dibayar Dimuka **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp0,00 **Rp0,00**

Tidak terdapat Beban Dibayar Dimuka pada Tahun 2025 dan Tahun 2024.

5.3.1.1.20 Persediaan **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp21.691.000.479,10 **Rp27.367.030.512,18**

Saldo Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp21.691.000.479,10 mengalami *penurunan* sebesar Rp5.676.030.033,08 atau 20,74%, jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp27.367.030.512,18. Persediaan Tahun 2025 berupa barang habis pakai dengan kondisi baik pada SKPD yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Simalungun dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan selama TA 2025 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 143. Rincian Persediaan TA 2025

JENIS PERSEDIAAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN
	(Rp)	(Rp)	
Bahan Bangunan dan Konstruksi	30.200.000,00	0,00	30.200.000,00
Bahan Kimia	301.466.025,50	333.244.275,00	(31.778.249,50)
Bahan Baku	8.049.520,00	0,00	8.049.520,00
Bahan/Bibit Tanaman	80.000,00	0,00	80.000,00
Isi Tabung Gas	410.000,00	690.000,00	(280.000,00)
Bahan Lainnya	303.000,00	0,00	303.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

JENIS PERSEDIAAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN
	(Rp)	(Rp)	
Suku Cadang Alat Kedokteran	150.329.333,80	597.831.709,07	(447.502.375,27)
Suku Cadang Alat Laboratorium	3.433.507,64	104.442.092,00	(101.008.584,36)
Alat Tulis Kantor	86.615.814,00	137.489.577,00	(50.873.763,00)
Kertas dan Cover	72.466.569,52	94.937.776,54	(22.471.207,02)
Bahan Cetak	153.747.596,96	301.063.843,18	(147.316.246,22)
Benda Pos	371.000,00	227.500,00	143.500,00
Bahan Komputer	192.734.450,00	722.777.450,00	(530.043.000,00)
Perabot Kantor	17.815.712,00	55.359.500,00	(37.543.788,00)
Alat Listrik	20.116.397,00	5.666.200,00	14.450.197,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	250.000,00	0,00	250.000,00
Suvenir/Cendera Mata	71.400.000,00	76.700.000,00	(5.300.000,00)
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	229.909.660,29	281.358.850,00	(51.449.189,71)
Obat	10.547.113.464,52	7.740.203.831,44	2.806.909.633,08
Obat-obatan Lainnya	6.239.853.995,96	2.999.178.573,15	3.240.675.422,81
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	3.554.390.181,91	13.911.056.334,80	(10.356.666.152,89)
Natura	9.282.250,00	4.671.500,00	4.610.750,00
Natura dan Pakan Lainnya	662.000,00	131.500,00	530.500,00
JUMLAH	21.691.000.479,10	27.367.030.512,18	(5.676.030.033,08)

Rincian Persediaan Per-SKPD TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran XXI**.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp190.308.626.325,48 **Rp182.808.626.325,48**

Investasi Jangka Panjang Tahun 2025 sebesar Rp190.308.626.325,48 mengalami *kenaikan* sebesar Rp7.500.000.000,00 atau 4,10%, jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp182.808.626.325,48. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp0,00 **Rp0,00**

Investasi Jangka Panjang Non Permanen terdiri dari investasi kepada Badan Usaha Milik Negara, investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah, investasi dalam Obligasi, investasi dalam Proyek Pembangunan, Dana Bergulir, Deposito Jangka Panjang, Investasi Non Permanen Lainnya. Pada Tahun 2025 dan 2024, tidak terdapat Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

5.3.1.2.1.1 Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp0,00 **Rp0,00**

Tidak terdapat saldo Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.3.1.2.1.2	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo Investasi dalam Obligasi per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3.1.2.1.3	Investasi dalam Obligasi	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo Investasi dalam Proyek Pembangunan per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3.1.2.1.4	Investasi dalam Proyek Pembangunan	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3.1.2.1.5	Dana Bergulir	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo Deposito Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3.1.2.1.6	Deposito Jangka Panjang	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo Deposito Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3.1.2.1.7	Investasi Non Permanen Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.2.1.8	Investasi Permanen Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp190.308.626.325,48	Rp182.808.626.325,48

Jumlah saldo Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simalungun pada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT Bank Sumut, PDAM Tirta Lihou, dan PD Agromadear dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Rincian dari Investasi Jangka Panjang Permanen diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal	Tahun 2025	Tahun 2024
Pemerintah Daerah	Rp190.308.626.325,48	Rp182.808.626.325,48

Pada Tahun 2025 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp190.308.626.325,48 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.500.000.000,00 atau 4,10%, jika dibandingkan saldo Tahun 2024 sebesar Rp182.808.626.325,48. Penyertaan Modal tersebut terdiri dari penyertaan modal ke PT BANK SUMUT sebesar Rp100.051.534.997,00, PDAM Tirta Lihou Tahun 2024 sebesar Rp29.966.807.328,48,00. Perusahaan Daerah Agromadear berupa tanah sebesar Rp60.290.284.000. Dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 144. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2024

Nama BUMD	Jumlah TA 2025	Jumlah TA 2024	Kenaikan/Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)		
PT Bank Sumut	100.051.534.997,00	92.551.534.997,00	7.500.000.000,00	8,10
PDAM Tirta Lihou	29.966.807.328,48	29.966.807.328,48	0,00	0,00
PD Agromadear	60.290.284.000,00	60.290.284.000,00	0,00	0,00
Jumlah	190.308.626.325,48	182.808.626.325,48	7.500.000.000,00	4,10

Penjelasan atas penyertaan modal pada masing-masing BUMD diuraikan sebagai berikut.

a. Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT Bank Sumut

Sesuai dengan surat nomor 026/KC29/L/2026 perihal Konfirmasi Data Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sumut tanggal 13 Januari 2026, nilai penyertaan modal di PT Bank Sumut pada tanggal tersebut adalah sebesar Rp100.051.534.997,00, dengan Jumlah lembar saham sebesar Rp400.206.160,00 yang dirinci pada tabel berikut:

Tabel 145. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sumut Tahun 2012 s.d. 2025

Uraian	Jumlah
	(Rp)
Sampai dengan tahun buku 2012	31.314.230.000,00
Setoran Saham 2014	2.793.940.000,00
Setoran Triwulan II tahun 2016	8.000.000.000,00
Setoran Triwulan I tahun 2017	4.391.160.000,00
Setoran Triwulan IV tahun 2017	7.258.710.000,00
Setoran Triwulan IV tahun 2018	8.503.759.000,00
Setoran Triwulan III tahun 2019	7.032.621.000,00
Setoran Triwulan I tahun 2021	3.886.385.700,00
Setoran Triwulan III tahun 2021	6.070.519.955,00
Setoran TW II tahun 2022	6.300.209.342,00
Setoran tahun 2024	7.000.000.000,00
Setoran tahun 2025	7.500.000.000,00
Jumlah	100.051.534.997,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

b. Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirta Lihou

PDAM Tirta Lihou didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun Nomor 2 Tahun 1983. Pelaksanaan Perda tersebut dijabarkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Simalungun Nomor 188.324/940/Huk-1987 tanggal 13 Januari 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun. Selanjutnya Perda Nomor 2 Tahun 1983 tersebut diperbarui dengan dikeluarkannya Perda Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun yang dilaksanakan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Simalungun Nomor 188.45/11393/PDAM tanggal 23 November 1994, Perda Nomor 43 Tahun 2001, dan Perda Nomor 1 Tahun 2017.

Jumlah *cost*/biaya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 Pada PDAM Tirta Lihou mengacu pada Laporan Keuangan (LK) *Unaudited* PDAM Tirta Lihou Tahun 2024 dikarenakan LK PDAM Tirta Lihou Tahun 2024 *Audited* mendapatkan opini *disclaimer* dan LK *Audited* PDAM Tirta Lihou Tahun 2025 belum disampaikan ke BPKPD sebagai entitas pelaporan sampai penyajian Laporan Keuangan *Audited* Pemerintah Kabupaten Simalungun. Jumlah *cost*/biaya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan nilai penyertaan modal per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp29.966.807.328,48 dengan persentase kepemilikan sebesar 57,49%. Jumlah *cost*/biaya penyertaan modal tersebut telah memperhitungkan mutasi selama Tahun 2024.

Sebagai pemegang saham mayoritas (>50%), nilai penyertaan modal pada PDAM Tirta Lihou dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun disajikan dengan metode ekuitas yang memperhitungkan penyesuaian dampak perubahan nilai laba (rugi) perusahaan daerah sesuai dengan proporsi kepemilikan Pemerintah kabupaten Simalungun. Dalam Laporan Keuangan PDAM Tirta Lihou Tahun Buku 2024 (*Unaudited*), jumlah saldo akumulasi rugi ditahan perusahaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp59.443.152.550,92, setelah dikurangi laba tahun berjalan sebesar Rp30.840.744,00 tahun 2024, sehingga nilai penyertaan modal pada PDAM Tirta Lihou per 31 Desember 2023 dengan metode ekuitas adalah sebesar Rp29.966.807.328,48 {Rp64.140.675.730,00 – (57,49% x Rp59.443.152.550,92)}. Nilai penyertaan modal pada PDAM Tirta Lihou menjadi bertambah sebesar Rp17.730.344,35 (penyertaan modal sampai Tahun 2024 Rp29.966.807.328,48 – penyertaan modal Tahun 2023 Rp29.949.076.984,13) Rincian perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Lihou dengan metode ekuitas per 31 Desember 2024 diuraikan pada tabel berikut dan dapat dilihat pada **Lampiran XLVIII**.

Tabel 146. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah kepada PDAM Tirta Lihou sampai Tahun 2024

No	Uraian	Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Lihou (Rp)
1	Nilai Penyerahan Aset Pemda TK II Simalungun Tahun 1987	799.431.646,00
2	Subsidi Pemda TK II Simalungun tahun 1987	44.230.000,00
3	Subsidi Pemda TK II Simalungun tahun 1988	156.682.990,00
4	bantuan ongkos angkut pipa eks PPSAB - SU Tahun 1989	47.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Lihou (Rp)
5	Bantuan upah Proyek Air Minum Saran Padang dan P. Bandar Tahun 1990	42.546.000,00
6	Bantuan Biaya Listrik tahun 1993	33.053.070,00
7	bantuan biaya detail design dan supervisi/pengawasan teknis tahun 1994	144.335.100,00
8	bantuan biaya detail design dan supervisi/pengawasan teknis tahun 1996	61.857.900,00
9	Penyerahan aset RSS tambun sari	140.551.000,00
10	Penambahan penyertaan modal Pemkab Simalungun tahun 2003	118.712.000,00
11	Bantuan dana talangan tahun 2004	892.963.612,00
12	Bantuan dana talangan tahun 2005	500.000.000,00
13	Penyertaan modal tahun 2006	1.650.000.000,00
14	Penyertaan modal tahun 2007	2.800.000.000,00
15	Penyertaan modal tahun 2008	1.500.000.000,00
16	Penyertaan modal tahun 2009	1.500.000.000,00
17	Penyertaan modal tahun 2011	1.000.000.000,00
18	Penyertaan modal tahun 2014	5.681.042.000,00
19	Penyertaan modal tahun 2016:	0,00
20	Utang Jangka Panjang ke Departemen Keuangan	6.840.849.802,00
21	Bunga Pinjaman dan denda ke Departemen Keuangan	20.096.902.610,00
22	Penyertaan Modal Tahun 2017	0,00
23	Instalasi Transmisi dan Distribusi di unit pelayanan negeri dolok, bangunan dan kerasaan	2.000.000.000,00
24	Bahan instalasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	3.500.000.000,00
25	Instalasi Transmisi/Distribusi	1.540.018.000,00
26	Instalasi sambungan rumah MBR Tahun 2018	4.950.000.000,00
27	Instalasi sambungan rumah MBR Tahun 2019	8.100.000.000,00
Jumlah Cost/Biaya Penyertaan Modal s.d. 31 Desember 2024		64.140.675.730,00
Dikurangi: Penyesuaian metode ekuitas atas saldo akumulasi laba (rugi) ditahan perusahaan daerah per 31 Desember 2024 sesuai proporsi persentase kepemilikan {57,49% x Rp(59.443.152.550,92)}		(34.173.868.401,52)
Jumlah Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 (Metode Ekuitas)		29.966.807.328,48

c. Penyertaan Modal pada PD Agromadear

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simalungun pada Perusahaan Daerah Agromadear sampai 31 Desember 2025 mengacu pada Laporan Keuangan *Audited* PD Agromadear Tahun 2025.

PD Agromadear didirikan berdasarkan Perda Kabupaten Simalungun Nomor 44 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Perusahaan Daerah Agromadear Kabupaten Simalungun. Pada awal pendiriannya PD Agromadear bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan agribisnis guna membantu Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menjaga



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

stabilitas harga, sarana/prasarana pertanian, serta membantu masyarakat dan petani khususnya dalam pelayanan, penyediaan, pengadaan distribusi sarana/prasarana dan pemasaran hasil produksi serta bidang usaha lainnya.

Sesuai Peraturan Bupati Simalungun Nomor 36 Tahun 2011 tentang Penambahan Bidang Usaha pada Perusahaan Daerah Agromadear Kabupaten Simalungun dan Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Simalungun Nomor 521/1855/DPRD tanggal 12 Desember 2011 tentang Persetujuan Penambahan Jenis Usaha di Bidang Aneka Jasa, Bidang Usaha PD Agromadear terhitung sejak Tahun 2011 bertambah menjadi pengelolaan gedung dan lahan milik Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pemerintah Kabupaten Simalungun memiliki penyertaan modal 100% (kepemilikan tunggal) dari modal yang disetor kepada PD Agromadear. Berdasarkan struktur kepemilikan modal tersebut, maka investasi Pemerintah Kabupaten Simalungun dinilai dengan menggunakan metode Ekuitas. Nilai perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simalungun pada PD Agromadear dirinci pada tabel berikut.

Tabel 147. Rincian Penyertaan Modal pada PD Agromadear Tahun 2007-2013

NO	URAIAN	Nilai (Rp)
1	Penyertaan modal melalui SP2D No. 900/3027/BTL/LS/2007 tanggal 30 Nopember 2007	815.000.000,00
2	Penyertaan modal melalui SP2D No. 900/1655/BTL/Bantuan/2008 tanggal 13 Juni 2008	4.150.000.000,00
3	Penyertaan modal melalui SP2D No. 900/0404/Pembiayaan/2012 tanggal 14 Maret 2012	1.000.000.000,00
3	Penyertaan modal melalui SP2D No. 900/0938/Pembiayaan/2013 16 April 2013	500.000.000,00
4	Akumulasi kerugian tahun sebelumnya	(6.528.171.681,30)
5	Laba (Rugi) tahun berjalan	(229.106.601,70)
	Jumlah	(292.278.283,00)

Penyertaan modal pemerintah tersebut diatas dihitung berdasar Laporan Keuangan PD Agromadear Tahun Buku 2015 dan 2014 yang disusun oleh Plh Direktur PD Agromadear yang belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen. Sejak Tahun 2014 PD Agromadear tidak melakukan kegiatan operasional sampai tahun 2022 sehingga penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Simalungun belum dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus PD Agromadear. Data mengenai operasional dan pertanggungjawaban keuangan PD Agromadear sampai dengan Tahun 2022 tidak tersedia dengan lengkap.

Pada Tahun 2023, PD Agromadear kembali beroperasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Agromadear Kabupaten Simalungun dan mendapatkan Hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Simalungun sebesar Rp1.500.000.000,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00. Selain itu pada tahun 2023 juga terdapat Hibah berupa Aset Tetap Tanah dari Pemerintah Kabupaten Simalungun ke PD Agromadear sebesar Rp56.790.284.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Umum Daerah Agromadear. Saldo akhir Penyertaan Modal sebesar Rp60.290.284.000,00,



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

sebagaimana tercatat sebagai Ekuitas per 31 Desember 2024 pada Laporan Keuangan *Audited* PD Agromadear 2024. Rincian Penyertaan Modal PD Agromadear terdapat pada tabel berikut dan dapat dilihat dalam **Lampiran XLIX**.

Tabel 148. Rincian Penyertaan Modal pada PD Agromadear Tahun 2023-2025

NO	URAIAN	Nilai
		(Rp)
1	Penyertaan Modal berupa Hibah Tanah (Aset) - Nomor BAST : 900/9094.2/28.5/2023	56.790.284.000,00
2	Penyertaan Modal Dari Belanja Hibah 2023 - Nomor SP2D : 900/06061/LS/2023	1.500.000.000,00
3	Penyertaan Modal Dari Belanja Hibah 2024 - Nomor SP2D : 12.08/04.0/000487/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P4/11/2024	2.000.000.000,00
	Saldo Per 31 Desember 2025	60.290.284.000,00

5.3.1.2.2.2	Investasi – Pemberian	Tahun 2025	Tahun 2024
	Pinjaman Daerah	Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3.1.3	Aset Tetap	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp2.712.220.468.700,88	Rp2.563.031.221.986,57

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang digunakan untuk mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten Simalungun atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 149. Rincian Aset Tetap TA 2025 dan TA 2024

ASET TETAP	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Rp	Rp	Rp	
Tanah	624.561.196.091,75	621.374.326.091,75	3.186.870.000,00	0,51
Peralatan dan Mesin	795.138.574.188,25	753.301.063.371,43	41.837.510.816,82	5,55
Gedung dan Bangunan	1.868.950.000.877,24	1.738.151.762.397,24	130.798.238.480,00	7,53
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.716.737.802.776,20	2.574.560.214.876,80	142.177.587.899,40	5,52
Aset Tetap Lainnya	85.462.670.269,93	71.696.212.129,22	13.766.458.140,71	19,20
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.130.613.931,42	3.423.164.880,40	9.707.449.051,02	283,58
Akumulasi Penyusutan	(3.391.760.389.433,91)	(3.199.475.521.760,27)	(192.284.867.673,64)	6,01
JUMLAH ASET TETAP	2.712.220.468.700,88	2.563.031.221.986,57	149.189.246.714,31	5,82

Saldo Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp2.712.220.468.700,88 mengalami *peningkatan* sebesar Rp149.189.246.714,31 atau 5,82%, jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp2.563.031.221.986,57. Rincian Aset Tetap per SKPD TA 2025 disajikan pada **Lampiran XXII**. Terdapat saldo *Ekstrakomptabel* pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp55.249.694.631,26, saldo *Ekstrakomptabel* Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.153.248.120,00, saldo *Ekstrakomptabel* Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Rp21.552.542.631,35, dan saldo *Ekstrakomptabel* Aset Tetap sebesar Rp308.396.602.319,28 disajikan pada **Lampiran XXIII**. Aset tetap terdiri dari:

5.3.1.3.1 Tanah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp624.561.196.091,75	Rp621.374.326.091,75

Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2025 sebesar Rp624.561.196.091,75 mengalami *penurunan* sebesar Rp3.186.870.000,00 atau 0,51%, jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp621.374.326.091,75 dirincikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 150. Rincian Perhitungan Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025
A	Saldo Awal 2024	621.374.326.091,75
B	Bertambah:	3.449.289.822,94
1.	Belanja Modal	0,00
2.	Koreksi/Inventarisasi	0,00
3.	Hibah	3.186.870.000,00
4.	Antar KIB	0,00
5.	Antar SKPD	262.419.822,94
6.	Perubahan SOTK (Saldo Awal) SKPD	0,00
7.	Aset Lainnya	0,00
8.	Antar KIB	0,00
9.	Pembayaran Hutang	0,00
10.	Diserahkan ke Pihak III	0,00
C	Mutasi Berkurang	262.419.822,94
1.	Hibah Penyertaan Modal ke PD Agromadear	0,00
2.	Koreksi/Inventarisasi	0,00
3.	Hibah Ke Pihak Ke III	0,00
4.	Aset Lainnya/Inventarisasi	0,00
5.	Antar SKPD	262.419.822,94
6.	Perubahan SOTK (Saldo Awal) SKPD	0,00
7.	Antar KIB	0,00
D	Jumlah	624.561.196.091,75

Dari Daftar Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang (RDMB) Aset tetap tanah diatas terdapat nilai aset bertambah sebesar Rp3.449.289.822,94 sebagai berikut:

- a. Mutasi bertambah dari Hibah sebesar Rp3.186.870.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah hibah dari PT. London Sumatera sebesar Rp1.700.000.000,- dengan nomor surat LGL-27/LSIP/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dari Brigestone sebesar Rp1.486.870.000,- dengan nomor berita acara kesepakatan 500.17.1/898.a/2025 dan nomor: HR-1343/2025.
- b. Mutasi antar SKPD sebesar Rp262.419.822,94 terdapat pada :
Bertambah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp262.419.822,94 dari Kecamatan Tanah Jawa.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per SKPD disajikan dalam **Lampiran XXIV**.

Tanah Pemerintah Kabupaten Simalungun per 31 Desember 2025 sebanyak 2.223 persil terdiri dari:

- Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 388 sertifikat; sedangkan sisanya 1.835 persil belum bersertifikat dari 2.223 bidang aset tanah.
- Sebanyak 446 persil merupakan tanah untuk jalan dan 256 persil merupakan tanah untuk irigasi/bangunan pengairan;
- Sebanyak 9 persil tanah dikerjasamakan (kerjasama pemanfaatan) dengan pihak ketiga dan disajikan pada akun aset lainnya – aset yang dikerjasamakan (tanah) sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.5.17 atas Laporan Keuangan.

1. Tanah dalam Proses Sengketa

Pada tahun 2025 terdapat 9 bidang tanah yang sedang dalam sengketa baik dengan pihak ketiga maupun dengan sekelompok masyarakat dimana tahun dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 151. Rincian Daftar Tanah Sengketa s.d. Tahun 2025

No.	Nama/ Jenis Barang	SKPD	Lokasi	Tahun Perolehan	Luas (m ²)	Harga Perolehan	Keterangan
1	Tanah Bangunan Perumahan	Bina Marga	Marihat	1995	10.193	56.100,00	Dikuasai Masyarakat (Tindak lanjut sudah dilakukan survei oleh Dinas PUTR dan sudah ada surat pernyataan penguasaan fisik dari Sekda Simalungun)
2	Tanah Bangunan Perumahan	Bina Marga	Serbelawan	1995	210	67.200,00	Lahan dikuasai pihak ketiga
3	Tanah Bangunan Perumahan	Bina Marga	Balimbingan	1995	1.806	2.940.000,00	Lahan dikuasai pihak ketiga
4	Tanah Bangunan Perumahan	Bina Marga	Tanjung Tengah	1995	750	3.150.000,00	Lahan dikuasai pihak ketiga
5	Tanah Bangunan Perumahan	Bina Marga	Perlanaan	1995	1.157	43.200.000,00	Dikuasai Masyarakat
6	Tanah Bangunan Perumahan	Bina Marga	Sipago	1995	900	13.872.000,00	Dikuasai Masyarakat
7	Tanah Bangunan Perumahan	Bina Marga	Bukit Maraja	1995	840	60.800.000,00	Dikuasai Masyarakat
8	Tanah Bangunan Perumahan	Bina Marga	Hinalang	1995	1.521	20.020.000,00	Dikuasai Masyarakat
9	Tanah Bangunan Pasar	Kecamatan Gunung Malela	Pekan	2003	4.000	120.000.000,00	Dikuasai Oleh Masyarakat (Tindak lanjut sudah dilakukan pertemuan dengan masyarakat dan sudah ada pernyataan dari masyarakat yang menempati tanah tersebut, yang menyatakan dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Simalungun/Negara)

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Tahun 2025

Tahun 2024

Rp795.138.574.188,25

Rp753.301.063.371,43



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp795.138.574.188,25 dan Tahun 2024 sebesar Rp753.301.063.371,43. Apabila dibandingkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dengan Tahun 2024, maka saldo Tahun 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp41.837.510.816,82 atau 5,55%. Nilai Aset Peralatan Dan Mesin tersebut diatas belum termasuk nilai aset dari penyaluran digitalisasi pembelajaran ke SD dan SMP Negeri. Aset ini belum tercatat karena belum ada BAST dan nilai asetnya dengan rincian sebagai berikut :

- a) *Smart Board* dengan nama barang *Interactive Plat Panel* dengan merek/type Hisense IFP 75 inch 75 WM61FE jumlah 1 unit per sekolah dengan jumlah sekolah penerima SD Negeri sebanyak 672 sekolah dan SMP Negeri sebanyak 62 sekolah; dan
- b) Laptop dengan nama barang Laptop Zyrex dengan merek/type Zyrex Note Book Cruiser 22 A82 (57U-P-ESS) sebanyak 1 unit per sekolah dengan jumlah penerima SD Negeri sebanyak 672 sekolah dan SMP Negeri sebanyak 62 sekolah.

1. Penjelasan mengenai Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi peralatan dan mesin Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 152. Rincian Penjelasan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
A	Saldo Awal 2025	753.301.063.371,43
B	MUTASI BERTAMBAH	61.728.251.578,66
1	Perubahan SOTK SKPD	0,00
2	Reklas dari Belanja BLUD	304.695.808,00
3	BM BOS SD	6.957.144.127,00
4	BM BOS SMP	2.178.995.060,00
5	Belanja Barang Jasa BOP PAUD & KESETARAAN	4.100.000,00
6	Belanja Modal	49.775.122.859,00
7	Antar SKPD	967.901.100,66
8	Reklas dari KIB C	0,00
9	Reklas dari KIB E	312.875.928,00
10	Dari Belanja Barang Habis Pakai	945.159.066,00
11	Reklas dari Belanja Pemeliharaan	201.309.600,0
12	Hibah	0,00
13	Pengakuan Hutang JK Pendek	80.948.030,00
14	Koreksi / Inventarisasi	0,00
C	MUTASI BERKURANG	19.890.740.761,84
1	Perubahan SOTK SKPD	0,00
2	Koreksi / Inventarisasi	0,00
3	Reklas Ke BHP	414.417.182,00
4	Ke Pemeliharaan	0,00
5	Antar SKPD	967.901.100,66
6	Ekstrakomptabel (Tahun Lalu)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
7	Ekstrakomptabel	16.126.599.482,79
8	Reklas ke KIB C	931.562.000,00
9	Reklas ke KIB D	1.193.309.996,39
10	Reklas ke KIB E	136.951.000,00
11	Antar KIB ATB (Aset tak berwujud)	120.000.000,00
12	Pembayaran Hutang	0,00
13	Diserahkan Ke Pihak III	0,00
14	Reklas ke Aset Lain-Lain	0,00
D	Saldo Akhir 2025	795.138.574.188,25

Dari Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang (RDMB) Peralatan dan Mesin, rincian mutasi bertambah sebesar Rp61.728.251.578,66 yang terdiri atas:

- a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp49.775.122.859,00.
- b. Realisasi Belanja Modal BOS SD Tahun 2025 sebesar Rp6.957.144.127,00, Belanja Modal BOS SMP Tahun 2025 sebesar Rp2.178.995.060,00.
- c. Reklasifikasi Belanja dari Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp4.100.000,00.
- d. Reklasifikasi dari Belanja Barang Dan Jasa BLUD sebesar Rp304.695.808,00 yang terdapat pada tiga rumah sakit:
- e. Mutasi Peralatan dan Mesin antar OPD Tahun 2025 sebesar Rp967.901.100,66 terdiri dari:
 - 1) Mutasi Aset Peralatan dan Mesin BK 1386 T bertambah ke Dinas Pendidikan dari Sekretariat Daerah sebesar Rp199.087.600,00 dengan Berita Acara nomor: 024/362.a/2025.
 - 2) Mutasi alat kedokteran umum berupa *Implant Removal KIT* bertambah ke Dinas Kesehatan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp13.590.000,00. dengan Berita Acara nomor: 000.2.3.2/1024/2025.
 - 3) Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin IUD KIT Penyerahan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke RSUD Tn. Rondahaim Pamatang Raya sebesar Rp44.180.000,00 dengan Berita Acara nomor: 000.2.3.2/1022/2025.
 - 4) Mutasi Peralatan Dan Mesin - mobil dinas BK 1389 T bertambah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp209.261.500,00 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Berita Acara nomor : 000.2.3.2/600.2/88/2025.
 - 5) Mutasi Peralatan dan Mesin - mobil dinas BK 1107 T bertambah pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp131.585.000,00 dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Berita Acara nomor : 000.2.3.2/11/2025.
 - 6) Mutasi Aset Peralatan dan Mesin BK 1410 T bertambah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp231.277.000,00 dari Dinas Pendidikan dengan Berita Acara nomor: 024/896/2025
 - 7) Mutasi Peralatan dan Mesin dari Dinas Lingkungan Hidup berupa kendaraan roda tiga bertambah ke Kecamatan Purba sebesar Rp69.460.000,33 dengan Berita Acara nomor : 664/756/DLH/2025.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- 8) Mutasi Peralatan dan Mesin dari Dinas Lingkungan Hidup berupa kendaraan roda tiga bertambah ke Kecamatan Pane sebesar Rp69.460.000,33 dengan Berita Acara nomor: 664/755/DLH/2025.
- f. Reklasifikasi antar KIB, dari KIB E sebesar Rp312.875.928 atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dengan rincian berupa alat perlengkapan kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp245.190.928,00, alat praktek kesenian sebesar Rp53.685.000, dan personal komputer sebesar Rp14.000.000,00;
- g. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin bertambah dari Belanja Barang Habis Pakai sebesar Rp945.159.066,00 terdiri dari :
- 1) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin bertambah berupa Pompa, Alat Timbangan/Biara, Alat Laboratorium Pertanian, Alat Kantor Lainnya, Peralatan Studio Audio, Alat Kesehatan Umum Lainnya, Alat Laboratorium Kimia, Komputer Unit Lainnya, Alat Pendukung Pencarian, Produksi Lainnya, Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya, Peralatan Olahraga Lainnya dari Belanja Barang Dan Jasa Habis Pakai sumber Dana BOS Tahun 2025 sebesar Rp841.952.188,00 pada Dinas Pendidikan.
 - 2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin bertambah dari Belanja Habis Pakai pada Dinas Kesehatan sebesar Rp14.970.670,00 berupa Alat Labolatorium sebesar Rp5.990.670,00 dan UPS sebesar Rp8.980.000,00.
 - 3) Reklasifikasi Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang Habis Pakai Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp61.750.000,00,- berupa papan pengumuman.
 - 4) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin bertambah dari Belanja Habis Pakai Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa pompa sebesar Rp4.523.508,00.
 - 5) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin bertambah berupa Mesin Bor, Mesin Gerinda, dan Tenda dari Bahan Habis Pakai Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp13.046.900,00.
 - 6) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin bertambah dari Bahan Habis Pakai Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor pada Kecamatan Tanah Jawa sebesar Rp755.800,00.
 - 7) Reklasifikasi Aset Peralatan Dan Mesin Alat Rumah Tangga Lainnya (*Homeuse*) bertambah dari Belanja Bahan Habis Pakai Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi berupa tangki air pada Dinas Pariwisata sebesar Rp8.160.000,00.
- h. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin bertambah dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan berupa Alat Ukur Labolatorium Lingkungan Hidup/Alat Uji Emisi Gas dari Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp201.309.600,00
- i. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin bertambah dari pembelian dengan utang sebesar Rp80.948.030,00. pada RSUD Perdagangan.
- Mutasi kurang Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp19.890.740.761,84 terdiri dari:
- a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Barang Habis Pakai sebesar Rp414.417.182,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

- 1) Reklasifikasi dari Belanja Modal BOS Tahun 2025 ke BHP pada Dinas Pendidikan sebesar Rp236.933.394,00
- 2) Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 ke BHP pada Dinas Kesehatan sebesar Rp45.278.488,00.
- 3) Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 ke BHP pada RSUD Perdagangan sebesar Rp2.297.700,-.
- 4) Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 ke BHP pada RSUD Tn. Rondahaim sebesar Rp128.500.000,-.
- 5) Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 ke BHP pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.407.600,-.
- b. Mutasi Peralatan dan Mesin antar OPD Tahun 2025 sebesar Rp967.901.100,66 terdiri dari:
 - 1) Mutasi Aset Peralatan Dan Mesin BK 1386 T berkurang di Dinas Pendidikan dari Sekretariat Daerah sebesar Rp199.087.600,00.
 - 2) Mutasi Alat Kedokteran Umum berupa *Implant Removal KIT* berkurang dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke Dinas Kesehatan sebesar Rp13.590.000,00.
 - 3) Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin IUD KIT berkurang karena penyerahan dari Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ke RSUD Tn. Rondahaim Pamatang Raya sebesar Rp44.180.000,00
 - 4) Mutasi Peralatan dan Mesin - mobil dinas BK 1389 T berkurang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mutasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp209.261.500,00.
 - 5) Mutasi Peralatan dan Mesin - mobil dinas BK 1107 T berkurang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mutasi ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp131.585.000,00.
 - 6) Mutasi Aset Peralatan dan Mesin - BK 1410 T berkurang dari Dinas Pendidikan ke Sekretariat Daerah sebesar Rp231.277.000,00.
 - 7) Mutasi berkurang Peralatan dan Mesin dari Dinas Lingkungan Hidup berupa kendaraan roda tiga pada Kecamatan Purba sebesar Rp69.460.000,33.
 - 8) Mutasi bertambah Peralatan dan Mesin dari Dinas Lingkungan Hidup berupa kendaraan roda tiga bertambah pada Kecamatan Pane sebesar Rp69.460.000,33.
- c. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berkurang ke barang ekstrakomptabel sebesar Rp16.126.599.533,18.
- d. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD Tahun 2025 sebesar Rp931.562.000,00 dengan rincian:
 - 1) Berkurang ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp750.410.000,00; dan
 - 2) Berkurang ke Sekretariat Daerah atas pembangunan taman sebesar Rp181.152.000,-
- e. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berkurang ke Jalan, Jaringan Dan Irigasi pada Dinas Perhubungan berupa lampu jalan sebesar Rp1.193.309.996,39.
- f. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari Dana BOS berkurang ke Aset Tetap Lainnya berupa buku pada Dinas Pendidikan sebesar Rp136.951.000,-
- g. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berkurang ke Aset Tak Berwujud pada RSUD Tn. Rondahaim sebesar Rp120.000.000,-



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Penjelasan mengenai rincian per SKPD mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada **Lampiran XXV**.

Terdapat saldo Ektrakomptabel pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp55.249.694.631,26. dengan rincian per SKPD disajikan pada **Lampiran XXIII**.

2. Penjelasan mengenai Jumlah Peralatan dan Mesin Tahun 2025 yang Dipinjam Pakai

Jumlah Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sudah termasuk kendaraan roda 4 (empat) yang dipinjam pakai oleh instansi vertikal dan pejabat lainnya yang belum dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 153. Rincian Daftar Kendaraan Roda 4 (Empat) yang Dipinjam Pakai oleh Instansi Vertikal

No	Pemakai instansi/ swasta	Jenis barang	No Polisi	Tahun perjanjian	Thn Berakhir	Keterangan	Tindak Lanjut
1	PKK	Mitsubishi/L 300 BC	BK 1293 T	26-Sep-23	26-Sep-25	SEKDA - sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai kepada PKK Kabupaten Simalungun Nomor:024/10012/28.5/2023	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai
2	Kejaksaaan Negeri Siantar	Kendaraan Roda 4	BK 1266 T	Poses Administrasi Pembaharuan Pinjam Pakai		BAP/SEKDA	Sedang Dilakukan Penelusuran oleh OPD Terkait
3	POLRES Simalungun	Kendaraan Roda 4	BK 1267 T	Poses Administrasi Pembaharuan Pinjam Pakai		BAP/SEKDA	Sedang Dilakukan Penelusuran oleh OPD Terkait
4	Denpom	Toyota/Inov a	BK 1225 T	Poses Administrasi Pembaharuan Pinjam Pakai		BAP/SEKDA	Sedang Dilakukan Penelusuran oleh OPD Terkait
5	Denpom	Toyota/Inov a	BK 1361 T	Poses Administrasi Pembaharuan Pinjam Pakai		BAP/SEKDA	Poses Administrasi Pembaharuan Pinjam Pakai
6	Pengadilan	Toyota / Innova	BK 1268 T	Poses Administrasi Pembaharuan Pinjam Pakai		SEKDA	Sedang Dilakukan Penelusuran oleh OPD Terkait
7	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1126 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
8	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1134 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
9	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1117 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Pemakai instansi/ swasta	Jenis barang	No Polisi	Tahun perjanjian	Thn Berakhir	Keterangan	Tindak Lanjut
10	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1130 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
11	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1127 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
12	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1135 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
13	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1116 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
14	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1121 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
15	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1122 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
16	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1119 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
17	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1137 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
18	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1145 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
19	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1110 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
20	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1120 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Pemakai instansi/ swasta	Jenis barang	No Polisi	Tahun perjanjian	Thn Berakhir	Keterangan	Tindak Lanjut
21	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1136 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
22	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1142 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
23	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1139 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
24	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1128 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
25	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1114 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
26	Kodim	DAIHATSU / TARUNA	BK 1129 T	06-Jan-25	06-Jan-27	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.xa/28.5/2025
27	Korem	Mitsubishi/Strada double cabin	BK 9369 T	Poses Administrasi Pembaharuan Pinjam Pakai		Dinas PUPR	Sedang Dilakukan Penelusuran oleh OPD Terkait
28	BNNK	Toyota Innova GM/T Lux	BK 1432 T	26-Jun-23	26-Jun-25	SEKDA	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 024/1097/28.5/2023
29	Kejari	Toyota Fortuner 4x2, 2,4 G A/T Dsl Lux	BK 1431 T	Poses Administrasi Pembaharuan Pinjam Pakai		SEKDA	Sedang Dilakukan Penelusuran oleh OPD Terkait
30	Kejari	Honda CR-V 2,4 AT Prestige (VIN 2016)	BK 1420 T	Poses Administrasi Pembaharuan Pinjam Pakai		SEKDA	Sedang Dilakukan Penelusuran oleh OPD Terkait
31	Danrem	Ford	BK 9401 T	Poses Administrasi Pembaharuan Pinjam Pakai		SEKDA	Sedang Dilakukan Penelusuran oleh OPD Terkait
32	BPN	Yamaha JUPITER Z CW F1 (Velg Racing)	BK 3244 T	11-Jul-23	11-Jul-25	sudah dikembalikan kepada Pemerintah kabupaten Simalungun	Sudah ada Berita Acara Pengembalian Kendaraan Nomor 27/BA-12.08/VI/2024 tgl 04 Juni 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Pemakai instansi/ swasta	Jenis barang	No Polisi	Tahun perjanjian	Thn Berakhir	Keterangan	Tindak Lanjut
33	BPN	Yamaha JUPITER Z CW F1 (Velg Racing)	BK 3245 T	11-Jul-23	11-Jul-25	sudah dikembalikan kepada Pemerintah kabupaten Simalungun	Sudah ada Berita Acara Pengembalian Kendaraan Nomor 27/BA-12.08/VI/2024 tgl 04 Juni 2024
34	BPN	Yamaha JUPITER Z CW F1 (Velg Racing)	BK 3246 T	11-Jul-23	11-Jul-25	sudah dikembalikan kepada Pemerintah kabupaten Simalungun	Sudah ada Berita Acara Pengembalian Kendaraan Nomor 27/BA-12.08/VI/2024 tgl 04 Juni 2024
35	BPN	Yamaha JUPITER Z CW F1 (Velg Racing)	BK 3247 T	11-Jul-23	11-Jul-25	sudah dikembalikan kepada Pemerintah kabupaten Simalungun	Sudah ada Berita Acara Pengembalian Kendaraan Nomor 27/BA-12.08/VI/2024 tgl 04 Juni 2024
36	Kejaksanaan	Toyota New Kijang Inova G N/T Bensin	BK 1528 T	Poses Administrasi Pembaharuan Pinjam Pakai		Dinas Kesehatan	Proses Penerbitan Berita Acara Pinjam Pakai
37	Kepolisian Sektor Tanah Jawa	Isuzu D-Max Rodeo	BK 8066 T	09-Dec-23	09-Dec-24	sudah dikembalikan kepada Pemerintah kabupaten Simalungun	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai
38	Agromadeur (BUMD)	Mitsubishi-Xpander	BK 1455 T	06-Jan-25	06-Jan-27	Sekretariat Daerah	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.x/28.5/2025
39	Pengadilan Negeri Simalungun	Toyota-Inova Zenix	BK 1460 T	06-Jan-25	06-Jan-27	BPKPD	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/016/28.5/2025
40	Kapolres Simalungun	Toyota-Inova Zenix	BK 1462 T	06-Jan-25	06-Jan-27	BPKPD	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/017/28.5/2025
41	Dandim	Toyota-Inova Zenix	BK 1458 T	06-Jan-25	06-Jan-27	BPKPD	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/018/28.5/2025



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Pemakai instansi/ swasta	Jenis barang	No Polisi	Tahun perjanjian	Thn Berakhir	Keterangan	Tindak Lanjut
42	Majelis Ulama Indonesia	Mitsubishi-Xpander	BK 1456 T	05-Jan-25	05-Jan-27	Sekretariat Daerah	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/671.x6/28.5/2025
43	Kejaksaan Negeri Simalungun	Toyota-Inova Zenix	BK 1457 T	06-Jan-25	06-Jan-27	BPKPD	Sudah ada Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 900/015/28.5/2025
		Total	52 unit				

Tabel 154. Rincian Daftar Kendaraan Roda 4 (Empat) yang Sudah Kembali ke Pemerintah Kabupaten Simalungun Sebelumnya Dipinjam Pakai oleh Instansi Vertikal

No	Pemakai instansi/ swasta	Jenis barang	No Polisi	Tahun perjanjian	Thn Berakhir	Keterangan	Tindak Lanjut
1	Tagor Siahaan	Isuzu/Panther	BK 1193 T	Sudah Kembali			Sudah Dikembalikan ke Pemkab Simalungun
2	Januarison Saragih, SH, M.Hum	Toyota/Rush	BK 1188 T			- terdaftar dalam KIB B Sekretariat Dewan dan fisik dikuasai penuh oleh Sekretariat Dewan	Sudah Dikembalikan ke Pemkab Simalungun
3	KPU	Toyota / Innova	BK 1351 T	Sudah Kembali		SEKDA - sudah dikembalikan ke Pemkab Simalungun sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengembalian BMD Nomor 401/RT.03.3-BA/1208/1/2023	Sudah Dikembalikan ke Pemkab Simalungun
4	KPU	Toyota / Innova	BK 1352 T	Sudah Kembali		SEKDA - sudah dikembalikan ke Pemkab Simalungun sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengembalian BMD Nomor 401/RT.03.3-BA/1208/1/2023	Sudah Dikembalikan ke Pemkab Simalungun
5	KPU	Toyota / Innova	BK 1353 T	Sudah Kembali		SEKDA - sudah dikembalikan ke Pemkab Simalungun sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengembalian BMD Nomor 401/RT.03.3-BA/1208/1/2023	Sudah Dikembalikan ke Pemkab Simalungun



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Tahun Anggaran 2025

No	Pemakai instansi/ swasta	Jenis barang	No Polisi	Tahun perjanjian	Thn Berakhir	Keterangan	Tindak Lanjut
6	KPU	Toyota / Innova	BK 1354 T	Sudah Kembali		SEKDA - sudah dikembalikan ke Pemkab Simalungun sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengembalian BMD Nomor 401/RT.03.3-BA/1208/1/2023	Sudah Dikembalikan ke Pemkab Simalungun
7	KPU	Toyota / Innova	BK 1355 T	Sudah Kembali		SEKDA - sudah dikembalikan ke Pemkab Simalungun sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengembalian BMD Nomor 401/RT.03.3-BA/1208/1/2023	Sudah Dikembalikan ke Pemkab Simalungun
8	Dandim	Honda CR-V 2,4 AT Prestige (VIN 2016)	BK 1422 T	Sudah Kembali		SEKDA	Sudah Dikembalikan ke Pemkab Simalungun
9	Pengadilan	Honda CR-V 2,4 AT Prestige (VIN 2016)	BK 1423 T	Sudah Kembali		SEKDA	Sudah Dikembalikan ke Pemkab Simalungun
10	Kapolres Simalungun	HONDA C-RV 2.0 MT VIN2016	BK 1421 T	Sudah Kembali		SATPOL PP	Sudah Dikembalikan ke Pemkab Simalungun
11	BPN	Toyota Hilux	BK 9386 T	Sudah Kembali		BPKAD	Sudah Dikembalikan ke Pemkab Simalungun
12	PDAM Tirtalihou	Terios	BK 1236 T/BK 1702 WC	Bukan Milik Pemkab Simalungun		- Kendaraan Roda Empat Totota Rush adalah milik PDAM Tirta Lihou yang sudah dirubah menjadi plat hitam BK 1702 WC	Berdasarkan Surat Nomor : 047/969/BU.PDAM /2023 Perihal Kejelasan terkait status dan fisik Kendaraan Dinas bahwa kendaraan BK 1236 T sudah memiliki Nopol BK 1702 WC.
13	BPN	Ford Ranger	BK 9402 T	Sudah Kembali		Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	Sudah Dikembalikan ke Pemkab Simalungun
		Total	13 unit				

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Tahun 2025

Rp1.868.950.000.877,24

Tahun 2024

Rp1.738.151.762.397,24



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp1.868.950.000.877,24 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.738.151.762.397,24. Apabila dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dengan Tahun 2024, maka saldo Tahun 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp130.798.238.480,00 atau 7,53%. Nilai Aset Gedung dan Bangunan tersebut diatas sudah termasuk nilai Aset Gedung dan Bangunan dari revitalisasi sebanyak 16 SD Negeri dan 12 SMP Negeri.

Rincian perhitungan mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan uraian rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 155. Rincian Perhitungan Mutasi Aset Tetap
Gedung dan Bangunan Tahun 2025**

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
A	Saldo Awal 2025	1.738.151.762.397,24
B	Bertambah	146.931.295.755,99
1	Perubahan SOTK (Saldo Awal) SKPD	
2	Inventarisasi Fisik/Koreksi:	3.288.300.000,00
3	Belanja Modal APBD	68.257.309.278,00
4	Reklas Dari KIB B	931.562.000,00
5	Reklas Dari KIB E	0,00
6	Kapitalisasi	29.886.476.603,00
7	Hibah	27.856.699.654,00
8	Antar SKPD	8.805.768.715,00
9	Dari Belanja Barang untuk Diserahkan	5.233.548.005,99
10	Pengakuan Hutang Jangka Pendek	2.671.631.500,00
C	Modal Berkurang	16.133.057.275,99
1	Perubahan SOTK (Saldo Awal) SKPD	
2	Hibah/Barang yang diserahkan ke Pihak Ketiga	0,00
3	Inventarisasi/Koreksi Berkurang	625.900.416,99
4	Persediaan	
5	Reklas ke Aset Lainnya	0,00
6	Reklas Ke KIB D	0,00
7	Antar SKPD	8.805.768.715,00
8	Ekstrakomptabel	0,00
9	Reklas Ke KIB B	0,00
10	Reklas Ke KIB F	6.701.388.144,00
D	Jumlah	1.868.950.000.877,24

Dari Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang (RDMB) Aset Tetap Gedung dan Bangunan diatas terdapat nilai Aset bertambah sebesar Rp146.931.295.755,99 sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp68.257.309.278,00;
- b. Reklasifikasi dari KIB B sebesar Rp931.562.000,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp750.410.000,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp181.152.000,00;
- c. Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp29.886.476.603,00;



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- d. Hibah TA 2025 sebesar Rp27.856.699.654,00 dari dana revitalisasi SD Negeri sebanyak 16 sekolah dan SMP Negeri sebanyak 12 sekolah pada Dinas Pendidikan;
- e. Mutasi antar SKPD TA 2025 sebesar Rp8.805.768.715,00 bertambah pada Dinas Pendidikan Pembangunan Aula SMP Negeri 1 Raya sebesar Rp3.599.164.000,00 dengan berita acara nomor: 000.2.3.2/2576.k/2024 dari Dinas PUTR dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp5.206.604.715,00 dengan berita acara nomor: 000.2.3.2/256.J/2024 dari Dinas PUTR;
- f. Inventarisasi/Koreksi TA 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.288.300.000,00;
- g. Dari Belanja Barang TA 2025 sebesar Rp 5.116.548.005,99, pada Dinas PUTR sebesar Rp3.599.164.000,00, ruang terbuka publik sebesar Rp1.474.350.589,00, Pembangunan Loods (Gedung Serba Guna) di Nagori Purba Tua Etek Kec. Silimakuta (BKP) sebesar Rp43.033.416,99;
- h. Dari Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Kecamatan Panombeian Panei pembangunan tempat parkir sebesar Rp117.000.000,-;
- i. Pengakuan Utang Jangka Pendek TA 2025 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp74.457.500,00, dan BPBD sebesar Rp2.597.174.000,00.

Dari Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang (RDMB) Aset Tetap Gedung dan Bangunan diatas terdapat nilai Aset berkurang sebesar Rp16.133.057.275,99 sebagai berikut:

- a. Inventarisasi /koreksi TA 2025 sebesar Rp625.900.416,99; dengan rincian Pembangunan Loods (Gedung Serba Guna) di Nagori Purba Tua Etek Kec. Silimakuta sebesar Rp43.033.416,99 telah diserahkan dari Dinas PUTR ke Nagori Purba Tua Etek Kec. Silimakuta dan koreksi pencatatan nilai denda yang digabung dengan pokok utangnya pada saat pembayaran atas pembayaran utang BTT TA 2021 sebesar Rp582.867.000,00 pada BPBD;
- b. Mutasi antar SKPD TA 2025 sebesar Rp8.805.768.715,00 berkurang dari dinas PUTR ke Dinas Pendidikan Pembangunan Aula SMP Negeri 1 Raya sebesar Rp3.599.164.000,00 dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp5.206.604.715,00.
- c. Mutasi ke KIB F TA 2025 sebesar Rp6.701.388.144,00 pada Dinas Kesehatan karena pembangunannya belum selesai 100%.

Untuk penjelasan rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD diatas disajikan dalam **Lampiran XXVI**.

Terdapat Saldo Ekstrakomptabel Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.153.248.120,00, dengan rincian per SKPD disajikan pada **Lampiran XXIII**.

5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tahun 2025 Rp2.716.737.802.776,20	Tahun 2024 Rp2.574.560.214.876,80
-----------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp2.716.737.802.776,20 dan Tahun 2024 sebesar Rp2.574.560.214.876,80. Apabila dibandingkan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dengan Tahun 2024, maka saldo Tahun 2025 mengalami *peningkatan* sebesar Rp142.177.587.899,40 atau 5,52%.

Adapun rincian perhitungan mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan rincian penjelasan mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 156. Rincian Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
A	Saldo Awal 2025	2.574.560.214.876,80
B	Bertambah	169.870.783.247,40
1	Perubahan SOTK (Saldo Awal) SKPD	0,00
2	Inventarisasi Fisik/Koreksi :	5.472.660.000,00
3	Belanja Modal APBD	135.455.575.766,00
4	Belanja BLUD	105.461.100,00
5	Dari Belanja Barang	940.488.287,01
6	Dari Barang Ekstrakomptabel	0,00
7	Pengakuan Hutang JK Pendek	3.281.391.098,00
8	Reklas dari KIB B	1.193.309.996,39
9	Reklas dari KIB C	0,00
10	Reklas dari KIB F	0,00
11	Antar SKPD	23.421.897.000,00
12	Kapitalisasi	0,00
13	Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00
14	Pengakuan Aset dari Belanja BTT	0,00
C	Berkurang	27.693.195.348,00
1	Perubahan SOTK (Saldo Awal) SKPD	0,00
2	Inventarisasi/Koreksi	0,00
3	Pembayaran Hutang 2023	0,00
4	Ekstrakomptabel	0,00
5	Reklas Ke KIB F	4.122.091.848,00
6	Diserahkan ke Pihak ketiga/hibah	149.206.500,00
7	Ke Belanja Barang	0,00
8	Antar SKPD	23.421.897.000,00
D	Jumlah	2.716.737.802.776,20

Dari Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang (RDMB) Jalan, Irigasi dan Jaringan, rincian mutasi bertambah sebesar Rp169.870.783.247,40 yang terdiri atas:

- a. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 sebesar Rp135,455,575.766,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2025 sebesar Rp105.461.100,00 di RSUD Perdagangan;
- c. Bertambah dari Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp940.488.287,01 berupa instalasi air bersih sebesar Rp149.589.651,00 di RSUD Perdagangan, bangunan pembawa irigasi sebesar Rp399.339.668,00 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan sebesar Rp391.558.968,01 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Pengakuan Utang Jangka Pendek TA 2025 sebesar Rp3.281.391.098,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- e. Reklasifikasi dari KIB B TA 2025 sebesar Rp1.193.309.996,39 berupa lampu jalan pada Dinas Perhubungan;
 - f. Mutasi antar SKPD TA 2025 sebesar Rp23.421.897.000,00 dengan rincian sebagai berikut : bertambah pada Dinas Pendidikan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas Utang Bencana Alam tahun 2021 Penanggulangan Bencana Alam Longsor TPT Sekolah Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun Rp 1.138.000.000,00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bertambah sebesar Rp22.283.897.000,-. Bertambah dari :
 - 1) Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan- Jalan Desa sebesar Rp199.985.000,- dari Kecamatan Silimakuta;
 - 2) Mutasi Berkurang Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp198.495.500,- dari Kecamatan Ujung Padang;
 - 3) Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan Desa Dan Bangunan Pembuang Air Kotor sebesar Rp995.250.000,- dari Kecamatan Raya;
 - 4) Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp399.660.000,- dari Kecamatan Dolok Batu Nanggar;
 - 5) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp199.489.700,- dari Kecamatan Purba;
 - 6) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp397.512.000,- dari Kecamatan Bandar;
 - 7) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp596.662.200,- dari Kecamatan Girsang Sipangan Bolon;
 - 8) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp199.860.000,- dari Kecamatan Jorlang Hataran;
 - 9) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp399.248.600,- dari Kecamatan Pematang Bandar;
 - 10) Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Bangunan Pembuang Air Kotor Berkurang sebesar Rp199.870.000,- dari Kecamatan Tanah Jawa;
 - 11) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp199.057.200,- dari Kecamatan Sidamanik;
 - 12) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp198.630.800,- dari Kecamatan Tapan Dolok;
 - 13) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp200.000.000,- dari Kecamatan Huta Bayu Raja;
 - 14) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp199.533.800,- dari Kecamatan Pamatang Sidamanik;
 - 15) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp198.929.000,- dari Kecamatan Bosar Maligas;
 - 16) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp198.823.200,- dari Kecamatan Raya Kahean;
 - 17) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp198.690.000,- dari Kecamatan Haranggaol Horison;
- Dari Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang (RDMB) Jalan, Irigasi dan Jaringan, rincian mutasi berkurang sebesar Rp27.693.195.348,00 yang terdiri atas:
- a. Reklasifikasi ke KIB F TA 2025 sebesar Rp4.122.091.848,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang karena Progres fisiknya belum selesai 100%;



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

- b. Diserahkan ke pihak ketiga/hibah Rp149.206.500,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- g. Mutasi antar SKPD TA 2025 sebesar Rp23.421.897.000,00 dengan rincian sebagai berikut : berkurang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Pendidikan atas Utang Bencana Alam tahun 2021 Penanggulangan Bencana Alam Longsor TPT Sekolah Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun Rp 1.138.000.000,00 dan berkurang dari 17 Kecamatan sebesar Rp22.283.897.000,- ke Dinas PUTR. Dengan rincian dari :
- 1) Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan- Jalan Desa sebesar Rp199.985.000,- dari Kecamatan Silimakuta;
 - 2) Mutasi Berkurang Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp198.495.500,- dari Kecamatan Ujung Padang;
 - 3) Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan Desa Dan Bangunan Pembuang Air Kotor sebesar Rp995.250.000,- dari Kecamatan Raya;
 - 4) Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp399.660.000,- dari Kecamatan Dolok Batu Nanggar;
 - 5) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp199.489.700,- dari Kecamatan Purba;
 - 6) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp397.512.000,- dari Kecamatan Bandar;
 - 7) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp596.662.200,- dari Kecamatan Girsang Sipangan Bolon;
 - 8) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp199.860.000,- dari Kecamatan Jorlang Hataran;
 - 9) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp399.248.600,- dari Kecamatan Pematang Bandar;
 - 10) Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Bangunan Pembuang Air Kotor Berkurang sebesar Rp199.870.000,- dari Kecamatan Tanah Jawa;
 - 11) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp199.057.200,- dari Kecamatan Sidamanik;
 - 12) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp198.630.800,- dari Kecamatan Tapan Dolok;
 - 13) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp200.000.000,- dari Kecamatan Huta Bayu Raja;
 - 14) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp199.533.800,- dari Kecamatan Pamatang Sidamanik;
 - 15) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp198.929.000,- dari Kecamatan Bosar Maligas;
 - 16) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp198.823.200,- dari Kecamatan Raya Kahean;
 - 17) Mutasi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Sebesar Rp198.690.000,- dari Kecamatan Haranggaol Horison;

Pada Tahun 2025 masih terdapat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang belum dikapitalisasi ke Aset Induknya atas pekerjaan Peningkatan Jalan belum dikapitalisasi ke Aset Induk dengan nilai sebesar Rp10.672.646.006,37 dengan rincian pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penata Ruang sebesar Rp, pada Dinas Pertanian sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025*

Rp165.958.721,00, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp151.439.355,00, dan Kecamatan Bosar Maligas sebesar Rp199.611.500,00.

Untuk penjelasan rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD diatas disajikan dalam **Lampiran XXVII**.

Terdapat saldo Ekstrakomptabel Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.552.542.631,35 dengan rincian per SKPD disajikan pada **Lampiran XXIII**.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Tahun 2025

Tahun 2024

Rp85.462.670.269,93

Rp71.696.212.129,22

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 sebesar Rp85.462.670.269,93 dan Tahun 2024 sebesar Rp71.696.212.129,22. Apabila dibandingkan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dengan Tahun 2024, maka saldo Tahun 2025 mengalami **kenaikan** sebesar Rp13.766.458.140,71 atau 19,20% dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan mengenai Mutasi Aset Tetap Lainnya

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 157. Rincian Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
A	Saldo Awal 2025	71.696.212.129,22
B	MUTASI BERTAMBAH	31.757.857.742,43
1	Perubahan SOTK SKPD	0,00
2	Inventarisasi/Koreksi	47.240.000,00
3	Belanja BLUD BLUD	0,00
4	Belanja Modal	584.246.363,00
5	Belanja Modal BOS SD	18.396.171.640,00
6	Belanja Modal BOS SMP	9.444.285.820,00
7	Belanja Barang dan Jasal BOP PAUD	6.354.000,00
8	Antar SKPD	0,00
9	Reklas dari KIB B	136.951.000,00
10	Dari Beban Pemeliharaan	0,00
11	Dari Belanja Barang	3.142.608.919,43
12	Hibah	0,00
13	Pengakuan Hutang Jangka Pendek	0,00
C	MUTASI BERKURANG	17.991.399.601,72
1	Perubahan SOTK SKPD	0,00
2	Persediaan (Belanja Barang)	181.889.670,00
3	Antar SKPD	0,00
4	Ekstrakomptabel Tahun Berjalan	34.851.704,00
5	Ekstrakomptabel Tahun Lalu	17.414.542.299,72
6	Reklas ke KIB B	312.875.928,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025*

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
7	Reklas ke KIB C	0,00
8	Koreksi/Inventarisasi	47.240.000,00
9	Diserahkan Ke Pihak III	0,00
10	Ke Belanja Jasa	0,00
11	Ke Belanja Pemeliharaan	0,00
D	Saldo Akhir 2024	85.462.670.269,93

Rincian mutasi bertambah sebesar Rp31.757.857.742,43 terdiri dari :

- 1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp584.246.363,00;
- 2) Belanja Modal BOS SD TA 2025 sebesar Rp18.396.171.640,00;
- 3) Belanja Modal BOS SMP TA 2025 sebesar Rp9.444.285.820,00;
- 4) Reklasifikasi dari Belanja BOP PAUD & KESETARAAN TA 2025 sebesar Rp6.354.000,00;
- 5) Reklasifikasi dari KIB B TA 2025 sebesar Rp136.951.000,00 berupa buku dan barang bercorak kesenian lainnya di Dinas Pendidikan;
- 6) Koreksi/Inventarisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2025 berupa tanaman sebesar Rp47.240.000,00 di RSUD Tn. Rondahaim;
- 7) Bertambah dari Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2025 sebesar Rp3.142.608.919,43 berupa barang bercorak kesenian lainnya di Dinas Pendidikan.

Rincian mutasi berkurang sebesar Rp17.991.399.601,72 terdiri dari:

- 1) Koreksi/inventarisasi berupa tanaman sebesar Rp47.240.000,00 pada RSUD Tn. Rondahaim;
- 2) Ekstrakomptabel tahun berjalan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa buku pelajaran sebesar Rp34.851.704,00, dan ekstrakomptabel tahun sebelumnya berupa buku umum di Dinas Pendidikan dari belanja modal BOS dan APBD sebesar Rp17.414.542.299,72
- 3) Reklasifikasi ke KIB B TA 2025 sebesar Rp312.875.928,00 berupa buku pelajaran dan barang bercorak kesenian di Dinas Pendidikan;
- 4) Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Persediaan sebesar Rp181.889.670,00 berupa buku umum di Dinas Pendidikan;

Untuk penjelasan rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD diatas disajikan dalam **Lampiran XXVIII.**

Terdapat Saldo Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp308.396.602.319,28 dengan rincian Per SKPD disajikan pada **Lampiran XXIII.**

5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam	Tahun 2025	Tahun 2024
	Pengerjaan	Rp13.130.613.931,42	Rp3.423.164.880,40

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 sebesar Rp13.130.613.931,42 dan Tahun 2024 sebesar Rp3.423.164.880,40. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp6.228.001.212,39 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp6.902.612.719,03. Konstruksi Dalam Pengerjaan terdiri dari realisasi pembayaran termin dengan rincian disajikan pada disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Tahun Anggaran 2025

Tabel 158. Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
A	Saldo Awal 2025	3.423.164.880,40
B	Bertambah	13.130.613.931,42
1	Perubahan SOTK (Saldo Awal) SKPD	0,00
2	Inventarisasi Fisik :	0,00
3	Belanja Modal APBD	0,00
4	Pengakuan Hutang JK Pendek	0,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.130.613.931,42
6	Mutasi Dari KIB D	0,00
7	Kapitalisasi	0,00
8	Hibah	0,00
9	Antar SKPD	0,00
C	Modal Berkurang	3.423.164.880,40
1	Perubahan SOTK (Saldo Awal) SKPD	0,00
2	Hibah/Barang yang diserahkan ke Pihak Ketiga	0,00
3	Persediaan	0,00
4	Aset Lainnya	0,00
5	Mutasi Ke KIB C	3.423.164.880,40
6	Antar SKPD	0,00
7	Ekstrakomptabel	0,00
8	Mutasi Ke KIB B	0,00
D	Jumlah	13.130.613.931,42

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 disajikan disajikan pada **Lampiran XXIX**.

5.3.1.3.7 Akumulasi

Tahun 2025

Tahun 2024

Penyusutan

Rp(3.391.760.389.433,91)

Rp(3.199.475.521.760,27)

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp(3.391.760.389.433,91) dan Tahun 2024 sebesar Rp(3.199.475.521.760,27). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 159. Rincian Akumulasi Penyusutan TA 2025

NO	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	(746.728.289.185,91)
2	Dinas Kesehatan	(149.331.342.331,91)
3	Rumah Sakit Umum Perdagangan	(56.533.087.180,45)
4	Rumah Sakit Umum Tuan Rondahaim	(50.947.329.625,67)
5	Rumah Sakit Umum Parapat	(34.500.740.824,39)
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(1.964.514.071.088,28)
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	(2.213.616.001,44)



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN
1	2	3
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.535.497.586,84)
9	Satuan Polisi Pamong Praja	(3.394.563.791,73)
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(34.046.550.770,39)
11	Dinas Sosial	(1.578.187.849,19)
12	Dinas Tenaga Kerja	(2.702.944.380,23)
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(3.100.664.619,51)
14	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	(8.018.770.612,20)
15	Dinas Lingkungan Hidup	(8.362.079.040,05)
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(6.966.097.106,99)
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori	(9.505.682.818,43)
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(12.337.401.316,05)
19	Dinas Perhubungan	(22.040.415.921,29)
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	(5.535.264.006,53)
21	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	(4.154.487.730,34)
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	(3.238.112.592,12)
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga	(3.063.564.946,96)
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(3.143.445.113,47)
25	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(9.855.054.121,91)
26	Dinas Pertanian	(16.536.823.787,99)
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(9.936.294.463,05)
28	Sekretariat Daerah	(70.376.681.608,99)
29	Sekretariat DPRD	(13.207.380.437,94)
30	Inspektorat	(5.793.435.070,06)
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.870.213.666,16)
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(28.267.619.368,36)
33	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	(3.605.193.797,21)
34	Kecamatan Siantar	(1.990.779.916,53)
35	Kecamatan Gunung Malela	(659.357.634,63)
36	Kecamatan Gunung Maligas	(681.338.197,88)
37	Kecamatan Panei	(1.587.853.901,99)
38	Kecamatan Panombeian Panei	(924.562.126,03)
39	Kecamatan Jorlang Hataran	(1.331.747.125,27)
40	Kecamatan Raya Kahean	(2.928.328.341,37)
41	Kecamatan Bosar Maligas	(1.566.925.880,60)
42	Kecamatan Sidamanik	(2.194.377.799,65)
43	Kecamatan Pamatang Sidamanik	(1.526.012.837,40)
44	Kecamatan Tanah Jawa	(1.716.583.887,89)
45	Kecamatan Hatonduhan	(1.565.463.554,59)
46	Kecamatan Dolok Panribuan	(1.741.640.083,09)
47	Kecamatan Purba	(1.790.574.839,28)
48	Kecamatan Haranggaol Horisan	(1.529.882.973,26)
49	Kecamatan Girsang sipangan Bolon	(5.970.565.457,01)



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN
1	2	3
50	Kecamatan Dolok Batu Nanggar	(3.100.907.933,13)
51	Kecamatan Huta Bayu Raja	(1.631.535.734,16)
52	Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi	(1.702.877.307,87)
53	Kecamatan Dolok Pardamean	(1.671.887.233,21)
54	Kecamatan Pematang Bandar	(3.334.710.393,25)
55	Kecamatan Bandar Huluan	(1.079.347.688,25)
56	Kecamatan Bandar	(16.331.682.179,64)
57	Kecamatan Bandar Masilam	(1.217.448.658,61)
58	Kecamatan Silimakuta	(6.767.935.816,98)
59	Kecamatan Silau Kahean	(1.370.510.386,18)
60	Kecamatan Tapan Dolok	(1.936.137.838,49)
61	Kecamatan Raya	(15.541.224.040,74)
62	Kecamatan Ujung Padang	(1.969.735.804,66)
63	Kecamatan Pamatang Silimahuta	(840.698.620,66)
64	Kecamatan Dolog Masagal	(1.526.159.319,85)
65	Kecamatan Dolok Silou	(1.090.693.159,72)
	Total	(3.391.760.389.433,91)

Rincian Akumulasi Penyusutan TA 2025 disajikan pada **Lampiran XXX**.

5.3.1.4	Dana Cadangan	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.5	Aset Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp2.242.205.433,00	Rp60.059.481.842,00

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang maupun Aset Tetap. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.242.205.433,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp60.059.481.842,00 yang mengalami **penurunan** Rp57.817.276.409 atau 96,27%. Penurunan ini diakibatkan perubahan kebijakan akuntansi dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Simalungun yang mengatur tentang pencatatan nilai Properti Investasi sebesar Rp 56.749.884.220,00, pembayaran Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Rp955.020.000,00 dan penurunan nilai buku Aset Tidak Berwujud akibat Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp112.372.189,00 Rincian Aset Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp2.242.205.433,00 diuraikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025*

Tabel 160. Rincian Daftar Aset Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Tagihan Jangka Panjang	606.447.010,37	606.447.010,37
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	3.397.199.383,00	3.035.724.383,00
Aset Lain-lain	190.352.014.792,36	190.352.014.792,36
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.152.743.950,00)	(1.678.896.761,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(189.354.264.792,36)	(189.354.264.792,36)
Piutang Corporate Farming	1.300.746.200,00	1.300.746.200,00
Akumulasi Penyisihan Piutang Corporate Farming	(1.300.746.200,00)	(1.300.746.200,00)
Akumulasi Penyisihan Tagihan Jangka Panjang	(606.447.010,37)	(606.447.010,37)
Utang PFK Bendahara	551.652.368,00	551.652.368,00
Akumulasi Penyisihan Utang PFK Bendahara	(551.652.368,00)	(551.652.368,00)
Dana Bergulir	296.800.000,00	296.800.000,00
Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir	(296.800.000,00)	(296.800.000,00)
Aset yang dikerjasamakan (Gedung)		9.047.615.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset yang dikerjasamakan (Gedung)		(9.047.615.000,00)
Aset yang dikerjasamakan (Tanah)		56.749.884.220,00
Piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah Macet	532.992.916,00	532.992.916,00
Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah Macet	(532.992.916,00)	(532.992.916,00)
Pajak Yang Tidak Disetor	890.390.066,00	890.390.066,00
Akumulasi Penyisihan Pajak Yang Tidak Disetor	(890.390.066,00)	(890.390.066,00)
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	15.435.520,00	15.435.520,00
Akumulasi Penyisihan Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	(15.435.520,00)	(15.435.520,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	955.020.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	2.242.205.433,00	60.059.481.842,00

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tahun 2025

Tahun 2024

Rp606.447.010,37

Rp606.447.010,37

Saldo Tagihan Jangka Panjang Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp606.447.010,37 merupakan tagihan tuntutan ganti kerugian daerah berupa panjar sebesar Rp55.192.010,37 dan kas bon sebesar Rp551.255.000,00 pada Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan pada SK Pembebanan Sementara. Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Sekretariat Daerah tersebut mulai tercatat di Neraca Tahun 2011 dan tidak terdapat penurunan saldo di Tahun 2025.

5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tahun 2025

Tahun 2024

Rp0,00

Rp0,00

Pada Tahun 2025 dan 2024 tidak terdapat saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Tahun 2025

Tahun 2024

Rp3.397.199.383,00

Rp3.035.724.383,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.397.199.383,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp3.035.724.383,00. Terdapat **kenaikan** Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp361.475.000,00 atau 11,91% yang terdapat pada SKPD berikut:

Tabel 161. Rincian Daftar Penambahan Aset Tidak Berwujud Tahun 2025

NO	SKPD	TAHUN 2025	TAHUN 2024	Bertambah/ Berkurang
1	DINAS KESEHATAN	191.475.000,00	0,00	191.475.000,00
2	RSUD PERDAGANGAN	548.803.693,00	548.803.693,00	0,00
3	RSUD Tn RONDHAHAIM	806.901.300,00	686.901.300,00	120.000.000,00
4	RSUD PARAPAT	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
6	BPKPD	478.671.000,00	478.671.000,00	0,00
7	INSPEKTORAT	183.100.000,00	133.100.000	50.000.000,00
8	BPSDM	199.128.450,00	199.128.450,00	0,00
9	DINAS PENDIDIKAN	687.817.440,00	687.817.440,00	0,00
10	DINAS PARIWISATA	257.582.500,00	257.582.500,00	0,00
11	DINAS PERHUBUNGAN	17.820.000,00	17.820.000,00	0,00
Jumlah		3.397.199.383,00	3.035.724.383,00	361.475.000,00

Dari selisih bertambah Aset Tidak Berwujud diatas terdiri dari:

- Bertambah dari Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 berupa *software* (*dashboard* Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) sebesar Rp191.475.000,00.
- Reklasifikasi antar KIB Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Aset Tak Berwujud berupa *Software* pada RSUD Tn. Rondahaim sebesar Rp120.000.000,00
- Bertambah dari Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 berupa *software* pada Inspektorat sebesar Rp50.000.000.

5.3.1.5.4 Aset Lain-lain

Tahun 2025

Tahun 2024

Rp190.352.014.792,36 Rp190.352.014.792,36

Aset Lain-Lain Tahun 2025 sebesar Rp190.352.014.792,36, jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp190.352.014.792,36 tidak ada mengalami kenaikan/penurunan.

Rincian Aset Lain-Lain TA 2025 disajikan dalam **Lampiran XXXI**.

5.3.1.5.5 Amortisasi Aset Tidak

Tahun 2025

Tahun 2024

Berwujud

Rp(2.152.743.950,00)

Rp(1.678.896.761,00)

Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp(2.152.743.950,00) dan Tahun 2024 sebesar Rp(1.678.896.761,00) maka mengalami **kenaikan** dari saldo Tahun 2024 sebesar Rp(473.847.189,00) atau 28,22%.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.3.1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp(189.354.264.792,36)	Rp(189.354.264.792,36)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp(189.354.264.792,36) dan Tahun 2024 sebesar Rp(189.354.264.792,36) tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya TA 2025 disajikan dalam **Lampiran XXXI**.

5.3.1.5.7	Piutang Corporate Farming	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp1.300.746.200,00	Rp1.300.746.200,00

Jumlah tersebut adalah Piutang *Corporate Farming* berupa dana yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dikelola oleh Dinas Pertanian sebagai upaya menstimulasi aktivitas kesertaan masyarakat pertanian melalui program transformasi pola, dari yang berpola tradisional dengan pendekatan produksi berbasis individu menjadi pendekatan pasar berbasis kelompok dan kemitraan. Diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan per kapita peserta. Dalam jangka waktu tertentu yang diharapkan peserta seoptimal mungkin memberdayakan dana tersebut. Piutang *Corporate Farming* per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.300.746.200,00. Piutang tersebut merupakan jumlah dana yang sedang dimanfaatkan oleh kelompok tani, dicatatkan sebagai Aset Lainnya sesuai dengan SK Bupati Nomor: 188.45/20/MP.TP.TGR/2012 tentang Penghapusan Piutang Daerah Atas Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun serta Dana Pinjaman Modal *Corporate Farming* (CF) pada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 162. Rincian Piutang Corporate Farming Tahun 2025 dan 2024

NO	TAHUN ANGGARAN KELOMPOK	JUMLAH BANTUAN PINJAMAN	JUMLAH YANG DIKEMBALIKAN 2002 S/D 2025	SALDO PIUTANG 2025	SALDO PIUTANG 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	1. SILAKKIDIR	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00
	2. TANAH JAWA	215.000.000,00	85.250.000,00	129.750.000,00	129.750.000,00
	3. JORLANG HATARAN	215.000.000,00	59.500.000,00	155.500.000,00	155.500.000,00
	4. PANEI	215.000.000,00	90.750.000,00	124.250.000,00	124.250.000,00
	JUMLAH TA 2002	860.000.000,00	450.500.000,00	409.500.000,00	409.500.000,00
II	1. SIANTAR	125.000.000,00	93.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
	2. BANDAR SIANTAR	125.000.000,00	50.875.000,00	74.125.000,00	74.125.000,00
	3. PEM. BANDAR	125.000.000,00	49.100.000,00	75.900.000,00	75.900.000,00
	4. BANDAR	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
	5. JAWA MARAJA	125.000.000,00	63.500.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00
	6. BAGE	285.300.000,00	0,00	285.300.000,00	285.300.000,00
	7. RAYA	187.500.000,00	66.000.000,00	121.500.000,00	121.500.000,00
	JUMLAH TA 2003	1.097.800.000,00	447.475.000,00	650.325.000,00	650.325.000,00
III	1. RAYA II	189.256.000,00	50.650.000,00	138.606.000,00	138.606.000,00
	2. UN. SIMALUNGUN	106.315.200,00	4.000.000,00	102.315.200,00	102.315.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	TAHUN ANGGARAN KELOMPOK	JUMLAH BANTUAN PINJAMAN	JUMLAH YANG DIKEMBALIKAN 2002 S/D 2025	SALDO PIUTANG 2025	SALDO PIUTANG 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	JUMLAH TA 2004	295.571.200,00	54.650.000,00	240.921.200,00	240.921.200,00
	TOTAL	2.253.371.200,00	952.625.000,00	1.300.746.200,00	1.300.746.200,00

Selama TA 2025 sampai dengan 2024 tidak ada realisasi ataupun penambahan dana yang digulirkan kepada kelompok tani.

5.3.1.5.8	Akumulasi Penyisihan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Piutang Corporate Farming	Rp(1.300.746.200,00)	Rp(1.300.746.200,00)

Akumulasi Penyisihan Piutang *Corporate Farming* pada Dinas Pertanian TA 2025 sebesar Rp(1.300.746.200,00) dan tahun 2024 sebesar Rp(1.300.746.200,00).

5.3.1.5.9	Akumulasi Penyisihan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Tagihan Jangka Panjang	Rp(606.447.010,37)	Rp(606.447.010,37)

Akumulasi Penyisihan Tagihan Jangka Panjang pada Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebesar Rp(606.447.010,37) dan Tahun 2024 sebesar Rp(606.447.010,37).

5.3.1.5.10	Utang PFK Bendahara	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp551.652.368,00	Rp551.652.368,00

Saldo Utang PFK Bendahara sebesar Rp551.652.368,00 terdiri dari pajak yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp551.652.368,00 karena disalahgunakan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD. Terdiri dari Utang PFK Tahun 2009 sebesar Rp39.091.500,00 dan Tahun 2010 sebesar Rp512.560.868,00.

Pemerintah Kabupaten Simalungun telah mengajukan surat permohonan untuk penghapusan atas pajak yang disalahgunakan oleh Alm. JS sebesar Rp551.652.368,00 kepada BPK RI Jakarta sesuai surat dengan Nomor:700.04/3886/it/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dengan tembusan kepada BPK RI Medan.

5.3.1.5.11	Akumulasi Penyisihan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Utang PFK Bendahara	Rp(551.652.368,00)	Rp(551.652.368,00)

Akumulasi Penyisihan Utang PFK Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebesar Rp(551.652.368,00), tidak mengalami perubahan dari saldo Tahun 2024 sebesar Rp(551.652.368,00).

5.3.1.5.12	Dana Bergulir	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp296.800.000,00	Rp296.800.000,00

Dana Bergulir merupakan dana yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Koperasi dan UKM dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha peserta. Penggunaan dana selama jangka waktu yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

Simalungun dengan peserta tidak membebankan bunga selama dalam pemanfaatannya. Saldo Tahun 2025 sebesar Rp296.800.000,00 merupakan dana yang dipakai oleh masyarakat sebanyak 597 peserta dan pada Laporan Keuangan Tahun 2025 dicatatkan sebagai Aset Lainnya sesuai dengan SK Bupati Nomor: 188.45/20/MP.TP.TGR/2012 tentang Penghapusan Piutang Daerah Atas Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun dan dana Pinjaman Modal *Corporate Farming* (CF) pada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun karena sudah tidak dapat ditagih dan status usahanya belum diputuskan Pengadilan yang menyatakan usahanya ditutup atau bangkrut. Rincian dapat dilihat didalam tabel berikut ini.

Tabel 163. Rincian Dana Bergulir Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Nagori/KUD	Jumlah Peminjam	Nilai TA 2025 (Rp)	Nilai TA 2024 (Rp)
PengusahaKecil Menengah (PKM)	46	587	261.300.000,00	261.300.000,00
Koperasi	10	10	35.500.000,00	35.500.000,00
Total	56	597	296.800.000,00	296.800.000,00

Rincian Dana Bergulir terdapat dalam **Lampiran XXXII**.

5.3.1.5.13	Akumulasi Penyisihan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Dana Bergulir	Rp(296.800.000,00)	Rp(296.800.000,00)

Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi tahun 2025 Rp(296.800.000,00) dan tahun 2024 Rp(296.800.00,00).

5.3.1.5.17	Piutang Pajak Daerah dan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Retribusi Daerah dengan	Rp532.992.916,00	Rp532.992.916,00
	Klasifikasi Macet		

Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah dengan klasifikasi macet Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp532.992.916,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 164. Rincian Piutang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah dengan Klasifikasi Macet Tahun 2025

PIUTANG MACET	Nilai Piutang (Rp)
PIUTANG PAJAK DAERAH	65.484.123,00
PIUTANG PBB TAHUN 2013 DAN 2014	387.583.818,00
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH	79.924.975,00
JUMLAH	532.992.916,00

5.3.1.5.18	Akumulasi Penyisihan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Piutang Pajak Daerah dan	Rp(532.992.916,00)	Rp(532.992.916,00)
	Retribusi Daerah dengan		
	Klasifikasi Macet		

Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan klasifikasi macet Tahun 2025 sebesar Rp(532.992.916,00) dan Tahun 2024 Rp(532.992.916,00).



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.3.1.5.19 Pajak yang Tidak Disetor	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp890.390.066,00	Rp890.390.066,00

Pajak yang Tidak Disetor Tahun 2025 sebesar Rp890.390.066,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp890.390.066,00. Adapun Piutang Pajak Daerah tersebut antara lain:

i. Pajak Hotel

Pajak Hotel yang telah dibayar wajib pajak kepada Bendahara Penerima Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Tahun 2012 sebesar Rp436.056.911,00. Berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi pajak hotel tersebut tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan berada ditangan saudara Drs. ON sebesar Rp435.500.000,00 dan sisanya pada saudara DO sebesar Rp556.911,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 165. Rincian Nilai Pajak Hotel Yang Belum Disetorkan ke Kas Umum Daerah

No.	Wajib Pajak	Masa Pajak	Nilai Pajak (Rp)
1	Hotel Siantar Quality	September 2006	3.250.860,00
2	Hotel Siantar Quality	Oktober 2006	8.358.226,00
3	Hotel Siantar Quality	November06	3.358.924,00
4	Hotel Siantar Quality	Desember 2006	5.705.377,00
5	Hotel Siantar Quality	20 Januari 2007	4.505.475,00
6	Hotel Siantar Quality	Februari 2007	3.390.128,00
7	Hotel Siantar Quality	Maret 2007	4.773.735,00
8	Hotel Siantar Quality	April 2007	2.204.908,00
9	Hotel Siantar Quality	Mei 2007	2.951.790,00
10	Hotel Siantar Quality	Juni 2007	4.615.443,00
11	Hotel Siantar Quality	Juli 2007	5.302.861,00
12	Hotel Siantar Quality	Agustus 2007	5.421.515,00
13	Hotel Siantar Quality	September 2007	2.603.733,00
14	Hotel Siantar Quality	Oktober 2007	7.957.694,00
15	Hotel Siantar Quality	November 2007	6.469.489,00
16	Hotel Siantar Quality	Desember 2007	7.931.284,00
17	Hotel Siantar Quality	Januari 2008	3.826.777,00
18	Hotel Siantar Quality	Februari 2008	6.232.309,00
19	Hotel Siantar Quality	Maret 2008	6.278.098,00
20	Hotel Siantar Quality	April 2008	4.855.564,00
21	Hotel Siantar Quality	Mei 2008	4.252.700,00
22	Hotel Siantar Quality	Juni 2008	3.519.490,00
23	Hotel Siantar Quality	Juli 2008	6.783.291,00
24	Hotel Siantar Quality	Agustus 2008	9.169.731,00
25	Hotel Siantar Quality	September 2008	2.534.977,00
26	Hotel Siantar Quality	Oktober 2008	8.077.590,00
27	Hotel Siantar Quality	November 208	6.544.941,00
28	Hotel Siantar Quality	Desember 2008	12.088.286,00
29	Hotel Siantar Quality	Januari 2009	9.431.881,00
30	Hotel Siantar Quality	Februari 2009	3.550.494,00
31	Niagara Hotel	Desember 2011	186.853.914,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No.	Wajib Pajak	Masa Pajak	Nilai Pajak (Rp)
32	Hotel Wisata Bahari	Oktober 2012	11.934.546,00
33	Hotel Wisata Bahari	November 2012	15.162.273,00
34	Hotel Danau Toba Int. Cot.	Juni 2012	34.372.743,00
35	Hotel Darma Agung Beach	Juni 2012	21.785.864,00
Jumlah			436.056.911,00

Dapat dijelaskan bahwa dari Ketetapan Pajak Hotel Siantar Quality bulan September 2006 sebesar Rp3.250.860,00 telah dilakukan penyetoran oleh Saudara ON dan DO pada tanggal 4 Februari 2016 sebesar Rp3.250.000,00 dan kekurangannya disetor tanggal 12 Februari sebesar Rp860,00. Untuk Ketetapan Pajak Hotel Siantar Quality bulan November 2006, juga telah dilakukan penyetoran pada tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp3.358.024,00 dan kekurangannya disetor tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp900,00 ke Kas Bendahara Umum Daerah Kabupaten Simalungun sehingga mengurangi jumlah pajak yang belum disetor menjadi sebesar Rp429.447.127,00 (Rp436.056.911,00-Rp6.609.784,00).

ii. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sudah dibayar wajib pajak, namun belum disetorkan ke kas umum daerah sebesar Rp468.553.680,00 oleh saudara MS. Setelah dilakukan inventarisasi ternyata terdapat 8 (delapan) SKPD dengan nilai sebesar Rp21.902.400,00 yang sudah disetor ke rekening Kas Umum Daerah, sehingga total Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang belum disetor oleh saudara MS sebesar Rp446.651.280,00.

iii. Pajak Reklame

Jumlah Pajak Reklame yang dibayar oleh wajib pajak sebesar Rp7.681.875,00 kepada saudara MS, namun pajak tersebut tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Adapun uraian pajak reklame tersebut adalah:

Tabel 166. Rincian Nilai Pajak Reklame yang Belum Disetorkan ke Kas Umum Daerah

No.	Wajib Pajak	Masa Pajak	Nilai Pajak (Rp)
1	MAJU BERSAMA MOTOR ADVERTISING	28-06-2012 S/D 27-06-2014	2.587.500,00
2	PT SUMO INTERNUSA INDONESIA	01-12-2012 S/D 30-11-2014	2.587.500,00
3	PT SUMO INTERNUSA INDONESIA	01-12-2012 S/D 30-11-2014	2.506.875,00
JUMLAH			7.681.875,00

Piutang yang telah disalahgunakan diatas telah ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pihak yang berwajib sesuai dengan nomor surat 903/059/It/2015 tanggal 16 Februari 2015 a.n. OJ dan nomor 903/060/It/2015 tanggal 16 Februari 2015 a.n. MS.

5.3.1.5.20	Akumulasi Penyisihan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Pajak yang Tidak Disetor	Rp(890.390.066,00)	Rp(890.390.066,00)

Akumulasi Penyisihan Pajak yang Tidak Disetor Tahun 2025 sebesar Rp(890.390.066,00) dan Tahun 2024 sebesar Rp(890.390.066,00).



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.3.1.5.21	Tagihan Piutang Penjualan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Angsuran	Rp15.435.520,00	Rp15.435.520,00

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dengan nilai tahun 2025 adalah sebesar Rp15.435.520,00. Tagihan tersebut merupakan Piutang Penjualan Angsuran rumah toko yang tunggakannya telah jatuh tempo atas angsuran harga toko dan rumah tempat tinggal di pusat pertokoan Sosor Saba Parapat Girsang Sipangan Bolon dengan kontrak selama 20 tahun (April 1990 s.d. Maret 2010), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 167. Rincian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Ruko TA 2025

NAMA PEMILIK	PAKET	NO. RUKO	SISA ANGSURAN	CICILAN / BLN	JUMLAH PEMBAYARAN		JUMLAH TUNGGAKAN SELURUHNYA
					Bln	Rp	
			Rp	Rp			Rp
Mangara Situmorang	B	20	14.360.000,00	59.840,00	132	7.898.880,00	6.461.120,00
Togar Sinaga	C	23	14.360.000,00	59.840,00	90	5.385.600,00	8.974.400,00
JUMLAH			28.720.000,00	119.680,00	222	13.284.480,00	15.435.520,00

5.3.1.5.22	Akumulasi Penyisihan Tagihan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Piutang Penjualan Angsuran	Rp(15.435.520,00)	Rp(15.435.520,00)

Akumulasi Penyisihan Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tahun 2025 sebesar Rp(15.435.520,00).

5.3.1.5.23	Kas yang Dibatasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	Penggunaannya	Rp0,00	Rp955.020.000,00

Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah dana yang sudah disalurkan dari RKUN TA 2024 dan belum dilakukan penarikan ke RKUD sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2024. Kas yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp955.020.000,00.

5.3.1.6	Properti Investasi	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp58.849.076.127,00	Rp0,00

Properti Investasi adalah aset berupa tanah, bangunan, atau bagian dari bangunan yang dikuasai/dimiliki untuk menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai aset (apresiasi modal), atau keduanya, bukan untuk digunakan dalam operasional produksi, penyediaan barang/jasa, atau dijual dalam kegiatan sehari-hari. Nilai Properti Investasi Tahun 2025 sebesar Rp58.849.076.127,00, sedangkan tahun 2024 dicatat sebagai Aset Lainnya. Pada Tahun 2025 dicatat sebagai Properti Investasi sesuai dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Simalungun yang mengatur tentang pencatatan nilai Properti Investasi. Properti Investasi terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.3.1.6.1	Properti Investasi Tanah	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp56.749.884.220,00	Rp0,00

Properti Investasi Tanah merupakan Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kabupaten Simalungun yang Dikerjasamakan ke Pihak Ketiga sejak Tahun 2013 untuk jangka waktu 30 Tahun. Saldo Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2025 Rp56.749.884.220,00. Properti Investasi Tanah termasuk dalam kategori Properti Investasi direklas ke Properti Investasi sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Simalungun yang mengatur tentang Properti Investasi. Adapun rincian Aset yang Dikerjasamakan (Tanah) sebagai berikut:

Tabel 168. Rincian Aset Tanah yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

NO	NAMA	LOKASI	JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	PENILAIAN KPKNL	LUAS TANAH DAN BANGUNAN
1	Eks Kantor DPRD Kabupaten Simalungun (PKS: 970/10962/DPPKA/2013 – 25 November 2013)	Jl. Asahan km 3,5 Nagori Pamatang Kec. Siantar Kab. Simalungun	Tanah	1985	13.604.541.000,00	20.285 m2
2	Eks Rumah Dinas Bupati (PKS: 970/11638/DPPKA/2013 – 13 Desember 2013)	Jln. Perintis Kemerdekaan No. 1 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar	Tanah	1978	8.086.540.000,00	3.080 m2
3	Eks Kantor Bupati (PKS: 970/12046/DPPKA/2013 – 24 Desember 2013)	Jl. Asahan km 3,5 Desa Rambung Merah /Nagori Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun	Tanah	1981	13.604.541.000,00	20.550 m2
4	Eks Kantor Golkar,PDI,PPP (PKS: 970/12048/DPPKA/2013 – 24 Desember 2013)	Jl. Asahan Desa Rambung Merah /Nagori Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun	Tanah		4.153.929.000,00	6.262 m2
5	Eks Gedung Serbaguna (PKS: 970/1204/DPPKA/2013 – 24 Desember 2013)	Jalan Rajamin Purba Kec. Sianta Desa Rambung Merah /Nagori Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun	Tanah	1984	767.682.000,00	2.959 m2
6	Eks Kantor Dinas Koperasi (PKS: 970/11987/DPPKA/2013 – 23 Desember 2013)	Jln Maluku, Kelurahan Timbang Galung, Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar	Tanah	1979	1.808.515.200,00	944 m2
7	Eks. Rumah Dinas Perikanan (PKS: 970/11986/DPPKA/2013 – 23 Desember 2013)	Jln Maluku, Kelurahan Timbang Galung, Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar	Tanah	1990	2.143.092.000,00	1.085 m2
8	Tanah Perkebunan Pondok Bulu Kec. Dolok Panribuan (PKS: 970/12131/DPPKA/2013 – 30 Desember 2013)	Nagori Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan	Tanah	1980	12.500.000.000,00 50.844.020,00	500.000 m2
9	Rest House Simarjarunjung Kec. Dolok Pardamean (PKS: 970/12/132/DPPKA/2013 – 30 Desember 2013)	Nagori Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean	Tanah	1985	30.200.000,00	19.000 m2
Total Keseluruhan					56.749.884.220,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.3.1.6.1	Properti Investasi Gedung	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp9.047.615.000,00	Rp0,00

Properti Investasi Gedung merupakan Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Simalungun yang Dikerjasamakan ke Pihak Ketiga sejak Tahun 2013 untuk jangka waktu 30 tahun. Saldo Properti Investasi Gedung per 31 Desember 2025 Rp9.047.615.000,00. Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.047.615.000,00 dicatat di aset lainnya, di Tahun 2025 direklas ke Properti Investasi sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Simalungun. Properti Investasi Gedung termasuk dalam kategori Properti Investasi, namun belum direklas ke Properti Investasi dikarenakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Simalungun yang mengatur hal tersebut baru terbit tanggal 18 Februari 2025. Adapun rincian Aset yang Dikerjasamakan (Gedung) sebagai berikut:

Tabel 169. Rincian Aset Tetap Gedung yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

NO	NAMA	LOKASI	JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	PENILAIAN KPKNL	LUAS TANAH DAN BANGUNAN
1	Eks Kantor DPRD Kabupaten Simalungun (PKS: 970/10962/DPP KA/2013 – 25 November 2013)	Jl. Asahan km 3,5 Desa Rambung Merah /Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun	Bangunan Utama	1985	2.406.194.000,00	20.285 m2
			Bangunan Belakang	1985	176.354.000,00	
2	Eks Rumah Dinas Bupati (PKS: 970/11638/DPP KA/2013 – 13 Desember 2013)	Jln. Perintis Kemerdekaan No. 1 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar	Bangunan	1978	1.133.237.000,00	3.080 m2
3	Eks Kantor Bupati (PKS: 970/12046/DPP KA/2013 – 24 Desember 2013)	Jl. Asahan km 3,5 Desa Rambung Merah /Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun	Bangunan	1981	4.112.467.000,00	20.550 m2
4	Eks Kantor Golkar, PDI,PPP (PKS: 970/12048/DPP KA/2013 – 24 Desember 2013)	Jl. Asahan Desa Rambung Merah /Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun	Bangunan 1		106.567.000,00	6.262 m2
			Bangunan 2		340.960.000,00	
			Bangunan 3		52.885.000,00	
5	Eks Gedung Serbaguna (PKS: 970/1204/DPPK A/2013 – 24 Desember 2013)	Jalan Rajamin Purba Kec. Siantar Desa Rambung Merah /Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun	Gedung Serbaguna	1984	308.271.000,00	2.959 m2
			Gedung Serbaguna	1987	166.130.000,00	
6	Eks Kantor Dinas Koperasi (PKS: 970/11987/DPP KA/2013 – 23 Desember 2013)	Jln. Maluku Kelurahan Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar	Gedung	1979	109.578.000,00	944 m2



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA	LOKASI	JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	PENILAIAN KPKNL	LUAS TANAH DAN BANGUNAN
7	Eks. Rumah Dinas Perikanan (PKS: 970/11986/DPP KA/2013 – 23 Desember 2013)	Jln. Maluku Kelurahan Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar	Bangunan	1990	134.972.000,00	1.085 m2
Total					9.047.615.000,00	

5.3.1.5.15 Akumulasi Penyusutan **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Properti Investasi Gedung dan Bangunan **Rp(6.948.423.093,00)** **Rp(9.047.615.000,00)**

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp(6.948.423.093,00) dan Tahun 2024 sebesar Rp(9.047.615.000,00) terdapat koreksi kelebihan pencatatan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi atas Gedung yang Dikerjasamakan Pemanfaatannya kepada pihak Ketiga sebesar Rp(2.099.191.907,00).

5.3.2 Kewajiban **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp40.527.077.614,64 **Rp60.436.488.882,45**

Kewajiban Tahun 2025 sebesar Rp40.527.077.614,64 mengalami *penurunan* sebesar Rp19.909.411.267,81 atau 32,94%, jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp60.436.488.882,45. Rincian kewajiban dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 170. Rincian Kewajiban Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	65.095.887,74	0,00	65.095.887,74
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	11.853.569.444,42	12.604.923.611,09	(751.354.166,67)
Utang Belanja	26.633.241.912,48	45.217.203.001,36	(18.583.961.088,88)
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.975.170.370,00	2.614.362.270,00	(639.191.900,00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	40.527.077.614,64	60.436.488.882,45	(19.909.411.267,81)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	40.527.077.614,64	60.436.488.882,45	(19.909.411.267,81)

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp40.527.077.614,64	Rp60.436.488.882,45

Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025 sebesar Rp40.527.077.614,64 mengalami *penurunan* sebesar Rp19.909.411.267,81 atau 32,94%, jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp60.436.488.882,45. Rincian kewajiban dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 171. Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	65.095.887,74	0,00	65.095.887,74
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	11.853.569.444,42	12.604.923.611,09	(751.354.166,67)
Utang Belanja	26.633.241.912,48	45.217.203.001,36	(18.583.961.088,88)
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.975.170.370,00	2.614.362.270,00	(639.191.900,00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	40.527.077.614,64	60.436.488.882,45	(19.909.411.267,81)

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp65.095.887,74	Rp0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2025 sebesar Rp65.095.887,74 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan pajak negara yang belum disetor ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp4.649.158,00 merupakan pajak negara yang belum disetor ke Kas Negara karena keterlambatan pihak bank dalam mendebit ke Kas Negara. Kas lainnya ini berada di Bendahara JKN Puskesmas Pamatang Raya, Puskesmas Sinasih, dan Puskesmas Saribu Dolok. Pajak ini telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 05,07 dan 15 Januari 2026;
- b. Dinas Pertanian sebesar Rp642.150,00 merupakan Utang PPh Pasal 22 yang merupakan kas tunai yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran. Pajak ini telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 13 April 2026;



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

c. Dinas Pendidikan sebesar Rp59.804.579,74, merupakan kas tunai yang dipegang Bendahara, yang terdiri dari:

- 1) Sudah dibayarkan pada Tahun 2026 senilai Rp50.305.675,82 (Utang PPN Rp19.162.331,00, Utang PPh pasal 22 Rp820.000,00 utang PPh pasal 23 Rp9.024.028,82 dan PPh pasal 21 sebesar Rp21.299.316,00);
- 2) Belum dibayarkan sebesar Rp9.498.903,92 (Utang PPN Rp8.967.026.92,00, Utang PPh pasal 22 Rp186.969,00 utang PPh pasal 23 Rp344.908).

5.3.2.1.2	Utang Bunga	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat Utang Bunga pada Tahun 2025.

5.3.2.1.3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat Utang Pinjaman Jangka Pendek pada Tahun 2025.

5.3.2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Tahun 2025.

5.3.2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp11.853.569.444,42	Rp12.604.923.611,09

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp11.853.569.444,42 merupakan bagian lancar Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa kerja sama pemanfaatan aset daerah per 31 Desember 2025, yang akan diakui sebagai pendapatan akrual dalam 12 bulan ke depan. Perjanjian sewa/pemanfaatan aset dimulai dari Tahun 2013 sampai Tahun 2043 dan tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Rincian perhitungan kewajiban jangka panjang - pendapatan diterima dimuka disajikan pada **Lampiran XXXIII**. Rincian bagian lancar Pendapatan Diterima Di Muka atas sewa kerja sama pemanfaatan aset daerah per periode diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 172. Rincian Bagian Lancar Pendapatan Diterima Dimuka

Keterangan	Nilai (Rp)
Nilai sewa untuk tahun 2013 s/d 2024 (telah diakui sebagai pendapatan akrual < Tahun 2025)	7.043.388.888,89
Nilai sewa Untuk Tahun 2025 (telah diakui sebagai pendapatan akrual Tahun 2025)	638.666.666,67
Nilai sewa Untuk Tahun 2026 (akan menjadi pendapatan akrual Tahun 2026)	638.666.666,67
Nilai Kontrak Untuk Tahun 2026 s/d 2043 (akan menjadi pendapatan akrual Tahun >2025)	10.839.277.777,78
A. Jumlah Total Realisasi Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan	19.160.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Keterangan	Nilai (Rp)
Penerimaan Pendapatan diterima dimuka, terdapat 2 penerimaan dari pemanfaatan BMD di 2024 untuk sewa tanah dan bangunan dengan nilai penerimaan sebesar Rp563.437.500,00 dengan masa kontrak selama 5 tahun terhitung dari 2024 hingga 2029-koreksi ke pendapatan diterima di muka (ada 2 PKS): $Rp563.437.500,00/60 = Rp9.390.625,00 \times 8 \text{ bulan} = Rp75.125.000,00$ (8 Bulan = Rp488.312.500,00. Untuk Pendapatan LO Tahun 2024	75.125.000
Nilai sewa Untuk Tahun 2025 (akan menjadi pendapatan akrual Tahun 2025)	112.687.500,00
Nilai Kontrak Untuk Tahun 2026 s/d 2029	375.625.000,00
B. Penerimaan Pendapatan diterima dimuka, terdapat 2 penerimaan dari pemanfaatan BMD di 2024 untuk sewa tanah dan bangunan dengan nilai penerimaan sebesar Rp563.437.500,00 dengan masa kontrak selama 5 tahun terhitung dari 2024 hingga 2029-koreksi ke	563.437.500,00

5.3.2.1.6 Utang Belanja	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp26.633.241.912,48	Rp45.217.203.001,36

Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.633.241.912,48 mengalami *penurunan* sebesar Rp18.583.961.088,88 atau 41,10%, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.217.203.001,36. Rincian pembayaran Utang Belanja Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran XXXIV**. Pembayaran Utang Belanja Bantuan Tak Terduga pada **Lampiran XXXV** dan Utang Belanja selain Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp26.416.759.620,48 yang dapat dilihat pada **Lampiran XXXVI**.

Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 173. Rincian Utang Belanja TA 2025

Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	Persentase Kenaikan / Penurunan
Utang Belanja Pegawai	216.482.292,00	704.207.970,00	(487.725.678,00)	(69,26)
Utang Belanja Barang dan Jasa	19.600.382.001,06	21.813.655.031,36	(2.213.273.030,30)	(10,15)
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	275.682.075,03	0,00	275.682.075,03	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.639.257.664,39	0,00	3.639.257.664,39	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga	2.901.437.880,00	22.699.340.000,00	(19.797.902.120,00)	(87,22)
Jumlah	26.633.241.912,48	45.217.203.001,36	(18.583.961.088,88)	(41,10)

Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.633.241.912,48 diuraikan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp216.482.292,00

Utang Belanja Pegawai merupakan utang atas rapel gaji yang belum dibayarkan pada Tahun 2023 pada dua SKPD, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, serta Tunjangan Fungsional Tahun 2025 yang belum dibayar. Rincian Utang Belanja Pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 174. Rincian Utang Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Saldo per 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Desember 2025
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	704.207.970,00	218.902.835,00	706.628.513,00	216.482.292,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Saldo per 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Desember 2025
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	490.206.810,00	0,00	483.968.369,00	6.238.441,00
Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	47.627.526,00	0,00	47.258.082,00	369.444,00
Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	71.364.950,00	0,00	71.364.950,00	0,00
Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	56.853.580,00	202.506.200,00	65.808.958,00	193.550.822,00
Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.085.000,00	0,00	1.075.000,00	10.000,00
Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.644.498,00	8.294.335,00	5.620.556,00	8.318.277,00
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	85.186,00	1.980,00	84.986,00	2.180,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.643.457,00	8.100.320,00	26.775.228,00	7.968.549,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.174.141,00	0,00	1.167.994,00	6.147,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	3.522.822,00	0,00	3.504.390,00	18.432,00
Jumlah Utang Belanja Pegawai	704.207.970,00	218.902.835,00	706.628.513,00	216.482.292,00

Adapun rincian Pembayaran dan Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp216.482.292,00 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XXXVII**.

2. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp19.600.382.001,06

Utang Belanja ini terdiri dari Utang Belanja yang bersumber dari APBD dan Dana BLUD.

Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 175. Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2025

SKPD	2024	Bertambah	Berkurang	2025
Dinas Pendidikan	199.445.000,00	15.540.000,00	199.445.000,00	15.540.000,00
Dinas Kesehatan	68.400.000,00	319.080.000,00	68.400.000,00	319.080.000,00
Rsu Perdagangan	8.827.747.699,85	5.596.603.380,78	5.777.991.401,00	8.646.359.679,63
Rsu Rondahaim	2.883.042.777,32	1.963.222.690,68	1.947.998.786,00	2.898.266.682,00
Rsu Parapat	3.694.118.116,00	1.215.190.313,00	2.704.870.832,00	2.204.437.597,00
Dinas PUTR	1.065.667.788,19	4.859.223.452,43	985.302.048,19	4.939.589.192,43
Dinas Komunikasi Dan Informatika		75.000.000,00		75.000.000,00
Dinas Pertanian	4.926.712.500,00	199.980.400,00	4.926.712.500,00	199.980.400,00
Sekretariat Daerah	148.521.150,00	57.894.300,00		206.415.450,00
Sekretariat DPRD		77.263.000,00		77.263.000,00
Kecamatan Ujung Padang		18.450.000,00		18.450.000,00
Jumlah	21.813.655.031,36	14.397.447.536,89	16.610.720.567,19	19.600.382.001,06



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

3. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp275.682.075,03 terdapat pada Dinas Pendidikan dengan nilai sebesar Rp74.457.500,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp201.224.575,03
4. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp3.639.257.664,39 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan nilai utang tersisa sebesar Rp3.639.257.664,39.
5. Utang Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.901.437.880,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5.3.2.1.7	Utang Jangka Pendek	Tahun 2025	Tahun 2024
	Lainnya	Rp1.975.170.370,00	Rp2.614.362.270,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.975.170.370,00 dan saldo Tahun 2024 sebesar Rp2.614.362.270,00. Terdapat pembayaran utang RSUD Perdagangan pada tanggal 26 September 2025 sebesar Rp639.191.900,00, sehingga nilai utang mengalami *penurunan* sebesar Rp639.191.900,00 atau 24,45 %. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 merupakan utang Rumah Sakit Tn. Rondahaim sebesar Rp1.975.170.370,00 kepada Kementerian Kesehatan RI akibat dari *double transfer* dana pembayaran klaim *COVID-19* berdasarkan Surat Keterangan Kementerian Kesehatan RI – Direktur Pelayanan Kesehatan No. KN.01.03/6.9/2020/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Permohonan Pengembalian *Double Transfer* dan *Review BPKP* dengan No. Surat : Tahap 11 PE..12.03/SP-126/D2/03/2022.

5.3.2.2	KEWAJIBAN JANGKA	Tahun 2025	Tahun 2024
	PANJANG	Rp0,00	Rp0,00

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Pada Tahun 2025, jumlah Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.2.2.1	Utang kepada Pemerintah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Pusat	Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat Utang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3.2.2.2	Utang kepada Lembaga	Tahun 2025	Tahun 2024
	Keuangan Bank (LKB)	Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3.2.2.3	Utang kepada Lembaga	Tahun 2025	Tahun 2024
	Keuangan Bukan Bank	Rp0,00	Rp0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tidak terdapat Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3.2.2.4	Utang kepada Masyarakat	Tahun 2025	Tahun 2024
		00,00	Rp0,00

Tidak terdapat Utang kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.3.2.2.5	Pendapatan Diterima	Tahun 2025	Tahun 2024
	Dimuka	Rp0,00	Rp0,00

Kewajiban Jangka Panjang - Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00

5.3.3	Ekuitas	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp3.295.572.610.752,26	Rp3.006.143.269.008,92

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Simalungun per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.295.572.610.752,26 mengalami *kenaikan* sebesar Rp289.429.341.743,34 atau 9,63% dari saldo Tahun 2024 sebesar Rp3.006.143.269.008,92. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.295.572.610.752,26 diperoleh dari selisih antara jumlah Aset sebesar Rp3.336.099.688.366,90 dengan jumlah Kewajiban sebesar Rp40.527.077.614,64.

5.3.4	Kewajiban dan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Ekuitas	Rp3.336.099.688.366,90	Rp3.066.579.757.891,37

Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp3.336.099.688.366,90 dan Tahun 2024 sebesar Rp3.066.579.757.891,37. Mengalami *kenaikan* sebesar Rp269.519.930.475,53 atau sebesar 8,79%.

5.4 PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya, yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan – LO
2. Beban
3. Surplus/Defisit dari Operasi
4. Kegiatan Non Operasional
5. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
6. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
7. Pos Luar Biasa;
8. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa
9. Surplus/Defisit LO



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.4.1 PENDAPATAN – LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp2.462.698.270.620,97	Rp2.329.244.846.398,39

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan DAK, dan DAU.
 - b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah Pendapatan Retribusi Daerah.

2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Adapun pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer.

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan Pendapatan Bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan LO yaitu penjumlahan Pendapatan LRA dengan Piutang Pendapatan tahun berjalan (Tahun Laporan Akuntansi) dikurang Piutang tahun-tahun sebelum nya dan dikurangi dengan koreksi.

Pendapatan-LO TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.462.698.270.620,97 dan Rp2.329.244.846.398,39, sehingga terdapat **kenaikan** sebesar Rp133.453.424.222,58 atau 5,73%. Adapun rincian Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 176. Rincian Perbandingan Pendapatan LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	Rp	Rp		
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	297.593.224.305,91	231.504.594.194,01	66.088.630.111,90	28,55
Pendapatan Transfer – LO	2.081.827.682.814,00	2.038.171.073.124,00	43.656.609.690,00	2,14
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	83.277.363.501,06	59.569.179.080,38	23.708.184.420,68	39,80
JUMLAH	2.462.698.270.620,97	2.329.244.846.398,39	133.453.424.222,58	5,73

5.4.1.1	PENDAPATAN	Tahun 2025	Tahun 2024
	ASLI DAERAH		
	(PAD) – LO	Rp297.593.224.305,91	Rp231.504.594.194,01

Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO merupakan pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang periode penetapannya Tahun 2025. Saldo Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2025 adalah sebesar Rp297.593.224.305,91 dan Saldo Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2024 sebesar Rp231.504.594.194,01. Apabila dibandingkan antara saldo Tahun 2025 dengan saldo Tahun 2024, maka mengalami *kenaikan* sebesar Rp66.088.630.111,90 atau 28,55% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 177. Rincian Perbandingan Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	Rp	Rp		
Pendapatan Pajak Daerah – LO	214.781.052.556,00	160.147.791.011,38	54.633.261.544,62	34,11
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	4.343.283.279,00	3.151.160.835,00	1.192.122.444,00	37,83
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	22.984.918.125,00	20.272.583.191,00	2.712.334.934,00	13,38
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	55.483.970.345,91	47.933.059.156,63	7.550.911.189,28	15,75
Jumlah	297.593.224.305,91	231.504.594.194,01	66.088.630.111,90	28,55

Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 178. Rincian Perbandingan Pendapatan Asli Daerah LRA dan LO Tahun 2025

URAIAN	Pendapatan LRA 2025	Penyesuaian		Pendapatan LO
		Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5
Pajak Daerah – LO	205.995.136.182,00	11.501.028.330,00	2.715.111.956,00	214.781.052.556,00
Retribusi Daerah – LO	4.343.283.279,00	0,00	0,00	4.343.283.279,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	22.984.918.125,00	0,00	0,00	22.984.918.125,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	54.191.993.304,24	5.789.273.629,29	4.497.296.587,62	55.483.970.345,91
Jumlah	287.515.330.890,24	17.290.301.959,29	7.212.408.543,62	297.593.224.305,91

5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak	Tahun 2025	Tahun 2024
	Daerah–LO		
		Rp214.781.052.556,00	Rp160.147.791.011,38

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun terdiri dari: (1) Pajak Hotel-LO; (2) Pajak Restoran-LO; (3) Pajak Hiburan-LO; (4) Pajak Reklame-



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

LO; (5) Pajak Penerangan Jalan-LO; (6) Pajak Air Tanah-LO; (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO; (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO; dan (9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO. Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk TA 2025 sebesar Rp214.781.052.556,00 dan TA 2024 sebesar Rp160.147.791.011,38 mengalami **kenaikan** sebesar Rp54.633.261.544,62 atau 34,11%. Rincian perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 179. Rincian Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
PBJT-Jasa Perhotelan	13.298.006.506,00	12.625.633.337,00	672.373.169,00	5,33
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	6.149.217.166,00	4.624.303.074,00	1.524.914.092,00	32,98
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	264.557.499,00	318.505.909,00	(53.948.410,00)	(16,94)
Pajak Reklame – LO	2.129.905.388,00	1.959.021.821,00	170.883.567,00	8,72
PBJT-Tenaga Listrik	40.850.173.559,00	43.016.543.679,00	(2.166.370.120,00)	(5,04)
PBJT-Jasa Parkir	344.755.137,00	286.505.438,00	58.249.699,00	20,33
Pajak Air Tanah – LO	11.067.209.818,00	3.298.307.315,00	7.768.902.503,00	235,54
Pajak Sarang Burung Walet-LO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	3.314.346.773,00	8.499.197.149,38	(5.184.850.376,38)	(61,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	72.072.688.323,00	64.934.816.664,00	7.137.871.659,00	10,99
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LO	18.544.828.334,00	20.584.956.625,00	(2.040.128.291,00)	(9,91)
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	29.271.226.428,00	0,00	29.271.226.428,00	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	17.473.137.625,00	0,00	17.473.137.625,00	0,00
Jumlah	214.781.052.556,00	160.147.791.011,38	54.633.261.544,62	34,11

Adapun rincian perhitungan Pendapatan - LO untuk masing-masing pajak Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 180. Rincian Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2025

Uraian	Pendapatan Pajak Daerah LRA 2025	Penerimaan Piutang 1995 s/d 2024	Piutang 2025	Pendapatan Pajak Daerah LO
	1	2	3	4=1-2+3
PBJT-Jasa Perhotelan	13.063.490.426,00	678.699.305,00	913.215.385,00	13.298.006.506,00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	6.166.752.253,00	184.943.471,00	167.408.384,00	6.149.217.166,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	264.410.999,00	1.914.500,00	2.061.000,00	264.557.499,00
Pajak Reklame – LO	2.114.938.877,00	69.816.030,00	84.782.541,00	2.129.905.388,00
PBJT-Tenaga Listrik	40.850.173.559,00	0,00	0,00	40.850.173.559,00
PBJT-Jasa Parkir	344.655.137,00	300.000,00	400.000,00	344.755.137,00
Pajak Air Tanah – LO	10.959.921.475,00	119.433.760,00	226.722.103,00	11.067.209.818,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025*

Uraian	Pendapatan Pajak Daerah LRA 2025	Penerimaan Piutang 1995 s/d 2024	Piutang 2025	Pendapatan Pajak Daerah LO
	1	2	3	4=1-2+3
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	3.323.234.634,00	354.718.828,00	345.830.967,00	3.314.346.773,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	63.617.366.435,00	1.305.286.062,00	9.760.607.950,00	72.072.688.323,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LO	18.544.828.334,00	0,00	0,00	18.544.828.334,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	29.271.226.428,00	0,00	0,00	29.271.226.428,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	17.473.137.625,00	0,00	0,00	17.473.137.625,00
Jumlah	205.995.136.182,00	2.715.111.956,00	11.501.028.330,00	214.781.052.556,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada perbedaan antara Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO pada:

1. PBJT-Jasa Perhotelan-LRA sebesar Rp13.063.490.426,00 dan Pendapatan PBJT-Jasa Perhotelan-LO sebesar Rp13.298.006.506,00. Perbedaan tersebut karena adanya mutasi berkurang atas realisasi piutang pajak hotel sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp 678.699.305,00 dan adanya mutasi bertambah atas piutang pajak hotel TA 2025 sebesar Rp913.215.385,00;
2. PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LRA sebesar Rp6.166.752.253,00 dan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO sebesar Rp6.149.217.166,00. Perbedaan tersebut karena adanya mutasi berkurang atas realisasi Piutang Pajak Restoran sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp184.943.471,00 dan adanya mutasi bertambah atas Piutang Pajak Restoran TA 2025 sebesar Rp167.408.384,00;
3. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LRA sebesar Rp264.410.999,00 dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO sebesar Rp264.557.499,00. Perbedaan tersebut karena adanya mutasi berkurang atas realisasi Piutang Pajak Hiburan sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.914.500,00 dan adanya mutasi bertambah atas Piutang Pajak Hiburan TA 2025 sebesar Rp2.061.000,00;
4. Pendapatan Pajak Reklame-LRA sebesar Rp2.114.938.877,00 dan Pendapatan Pajak Reklame-LO sebesar Rp2.129.905.388,00. Perbedaan tersebut karena adanya mutasi berkurang atas realisasi Piutang Pajak Reklame sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp69.816.030,00 dan adanya mutasi bertambah atas Piutang Pajak Reklame TA 2025 sebesar Rp84.782.541,00;
5. PBJT-Jasa Parkir-LRA sebesar Rp344.655.137,00 dan Pendapatan PBJT-Jasa Parkir-LO sebesar Rp344.755.137,00. Perbedaan tersebut karena adanya mutasi berkurang atas realisasi Piutang Pajak Parkir sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp300.000,00 dan adanya mutasi bertambah atas Piutang Pajak Parkir TA 2025 sebesar Rp400.000,00;
6. Pendapatan Pajak Air Tanah-LRA sebesar Rp10.959.921.475,00 dan Pendapatan Pajak Air Tanah-LO sebesar Rp11.067.209.818,00. Perbedaan tersebut karena adanya mutasi berkurang atas realisasi Piutang Pajak Air Tanah sampai dengan Tahun 2024 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025*

Rp119.433.760,00 dan adanya mutasi bertambah atas Piutang Pajak Air Tanah TA 2025 sebesar Rp226.722.103,00;

7. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA sebesar Rp3.323.234.634,00 dan Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO sebesar Rp3.314.346.773,00. Perbedaan tersebut karena adanya mutasi berkurang atas realisasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp354.718.828,00 dan adanya mutasi bertambah atas Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2025 sebesar Rp345.830.967,00;
8. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LRA sebesar Rp63.617.366.435,00 dan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO sebesar Rp72.072.688.323,00. Perbedaan tersebut karena adanya mutasi berkurang atas realisasi Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.305.286.062,00 dan adanya mutasi bertambah atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2025 sebesar Rp9.760.607.950,00.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi	Tahun 2025	Tahun 2024
Daerah-LO	Rp4.343.283.279,00	Rp3.151.160.835,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2025 sebesar Rp4.343.283.279,00 dan TA 2024 sebesar Rp3.151.160.835,00. Apabila dibandingkan Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2025 dengan TA 2024 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.192.122.444,00 atau 37,83%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 181. Rincian Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Pendapatan Retribusi Daerah- LRA TA 2025	Pendapatan Retribusi Daerah- LO TA 2025	Pendapatan Retribusi Daerah- LO TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1. Retribusi Jasa umum	1.471.006.447,00	1.471.006.447,00	1.217.974.529,00	253.031.918,00	20,77
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	23.580.000,00	23.580.000,00	24.653.500,00	(1.073.500,00)	(4,35)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	551.229.334,00	551.229.334,00	996.951.029,00	(445.721.695,00)	(44,71)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	243.015.000,00	243.015.000,00	196.000.000,00	47.015.000,00	23,99
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	361.673.012,00	361.673.012,00	0,00	361.673.012,00	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	0,00	0,00	370.000,00	(370.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	291.509.101,00	291.509.101,00	0,00	291.509.101,00	0,00
2. Retribusi Jasa Usaha	404.963.000,00	404.963.000,00	780.602.787,00	(375.639.787,00)	(48,12)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.420.000,00	3.420.000,00	386.125.000,00	(382.705.000,00)	(99,11)
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	358.232.687,00	(358.232.687,00)	(100,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	31.097.100,00	(31.097.100,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Pendapatan Retribusi Daerah- LRA TA 2025	Pendapatan Retribusi Daerah- LO TA 2025	Pendapatan Retribusi Daerah- LO TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Retribusi Penyeberangan di Air	0,00	0,00	5.148.000,00	(5.148.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	8.918.000,00	8.918.000,00	0,00	8.918.000,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	389.025.000,00	389.025.000,00	0,00	389.025.000,00	0,00
3. Retribusi Perizinan Tertentu	2.467.313.832,00	2.467.313.832,00	1.152.583.519,00	1.314.730.313,00	114,07
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.194.942.840,00	1.194.942.840,00	1.152.583.519,00	42.359.321,00	3,68
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.272.370.992,00	1.272.370.992,00	0,00	1.272.370.992,00	0,00
Jumlah	4.343.283.279,00	4.343.283.279,00	3.151.160.835,00	1.192.122.444,00	37,83

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp22.984.918.125,00 **Rp20.272.583.191,00**

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2025 sebesar Rp22.984.918.125,00, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2024 sebesar Rp20.272.583.191,00. Apabila dibandingkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2025 dengan TA 2024, maka mengalami *kenaikan* sebesar Rp2.712.334.934,00 atau 13,38%. Tidak terdapat perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA dengan LO.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp55.483.970.345,91 **Rp47.933.059.156,63**

Jumlah realisasi Lain-Lain PAD -LO TA 2025 sebesar Rp55.483.970.345,91 dan TA 2024 sebesar Rp47.933.059.156,63, dimana saldo Tahun 2025 mengalami *kenaikan* sebesar Rp7.550.911.189,28 atau 15,75%. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2025 Selisih antara penambahan dengan pengurangan Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2025 (bertambah Rp5.693.576.678,67– berkurang Rp4.465.639.637,00). Lain-lain PAD yang Sah-LO dirinci pada tabel berikut:

Tabel 182. Rincian Perhitungan Lain-Lain PAD yang Sah-LO TA 2025

URAIAN	LRA TA 2025	Mutasi		LO- TA 2025	Keterangan
		Bertambah	Berkurang		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	34.413.000,00			34.413.000,00	
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	751.354.166,67		751.354.166,67	Pendapatan diterima dimuka Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025*

URAIAN	LRA TA 2025	Mutasi		LO- TA 2025	Keterangan
		Bertambah	Berkurang		
Jasa Giro	5.536.494.081,00			5.536.494.081,00	
Pendapatan Bunga	31.309.004,00			31.309.004,00	
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.406.142.493,05	64.040.000,00	0,00	5.470.182.493,05	
Pendapatan Denda Pajak Daerah	582.732.799,00	0,00	0,00	582.732.799,00	
Pendapatan dari Pengembalian	13.289.331.506,19	0,00	0,00	13.289.331.506,19	
Pendapatan BLUD	29.311.570.421,00	4.942.222.512,00	4.465.639.637,00	29.788.153.296,00	Penerimaan Piutang dan Pengakuan Piutang BLUD
Jumlah	54.191.993.304,24	5.757.616.678,67	4.465.639.637,00	55.483.970.345,91	

5.4.1.2 PENDAPATAN

Tahun 2025

Tahun 2024

TRANSFER-LO

Rp2.081.827.682.814,00

Rp2.038.171.073.124,00

Merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penetapan Tahun 2025. Saldo Pendapatan Transfer - LO TA 2025 adalah sebesar Rp2.081.827.682.814,00 dan Saldo Pendapatan Transfer-LO TA 2024 sebesar Rp2.038.171.073.124,00. Apabila dibandingkan antara saldo Tahun 2025 dengan saldo Tahun 2024 maka mengalami **kenaikan** sebesar Rp43.656.609.690,00 atau 2,14%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 183. Rincian Perbandingan Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	1.976.905.222.992,00	1.941.755.084.987,00	35.150.138.005,00	1,81
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Pemerintah Provinsi-LO	104.922.459.822,00	96.415.988.137,00	8.506.471.685,00	8,82
Jumlah	2.081.827.682.814,00	2.038.171.073.124,00	43.656.609.690,00	2,14

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah

Tahun 2025

Tahun 2024

Pusat-Dana

Rp1.976.905.222.992,00

Rp1.941.755.084.987,00

Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.976.905.222.992,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.941.755.084.987,00. Apabila dibandingkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 dengan 2024, maka mengalami **kenaikan** sebesar Rp35.150.138.005,00 atau 1,81%, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 184. Rincian Perbandingan Pendapatan Transfer-Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LRA Tahun 2025 dan LO Tahun 2025

URAIAN	LRA TA 2025	Mutasi			LO- TA 2025
		Bertambah Piutang	Berkurang Aset Lainnya TDF	Berkurang Pembayaran Piutang	
Dana Bagi Hasil (DBH)	74.753.539.800,00	0,00	955.020.000,00	0,00	73.798.519.800,00
DBH PBB	46.470.508.900,00		759.257.000,00		45.711.251.900,00
DBH PPh Pasal 21	15.657.621.800,00				15.657.621.800,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	911.327.100,00				911.327.100,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.118.188.000,00				1.118.188.000,00
DBH SDA Minyak Bumi	11.156.000,00		1.000,00		11.155.000,00
DBH SDA Gas Bumi	1.029.000,00				1.029.000,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	131.760.000,00		6.134.000,00		125.626.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	4.127.156.000,00		188.696.000,00		3.938.460.000,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	169.302.000,00		932.000,00		168.370.000,00
DBH SDA Perikanan	833.805.000,00				833.805.000,00
DBH Sawit	5.321.686.000,00				5.321.686.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.505.898.079.984,00	0,00	0,00	0,00	1.505.898.079.984,00
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.266.590.396.800,00				1.266.590.396.800,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	239.307.683.184,00				239.307.683.184,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52.783.147.720,00	0,00	0,00	0,00	52.783.147.720,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.829.909.200,00				7.829.909.200,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	12.176.731.500,00				12.176.731.500,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.117.152.246,00				1.117.152.246,00
DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan	14.777.161.315,00				14.777.161.315,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	248.268.150,00				248.268.150,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	225.383.160,00				225.383.160,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	16.408.542.149,00				16.408.542.149,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	LRA TA 2025	Mutasi			LO- TA 2025
		Bertambah Piutang	Berkurang Aset Lainnya TDF	Berkurang Pembayaran Piutang	
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	344.425.475.488,00	0,00	0,00	0,00	344.425.475.488,00
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.015.713.374,00				3.015.713.374,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	2.328.783.300,00				2.328.783.300,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	112.637.576.949,00				112.637.576.949,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.733.750.000,00				3.733.750.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	6.916.622.300,00				6.916.622.300,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00				15.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler	336.600.000,00				336.600.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	45.000.000,00				45.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.497.011.732,00				5.497.011.732,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	21.410.989.279,00				21.410.989.279,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	174.892.342.309,00				174.892.342.309,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	2.955.520.000,00				2.955.520.000,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	9.678.772.245,00				9.678.772.245,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	961.794.000,00				961.794.000,00
JUMLAH	1.977.860.242.992,00	0,00	955.020.000,00	0,00	1.976.905.222.992,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO

**Tahun 2025
Rp0,00**

**Tahun 2024
Rp0,00**

Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- LO Tahun 2025 dan Tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer

Tahun 2025

Tahun 2024

Antar Daerah –LO

Rp104.922.459.822,00

Rp96.415.988.137,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2025 sebesar Rp104.922.459.822,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp96.415.988.137,00. Apabila dibandingkan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2025 dengan Tahun 2024, maka mengalami **kenaikan** sebesar Rp8.506.471.685,00 atau 8,82% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 185. Rincian Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO
Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	8.489.809.334,00	0,00	8.489.809.334,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	239.281.609,00	0,00	239.281.609,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	37.108.885.436,00	0,00	37.108.885.436,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	3.888.970.586,00	0,00	3.888.970.586,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	55.195.512.857,00	47.343.881.763,00	7.851.631.094,00	16,58
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	49.072.106.374,00	(49.072.106.374,00)	(100,00)
Jumlah	104.922.459.822,00	96.415.988.137,00	8.506.471.685,00	8,82

Adapun rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 186. Rincian Perhitungan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025

Uraian	Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA	Berkurang		Pendapatan Transfer Antar Daerah LO
		Bertambah Piutang	Penerimaan Piutang	
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	45.312.780.380,00	8.489.809.334,00	45.312.780.380,00	8.489.809.334,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	26.482.279.446,00	239.281.609,00	26.482.279.446,00	239.281.609,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	60.024.029.789,00	36.608.885.436,00	59.524.029.789,00	37.108.885.436,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	2.894.385.194,00	3.888.970.586,00	2.894.385.194,00	3.888.970.586,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	55.195.512.857,00	0,00	0,00	55.195.512.857,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	49.072.106.374,00	0,00	49.072.106.374,00	0,00
Jumlah	238.981.094.040,00	49.226.946.965,00	183.285.581.183,00	104.922.459.822,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

	LAIN-LAIN	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.1.3	PENDAPATAN DAERAH	Rp83.277.363.501,06	Rp59.569.179.080,38
	YANG SAH – LO		

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 sebesar Rp83.277.363.501,06 dan Tahun 2024 sebesar Rp59.569.179.080,38, sehingga mengalami **peningkatan** sebesar Rp23.708.184.420,68 atau 39,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 187. Rincian Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA dan LO Tahun 2025

Uraian	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA	Mutasi		Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
		Penambahan	Berkurang	
Pendapatan Hibah-LO	0,00	49.255.199.625,06	0,00	49.255.199.625,06
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	34.022.163.876,00	0,00	0,00	34.022.163.876,00
JUMLAH	34.022.163.876,00	49.255.199.625,06	0,00	83.277.363.501,06

5.4.1.3.2	Pendapatan Hibah – LO	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp49.255.199.625,06	Rp26.852.327.832,38

Pendapatan Hibah-LO TA 2025 sebesar Rp49.255.199.625,06 dan Pendapatan Hibah-LO TA 2024 sebesar Rp26.852.327.832,38. Apabila dibandingkan Pendapatan Hibah-LO TA 2025 dan Pendapatan Hibah-LO TA 2024 maka terdapat **peningkatan** sebesar Rp22.402.871.792,68 atau 45,48%. Pendapatan Hibah di LRA Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 sebesar Rp Rp49.255.199.625,06, terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa alat-alat kesehatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp697.626.440,00;
2. Pendapatan Hibah Blanko E-KTP ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp677.103.000,00;
3. Pendapatan Hibah Tanah dari PT Lonsum sebesar Rp1.700.000.000,00 dan PT Bridgestone sebesar Rp1.486.870.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
4. Pendapatan Hibah Obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp16.836.900.531,06; dan
5. Pendapatan Hibah dan Aset Tetap Gedung Bangunan bertambah dari dana revitalisasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp27.856.699.654,00.

5.4.1.3.2	Dana Darurat – LO	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Dana Darurat-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

	Lain-lain Pendapatan	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.1.3.3	Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	Rp34.022.163.876,00	Rp32.716.851.248,00

Pada Tahun 2025 terdapat Realisasi Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO sebesar Rp34.022.163.876,00, dan Tahun 2024 sebesar Rp32.716.851.248,00 yang merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non-BLUD. Apabila dibandingkan Tahun 2025 dengan Tahun 2024, maka mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.305.312.628,00 atau 3,99%.

5.4.2	BEBAN	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp2.303.338.155.537,84	Rp2.212.757.283.894,26

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saldo beban pada TA 2025 sebesar Rp2.303.338.155.537,84 dan saldo TA 2024 sebesar Rp2.212.757.283.894,26. Apabila dibandingkan saldo TA 2025 dengan saldo TA 2024, maka mengalami **kenaikan** sebesar Rp90.580.871.643,58 atau 4,09% dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 188. Rincian Perbandingan Beban-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	SALDO 2025 (Rp)	SALDO 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
			(Rp)	
Beban Pegawai	1.175.682.138.515,00	964.985.141.154,00	210.696.997.361,00	21,83
Beban Barang	255.851.647.882,43	245.906.531.721,74	9.945.116.160,69	4,04
Beban Jasa	324.510.812.187,00	323.259.431.601,58	1.251.380.585,42	0,39
Beban Pemeliharaan	38.784.212.864,12	33.319.701.271,00	5.464.511.593,12	16,40
Beban Perjalanan Dinas	69.304.606.135,00	78.673.197.489,00	(9.368.591.354,00)	(11,91)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.248.532.218,00	8.579.432.645,00	(2.330.900.427,00)	(27,17)
Beban Barang dan Jasa BLUD	7.813.512,00	0,00	7.813.512,00	0,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	38.157.474.618,00	102.909.788.657,00	(64.752.314.039,00)	(62,92)
Beban Bantuan Sosial	0,00	501.350.000,00	(501.350.000,00)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang	8.361.266.872,61	7.390.018.006,38	971.248.866,23	13,14
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	76.961.544.815,48	76.605.451.621,77	356.093.193,71	0,46
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	49.540.850.307,76	49.557.632.598,23	(16.782.290,47)	(0,03)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	74.247.163.211,78	150.190.871.005,36	(75.943.707.793,58)	(50,56)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	473.847.189,00	528.044.877,00	(54.197.688,00)	(10,26)
Beban Penyusutan Properti Investasi	347.421.154,66	0,00	347.421.154,66	0,00
Beban Transfer	167.026.096.255,00	158.540.735.998,20	8.485.360.256,80	5,35



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tidak Terduga	17.832.727.800,00	11.809.955.248,00	6.022.772.552,00	51,00
JUMLAH	2.303.338.155.537,84	2.212.757.283.894,26	90.580.871.643,58	4,09

Rincian Beban-LO Per SKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran XXXVIII**.

5.4.2.1 Beban Pegawai-LO

Tahun 2025

Tahun 2024

Rp1.175.682.138.515,00

Rp964.985.141.154,00

Beban Pegawai-LO Pemerintah Kabupaten Simalungun TA 2025 sebesar Rp1.175.682.138.515,00 dan Beban Pegawai-LO TA 2024 sebesar Rp964.985.141.154,00. Apabila dibandingkan Beban Pegawai-LO Tahun 2025 dengan Tahun 2024, maka Beban Pegawai-LO tahun 2025 mengalami *kenaikan* sebesar Rp210.696.997.361,00 atau 21,83%. Rincian Beban pegawai-LO Tahun 2025 pada tabel berikut:

Tabel 189. Rincian Perhitungan Beban Pegawai LO TA 2025

URAIAN	REALISASI TAHUN 2025	MUTASI		LO 2025
		BERTAMBAH	BERKURANG	
Beban Pegawai	1.176.138.593.451,00	212.496.435,00	668.951.371,00	1.175.682.138.515,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	835.311.714.113,00	212.496.435,00	668.951.371,00	834.855.259.177,00
Beban Gaji Pokok ASN	642.631.674.136,00	0,00	468.407.324,00	642.163.266.812,00
Beban Gaji Pokok PNS	372.286.807.880,00	0,00	417.719.295,00	371.869.088.585,00
Beban Gaji Pokok PPPK	270.344.866.256,00	0,00	50.688.029,00	270.294.178.227,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	51.056.772.762,00	0,00	45.918.554,00	51.010.854.208,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	34.729.193.216,00	0,00	40.989.448,00	34.688.203.768,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	16.327.579.546,00	0,00	4.929.106,00	16.322.650.440,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	8.724.349.430,00	30.800.000,00	69.806.500,00	8.685.342.930,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	8.724.349.430,00	30.800.000,00	69.806.500,00	8.685.342.930,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	49.080.963.626,00	165.546.200,00	32.808.580,00	49.213.701.246,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	24.781.363.033,00	165.546.200,00	32.808.580,00	24.914.100.653,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	24.299.600.593,00	0,00	0,00	24.299.600.593,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.175.132.054,00	0,00	16.548.350,00	5.158.583.704,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.790.288.850,00	0,00	16.548.350,00	3.773.740.500,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.384.843.204,00	0,00	0,00	1.384.843.204,00
Beban Tunjangan Beras ASN	33.822.407.480,00	0,00	0,00	33.822.407.480,00
Beban Tunjangan Beras PNS	18.024.834.432,00	0,00	0,00	18.024.834.432,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	15.797.573.048,00	0,00	0,00	15.797.573.048,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.444.306.160,00	8.294.335,00	5.523.344,00	1.447.077.151,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.444.306.160,00	8.294.335,00	5.523.344,00	1.447.077.151,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	7.797.757,00	1.980,00	57.624,00	7.742.113,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	4.675.157,00	1.980,00	55.026,00	4.622.111,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.122.600,00	0,00	2.598,00	3.120.002,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	38.038.062.337,00	7.853.920,00	25.296.377,00	38.020.619.880,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	23.661.818.356,00	7.853.920,00	23.072.375,00	23.646.599.901,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	REALISASI TAHUN 2025	MUTASI		LO 2025
		BERTAMBAH	BERKURANG	
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	14.376.243.981,00	0,00	2.224.002,00	14.374.019.979,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.334.709.591,00	0,00	1.146.082,00	1.333.563.509,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	766.491.666,00	0,00	1.024.738,00	765.466.928,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	568.217.925,00	0,00	121.344,00	568.096.581,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	3.995.538.780,00	0,00	3.438.636,00	3.992.100.144,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.291.042.229,00	0,00	3.074.604,00	2.287.967.625,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.704.496.551,00	0,00	364.032,00	1.704.132.519,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	311.872.898.517,00	0,00	0,00	311.872.898.517,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	91.127.025.763,00	0,00	0,00	91.127.025.763,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	91.127.025.763,00	0,00	0,00	91.127.025.763,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	220.745.872.754,00	0,00	0,00	220.745.872.754,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.050.893.845,00	0,00	0,00	7.050.893.845,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	86.849.200,00	0,00	0,00	86.849.200,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	460.418.431,00	0,00	0,00	460.418.431,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	144.173.175,00	0,00	0,00	144.173.175,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	2.661.036.489,00	0,00	0,00	2.661.036.489,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	762.141.843,00	0,00	0,00	762.141.843,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(I),PBJT]	2.399.801.327,00	0,00	0,00	2.399.801.327,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	536.473.380,00	0,00	0,00	536.473.380,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	206.957.690.909,00	0,00	0,00	206.957.690.909,00
Beban TPG PNSD	206.957.690.909,00	0,00	0,00	206.957.690.909,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	16.018.000,00	0,00	0,00	16.018.000,00
Beban TKG PNSD	16.018.000,00	0,00	0,00	16.018.000,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	6.721.270.000,00	0,00	0,00	6.721.270.000,00
Beban Tamsil Guru PNSD	6.721.270.000,00	0,00	0,00	6.721.270.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.835.141.057,00	0,00	0,00	27.835.141.057,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.112.685.000,00	0,00	0,00	1.112.685.000,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.112.685.000,00	0,00	0,00	1.112.685.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	95.432.400,00	0,00	0,00	95.432.400,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	95.432.400,00	0,00	0,00	95.432.400,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	115.582.320,00	0,00	0,00	115.582.320,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	REALISASI TAHUN 2025	MUTASI		LO 2025
		BERTAMBAH	BERKURANG	
Beban Tunjangan Beras DPRD	115.582.320,00	0,00	0,00	115.582.320,00
Beban Uang Paket DPRD	95.403.000,00	0,00	0,00	95.403.000,00
Beban Uang Paket DPRD	95.403.000,00	0,00	0,00	95.403.000,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.613.393.250,00	0,00	0,00	1.613.393.250,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.613.393.250,00	0,00	0,00	1.613.393.250,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	133.919.100,00	0,00	0,00	133.919.100,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	133.919.100,00	0,00	0,00	133.919.100,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25.715.025,00	0,00	0,00	25.715.025,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25.715.025,00	0,00	0,00	25.715.025,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	0,00	0,00	8.820.000.000,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	0,00	0,00	8.820.000.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	1.425.900.000,00	0,00	0,00	1.425.900.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	1.425.900.000,00	0,00	0,00	1.425.900.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	524.522,00	0,00	0,00	524.522,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	524.522,00	0,00	0,00	524.522,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.008.130.440,00	0,00	0,00	5.008.130.440,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	96.766.908,00	0,00	0,00	96.766.908,00
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5.806.014,00	0,00	0,00	5.806.014,00
Beban Jaminan Kematian DPRD	7.257.518,00	0,00	0,00	7.257.518,00
Beban Tunjangan Perumahan DPRD	4.898.300.000,00	0,00	0,00	4.898.300.000,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	9.388.456.000,00	0,00	0,00	9.388.456.000,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	9.388.456.000,00	0,00	0,00	9.388.456.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	217.783.764,00	0,00	0,00	217.783.764,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	101.400.000,00	0,00	0,00	101.400.000,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	101.400.000,00	0,00	0,00	101.400.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.108.000,00	0,00	0,00	6.108.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.108.000,00	0,00	0,00	6.108.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	0,00	0,00	98.280.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	0,00	0,00	98.280.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.286.660,00	0,00	0,00	5.286.660,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.286.660,00	0,00	0,00	5.286.660,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	808.044,00	0,00	0,00	808.044,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	808.044,00	0,00	0,00	808.044,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	REALISASI TAHUN 2025	MUTASI		LO 2025
		BERTAMBAH	BERKURANG	
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.449.920,00	0,00	0,00	5.449.920,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.449.920,00	0,00	0,00	5.449.920,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	0,00	0,00	112.320,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	0,00	0,00	112.320,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	0,00	0,00	336.960,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	0,00	0,00	336.960,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	901.056.000,00	0,00	0,00	901.056.000,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	301.056.000,00	0,00	0,00	301.056.000,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	301.056.000,00	0,00	0,00	301.056.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00

Beban Pegawai tahun 2025 sebesar Rp1.175.682.138.515,00 terdiri dari realisasi belanja yang masuk ke akun Beban pegawai sebesar Rp1.176.138.593.451,00, ditambah Utang Beban Pegawai sebesar Rp212.496.435,00, dan dikurang Pembayaran Utang sebesar Rp668.951.371,00.

Rincian Beban Pegawai-LO Per SKPD TA 2025 disajikan pada **Lampiran XXXIX**.

5.4.2.2 Beban Persediaan – LO

Tahun 2025

Tahun 2024

Rp255.851.647.882,43

Rp245.906.531.721,74

Saldo Beban Persediaan-LO TA 2025 sebesar Rp255.851.647.882,43 dan TA 2024 sebesar Rp245.906.531.721,74. Apabila dibandingkan Saldo Beban Persediaan – LO Tahun 2025 dengan Tahun 2024, maka terdapat **kenaikan** sebesar Rp9.945.116.160,69 atau 4,04%. Rincian perhitungan Beban Persediaan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 190. Rincian Perhitungan Beban Persediaan LO Tahun 2025

Uraian	Beban Persediaan LRA 2025	Mutasi		Beban Persediaan LO 2025
		Bertambah	Berkurang	
Beban Barang	182.108.045.819,00	116.002.154.100,36	42.258.552.036,93	255.851.647.882,43
Beban Barang Pakai Habis	182.101.179.617,00	82.389.024.097,46	42.252.561.366,93	222.237.642.347,53
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	754.355.640,00	735.129.365,00	42.883.508,00	1.446.601.497,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	1.777.122.159,00	485.076.815,00	229.117.625,50	2.033.081.348,50
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	949.038.694,00	193.746.030,00	69.263.000,00	1.073.521.724,00
Beban Bahan-Bahan Baku	0,00	813.491.795,00	8.049.520,00	805.442.275,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.749.551.200,00	52.535.000,00	80.000,00	1.802.006.200,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	148.172.640,00	426.515.700,00	122.082.800,00	452.605.540,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	140.362.000,00	1.513.435.674,00	9.945.000,00	1.643.852.674,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	4.540.000,00	0,00	4.540.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Beban Persediaan LRA 2025	Mutasi		Beban Persediaan LO 2025
		Bertambah	Berkurang	
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	763.287.104,00	950.226.792,50	217.102.576,80	1.496.411.319,70
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	265.286.850,00	784.538.212,00	225.023.857,64	824.801.204,36
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	13.230.000,00	0,00	13.230.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	3.274.600,00	0,00	3.274.600,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.735.847.618,00	7.750.190.917,00	107.788.714,00	10.378.249.821,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.551.215.589,00	338.448.154,02	93.765.770,00	2.795.897.973,02
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.672.883.269,00	8.869.296.745,22	384.367.514,00	17.157.812.500,22
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	72.814.460,00	84.094.600,00	3.221.000,00	153.688.060,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.050.432.411,00	1.246.885.783,00	196.692.450,00	3.100.625.744,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.696.107.576,00	3.824.523.345,00	84.866.574,00	5.435.764.347,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	957.246.572,00	454.634.001,00	163.836.897,00	1.248.043.676,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	258.399.958,00	32.121.900,00	8.918.900,00	281.602.958,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	58.044.950,00	250.000,00	57.794.950,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.753.108.800,00	216.576.000,00	0,00	1.969.684.800,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.565.697.306,00	2.930.652.796,00	1.256.507.448,72	3.239.842.653,28
Beban Obat-Obatan-Obat	11.581.835.788,00	33.781.871.165,66	15.363.033.453,30	30.000.673.500,36
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.637.627.724,00	10.138.281.840,26	8.616.143.050,18	9.159.766.514,08
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	50.336.924.640,00	353.129.963,80	5.259.145.248,00	45.430.909.355,80
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	52.578.021.375,00	3.157.144.771,00	8.320.483.809,79	47.414.682.336,21
Beban Natura dan Pakan-Natura	3.872.424.544,00	1.156.988.300,00	822.415.150,00	4.206.997.694,00
Beban Natura dan Pakan-Pakan	167.622.000,00	0,00	0,00	167.622.000,00
Beban Natura dan Pakan-Pakan Lainnya	0,00	71.480.000,00	66.990.500,00	4.489.500,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	15.745.217.782,00	576.909.454,00	54.910.000,00	16.267.217.236,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.162.867.800,00	102.249.000,00	34.049.500,00	2.231.067.300,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	535.478.428,00	0,00	535.478.428,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.023.186.675,00	672.332.000,00	491.627.500,00	4.203.891.175,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.399.670.309,00	0,00	0,00	3.399.670.309,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	167.965.000,00	0,00	0,00	167.965.000,00
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	496.725.000,00	0,00	0,00	496.725.000,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	131.234.748,00	35.625.000,00	0,00	166.859.748,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	328.213.059,00	8.000.000,00	0,00	336.213.059,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	212.902.991,00	3.270.000,00	0,00	216.172.991,00
Beban Pakaian Penyelamatan	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
Beban Pakaian Adat Daerah	366.833.340,00	3.920.000,00	0,00	370.753.340,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	12.066.996,00	0,00	0,00	12.066.996,00
Beban Pakaian Olahraga	18.360.000,00	0,00	0,00	18.360.000,00
Beban Pakaian Paskibraka	0,00	5.335.000,00	0,00	5.335.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Beban Persediaan LRA 2025	Mutasi		Beban Persediaan LO 2025
		Bertambah	Berkurang	
Beban Barang Tak Habis Pakai	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	5.867.202,00	33.613.130.002,90	5.990.670,00	33.613.006.534,90
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.867.202,00	15.759.069.875,18	5.990.670,00	15.758.946.407,18
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	0,00	4.522.000,00	0,00	4.522.000,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	352.532.800,00	0,00	352.532.800,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	216.500,00	0,00	216.500,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah- Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	71.535.500,00	0,00	71.535.500,00
Beban Peralatan dan Mesin-Komputer- Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	8.589.000,00	0,00	8.589.000,00
Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	5.597.000,00	0,00	5.597.000,00
Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak- Buku Umum	0,00	17.383.935.299,72	0,00	17.383.935.299,72
Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
Beban Aset Tetap Lainnya-Tanaman- Tanaman-Tanaman	0,00	21.475.028,00	0,00	21.475.028,00

Rincian Mutasi Bertambah dan berkurang Beban Persediaan-LO disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 191. Rincian Mutasi Bertambah dan Berkurang Beban Persediaan-LO TA 2025

URAIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Rincian Beban BOS SMP Reguler		
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	107.799.940,00	
Beban Bahan-Bahan Kimia	25.578.000,00	
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.644.000,00	
Beban Bahan-Bahan Baku	481.878.215,00	
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	28.858.000,00	
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	2.205.000,00	
Beban Bahan-Bahan Lainnya	451.018.380,00	
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.540.000,00	
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	5.730.000,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.048.476.845,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	39.337.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.511.523.350,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	31.619.700,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	156.646.984,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.081.209.270,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	104.217.850,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	12.520.900,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	22.048.000,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	97.079.000,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	352.591.370,00	
Beban Obat-Obatan-Obat	87.550.160,00	
Beban Makanan dan Minuman Rapat	270.786.000,00	
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.584.000,00	
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	368.789.800,00	
Beban Pakaian Penyelamatan	5.800.000,00	
Beban Pakaian Adat Daerah	1.920.000,00	
Beban Pakaian Paskibraka	5.200.000,00	
Rincian Beban BOS SMP Kinerja		
Beban Bahan-Bahan Lainnya	9.683.060,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.543.688,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	310.000,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.164.820,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	460.000,00	
Beban Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	20.829.488,00	
Rincian Beban BOS SD Reguler		
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	625.749.425,00	
Beban Bahan-Bahan Kimia	18.741.820,00	
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.454.000,00	
Beban Bahan-Bahan Baku	330.858.580,00	
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	23.677.000,00	
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	2.070.000,00	
Beban Bahan-Bahan Lainnya	966.876.466,00	
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.000.000,00	
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	7.500.000,00	
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.274.600,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.350.512.469,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	109.940.650,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.637.422.701,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	49.247.400,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	358.521.421,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.258.082.378,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	192.574.900,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	17.717.000,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	35.996.950,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	114.197.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	981.615.331,00	
Beban Obat-Obatan-Obat	53.121.702,00	
Beban Makanan dan Minuman Rapat	125.466.454,00	
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.766.000,00	
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	71.091.500,00	
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.000.000,00	
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	3.270.000,00	
Beban Pakaian Adat Daerah	2.000.000,00	
Beban Pakaian Paskibraka	135.000,00	
Rincian Beban BOS SD Kinerja		
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.580.000,00	
Beban Bahan-Bahan Baku	755.000,00	
Beban Bahan-Bahan Lainnya	49.792.596,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.802.660,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	923.464,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.878.512,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.521.928,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.269.464,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	150.000,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.724.000,00	
Beban Obat-Obatan-Obat	150.000,00	
Beban Natura dan Pakan-Pakan Lainnya	200.000,00	
Beban Makanan dan Minuman Rapat	17.050.000,00	
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	74.767.640,00	
Rincian Beban BOP PAUD		
Beban Bahan-Bahan Lainnya	658.200,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.728.000,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.015.000,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.499.000,00	
Beban Obat-Obatan-Obat	840.000,00	
Pemakaian Persediaan APBD		
Beban Bahan-Bahan Kimia	260.895.875,00	
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	36.975.000,00	
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	252.600.352,50	
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	162.899.992,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	85.370.784,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	83.633.715,48	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	427.126.260,22	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.077.500,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	693.585.550,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	110.103.562,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	139.047.700,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.734.000,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	5.300.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	314.487.931,00	
Beban Obat-Obatan-Obat	6.903.171.570,93	
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.166.858.698,83	
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	153.149.563,80	
Beban Natura dan Pakan-Natura	816.182.900,00	
Beban Makanan dan Minuman Rapat	54.910.000,00	
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	131.500,00	
Pemakaian Persediaan BLUD		
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	61.793.000,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.500,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	466.900,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	891.000,00	
Beban Obat-Obatan-Obat	2.746.798.490,06	
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.744.355.462,33	
Belanja Natura dan Pakan-Pakan Lainnya	4.289.500,00	
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	27.037.000,00	
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	186.212.500,00	
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.262.244.271,00	
Pengeluaran Persediaan Obat COVID Expired		
Beban Obat-Obatan-Obat	880.000,00	
Hutang 2025		
Beban Obat-Obatan-Obat	1.063.173.472,00	
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	781.405.573,00	
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	199.980.400,00	
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	894.900.500,00	
Reklasifikasi dari Aset BOS Aset Tetap Lainnya		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	357.814.598,00	
Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	17.383.935.299,72	
Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	990.000,00	
Rincian Beban BLUD		
Beban Bahan-Bahan Kimia	179.861.120,00	
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	106.855.030,00	
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	385.265.700,00	
Beban Bahan-Bahan Lainnya	9.642.000,00	
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	621.638.220,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	133.388.178,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	82.319.563,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	268.485.602,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	373.858.671,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.783.551,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.673.000,00	
Beban Obat-Obatan-Obat	4.343.379.365,45	
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.588.210.982,00	
Beban Natura dan Pakan-Natura	340.805.400,00	
Beban Natura dan Pakan-Pakan Lainnya	66.990.500,00	
Beban Makanan dan Minuman Rapat	108.097.000,00	
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	34.049.500,00	
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	312.335.000,00	
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	35.625.000,00	
Hibah dari Pusat		
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	697.626.440,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	677.103.000,00	
Beban Obat-Obatan-Obat	16.641.987.941,06	
Utang BLUD 2025		
Beban Obat-Obatan-Obat	1.861.615.729,00	
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.593.673.030,00	
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.812.500,00	
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	173.653.000,00	
Reklasifikasi dari Beban Modal Peralatan dan Mesin ke Barang Ekstrakomtabel		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	61.008.466,00	
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.375.000,00	
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	392.000,00	
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.759.069.875,18	
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	4.522.000,00	
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	352.532.800,00	
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	900.000,00	
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	216.500,00	
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	71.535.500,00	
Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	8.589.000,00	
Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	5.597.000,00	
Beban Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman	21.475.028,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Reklasifikasi dari Beban Modal Peralatan dan Mesin ke BHP		
Beban Bahan-Bahan Lainnya	25.764.972,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	159.524.600,00	
Pemakaian Persediaan Dana BOS SMP 2024		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.440.964,00	
Pemakaian Persediaan Dana BOS SD 2024		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.887.629,00	
Pemakaian Persediaan JKN		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.987.200,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.516.861,54	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.789.500,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	33.149.900,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.010.000,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	611.500,00	
Beban Obat-Obatan-Obat	23.543.217,00	
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.224.734.013,43	
Obat Kadaluarsa		
Beban Obat-Obatan-Obat	55.659.518,16	
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	39.044.080,67	
Pembayaran Utang BLUD		
Beban Bahan-Isi Tabung Gas		6.045.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya		9.642.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		72.858.000,00
Beban Obat-Obatan-Obat		1.168.552.795,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		825.996.270,00
Beban Natura dan Pakan-Pakan Lainnya		66.990.500,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		7.012.500,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan		302.085.000,00
Persediaan JKN Puskesmas		
Beban Bahan-Bahan Kimia		30.419.576,50
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		8.846.700,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		25.103.600,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		14.696.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		32.280.700,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		7.684.607,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		17.733.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.548.500,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		2.112.446.425,40
Pembayaran Hutang		
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		7.470.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Beban Bahan-Isi Tabung Gas		79.342.800,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		18.800.000,00
Beban Obat-Obatan-Obat		1.163.190.928,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		717.309.547,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		4.926.712.500,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		556.099.380,79
Reklas ke aset tetap peralatan dan mesin		
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		12.683.508,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		12.532.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		8.918.900,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		841.952.188,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		5.990.670,00
Reklas ke aset tetap gedung dan bangunan		
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		1.474.350.589,00
Reklas ke aset tetap jalan irigasi dan jaringan		
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		299.075.848,00
Persediaan BLUD 2025		
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		61.793.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		337.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		188.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		4.646.160,29
Beban Obat-Obatan-Obat		3.577.251.534,35
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		2.577.630.396,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		27.037.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan		189.465.500,00
Persediaan Akhir 2025		
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		30.200.000,00
Beban Bahan-Bahan Kimia		198.698.049,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas		36.695.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		217.102.576,80
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		225.023.857,64
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		76.073.290,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		66.745.670,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		266.350.074,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		3.073.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		163.443.250,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		69.309.167,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		132.525.547,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		255.403.631,00
Beban Obat-Obatan-Obat		6.737.192.333,67



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		2.382.760.411,78
Beban Natura dan Pakan-Natura		822.415.150,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat		54.910.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan		77.000,00
Rincian Beban BLUD		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		434.100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1.916.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		102.000,00
Persediaan Dana BOS SMP 2025		
Beban Bahan-Bahan Baku		8.049.520,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		80.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya		303.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		15.900.624,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		148.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		866.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		7.117.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		281.850,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga		250.000,00
Beban Obat-Obatan-Obat		814.500,00
Persediaan Dana BOS SD 2025		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.534.000,00
Reklas Beban BOS Ke aset tetap Lainnya		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		152.956.969,43
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		2.989.651.950,00
Reklasifikasi Antar Kode Rekening		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		755.800,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		576.000,00
Persediaan dari Dana Hibah Obat		
Beban Obat-Obatan-Obat		2.716.031.362,28
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		132.750.900,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		3.200.987.890,00
Mutasi Persediaan		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		11.326.440,00
JUMLAH	116.002.154.100,36	42.258.552.036,93

Rincian Beban Persediaan LO Per SKPD TA 2025 disajikan Pada **Lampiran XL**.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

5.4.2.3 Beban Jasa-LO

Tahun 2025

Tahun 2024

Rp324.510.812.187,00

Rp323.259.431.601,58

Saldo Beban Jasa-LO TA 2025 sebesar Rp324.510.812.187,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp323.259.431.601,58. Apabila dibandingkan saldo Beban Jasa-LO Tahun 2025 dengan Tahun 2024, maka terdapat **kenaikan** sebesar Rp1.251.380.585,42 atau 0,39%. Adapun rincian Beban Jasa-LO TA 2025 beserta perbedaannya dengan realisasi Belanja diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 192. Rincian Perhitungan Beban Jasa-LO TA 2025

Uraian	LRA	Bertambah	Berkurang	Beban Jasa LO
Beban Jasa	283.332.131.522,00	45.615.737.009,00	4.437.056.344,00	324.510.812.187,00
Beban Jasa Kantor	144.056.398.745,00	42.103.475.313,00	3.626.469.901,00	182.533.404.157,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.191.622.500,00	34.150.000,00	0,00	2.225.772.500,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	612.100.000,00	424.030.536,00	0,00	1.036.130.536,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	183.800.000,00	0,00	0,00	183.800.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.887.970.000,00	10.850.000,00	0,00	3.898.820.000,00
Honorarium Rohaniwan	4.800.000,00	5.700.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	147.500.000,00	0,00	0,00	147.500.000,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	32.860.000,00	0,00	32.860.000,00
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	354.000.000,00	810.590.720,00	0,00	1.164.590.720,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	498.900.000,00	0,00	0,00	498.900.000,00
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	874.800.000,00	10.186.285.000,00	0,00	11.061.085.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	39.184.842.517,00	16.017.185.790,00	2.976.709.433,00	52.225.318.874,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	324.533.084,00	322.680.000,00	0,00	647.213.084,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	255.480.700,00	0,00	255.480.700,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	871.380.000,00	0,00	0,00	871.380.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	18.860.000,00	0,00	18.860.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	0,00	4.577.638.798,00	0,00	4.577.638.798,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	46.217.304,00	514.993.500,00	0,00	561.210.804,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.985.780.400,00	161.250.000,00	68.400.000,00	25.078.630.400,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	1.703.348.000,00	185.338.480,00	127.156.480,00	1.761.530.000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	7.041.718.574,00	1.502.005.000,00	0,00	8.543.723.574,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	61.850.000,00	551.055.000,00	0,00	612.905.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	429.662.054,00	0,00	0,00	429.662.054,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	212.000.000,00	0,00	0,00	212.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00	45.569.200,00	0,00	45.569.200,00
Beban Jasa Audit/ Surveillance ISO	0,00	85.920.000,00	0,00	85.920.000,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	LRA	Bertambah	Berkurang	Beban Jasa LO
Beban Jasa Tata Rias	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.542.952.324,00	0,00	0,00	1.542.952.324,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	315.235.970,00	41.799.220,00	0,00	357.035.190,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	109.383.191,00	0,00	109.383.191,00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	779.130.000,00	0,00	0,00	779.130.000,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	518.850.000,00	0,00	0,00	518.850.000,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	297.650.000,00	269.680.000,00	33.120.000,00	534.210.000,00
Beban Jasa Kalibrasi	159.897.267,00	39.338.000,00	14.820.000,00	184.415.267,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	0,00	298.117.529,00	103.528.988,00	194.588.541,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	10.560.000,00	10.550.000,00	0,00	21.110.000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	3.420.587.009,00	129.000.000,00	0,00	3.549.587.009,00
Beban Jasa Operator Kapal	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Beban Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tagihan Air	354.293.194,00	379.013.053,00	0,00	733.306.247,00
Beban Tagihan Listrik	39.251.703.779,00	666.366.506,00	0,00	39.918.070.285,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	558.809.500,00	986.402.000,00	0,00	1.545.211.500,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.177.212.163,00	2.679.197.252,00	42.427.000,00	8.813.982.415,00
Beban Paket/ Pengiriman	5.567.500,00	0,00	0,00	5.567.500,00
Beban Penambahan Daya	63.104.375,00	2.905.300,00	0,00	66.009.675,00
Beban Registrasi/ Keanggotaan	0,00	121.695.540,00	0,00	121.695.540,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	255.610.212,00	120.768.000,00	120.768.000,00	255.610.212,00
Beban Pengolahan Air Limbah	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
Beban Lembur	6.164.813.017,00	71.915.000,00	0,00	6.236.728.017,00
Beban Medical Check Up	147.628.002,00	430.461.998,00	135.040.000,00	443.050.000,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	147.780.000,00	0,00	0,00	147.780.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	159.290.000,00	0,00	0,00	159.290.000,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	101.538.821.761,00	0,00	0,00	101.538.821.761,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.529.711.180,00	0,00	0,00	4.529.711.180,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	78.778.095.000,00	0,00	0,00	78.778.095.000,00
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	6.707.484.000,00	0,00	0,00	6.707.484.000,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.540.097.572,00	0,00	0,00	2.540.097.572,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.229.717.142,00	0,00	0,00	5.229.717.142,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.753.716.867,00	0,00	0,00	3.753.716.867,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.163.410.450,00	41.962.000,00	0,00	7.205.372.450,00
Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	297.798.850,00	0,00	0,00	297.798.850,00
Beban Sewa Electric Generating Set	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Beban Sewa Pompa	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	1.504.618.000,00	0,00	0,00	1.504.618.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	368.300.000,00	7.600.000,00	0,00	375.900.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	LRA	Bertambah	Berkurang	Beban Jasa LO
Barang				
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	3.557.410.000,00	2.172.000,00	0,00	3.559.582.000,00
Beban Sewa Mebel	441.203.600,00	0,00	0,00	441.203.600,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	805.280.000,00	11.065.000,00	0,00	816.345.000,00
Beban Sewa Alat Studio Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Beban Sewa Peralatan Umum	61.000.000,00	9.900.000,00	0,00	70.900.000,00
Beban Sewa Komputer Jaringan	91.800.000,00	0,00	0,00	91.800.000,00
Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	651.900.000,00	0,00	0,00	651.900.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	411.600.000,00	0,00	0,00	411.600.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	200.800.000,00		0,00	200.800.000,00
Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	39.500.000,00	0,00	0,00	39.500.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Beban Sewa Alat Musik	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	14.766.223.081,00	428.495.544,00	810.586.443,00	14.384.132.182,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	9.950.000,00	0,00	0,00	9.950.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.497.687.476,00	0,00	157.400.000,00	1.340.287.476,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	9.916.210,00	0,00	9.916.210,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	339.099.450,00	0,00	0,00	339.099.450,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	199.533.800,00	0,00	0,00	199.533.800,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	997.520.625,00	199.022.000,00	0,00	1.196.542.625,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	4.194.997.025,00	0,00	24.179.643,00	4.170.817.382,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	849.532.950,00	0,00	0,00	849.532.950,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	419.050.530,00	0,00	66.718.800,00	352.331.730,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.383.510.800,00	119.935.500,00	562.288.000,00	1.941.158.300,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.517.444.925,00	0,00	0,00	1.517.444.925,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.109.573.150,00	0,00	0,00	1.109.573.150,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.248.322.350,00	99.621.834,00	0,00	1.347.944.184,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Uraian	LRA	Bertambah	Berkurang	Beban Jasa LO
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	468.958.000,00	85.000.000,00	0,00	553.958.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	122.030.000,00	0,00	0,00	122.030.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	146.928.000,00	0,00	0,00	146.928.000,00
Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	274.725.000,00	0,00	0,00	274.725.000,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	274.725.000,00	0,00	0,00	274.725.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	149.960.000,00	0,00	0,00	149.960.000,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	76.960.000,00	0,00	0,00	76.960.000,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.246.734.485,00	2.956.804.152,00	0,00	17.203.538.637,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	14.246.734.485,00	2.956.804.152,00	0,00	17.203.538.637,00

Rincian mutasi bertambah dan berkurang Beban Jasa-LO disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 193. Rincian Mutasi Bertambah dan Berkurang Beban Jasa LO TA 2025

URAIAN	Bertambah	Berkurang
Hutang 2025		
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.281.356.237,00	0,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	3.960.000,00	0,00
Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	75.000.000,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	89.499.300,00	0,00
Beban Medical Check Up	37.574.700,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	199.022.000,00	0,00
Rincian Beban BLUD		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	0,00
Honorarium Rohaniwan	4.500.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	12.605.614.259,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	184.680.700,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	142.800.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	145.308.480,00	0,00
Beban Jasa Audit/ Surveillance ISO	85.000.000,00	0,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	2.220.000,00	0,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	75.232.582,00	0,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	248.440.000,00	0,00
Beban Jasa Kalibrasi	39.338.000,00	0,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	130.183.988,00	0,00
Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	54.000.000,00	0,00
Beban Tagihan Listrik	60.324.430,00	0,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.480.000,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	150.378.000,00	0,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	120.768.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	Bertambah	Berkurang
Beban Pengolahan Air Limbah	940.000,00	0,00
Beban Medical Check Up	374.930.298,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	9.916.210,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	119.935.500,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	99.621.834,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	85.000.000,00	0,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	13.247.500,00	0,00
Rincian Beban BOS SMP Kinerja		
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	19.331.108,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	500.000,00	0,00
Beban Registrasi/ Keanggotaan	6.065.540,00	0,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	99.014.096,00	0,00
Rincian Beban BOS SMP Reguler		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.250.000,00	0,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	202.310.000,00	0,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.750.000,00	0,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	8.820.000,00	0,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	311.327.700,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	3.048.509.500,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	15.290.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.700.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	946.358.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	80.300.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	7.680.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	373.190.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	302.780.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	10.575.000,00	0,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	2.014.220,00	0,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	16.597.348,00	0,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	4.400.000,00	0,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	7.900.000,00	0,00
Beban Tagihan Air	111.356.388,00	0,00
Beban Tagihan Listrik	203.739.485,00	0,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	240.716.000,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	395.022.066,00	0,00
Beban Penambahan Daya	1.893.300,00	0,00
Beban Registrasi/ Keanggotaan	65.970.000,00	0,00
Beban Lembur	13.510.000,00	0,00
Beban Sewa Electric Generating Set	1.500.000,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.950.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Umum	8.700.000,00	0,00
Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	750.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	Bertambah	Berkurang
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	423.139.828,00	0,00
Rincian Beban BOS SD Kinerja		
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.290.536,00	0,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	100.478.912,00	0,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	4.050.000,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	304.500,00	0,00
Beban Lembur	3.525.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	2.250.000,00	0,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	516.542.728,00	0,00
Rincian Beban BOS SD Reguler		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.300.000,00	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	212.430.000,00	
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.100.000,00	
Honorarium Rohaniwan	1.200.000,00	
Honorarium Penyelenggara Ujian	24.040.000,00	
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	379.453.000,00	
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	7.136.275.500,00	
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	3.600.000,00	
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	55.510.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	13.160.000,00	
Beban Jasa Tenaga Administrasi	3.631.280.798,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	434.693.500,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	32.350.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.128.815.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	248.275.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	34.994.200,00	0,00
Beban Jasa Audit/ Surveillance ISO	920.000,00	0,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.000.000,00	0,00
Beban Jasa Tata Rias	1.300.000,00	0,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	37.565.000,00	0,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	13.497.461,00	0,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	5.100.000,00	0,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	2.650.000,00	0,00
Beban Jasa Operator Kapal	1.200.000,00	0,00
Beban Tagihan Air	267.656.665,00	0,00
Beban Tagihan Listrik	398.702.591,00	0,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	730.206.000,00	
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.038.693.386,00	
Beban Penambahan Daya	1.012.000,00	
Beban Registrasi/ Keanggotaan	49.660.000,00	
Beban Lembur	54.880.000,00	
Beban Sewa Pompa	325.000,00	
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.650.000,00	
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	2.172.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	Bertambah	Berkurang
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.065.000,00	
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	3.000.000,00	
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	1.400.000,00	
Beban Sewa Peralatan Umum	1.200.000,00	
Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	900.000,00	
Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	1.100.000,00	
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.904.860.000,00	
Utang BLUD 2025		
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2.130.215.294,00	
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	17.280.000,00	
Beban Jasa Pengolahan Sampah	158.433.541,00	
Beban Medical Check Up	17.957.000,00	
Rincian Beban PAUD Tahun 2025		
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	1.500.000,00	
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.800,00	
Beban Tagihan Listrik	3.600.000,00	
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.800.000,00	
Koreksi Hutang		
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	319.080.000,00	
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.450.000,00	
Pembayaran Hutang		
Honorarium Rohaniwan		4.500.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan		2.493.610.057,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum		68.400.000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli		127.156.480,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi		33.120.000,00
Beban Jasa Kalibrasi		14.820.000,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah		103.528.988,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		42.427.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan		120.768.000,00
Beban Medical Check Up		135.040.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		99.955.500,00
Kapitalisasi		
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural		157.400.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		426.332.500,00
Pembayaran Hutang BLUD		
Beban Jasa Tenaga Kesehatan		483.099.376,00
Lebih Catat atas Beban Jasa Konsultansi		
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi		24.179.643,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur		66.718.800,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		36.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	Bertambah	Berkurang
JUMLAH	45.615.737.009,00	4.437.056.344,00

Rincian Beban Jasa-LO Per SKPD TA 2025 disajikan pada **Lampiran XLI**.

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2025 Tahun 2024
Rp38.784.212.864,12 Rp33.319.701.271,00

Saldo Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2025 sebesar Rp38.784.212.864,12 dan Tahun 2024 sebesar Rp33.319.701.271,00. Apabila dibandingkan saldo Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2025 dengan Tahun 2024, maka terdapat **kenaikan** sebesar Rp5.464.511.593,12 atau 16,40%. Adapun rincian saldo Beban Pemeliharaan-LO TA 2025 beserta perbedaannya dengan realisasi Belanja diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 194. Rincian Perhitungan Beban Pemeliharaan LO tahun 2025

Uraian	Beban Pemeliharaan LRA 2025	Mutasi		Beban Pemeliharaan LO
		Bertambah	Berkurang	
Beban Pemeliharaan	61.392.751.261,00	8.925.268.754,52	31.533.807.151,40	38.784.212.864,12
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.638.299.275,00	2.244.445.958,00	367.928.592,00	13.514.816.641,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.880.733.538,00	5.138.062.311,00	29.974.282.678,00	5.044.513.171,00
Beban Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	19.873.718.448,00	1.053.811.425,52	1.191.595.881,40	19.735.933.992,12
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	488.949.060,00	0,00	488.949.060,00

Rincian mutasi bertambah dan berkurang Beban Pemeliharaan-LO disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 195. Rincian Mutasi Bertambah dan Berkurang Beban Pemeliharaan LO TA 2025

URAIAN	Bertambah	Berkurang
Rincian Beban BOS		
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	38.050.596,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	126.282.538,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	121.075.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	11.431.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	51.071.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	90.182.520,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.726.440,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	6.310.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	3.496.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	2.600.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	Bertambah	Berkurang
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	3.705.464,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	5.950.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian No Tanggal No Bukti Uraian Deb	2.944.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian No Tanggal No Bukti Uraian Deb	17.476.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	2.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	14.117.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	126.217.664,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	2.201.200,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	500.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	23.120.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	12.475.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	59.043.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	8.775.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	12.329.300,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	22.207.600,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	520.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	467.112.712,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	31.857.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	10.095.560,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	7.800.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	360.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.622.336.303,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	23.500.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	21.790.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	15.740.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	411.722.800,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	19.017.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	644.958.300,00	0,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	32.949.600,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	Bertambah	Berkurang
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	52.862.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	380.282.060,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya	6.570.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	67.067.000,00	
Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	3.000.000,00	
Rincian Beban BLUD		
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	29.009.860,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	532.985.192,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	23.680.400,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.330.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	6.607.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	20.313.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	21.175.700,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	79.828.220,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	106.259.480,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	58.507.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	20.990.100,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	403.404.900,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	400.000,00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	27.667.560,00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.250.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	42.768.001,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	667.677.224,00	
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	116.818.975,00	
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	22.200.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	32.030.000,00	0,00
Utang		
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	33.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.800.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.961.400,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	Bertambah	Berkurang
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	32.699.823,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.077.276.437,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	792.264.157,12	
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	4.329.168,40	
Koreksi Beban Modal		
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	149.206.500,00	
Pembayaran Utang BLUD		
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00	106.512.492,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		5.330.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		14.285.700,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		2.200.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic		58.507.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi		8.658.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya		170.334.900,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		2.100.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		392.541.500,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		98.387.475,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten		550.183.442,00
Reklasifikasi		
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		318.309.600,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		61.750.000,00
Kapitalisasi		
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		6.359.070.630,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi		100.566.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		22.246.485.273,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan		197.727.200,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten		292.164.968,40
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor		199.657.820,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya		149.589.651,00
Pembayaran Utang		
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		199.445.000,00
JUMLAH	8.925.268.754,52	31.533.807.151,40



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Perbedaan Belanja Pemeliharaan LRA TA 2025 dengan Beban Pemeliharaan-LO TA 2024, dikarenakan adanya rincian Beban Pemeliharaan Dana BOS SD dan SMP yang terdiri dari Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp778.807.822,00, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.276.289.675,00, Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp85.811.600,00 dan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp456.919.060,00. Rincian Beban BLUD yang terdiri dari Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.389.176.913,00, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp784.496.199,00, Beban Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp22.200.000,00, dan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp32.030.000,00, hutang yang merupakan Utang Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp76.461.223,00, Utang Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.077.276.437,00, dan Utang Beban Pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp796.593.325,25, Koreksi Belanja Modal Jalan Kabupaten ke Belanja Barang yang Diserahkan ke Pihak Ketiga sebesar Rp149.206.500,00, Pembayaran Utang BLUD yang merupakan pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp367.928.592,00, pembayaran Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp490.928.975,00, dan pembayaran Utang Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp550.183.442,00, dan reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp380.059.600,00, kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp29.545.261.542,40 dan pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp199.445.000,00. Rincian Beban Pemeliharaan – LO per SKPD Tahun 2025 disajikan pada **Lampiran XLII**.

5.4.2.5	Beban Perjalanan Dinas-	Tahun 2025	Tahun 2024
	LO	Rp69.304.606.135,00	Rp78.673.197.489,00

Saldo Beban Perjalanan Dinas-LO TA 2025 adalah sebesar Rp69.304.606.135,00 dan saldo Beban Perjalanan Dinas-LO TA 2024 sebesar Rp78.673.197.489,00. Apabila dibandingkan saldo Beban Perjalanan Dinas-LO TA 2025 dengan saldo Beban Perjalanan Dinas-LO TA 2024, maka terdapat **penurunan** sebesar Rp9.368.591.354,00 atau 11,91%. Terdapat perbedaan realisasi Belanja Perjalanan Dinas LRA sebesar Rp68.381.644.525,00 dengan Beban Perjalanan Dinas-LO sebesar Rp69.304.606.135,00. Perbedaan tersebut karena Beban Perjalanan Dinas dari Belanja BLUD dan dari Belanja Dana BOS. Rincian perbedaan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dengan Beban Perjalanan Dinas-LO per SKPD TA 2025 disajikan pada **Lampiran XLIII**.

5.4.2.6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp6.248.532.218,00	Rp8.579.432.645,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat-LO Tahun 2025 sebesar Rp6.248.532.218,00. Terdapat perbedaan realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LRA sebesar Rp5.422.401.073,00 dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO sebesar Rp6.248.532.218,00. Perbedaan tersebut karena



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dari Sumber Dana Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Parapat Tahun 2025 sebesar Rp393.183.274,00, Utang atas Beban Kerjasama Pihak Ketiga RSUD Parapat sebesar Rp35.111.614,00, pembayaran Utang Kerjasama Pihak Ketiga RSUD Parapat sebesar Rp130.663.742,00, dan reklasifikasi Beban Bantuan Sosial ke Beban Uang dan/Atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp528.500.000,00. Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat terdapat pada tabel berikut:

Tabel 196. Rincian Perhitungan Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat-LO Tahun 2025

Uraian	LRA	Mutasi		LO Tahun 2025
		Penambahan	Berkurang	
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	652.003.693,00	0,00	0,00	652.003.693,00
Beban Penghargaan atas suatu Prestasi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Beban Beasiswa	1.225.500.000,00	0,00	0,00	1.225.500.000,00
Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	124.500.000,00	528.500.000,00	0,00	653.000.000,00
Beban Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.390.397.380,00	297.631.145,00	0,00	3.688.028.525,00
JUMLAH	5.422.401.073,00	826.131.145,00	0,00	6.248.532.218,00

5.4.2.7 Beban Barang dan Jasa	Tahun 2025	Tahun 2024
BLUD	Rp7.813,512,00	Rp0,00

Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 sebesar Rp7.813,512,00 merupakan pengembalian uang ke RSUD Perdagangan karena adanya salah transfer Tahun 2024. Seharusnya ditransfer oleh RSUD Perdagangan ke Pentavalen, bukan ke RSUD Rondahaim dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.2.8 Beban Bunga	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat Realisasi Beban Bunga-LO TA 2025 dan Beban Bunga-LO TA 2024.

5.4.2.9 Beban Subsidi	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	Rp0,00

Beban Subsidi Pemerintah Kabupaten Simalungun TA 2025 sebesar Rp0,00 dan TA 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.2.10 Beban Hibah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp38.157.474.618,00	Rp102.909.788.657,00

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban Hibah dalam bentuk



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi. Beban Hibah-LO Tahun 2025 sebesar Rp38.157.474.618,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp102.909.788.657,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp64.752.314.039,00 atau 62,92%.

5.4.2.11 Beban Bantuan Sosial	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	Rp501.350.000,00

Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2024 sebesar Rp501.350.000,00.

5.4.2.12 Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp8.361.266.872,61	Rp7.390.018.006,38

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp8.361.266.872,61 dan Tahun 2024 sebesar Rp7.390.018.006,38. Apabila dibandingkan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dengan Tahun 2024, maka terdapat **kenaikan** pada saldo Tahun 2025 sebesar Rp971.248.866,23 atau 13,14%. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dirinci pada tabel berikut ini:

Tabel 197. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025

NO	JENIS PAJAK	PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2025
1	Pajak Hotel	0,00
2	Pajak Mineral	6.280.938,88
3	Pajak Restoran dan sejenisnya	126.474.990,61
4	Pajak Reklame	25.647.856,54
5	Pajak Air Tanah	1.515.668.590,73
6	Pajak hiburan	466.732,50
7	Pajak Parkir	813.695,00
8	PBB	6.685.914.068,35
TOTAL		8.361.266.872,61

5.4.2.13 Beban Penyusutan	Tahun 2025	Tahun 2024
Peralatan Mesin	Rp76.961.544.815,48	Rp76.605.451.621,77

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin-LO Tahun 2025 sebesar Rp76.961.544.815,48 dan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin-LO Tahun 2024 sebesar Rp76.605.451.621,77. Apabila dibandingkan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin-LO Tahun 2025 dengan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO Tahun 2024, maka terdapat **kenaikan** sebesar Rp356.093.193,71 atau 0,46%. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin-LO per SKPD TA 2025 disajikan pada **Lampiran XLIV**.

5.4.2.14 Beban Penyusutan	Tahun 2025	Tahun 2024
Gedung dan Bangunan	Rp49.540.850.307,76	Rp49.557.632.598,23

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO Tahun 2025 sebesar Rp49.540.850.307,76 dan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO Tahun 2024 sebesar Rp49.557.632.598,23. Apabila dibandingkan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO tahun 2025 dengan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO Tahun 2024, maka



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

terdapat **penurunan** sebesar Rp16.782.290,47 atau 0,03%. Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO per SKPD TA 2025 disajikan pada **Lampiran XLIV**.

5.4.2.15	Beban Penyusutan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp74.247.163.211,78	Rp150.190.871.005,36

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO Tahun 2025 sebesar Rp74.247.163.211,78 dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO Tahun 2024 sebesar Rp150.190.871.005,36. Apabila dibandingkan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO Tahun 2025 dengan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO Tahun 2024, maka terdapat **penurunan** sebesar Rp75.943.707.793,58 atau 50,56%. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO per SKPD TA 2025 disajikan pada **Lampiran XLIV**.

5.4.2.16	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya-LO Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya-LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.2.17	Beban Penyusutan Aset Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Beban Penyusutan Lainnya-LO Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Beban Penyusutan Aset Lainnya-LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.2.18	Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp473.847.189,00	Rp528.044.877,00

Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp473.847.189,00 dan Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp528.044.877,00. Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD TA 2025 disajikan pada **lampiran XLIV**.

5.4.2.19	Beban Penyusutan Properti Investasi	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp347.421.154,66	Rp0,00

Beban Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025 sebesar Rp347.421.154,66 dan Beban Penyusutan Properti Investasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.2.20	Beban Transfer	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp167.026.096.255,00	Rp158.540.735.998,20

Beban Transfer Tahun 2025 sebesar Rp167.026.096.255,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp158.540.735.998,20 yang merupakan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp10.659.992.569,00, Beban Bantuan



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp500.000.000,00, dan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa sebesar Rp155.866.103.686,00.

5.4.2.21	Beban Tidak Terduga	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp17.832.727.800,00	Rp11.809.955.248,00

Beban Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp17.832.727.800,00 yang merupakan Beban atas Penanggulangan Bencana Alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 17.802.727.800,00 dan reklasifikasi Beban Bantuan Sosial ke Beban Tidak Terduga pada Dinas Sosial sebesar Rp30.000.000,00, sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp11.809.955.248,00.

5.4.3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp159.360.115.083,13	Rp116.487.562.504,13

Surplus/Defisit dari Operasi pada Tahun 2025 sebesar Rp159.360.115.083,13, sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp116.487.562.504,13.

5.4.4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo atas Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024.

5.4.5	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp159.360.115.083,13	Rp116.487.562.504,13

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Simalungun memiliki Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp159.360.115.083,13 dan Tahun 2024 sebesar Rp116.487.562.504,13.

5.4.6	Pos Luar Biasa	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp582.867.000,00	Rp0,00

Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp582.867.000,00 merupakan koreksi atas pencatatan nilai aset dimana pembayaran Utang BTT Tahun 2021 dibayar dari Belanja Modal berikut dengan dendanya dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.6.1	Beban Luar Biasa-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp582.867.000,00	Rp0,00

Beban Luar Biasa-LO Tahun 2025 sebesar Rp582.867.000,00 Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.7	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp(582.867.000,00)	Rp(0,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa merupakan selisih antara Pendapatan Luar Biasa-LO dengan Beban Luar Biasa. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp(582.867.000,00) dan Tahun 2024 sebesar Rp(0,00).

5.4.8 SURPLUS/DEFISIT-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp158.777.248.083,13	Rp116.487.562.504,13

Surplus/Defisit-LO diperoleh dari Surplus/Defisit sebelum Pos Luar biasa dikurangi dengan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp158.777.248.083,13 **bertambah** sebesar Rp42.289.685.579,00 atau 36,30%, jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO Tahun 2024 sebesar Rp116.487.562.504,13.

5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Simalungun menggambarkan Saldo Awal Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Akhir Kas selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Tujuan pelaporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk menggunakan kas tersebut. Dalam periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalami **penurunan** kas sebesar Rp(151.633.381.894,98). dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 198. Rincian Komponen Laporan Arus Kas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	450.324.198.920,24	331.722.016.396,13	118.602.182.524,11	35,75
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(298.755.912.913,00)	(349.471.126.587,00)	107.375.424.420,00	(30,73)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	65.095.887,74	0,00	193.680.025,51	0,00
Kenaikan/ (Penurunan) Kas	151.633.381.894,98	(17.749.110.190,87)	226.171.286.969,62	(1.274,27)

5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp450.324.198.920,24	Rp331.722.016.396,13

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Simalungun TA 2025 dan TA 2024 dan merupakan realisasi Pendapatan Daerah setelah dikurangi Belanja Operasi kegiatan pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 199. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

NO	URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Kas Masuk		



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
3	Penerimaan Pajak Daerah	205.995.136.182,00	151.774.759.464,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	4.343.283.279,00	3.151.160.835,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.984.918.125,00	20.272.583.191,00
6	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	54.157.580.304,24	44.655.180.974,96
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	74.753.539.800,00	77.997.860.510,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.505.898.079.984,00	1.334.875.047.531,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	52.783.147.720,00	204.755.773.878,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	344.425.475.488,00	334.463.699.068,00
11	Penerimaan Dana Insentif	0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Desa	264.200.487.148,00	343.668.854.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	189.908.987.666,00	98.537.294.645,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	49.072.106.374,00	0,00
15	Penerimaan Hibah	0,00	0,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	34.022.163.876,00	32.716.851.248,00
11	Jumlah Arus Kas Masuk	2.802.544.905.946,24	2.646.869.065.344,96
12	Arus Kas Keluar		
13	Pembayaran Pegawai	1.176.138.593.451,00	964.985.141.154,00
14	Pembayaran Barang dan Jasa	688.336.827.754,00	725.004.496.544,63
15	Pembayaran Belanja Hibah	38.157.474.618,00	101.603.079.004,00
16	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	558.500.000,00	501.350.000,00
17	Pembayaran Tak Terduga	17.802.727.800,00	20.843.392.248,00
18	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	10.659.992.569,00	158.540.735.998,20
19	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	420.566.590.834,00	343.668.854.000,00
22	Jumlah Arus Kas Keluar	2.352.220.707.026,00	2.315.147.048.948,83
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (12-23)	450.324.198.920,24	331.722.016.396,13

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Simalungun selama TA 2025 sebesar Rp2.802.544.905.946,24 dan TA 2024 sebesar Rp2.646.869.065.344,96. Apabila dibandingkan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten selama TA 2025 dengan TA 2024, maka Arus Kas Masuk Tahun 2025 mengalami **kenaikan** sebesar Rp155.675.840.601,28 atau 5,88%. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Simalungun selama TA 2025 dan TA 2024, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 200. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

NO	URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
2	Arus Kas Masuk				
3	Penerimaan Pajak Daerah	205.995.136.182,00	151.774.759.464,00	54.220.376.718,00	35,72



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
4	Penerimaan Retribusi Daerah	4.343.283.279,00	3.151.160.835,00	1.192.122.444,00	37,83
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.984.918.125,00	20.272.583.191,00	2.712.334.934,00	13,38
6	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	54.157.580.304,24	44.655.180.974,96	9.502.399.329,28	21,28
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	74.753.539.800,00	77.997.860.510,00	(3.244.320.710,00)	(4,16)
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.505.898.079.984,00	1.334.875.047.531,00	171.023.032.453,00	12,81
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	52.783.147.720,00	204.755.773.878,00	(151.972.626.158,00)	(74,22)
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	344.425.475.488,00	334.463.699.068,00	9.961.776.420,00	2,98
11	Penerimaan Dana Insentif	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Desa	264.200.487.148,00	343.668.854.000,00	(79.468.366.852,00)	(23,12)
13	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	189.908.987.666,00	98.537.294.645,00	91.371.693.021,00	92,73
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	49.072.106.374,00	0,00	49.072.106.374,00	0,00
15	Penerimaan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	34.022.163.876,00	32.716.851.248,00	1.305.312.628,00	3,99
12	Jumlah Arus Kas Masuk	2.802.544.905.946,24	2.646.869.065.344,96	155.675.840.601,28	5,88

5.5.1.2 Arus Kas keluar Tahun 2025 Tahun 2024
Rp2.352.220.707.026,00 Rp2.315.147.048.948,83

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Simalungun selama TA 2025 sebesar Rp2.352.220.707.026,00 dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Simalungun selama TA 2024 sebesar Rp2.315.147.048.948,83. Apabila dibandingkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Simalungun selama TA 2025 dengan TA 2024, maka Arus Kas Keluar TA 2025 mengalami **kenaikan** sebesar Rp37.073.658.077,17 atau 1,60%. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Simalungun selama TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 201. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

NO	URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Arus Kas Keluar				
2	Pembayaran Pegawai	1.176.138.593.451,00	964.985.141.154,00	211.153.452.297,00	21,88
3	Pembayaran Barang dan Jasa	688.336.827.754,00	725.004.496.544,63	(36.667.668.790,63)	(5,06)
4	Pembayaran Belanja Hibah	38.157.474.618,00	101.603.079.004,00	(63.445.604.386,00)	(62,44)
5	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	558.500.000,00	501.350.000,00	57.150.000,00	11,40
6	Pembayaran Tak Terduga	17.802.727.800,00	20.843.392.248,00	(3.040.664.448,00)	(14,59)
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	10.659.992.569,00	158.540.735.998,20	(147.880.743.429,20)	(93,28)
8	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	420.566.590.834,00	343.668.854.000,00	76.897.736.834,00	22,38
11	Jumlah Arus Kas Keluar	2.352.220.707.026,00	2.315.147.048.948,83	37.073.658.077,17	1,60



5.5.2	Arus Kas Bersih dari	Tahun 2025	Tahun 2024
	Aktivitas Investasi	Rp(298.755.912.913,00)	Rp(349.471.126.587,00)

Arus Kas ini merupakan saldo dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Simalungun TA 2025 dan TA 2024 dan merupakan realisasi Pendapatan Daerah dari Penjualan Aset Daerah setelah dikurangi Belanja Modal pemerintah berupa pengadaan Barang Inventaris Milik Daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 202. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2025 dan 2024

NO	URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
2	Arus Kas Masuk				
3	Penjualan Aset Tetap Lainnya	34.413.000,00	90.836.500,00	(56.423.500,00)	(62,12)
4	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah Arus Kas Masuk	34.413.000,00	90.836.500,00	(56.423.500,00)	(62,12)
11	Arus Kas Keluar				
12	Perolehan Peralatan dan Mesin	58.911.262.046,00	107.661.000.057,00	(48.749.738.011,00)	(45,28)
13	Perolehan Gedung dan Bangunan	68.257.309.278,00	76.995.108.180,00	(8.737.798.902,00)	(11,35)
14	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	135.455.575.766,00	134.990.437.486,00	465.138.280,00	0,34
15	Perolehan Aset Tetap Lainnya	28.424.703.823,00	22.915.417.364,00	5.509.286.459,00	24,04
16	Perolehan Aset Lainnya	241.475.000,00	0,00	241.475.000,00	#DIV/0!
17	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	7.000.000.000,00	500.000.000,00	7,14
19	Jumlah Arus Kas Keluar	298.790.325.913,00	349.561.963.087,00	(50.771.637.174,00)	(14,52)
20	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(298.755.912.913,00)	(349.471.126.587,00)	50.715.213.674,00	(14,51)

5.5.2.1	Arus Kas Masuk	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp34.413.000,00	Rp90.836.500,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Simalungun selama TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp34.413.000,00 dan Rp90.836.500,00. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi TA 2025 merupakan Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp34.413.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 203. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi TA 2025 dan TA 2024

NO	URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)		
Arus Kas Masuk					
	Penjualan Aset Tetap Lainnya	34.413.000,00	90.836.500,00	(56.423.500,00)	(62,12)
	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	34.413.000,00	90.836.500,00	(56.423.500,00)	(62,12)

Apabila dibandingkan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Simalungun selama TA 2025 dengan TA 2024, maka TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp56.423.500,00 atau 62,12%.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

		Tahun 2025	Tahun 2024
5.5.2.2	Arus Kas Keluar	Rp298.790.325.913,00	Rp349.561.963.087,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Simalungun selama TA 2025 sebesar Rp298.790.325.913,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp349.561.963.087,00 terdiri dari:

Tabel 204. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2025 dan TA 2024

NO	URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)		
Arus Kas Keluar					
	Perolehan Peralatan dan Mesin	58.911.262.046,00	107.661.000.057,00	(48.749.738.011,00)	(45,28)
	Perolehan Gedung dan Bangunan	68.257.309.278,00	76.995.108.180,00	(8.737.798.902,00)	(11,35)
	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	135.455.575.766,00	134.990.437.486,00	465.138.280,00	0,34
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	28.424.703.823,00	22.915.417.364,00	5.509.286.459,00	24,04
	Perolehan Aset Lainnya	241.475.000,00	0,00	241.475.000,00	0,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	7.000.000.000,00	500.000.000,00	7,14
	Jumlah Arus Kas Keluar	298.790.325.913,00	349.561.963.087,00	(50.771.637.174,00)	(14,52)

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Simalungun selama TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp298.790.325.913,00 dan sebesar Rp349.561.963.087,00. Apabila dibandingkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Simalungun selama TA 2025 dengan TA 2024, maka TA 2025 mengalami *penurunan* sebesar Rp50.771.637.174,00 atau 14,52%.

5.5.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Simalungun selama TA 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.5.4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp69.745.045,74	Rp0,00

Arus kas ini merupakan saldo dari Aktivitas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yaitu arus kas dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam kerangka aktivitas transitoris, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 205. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2025 dan TA 2024

NO	URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)		
Arus Kas Masuk					
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	138.709.676.108,00	153.229.487.978,00	(14.519.811.870,00)	(9,48)
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya	65.095.887,74	0,00	65.095.887,74	0,00
	Koreksi Silpa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	138.774.771.995,74	153.229.487.978,00	(14.454.715.982,26)	(9,43)
Arus Kas Keluar					



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)		
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	138.709.676.108,00	153.229.487.978,00	(14.519.811.870,00)	(9,48)
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koreksi Silpa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	138.709.676.108,00	153.229.487.978,00	(14.519.811.870,00)	(9,48)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	65.095.887,74	0,00	65.095.887,74	0,00

Rincian arus kas masuk dan keluar yang bersumber dari PFK TA 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 206. Rincian Arus Kas Masuk dan Keluar dari PFK Transitoris TA 2025

NO	URAIAN	ARUS KAS MASUK PFK	ARUS KAS KELUAR PFK	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	
1	Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	138.709.676.108,00	138.709.676.108,00	0,00
1.1	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	42.375.122.049,00	42.375.122.049,00	0,00
1.2	PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	0,00	0,00	0,00
1.3	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	6.306.403.708,00	6.306.403.708,00	0,00
1.4	PPh 21	15.779.533.482,00	15.779.533.482,00	0,00
1.5	PPh 22	1.007.487.651,00	1.007.487.651,00	0,00
1.6	PPh 23	380.565.540,00	380.565.540,00	0,00
1.7	iwp 1% PNS	3.758.374.200,00	3.758.374.200,00	0,00
1.8	iwp 8% PNS	27.579.417.096,00	27.579.417.096,00	0,00
1.9	askes 4% PNS	15.033.484.757,00	15.033.484.757,00	0,00
1.10	jkk PNS	758.182.203,00	758.182.203,00	0,00
1.11	jkm PNS	2.274.558.957,00	2.274.558.957,00	0,00
1.12	iwp 1% PPPK	2.665.845.088,00	2.665.845.088,00	0,00
1.13	iwp 8% PPPK	7.949.006.743,00	7.949.006.743,00	0,00
1.14	askes 4% PPPK	10.663.385.369,00	10.663.385.369,00	0,00
1.15	jkk PPPK	541.739.223,00	541.739.223,00	0,00
1.16	jkm PPPK	1.625.160.202,00	1.625.160.202,00	0,00
1.17	iwp 1% KDH	1.361.520,00	1.361.520,00	0,00
1.18	iwp 8% KDH	4.152.960,00	4.152.960,00	0,00
1.19	askes 4% KDH	5.446.080,00	5.446.080,00	0,00
1.20	jkk KDH	112.320,00	112.320,00	0,00
1.21	jkm KDH	336.960,00	336.960,00	0,00
2	Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya	65.095.887,74	0,00	65.095.887,74
2.1	MPN(1%) JKN	1.034.133,00	0,00	1.034.133,00
2.2	PPh 21 JKN	3.253.503,00	0,00	3.253.503,00
2.3	Jaspel JKN	358.522,00	0,00	358.522,00
2.4	Admin JKN	3.000,00	0,00	3.000,00
2.5	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	28.129.357,92	0,00	28.129.357,92
2.6	PPh 21	21.299.316,00	0,00	21.299.316,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025*

NO	URAIAN	ARUS KAS MASUK PFK	ARUS KAS KELUAR PFK	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	
2.7	PPh 22	1.649.119,00	0,00	1.649.119,00
2.8	PPh 23	9.368.936,82	0,00	9.368.936,82
3	Koreksi Silpa	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah arus kas masuk dan Keluar	138.774.771.995,74	138.709.676.108,00	65.095.887,74

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 sebesar Rp264.820.095.946,43 dan Tahun 2024 sebesar Rp113.186.714.051,74 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 207. Rincian Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	(Rp)	(Rp)		
Kas di Kas Daerah	255.808.729.916,36	93.925.115.350,33	161.883.614.566,03	172,35
Kas di Bendahara Penerimaan	11.434.700,00	21.499.500,00	(10.064.800,00)	(46,81)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	1.314.056.754,80	1.759.322.567,80	(445.265.813,00)	(25,31)
Kas Dana BOS	991.494.462,21	681.861.814,00	309.632.648,21	45,41
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.254.311.295,32	6.198.076.101,32	(3.943.764.806,00)	(63,63)
Kas Dana BOK Puskesmas	4.374.972.930,00	10.600.838.718,29	(6.225.865.788,29)	(58,73)
Kas Lainnya	65.095.887,74	0,00	65.095.887,74	0,00
Saldo Akhir Kas	264.820.095.946,43	113.186.714.051,74	151.633.381.894,69	133,97

5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas Aktivitas Operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada LPE TA 2025 dan TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 208. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan Tahun 2024

Reff CaLK	URAIAN	TA 2025	TA 2024
		(Rp)	(Rp)
5.6.1	EKUITAS AWAL	3.006.143.269.008,92	2.946.777.337.747,92
5.6.2	SURPLUS/DEFISIT-LO	158.777.248.083,133	116.487.562.504,13
5.6.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
5.6.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
5.6.3.2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
5.6.3.3	Koreksi ekuitas lainnya	130.652.093.660,21	(57.121.631.243,13)
5.6.4	EKUITAS AKHIR	3.295.572.610.752,26	3.006.143.269.008,92

5.6.1	Ekuitas Awal	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp3.006.143.269.008,92	Rp2.946.777.337.747,92

Ekuitas Awal TA 2025 sebesar Rp3.006.143.269.008,92 dan TA 2024 sebesar Rp2.946.777.337.747,92, Apabila dibandingkan Ekuitas Awal TA 2025 dengan Ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Awal TA 2024 terdapat **kenaikan** sebesar Rp59.365.931.261,00 atau 2,01%. Rincian Ekuitas Awal dan Perubahan Ekuitas Per SKPD Tahun 2025, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 209. Rincian Ekuitas Awal dan Perubahan Ekuitas Per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	EKUITAS AWAL 2025	SURPLUS/DEFISIT- LO 2025	KOREKSI EKUITAS LAINNYA TA 2025	EKUITAS AKHIR 2025
1	DINAS PENDIDIKAN	599.353.544.080,18	(870.274.837.198,67)	8.754.453.241,29	(262.166.839.877,20)
2	DINAS KESEHATAN	195.509.063.083,60	(319.590.259.906,42)	124.216.960,62	(123.956.979.862,20)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN	62.794.584.558,64	(29.406.406.763,65)	128.339.470,01	33.516.517.265,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM	46.630.444.089,73	(27.787.661.590,06)	44.665.907,32	18.887.448.406,99
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT	50.652.610.827,51	(22.169.630.568,32)	(96.509.916,00)	28.386.470.343,19
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	909.303.104.608,56	(186.577.600.495,11)	13.237.923.724,28	735.963.427.837,73
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	1.625.110.179,00	(3.826.165.867,08)	0,00	(2.201.055.688,08)
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.316.371.746,61	(6.510.662.368,30)	0,00	(3.194.290.621,69)
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20.009.060.606,52	(11.865.438.208,86)	17.760.044.039,15	25.903.666.436,81
10	DINAS SOSIAL	275.249.055,64	(6.046.197.149,33)	0,00	(5.770.948.093,69)
11	DINAS KETENAGAKERJAAN	7.149.166.102,68	(2.185.763.561,81)	240.395.000,00	5.203.797.540,87
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.892.400.406,27	(2.635.973.990,78)	0,00	1.256.426.415,49
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	8.492.768.341,23	(10.238.843.700,43)	0,00	(1.746.075.359,20)
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15.319.772.983,29	(11.795.476.701,34)	(138.920.000,66)	3.385.376.281,29
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPI	6.298.263.779,74	(6.925.539.564,73)	0,00	(627.275.784,99)
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI	3.392.286.044,38	(5.966.566.794,81)	0,00	(2.574.280.750,43)
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.201.801.481,22	(18.341.854.949,59)	(57.769.999,75)	(7.197.823.468,12)
18	DINAS PERHUBUNGAN	25.362.600.467,05	(48.399.383.538,87)	11.326.440,00	(23.025.456.631,82)
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.246.429.577,93	(8.882.780.625,43)	0,00	(7.636.351.047,50)
20	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN	9.681.293.257,44	(5.656.283.497,72)	158.960.000,00	4.183.969.759,72



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	SKPD	EKUITAS AWAL 2025	SURPLUS/DEFISIT- LO 2025	KOREKSI EKUITAS LAINNYA TA 2025	EKUITAS AKHIR 2025
	MENENGAH				
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.382.160.602,99	(4.630.169.685,34)	0,00	(248.009.082,35)
22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	17.264.837.019,68	(4.949.882.550,97)	0,00	12.314.954.468,71
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	13.353.009.707,52	(4.433.413.315,96)	0,00	8.919.596.391,56
24	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	29.643.592.222,98	(7.296.682.473,28)	5.102.472.621,41	27.449.382.371,11
25	DINAS PERTANIAN	60.829.618.951,18	(55.162.276.383,57)	(11.495.662.500,00)	(5.828.319.932,39)
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20.565.724.635,74	(9.308.905.502,79)	262.419.822,94	11.519.238.955,89
27	SEKRETARIAT DAERAH	133.716.621.244,11	(51.670.121.153,05)	16.065.000,00	82.062.565.091,06
28	SEKRETARIAT DPRD	17.143.821.409,27	(56.967.921.347,72)	0,00	(39.824.099.938,45)
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	3.906.160.283,14	(5.896.671.904,30)	0,00	(1.990.511.621,16)
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	523.650.673.126,64	2.121.134.897.177,25	101.902.845.701,88	2.746.688.416.005,77
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.031.799.221,44	(48.284.924.891,65)	0,00	(45.253.125.670,21)
32	INSPEKTORAT	4.147.864.933,72	(13.756.311.879,88)	0,00	(9.608.446.946,16)
33	KECAMATAN SIANTAR	5.882.250.306,92	(3.708.059.230,19)	0,00	2.174.191.076,73
34	KECAMATAN GUNUNG MALELA	506.289.472,64	(3.049.145.805,27)	0,00	(2.542.856.332,63)
35	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS	453.404.176,17	(2.652.598.068,05)	0,00	(2.199.193.891,88)
36	KECAMATAN PANEI	955.679.364,97	(2.994.537.735,08)	0,00	(2.038.858.370,11)
37	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI	600.159.129,50	(2.537.727.289,68)	69.460.000,33	(1.868.108.159,85)
38	KECAMATAN JORLANG HATARAN	1.441.300.339,84	(2.951.332.781,66)	(199.860.000,00)	(1.709.892.441,82)
39	KECAMATAN RAYA KAHEAN	2.677.614.385,30	(2.031.023.664,61)	(198.823.200,00)	447.767.520,69
40	KECAMATAN BOSAR MALIGAS	1.667.641.448,34	(2.721.613.754,06)	(198.929.000,00)	(1.252.901.305,72)
41	KECAMATAN SIDAMANIK	5.914.412.590,43	(3.228.714.484,41)	(199.057.200,00)	2.486.640.906,02
42	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK	2.004.599.560,77	(2.768.051.925,69)	(199.533.800,00)	(962.986.164,92)
43	KECAMATAN TANAH	2.696.539.339,63	(3.947.680.072,34)	(462.289.822,94)	(1.713.430.555,65)



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	SKPD	EKUITAS AWAL 2025	SURPLUS/DEFISIT- LO 2025	KOREKSI EKUITAS LAINNYA TA 2025	EKUITAS AKHIR 2025
	JAWA				
44	KECAMATAN HATONDUHAN	1.070.693.178,54	(2.169.709.403,33)	0,00	(1.099.016.224,79)
45	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN	3.076.866.069,36	(2.160.299.347,21)	0,00	916.566.722,15
46	KECAMATAN PURBA	2.574.218.116,87	(2.172.598.445,92)	(130.029.699,67)	271.589.971,28
47	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON	3.563.127.723,92	(1.586.842.762,80)	(198.690.000,00)	1.777.594.961,12
48	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON	26.804.894.595,50	(3.385.038.078,73)	(596.662.200,00)	22.823.194.316,77
49	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR	6.111.272.425,94	(4.335.413.267,67)	(399.660.000,00)	1.376.199.158,27
50	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA	2.318.383.948,12	(2.402.568.632,50)	(200.000.000,00)	(284.184.684,38)
51	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI	1.009.626.897,64	(2.085.545.752,41)	0,00	(1.075.918.854,77)
52	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN	1.701.104.551,50	(1.364.871.989,41)	0,00	336.232.562,09
53	KECAMATAN PEMATANG BANDAR	8.132.559.917,01	(3.549.385.401,77)	(399.248.600,00)	4.183.925.915,24
54	KECAMATAN BANDAR HULUAN	743.571.805,15	(2.166.953.369,90)	0,00	(1.423.381.564,75)
55	KECAMATAN BANDAR	34.371.692.695,74	(5.055.232.379,31)	(397.512.000,00)	28.918.948.316,43
56	KECAMATAN BANDAR MASILAM	1.866.963.296,36	(1.838.058.015,37)	0,00	28.905.280,99
57	KECAMATAN SILIMAKUTA	21.527.785.509,02	(3.007.823.535,42)	(199.985.000,00)	18.319.976.973,60
58	KECAMATAN SILOU KAHEAN	2.349.436.247,59	(1.454.944.257,22)	0,00	894.491.990,37
59	KECAMATAN TAPIAN DOLOK	7.706.185.834,54	(4.056.640.835,20)	(198.630.800,00)	3.450.914.199,34
60	KECAMATAN RAYA	32.828.408.856,47	(4.611.669.013,75)	(995.250.000,00)	27.221.489.842,72
61	KECAMATAN UJUNG PADANG	1.808.561.909,06	(2.304.646.679,34)	(198.495.500,00)	(694.580.270,28)
62	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA	1.114.048.176,87	(1.828.501.934,28)	0,00	(714.453.757,41)
63	KECAMATAN DOLOG MASAGAL	3.308.510.060,23	(1.377.573.521,08)	0,00	1.930.936.539,15
64	KECAMATAN DOLOK SILOU	709.114.362,52	(1.494.942.662,79)	0,00	(785.828.300,27)
65	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.504.544.080,83	(7.917.296.867,85)	24.970,00	(4.412.727.817,02)
	TOTAL	3.006.143.269.008,92	158.777.248.083,133	130.652.093.660,21	3.295.621.413.792,01

5.6.2 Surplus/Defisit LO **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp158.777.248.083,133 **Rp116.487.562.504,13**

Surplus/Defisit-LO pada TA 2025 sebesar Rp158.777.248.083,133 dan Surplus/Defisit-LO TA 2024 sebesar Rp116.487.562.504,13. Rincian Surplus/Defisit-LO TA 2025 dan 2024, disajikan pada tabel dibawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 210. Rincian SURPLUS/DEFISIT LO TA 2025 dan TA 2024

NO	SKPD	SURPLUS/DEFISIT- LO TA 2025	SURPLUS/DEFISIT- LO TA 2024
1	DINAS PENDIDIKAN	(870.274.837.198,67)	(776.010.837.195,89)
2	DINAS KESEHATAN	(319.590.259.906,42)	(260.428.525.995,76)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN	(29.406.406.763,65)	(27.721.820.166,57)
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDHAHM	(27.787.661.590,06)	(27.904.520.109,92)
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT	(22.169.630.568,32)	(19.271.075.186,25)
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	(186.577.600.495,11)	(219.132.013.956,25)
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	(3.826.165.867,08)	(12.347.405.500,53)
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(6.510.662.368,30)	(8.215.753.921,65)
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(11.865.438.208,86)	(14.126.452.342,95)
10	DINAS SOSIAL	(6.046.197.149,33)	(9.358.342.961,33)
11	DINAS KETENAGAKERJAAN	(2.185.763.561,81)	(9.494.556.158,24)
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(2.635.973.990,78)	(3.563.321.431,78)
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	(10.238.843.700,43)	(11.578.968.087,57)
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(11.795.476.701,34)	(6.523.097.615,29)
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(6.925.539.564,73)	(7.180.745.065,73)
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI	(5.966.566.794,81)	(9.114.928.081,20)
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(18.341.854.949,59)	(18.525.971.540,29)
18	DINAS PERHUBUNGAN	(48.399.383.538,87)	(22.081.077.314,35)
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(8.882.780.625,43)	(9.954.837.689,44)
20	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	(5.656.283.497,72)	(10.804.707.323,24)
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(4.630.169.685,34)	(3.702.349.601,60)
22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	(4.949.882.550,97)	(9.777.801.377,77)
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	(4.433.413.315,96)	(4.287.053.140,50)
24	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	(7.296.682.473,28)	(19.564.487.275,39)
25	DINAS PERTANIAN	(55.162.276.383,57)	(40.389.067.074,89)
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(9.308.905.502,79)	(9.507.114.982,59)
27	SEKRETARIAT DAERAH	(51.670.121.153,05)	(60.448.076.206,77)
28	SEKRETARIAT DPRD	(56.967.921.347,72)	(50.510.057.954,78)
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	(5.896.671.904,30)	(7.099.660.452,22)
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2.121.134.897.177,25	1.989.148.501.715,84
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(48.284.924.891,65)	(10.730.844.064,65)
32	INSPEKTORAT	(13.756.311.879,88)	(11.785.465.397,80)



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	SKPD	SURPLUS/DEFISIT- LO TA 2025	SURPLUS/DEFISIT- LO TA 2024
33	KECAMATAN SIANTAR	(3.708.059.230,19)	(3.955.233.715,19)
34	KECAMATAN GUNUNG MALELA	(3.049.145.805,27)	(3.359.330.550,27)
35	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS	(2.652.598.068,05)	(2.819.744.711,05)
36	KECAMATAN PANEI	(2.994.537.735,08)	(3.236.407.661,08)
37	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI	(2.537.727.289,68)	(2.803.656.767,29)
38	KECAMATAN JORLANG HATARAN	(2.951.332.781,66)	(3.107.163.330,66)
39	KECAMATAN RAYA KAHEAN	(2.031.023.664,61)	(1.947.843.985,61)
40	KECAMATAN BOSAR MALIGAS	(2.721.613.754,06)	(2.790.390.575,06)
41	KECAMATAN SIDAMANIK	(3.228.714.484,41)	(3.453.383.482,41)
42	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK	(2.768.051.925,69)	(2.676.534.191,69)
43	KECAMATAN TANAH JAWA	(3.947.680.072,34)	(4.071.670.796,34)
44	KECAMATAN HATONDUHAN	(2.169.709.403,33)	(2.399.049.483,33)
45	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN	(2.160.299.347,21)	(2.201.262.011,21)
46	KECAMATAN PURBA	(2.172.598.445,92)	(2.321.457.280,53)
47	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON	(1.586.842.762,80)	(1.606.617.470,80)
48	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON	(3.385.038.078,73)	(3.865.518.478,16)
49	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR	(4.335.413.267,67)	(4.508.270.328,68)
50	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA	(2.402.568.632,50)	(2.627.280.946,50)
51	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI	(2.085.545.752,41)	(2.334.665.969,41)
52	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN	(1.364.871.989,41)	(1.627.629.511,95)
53	KECAMATAN PEMATANG BANDAR	(3.549.385.401,77)	(3.519.406.684,32)
54	KECAMATAN BANDAR HULUAN	(2.166.953.369,90)	(2.537.945.946,90)
55	KECAMATAN BANDAR	(5.055.232.379,31)	(5.296.831.361,31)
56	KECAMATAN BANDAR MASILAM	(1.838.058.015,37)	(2.241.307.666,37)
57	KECAMATAN SILIMAKUTA	(3.007.823.535,42)	(2.926.743.070,42)
58	KECAMATAN SILOU KAHEAN	(1.454.944.257,22)	(1.671.871.924,21)
59	KECAMATAN TAPIAN DOLOK	(4.056.640.835,20)	(3.975.797.777,20)
60	KECAMATAN RAYA	(4.611.669.013,75)	(4.748.064.524,75)
61	KECAMATAN UJUNG PADANG	(2.304.646.679,34)	(2.442.307.557,34)
62	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA	(1.828.501.934,28)	(1.851.850.450,28)
63	KECAMATAN DOLOG MASAGAL	(1.377.573.521,08)	(1.471.897.972,79)
64	KECAMATAN DOLOK SILOU	(1.494.942.662,79)	(1.514.889.979,79)
65	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(7.917.296.867,85)	(69.607.977.875,62)
TOTAL		158.777.248.083,133	116.487.562.504,13

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:

5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo koreksi atas nilai Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024.

5.6.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo koreksi atas selisih nilai Revaluasi Aset Tetap pada Tahun 2025 dan 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

	Koreksi Ekuitas	Tahun 2025	Tahun 2024
5.6.3.3	Lainnya	Rp130.652.093.660,21	Rp(57.121.631.243,13)

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas sebagai dampak adanya kesalahan mendasar penyajian saldo akun yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Ekuitas lainnya TA 2025 sebesar Rp130.652.093.660,21 dan TA 2024 sebesar Rp(57.121.631.243,13). Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya TA 2025 dan TA 2024 per SKPD disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 211. Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Per SKPD TA 2025 dan TA 2024

NO	SKPD	KOREKSI EKUITAS LAINNYA TA 2025	KOREKSI EKUITAS LAINNYA TA 2024
1	DINAS PENDIDIKAN	8.754.453.241,29	(170.658.497.591,11)
2	DINAS KESEHATAN	124.216.960,62	605.486.964,59
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN	128.339.470,01	42.220.056,19
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM	44.665.907,32	11.477.717.297,13
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT	(96.509.916,00)	(6.397.462.354,40)
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	13.237.923.724,28	31.366.796.325,79
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	0,00	0,00
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17.760.044.039,15	(627.758.670,37)
10	DINAS SOSIAL	0,00	0,00
11	DINAS KETENAGAKERJAAN	240.395.000,00	3.888.970.469,69
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	0,00	(705.865.570,61)
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(138.920.000,66)	(3.049.884.399,98)
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI	0,00	22.572.069,64
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(57.769.999,75)	0,00
18	DINAS PERHUBUNGAN	11.326.440,00	8.183.145.455,77
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00
20	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	158.960.000,00	(332.552,10)
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	596.750.000,00
22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	13.081.825.381,00
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	0,00	817.635.825,21
24	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	5.102.472.621,41	17.836.250,00
25	DINAS PERTANIAN	(11.495.662.500,00)	(465.349.906,06)
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	262.419.822,94	(2.865.546.815,91)
27	SEKRETARIAT DAERAH	16.065.000,00	(13.947.583.633,08)
28	SEKRETARIAT DPRD	0,00	(18.100.500,00)
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	122.813.786,63
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	101.902.845.701,88	55.043.406.846,71



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	SKPD	KOREKSI EKUITAS LAINNYA TA 2025	KOREKSI EKUITAS LAINNYA TA 2024
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	(87.396.120,00)
32	INSPEKTORAT	0,00	(3.706.300,00)
33	KECAMATAN SIANTAR	0,00	4.813.770.224,77
34	KECAMATAN GUNUNG MALELA	0,00	0,00
35	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS	0,00	0,00
36	KECAMATAN PANEI	0,00	(442.658.480,40)
37	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI	69.460.000,33	0,00
38	KECAMATAN JORLANG HATARAN	(199.860.000,00)	349.700.000,00
39	KECAMATAN RAYA KAHEAN	(198.823.200,00)	(399.445.000,00)
40	KECAMATAN BOSAR MALIGAS	(198.929.000,00)	(202.761.500,00)
41	KECAMATAN SIDAMANIK	(199.057.200,00)	(219.546.234,89)
42	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK	(199.533.800,00)	(198.645.000,00)
43	KECAMATAN TANAH JAWA	(462.289.822,94)	(199.800.000,00)
44	KECAMATAN HATONDUHAN	0,00	0,00
45	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN	0,00	240.048.000,00
46	KECAMATAN PURBA	(130.029.699,67)	(215.176.080,40)
47	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON	(198.690.000,00)	620.256.876,66
48	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON	(596.662.200,00)	(599.037.333,36)
49	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR	(399.660.000,00)	(402.790.909,09)
50	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA	(200.000.000,00)	(205.867.860,00)
51	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI	0,00	0,00
52	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN	0,00	(16.694.880,40)
53	KECAMATAN PEMATANG BANDAR	(399.248.600,00)	(399.722.500,00)
54	KECAMATAN BANDAR HULUAN	0,00	0,00
55	KECAMATAN BANDAR	(397.512.000,00)	8.166.450.929,99
56	KECAMATAN BANDAR MASILAM	0,00	0,00
57	KECAMATAN SILIMAKUTA	(199.985.000,00)	349.557.000,00
58	KECAMATAN SILOU KAHEAN	0,00	(1.700.000,00)
59	KECAMATAN TAPIAN DOLOK	(198.630.800,00)	6.048.241.189,26
60	KECAMATAN RAYA	(995.250.000,00)	(995.250.000,00)
61	KECAMATAN UJUNG PADANG	(198.495.500,00)	(199.752.000,00)
62	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA	0,00	549.500.000,00
63	KECAMATAN DOLOG MASAGAL	0,00	0,00
64	KECAMATAN DOLOK SILOU	0,00	0,00
65	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.970,00	0,00
	TOTAL	130.652.093.660,21	(57.121.631.243,13)

Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran XLV**.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.6.4 Ekuitas Akhir	Rp3.295.572.610.752,26	Rp3.006.143.269.008,92

Saldo Ekuitas Akhir TA 2025 sebesar Rp3.295.572.610.752,26 dan TA 2024 sebesar Rp3.006.143.269.008,92.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tabel 212. Rincian Ekuitas Akhir TA 2025

NO	URAIAN	TAHUN 2025
1.	Ekuitas Awal	3.006.143.269.008,92
2.	Surplus/Defisit - LO	158.777.248.083,13
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	130.652.093.660,21
4.	Ekuitas Akhir	3.295.572.610.752,26

INFORMASI PENTING

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Simalungun menerima hibah untuk digitalisasi pembelajaran dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Pemerintah Pusat resmi menyalurkan Program Digitalisasi Pembelajaran ke Sekolah Negeri di Kabupaten Simalungun untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), berupa :

1. *Smart Board* dengan nama barang *Interactive Plat Panel* dengan merek/tipe Hisense IFP 75 Inch 75 WM61FE jumlah 1 unit per sekolah dengan jumlah sekolah penerima SD Negeri sebanyak 672 sekolah dan SMP Negeri sebanyak 62 sekolah.
2. Laptop dengan nama barang Laptop Zyrex dengan merek/tipe Zyrex Note Book Cruiser 22 A82 (57U-P-ESS) sebanyak 1 unit per sekolah dengan jumlah penerima SD Negeri sebanyak 672 sekolah dan SMP Negeri sebanyak 62 sekolah.

Atas penerimaan Hibah Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025 tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun belum melakukan pencatatan di KIB B sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Laporan Keuangan *Audited* Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025. Hal ini dikarenakan atas penerimaan hibah tersebut tidak ada dokumen yang menunjukkan nilai atau harga barangnya pada saat penerimaan hibah. Adapun rincian per sekolah yang menerima Hibah Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025 dapat dilihat untuk SD pada **Lampiran XLVI** dan SMP pada **Lampiran XLVII**.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Wilayah

1. Geografis

Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Sumatera Utara setelah Kabupaten Langkat dan Kabupaten Mandailing Natal, dengan luas wilayah 4.372,50 Km² atau 6,12 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Simalungun berbatasan dengan 8 (delapan) kabupaten/kota yaitu sebelah utara Kabupaten Simalungun berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara serta dengan Kota Pematang Siantar yang kelilingi oleh wilayah Kabupaten Simalungun. Secara astronomis Kabupaten Simalungun terletak diantara 02°36"-03°18" Lintang Utara dan 98°32"-99°35" Bujur Timur dan berada pada ketinggian 0 – 1400 meter.

2. Iklim

Suhu udara di Kabupaten Simalungun Tahun 2025 berdasarkan data BPS Tahun 2025 tercatat dengan angka maksimum sebesar 25,79°C di bulan Maret 2025 dan angka minimum sebesar 24,15°C di bulan Desember 2025.

3. Topografi

a. Kemiringan Lahan

Kabupaten Simalungun dilihat dari topografinya bervariasi yaitu dataran tinggi terletak di bagian barat daya, barat dan barat laut serta dataran rendah di bagian utara, timur dan tenggara dengan kemiringan lereng antara 0-40 % yang berada pada ketinggian antara 20-1400 m diatas permukaan laut.

Kondisi kemiringan lahan yang terdapat di Kabupaten Simalungun dikategorikan ke dalam 4 kelompok, yaitu:

- Dataran rendah dengan kelerengan 0-2 % seluas 117.558 Ha.
- Dataran landai dengan kelerengan 2-15% seluas 179.613 Ha.
- Daerah perbukitan dengan kelerengan 15-40% seluas 100.984 Ha
- Daerah pegunungan dengan kelerengan >40% seluas 59.805Ha.

b. Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan Kabupaten Simalungun diatas permukaan laut berada antara 0-1400 meter. Wilayah tertinggi berada di Kecamatan Raya, Dolok Silou, Girsang Sipangan Bolon, Dolok Pardamean, Haranggaol Horison, Purba, Pematang Silimakuta dan Silimakuta, sedangkan wilayah terendah dengan ketinggian antara 0-200 meter berada di Kecamatan Bandar dan Bandar Masilam.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

4. Hidrologi

Kabupaten Simalungun mempunyai sungai-sungai besar dan kecil yang mengalir dari daerah perbukitan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai irigasi, baik teknis maupun non teknis untuk menunjang lahan pertanian terutama tanaman pangan lahan basah. Selain itu, sebagian besar penduduk di Kabupaten Simalungun masih menggunakan sungai sebagai sumber kebutuhan air bersih sehari-hari seperti memasak, mandi dan mencuci. Kabupaten Simalungun dialiri oleh 9 (Sembilan) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu :

Tabel 213. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Simalungun

No.	Nama DAS
1	DAS Silou
2	DAS Wampu
3	DAS Bedagai
4	DAS Asahan
5	DAS Padang
6	DAS Silou Tua
7	DAS Ular
8	DAS Bahapal
9	DAS Bah Bolon

6.2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Penduduk Kabupaten Simalungun pada Tahun 2025 sebanyak 1.067.499 jiwa, yang terdiri atas 537.650 jiwa penduduk laki-laki dan 529.849 jiwa penduduk perempuan. Dengan kepadatan penduduk sebesar 219 orang per km persegi, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari Tahun 2020-2025 sebesar 1,62 persen. Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 21,44 persen, 15-64 tahun sebesar 69 persen dan usia 65 tahun keatas sebesar 9,56 persen yang berarti, jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif. Bila dilihat per kecamatan, maka Kecamatan Bandar merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 8,11 persen, sedangkan Kecamatan Haranggaol Horison adalah yang terkecil yaitu 0,65 persen. Untuk Kecamatan terpadat urutan pertama adalah Siantar disusul Bandar dengan masing-masing kepadatan 920 jiwa per km² dan 769 jiwa per km² dan yang terjarang adalah Kecamatan Dolok Silou. Kepadatan penduduk di kecamatan ini perlu mendapat pengelolaan yang lebih baik lagi agar tercipta lingkungan yang baik.

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional di Simalungun pada Tahun 2025 sebesar 604.582 jiwa dengan tingkat partisipasinya sebesar 74,52%. Pada umumnya penduduk Simalungun bekerja pada sektor perdagangan dan jasa (42,97%), kemudian sektor pertanian yakni sebesar 38,46%, dan selanjutnya sektor industri sebesar 18,57%. Sedangkan menurut pendidikan, angkatan kerja di Simalungun sebagian besar berpendidikan SMA/SMK/Sederajat yaitu sebesar 54,74%, sedangkan berpendidikan SMP 17,90% dan 9,62% berpendidikan diploma sampai dengan sarjana.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun Tahun 2025 sebanyak 360 orang dengan rincian 212 orang laki laki dan 148 orang perempuan.

Data rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin seperti terdapat pada Tabel 6.2. berikut:

Tabel 214. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	21.331	19.453	40.784
5 – 9	38.195	35.862	74.057
10 – 14	46.402	43.625	90.027
15 – 19	49.862	47.468	97.330
20 – 24	46.501	44.073	90.574
25 – 29	37.705	35.201	72.906
30 – 34	32.605	30.604	63.209
35 – 39	31.110	29.999	61.109
40 – 44	33.618	32.837	66.455
45 – 49	30.996	30.119	61.115
50 – 54	26.914	27.965	54.879
55 – 59	23.345	25.687	49.032
60 – 64	19.193	23.573	42.766
65 – 69	16.531	20.653	37.184
70 – 74	10.479	13.740	24.219
75+	11.568	18.406	29.974
Jumlah	476.355	479.265	955.620

6.3 Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Simalungun berjumlah 65 SKPD yang terdiri dari 21 Dinas, 5 Badan, 2 Sekretariat, 3 Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, dan 32 Kecamatan 386 Nagori (desa) dan 27 Kelurahan. Data jumlah nagori/ kelurahan dan luas wilayah menurut kecamatan seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 215. Jumlah Nagori/ Kelurahan dan Luas Daerah Kabupaten Simalungun Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Nagori	Kelurahan	Luas Wilayah	
				Total Area	%
1	Silimakuta	6	1	74,16	1,70
2	Pamatang Silimakuta	10	0	79,68	1,82
3	Purba	13	1	172,71	3,95
4	Haranggaol Horison	4	1	40,97	0,94
5	Dolok Pardamean	11	0	67,9	1,55
6	Sidamanik	14	1	80,88	1,85



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Kecamatan	Nagori	Kelurahan	Luas Wilayah	
				Total Area	%
7	Pamatang Sidamanik	9	1	137,80	3,15
8	Girsang Sipangan Bolon	3	3	129,89	2,97
9	Tanah Jawa	19	1	174,33	3,99
10	Hatonduhan	9	0	336,26	7,69
11	Dolok Panribuan	15	0	148,62	3,40
12	Jorlang Hataran	12	1	93,70	2,14
13	Panei	16	1	77,96	1,78
14	Panombeian Panei	11	0	73,74	1,69
15	Raya	12	5	261,56	5,98
16	Dolog Masagal	10	0	105,77	2,42
17	Dolok Silou	14	0	302,66	6,92
18	Silau Kahean	16	0	228,74	5,23
19	Raya Kahean	13	1	204,89	4,69
20	Tapian Dolok	10	1	119,89	2,74
21	Dolok Batu Nanggar	14	2	106,91	2,45
22	Siantar	17	0	73,99	1,69
23	Gunung Malela	16	0	96,74	2,21
24	Gunung Maligas	9	0	51,39	1,18
25	Hutabayu Raja	15	1	191,43	4,38
26	Jawa Maraja Bah Jambi	8	0	38,97	0,89
27	Pamatang Bandar	11	2	88,16	2,02
28	Bandar Huluan	10	0	107,33	2,45
29	Bandar	14	2	100,69	2,30
30	Bandar Masilam	10	0	91,22	2,09
31	Bosar Maligas	16	1	285,43	6,53
32	Ujung Padang	19	1	228,49	5,23
	Jumlah	386	27	4.372,86	100,00

6.4 Visi dan Misi Organisasi

Visi Pemerintah Kabupaten Simalungun periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**”BERSAMA SEMANGAT BARU SIMALUNGUN MENUJU SIMALUNGUN
MAJU”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Membenahi pelayanan dan fasilitas publik di Kabupaten Simalungun.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tahun Anggaran 2025

2. Melaksanakan pengawasan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Melakukan pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat, sehingga pemerintah dapat menjamin pencapaian kesejahteraan rakyat.
4. Pemerintahan yang akan dibangun untuk Simalungun kedepan adalah pemerintahan yang mampu menjadi solusi terhadap permasalahan ditengah tengah masyarakat.
5. Pemerintah Kabupaten Simalungun kedepan haruslah menjadi pemerintah yang bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 ini disusun sebagai media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025 yang merupakan kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, disusun mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja menuju pencapaian *good governance*.

Pamatang Raya, Mei 2026



BUPATI SIMALUNGUN

AYTON ACHMAD SARAGIH